



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

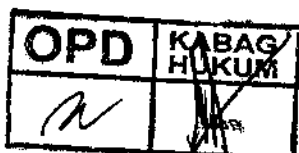
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022

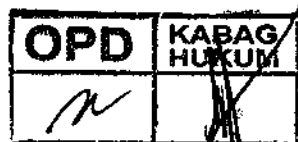
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan strategi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2017 – 2022.

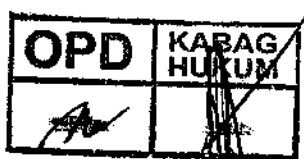
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis OPD yang disebut dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja OPD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan.

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah periode 2017-2022, dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022.



Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Gambaran keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. Penutup;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan ;
 - a. Renstra OPD
 - b. RKPD
- (2) RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi pembangunan daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.



Pasal 7

- (1) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program Perangkat Daerah periode sebelumnya.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 8

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
- c. terjadi perubahan yang mendasar;

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengevaluasian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.



- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat sektoral yang sudah ada dan masih berlaku wajib disesuaikan dengan RJPMD ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan;
- (2) RKPD tahun 2018 wajib disesuaikan dengan RJPMD ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkan;
- (3) Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman kepada RPJMD ini;
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan Pekon wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 8 Juni 2018


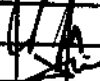

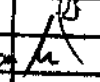




Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor 01 / 1 LB / 2018

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Barat dibentuk dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat. Sebagai daerah otonom Kabupaten Lampung Barat berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kabupaten Lampung Barat harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, keuangan Daerah, indikator kinerja daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selanjutnya, Perangkat Daerah menyusun rencana



strategis dengan berpedoman pada RPJMD ini. RPJMD akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Karena RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD maka, dalam penyusunannya harus memperhatikan periodisasi RPJPD. RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2005-2025 terbagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan per 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 berada dalam tahapan 3 (tiga) dan 4 (empat) RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Huruf a.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Termasuk juga Dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Huruf b.

menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Huruf c.

menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan

Huruf d.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Huruf e.

menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang menjadi janji politik kepala daerah.



Huruf f.

menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Huruf g.

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

Huruf h.

Memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan waktu kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Huruf i ; Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

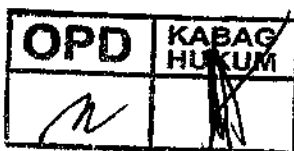
Pasal 4

Ayat (1)

- a. Perumusan Renstra OPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan tahap perumusan RPJMD; dan Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Yang dimaksud RPJMD Kabupaten Lampung Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan penyesuaian:
 - prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; dan
 - rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

Ayat (2)

Didalam RPJMD tertuang Indikator Kinerja Daerah. Sedangkan RPJMD merupakan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.



Pasal 5

Ayat (1)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

- Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri terkait pemerintahan daerah.
- Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

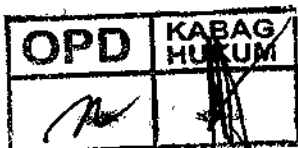
Pasal 10

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat sektoral adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor, yang hanya melingkupi satu sektor pembangunan saja. Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor pariwisata, pembangunan industri, dan sebagainya.



Ayat (2)

RKPD 2018 merupakan acuan penyusunan APBD 2018.
Sedangkan APBD 2018 merupakan landasan pembiayaan
pelaksanaan program RPJMD di tahun 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

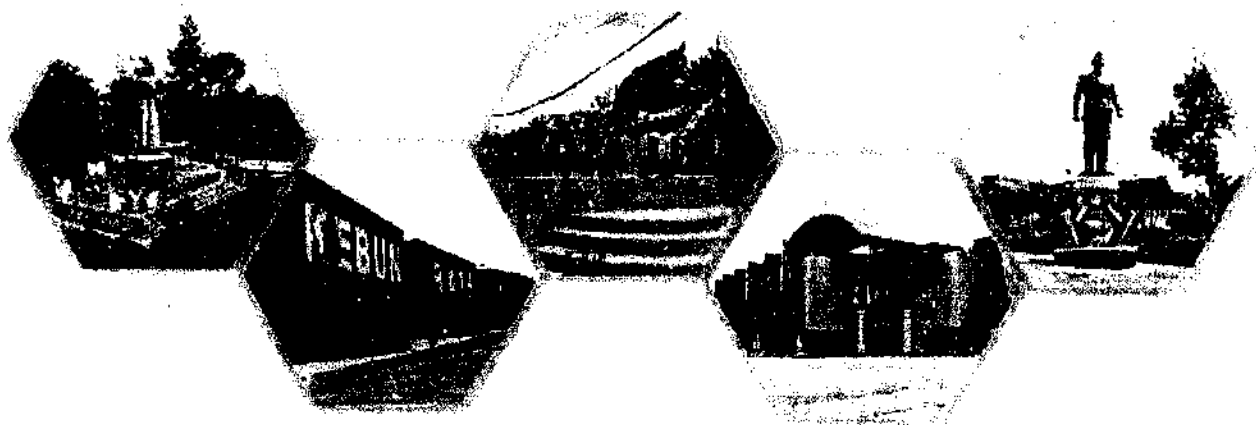
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 404



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2017-2022

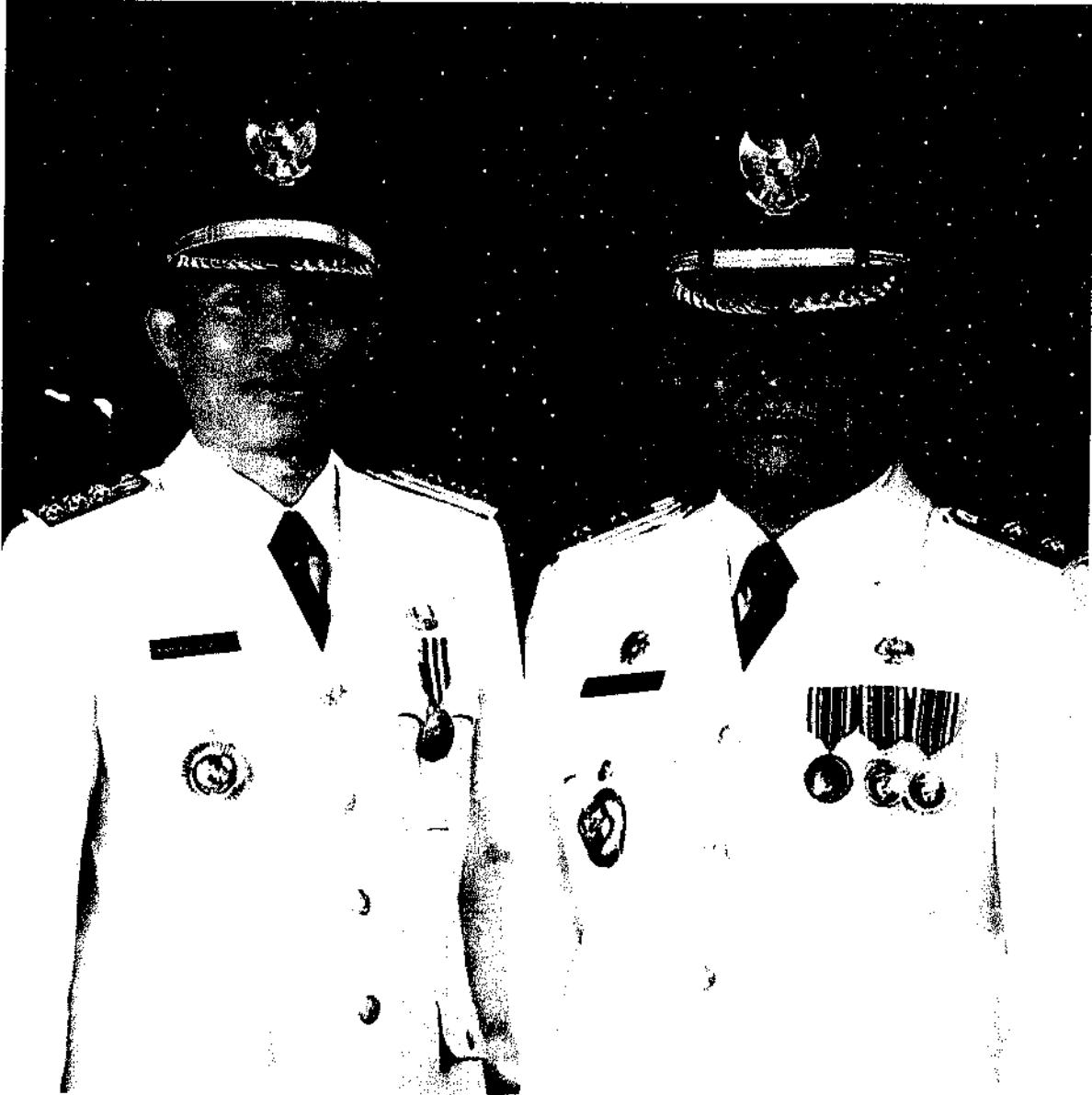
LAMPUNG BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2018**



**BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT
PERIODE 2017-2022**



Hi. PAROSIL MABSUS

Hi. MAD HASNURIN



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

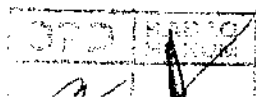
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022

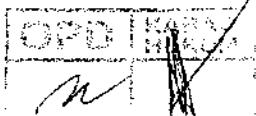
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan strategi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2017 – 2022.

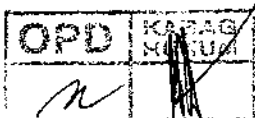
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



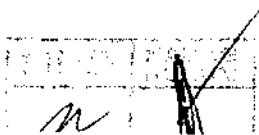
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis OPD yang disebut dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja OPD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan.

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah periode 2017-2022, dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Gambaran keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. Penutup;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan ;
 - a. Renstra OPD
 - b. RKPD
- (2) RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

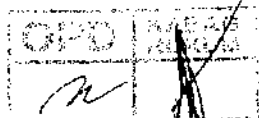
- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi pembangunan daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.



Pasal 7

- (1) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program Perangkat Daerah periode sebelumnya.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 8

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
- c. terjadi perubahan yang mendasar;

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengevaluasian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.



- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

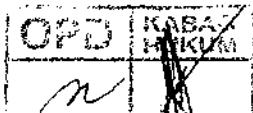
- (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat sektoral yang sudah ada dan masih berlaku wajib disesuaikan dengan RJPMD ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan;
- (2) RKPD tahun 2018 wajib disesuaikan dengan RJPMD ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkan;
- (3) Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman kepada RPJMD ini;
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan Pekon wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

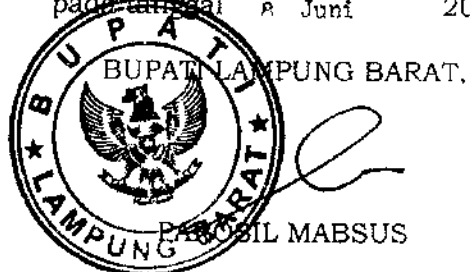


Pasal 13

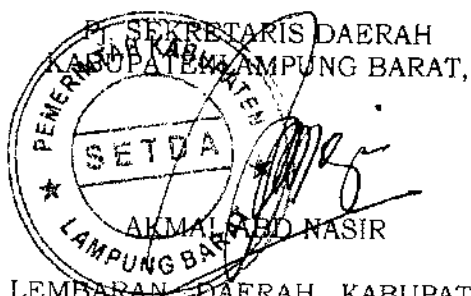
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Juni 2018

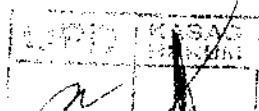


Diundangkan di Liwa
pada tanggal 8 Juni 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
001707/18/2018



PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022**

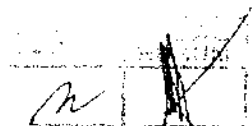
I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Barat dibentuk dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat. Sebagai daerah otonom Kabupaten Lampung Barat berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kabupaten Lampung Barat harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, keuangan Daerah, indikator kinerja daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selanjutnya, Perangkat Daerah menyusun rencana

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

strategis dengan berpedoman pada RPJMD ini. RPJMD akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Karena RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD maka, dalam penyusunannya harus memperhatikan periodisasi RPJPD. RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2005-2025 terbagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan per 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 berada dalam tahapan 3 (tiga) dan 4 (empat) RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Termasuk juga Dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Huruf b.

menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Huruf c.

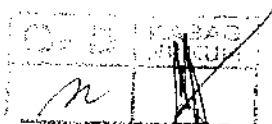
menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan

Huruf d.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Huruf e.

menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang menjadi janji politik kepala daerah.



Huruf f.

menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Huruf g.

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indicator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

Huruf h.

Memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Huruf i ; Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

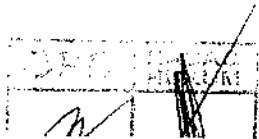
Pasal 4

Ayat (1)

- a. Perumusan Renstra OPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan tahap perumusan RPJMD; dan Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Yang dimaksud RPJMD Kabupaten Lampung Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan penyesuaian:
 - prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; dan
 - rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

Ayat (2)

Didalam RPJMD tertuang Indikator Kinerja Daerah. Sedangkan RPJMD merupakan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.



Pasal 5

Ayat (1)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

- Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri terkait pemerintahan daerah.
- Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat sektoral adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor, yang hanya melingkupi satu sektor pembangunan saja. Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor pariwisata, pembangunan industri, dan sebagainya.



Ayat (2)

RKPD 2018 merupakan acuan penyusunan APBD 2018.
Sedangkan APBD 2018 merupakan landasan pembiayaan pelaksanaan program RPJMD di tahun 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

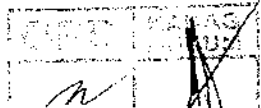
Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 404





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

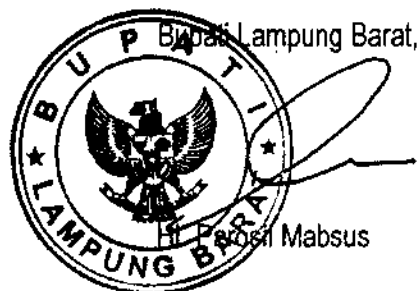
Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaannya diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Dokumen RPJMD meliputi Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Umum Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Rerangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Penutup.

Penyusunan RPJMD 2017-2022 ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Konsultasi dengan Gubernur, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, Pembahasan Ranperda RPJMD dengan DPRD, Pelaksanaan Evaluasi Ranperda RPJMD oleh Gubernur hingga Penetapan RPJMD.

RPJMD 2017-2022 merupakan referensi kita semua dalam menyusun program-program pembangunan 5 tahun kedepan. Seluruh Sasaran dan Target-Target yang akan dicapai menjadi tolak ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan.

Demikian RPJMD ini disusun sebagai dasar penyusunan Renstra OPD dan dijabarkan pada tiap tahunnya kedalam RKPD dan Renja OPD.

Liwa, 8 Juni 2018





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	vii	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	I-1	
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3	
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4	
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5	
1.5. Sistematika Penulisan	I-5	
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1	
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-18	
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-27	
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-42	
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1	
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-8	
3.3. Kerangka Pendanaan	III-8	
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS		
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1	
4.2. Isu Strategis.....	IV-4	
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		
5.1. Visi	V-1	
5.2. Misi	V-2	
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-3	
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		VI.1
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		VII.1
BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VIII.1
BAB IX. PENUTUP		IX.1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah, Jumlah Pekon/Kelurahan, dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat	II-1
Tabel 2.2.	Curah Hujan Bulanan Tahun 2012 s/d 2014 Kabupaten Lampung Barat .	II-8
Tabel 2.3.	Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016.....	II-9
Tabel 2.4.	Tutupan Lahan Daerah Kabupaten Lampung Barat.....	II-9
Tabel 2.5.	Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi di Lampung Barat..	II-10
Tabel 2.6.	Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat.....	II-15
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Kecamatan Tahun 2016.....	II-17
Tabel 2.8.	PDRB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016.....	II-18
Tabel 2.9.	Distribusi Presentase PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lampung Barat 2012 -2016	II-19
Tabel 2.10.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2012-2016	II-20
Tabel 2.11.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2012-2016	II-20
Tabel 2.12.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2012—2016.....	II-21
Tabel 2.13.	Inflasi Lampung Barat Tahun 2015-2017.....	II-21
Tabel 2.14.	Angka Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2012-2016	II-23
Tabel 2.15.	Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Kabupaten Lampung Barat	II-26
Tabel 2.16.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	II-26
Tabel 2.17.	Perkembangan Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Lampung Barat	II-26
Tabel 2.18.	Perkembangan Olahraga Tahun 2017 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat.....	II-27
Tabel 2.19.	Rasio Kelas Terhadap Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2017.....	II-27



Tabel 2.20.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016.....	II-28
Tabel 2.21.	Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Barat Dirinci Menurut Jenis Permukaan Tahun 2017 (Maret).....	II-30
Tabel 2.22.	Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Barat Dirinci Menurut Kondisinya Tahun 2017 (Maret).....	II-31
Tabel 2.23.	Jumlah dan Luas Daerah Irigasi berdasarkan wilayah kecamatan	II-31
Tabel 2.24.	Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Barat.....	II-33
Tabel 2.25.	Data PMKS dan PMKS Yang Sudah Ditangani di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 - 2017.....	II-34
Tabel 2.26.	Data Koperasi Tahun 2017	II-35
Tabel 2.27.	Jumlah Desa/Pekon Tertinggal Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 dan 2018.....	II-37
Tabel 2.28.	Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Lampung Barat (Hektar) Tahun 2017.....	II-37
Tabel 2.29.	Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 dan Tahun 2017	II-38
Tabel 2.30.	Perkembangan Luas Lahan Komoditas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011-2017 (Ha).....	II-39
Tabel 2.31.	Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2013-2017 (ton).....	II-39
Tabel 2.32.	Perkembangan Produktivitas Komoditas Perkebunan Lampung Barat Tahun 2013-2017 (kg/ha).....	II-39
Tabel 2.33.	Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2015 dan 2016.....	II-40
Tabel 2.34.	Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di kolam, budidaya di perairan umum (KJA dan Keramba Tancap) dan mina padi...	II-40
Tabel 2.35.	Produksi Budidaya Perairan Umum, Budidaya Kolam dan Mina Padi.....	II-41
Tabel 2.36.	Potensi kegiatan penangkapan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017.....	II-41
Tabel 2.37.	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Lampung Barat tahun 2013 - 2017	II-42
Tabel 2.38.	Ruas Jalan Strategis Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.....	II-43



Tabel 2.39.	Persentase luas Wilayah Produktif Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015	II-44
Tabel 2.40.	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Lampung Barat	II-45
Tabel 2.41.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Lampung Barat	II-45
Tabel 2.42.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Lampung Barat	II-45
Tabel 2.43.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2016.....	II-47
Tabel 2.44.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2016	II-48
Tabel 2.45.	Perkembangan Rasio Guru Terhadap Siswa Tahun 2015-2017 Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Lampung Barat.....	II-50
Tabel 2.46.	Jumlah Sebaran Guru SMP Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017	II-50
Tabel 2.47.	Jumlah Sebaran Guru SD Berdasarkan Kecamatan tahun 2017	II-51
Tabel 2.48.	Data Guru Bersertifikasi di Kabupaten Lampung Barat.....	
Tabel 2.49.	Rasio Lulusan S1, S2, S3 Kabupaten Lampung Barat.....	II-51
Tabel 2.50.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2015.....	II-53
Tabel 2.51.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2015	II-53
Tabel 3.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat 2015-2017.....	III-1
Tabel 3.2.	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2017	III-2
Tabel 3.3.	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2017.....	III-3
Tabel 3.4.	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016.....	III-4
Tabel 3.5.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022.....	III-10



Tabel 3.6.	Proyeksi Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022	III-11
Tabel 3.7.	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022	III-11
Tabel 3.8.	Proyeksi Defisit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022	III-11
Tabel 3.9.	Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022	III-12
Tabel 3.10.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.....	III-13
Tabel 5.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022	V-4
Tabel 6.1.	Analisis SWOT Misi 1.....	VI-2
Tabel 6.2.	Analisis SWOT Misi 2.....	VI-4
Tabel 6.3.	Analisis SWOT Misi 3.....	VI-6
Tabel 6.4.	Analisis SWOT Misi 4.....	VI-7
Tabel 6.5.	Analisis SWOT Misi 5.....	VI-9
Tabel 6.6.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	VI-10
Tabel 6.7	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022	VI-15
Tabel 6.8	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018-2022 Kabupaten Lampung Barat.....	VI-19
Tabel 7.1	Pemetaan Program Unggulan dan Program Prioritas.....	VII-3
Tabel 7.2	Pemetaan Janji Politis, Strategi dan Kebijakan	VII-8
Tabel 7.3	Kerangkaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Lampung Barat.....	VII-15
Tabel 7.4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2022 Kabupaten Lampung Barat	VII-16
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.....	VIII-7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Barat.....	II-2
Gambar 2.2. Pemukiman Tradisional.....	II-4
Gambar 2.3. Peta Daerah Aliran Sungai di Propinsi Lampung.....	II-6
Gambar 2.4. Rencana Pusat Kegiatan Kabupaten Lampung Barat.....	II-11
Gambar 2.5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi.....	II-12
Gambar 2.6. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi	II-13
Gambar 2.7. Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016	II-16
Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2016.....	II-17
Gambar 2.9. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016	II-18
Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Indonesia Tahun 2013-2016 (persen).	II-18
Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Indonesia Tahun 2012-2016	II-22
Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016.....	II-22
Gambar 2.13. Perkembangan AHH, HLS, dan RLS Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016	II-23
Gambar 2.14. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-23
Gambar 2.15. Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung (Juta Rupiah)	II-24
Gambar 2.16. Perkembangan Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat	II-24
Gambar 2.17. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-25
Gambar 2.18. Perkembangan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016, Kabupaten Lampung Barat.....	II-29



Gambar 2.19. Perkembangan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-30
Gambar 2.20. Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016, Kabupaten Lampung Barat.....	II-31
Gambar 2.21. Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-33
Gambar 2.22. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-35
Gambar 2.23. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-35
Gambar 2.24. Perkembangan Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-36
Gambar 2.25. Perkembangan Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-36
Gambar 2.26. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat (Ribu Rupiah).....	II-42
Gambar 2.27. Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2010-2015 Kabupaten Lampung Barat.....	II-45
Gambar 2.28. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-46
Gambar 2.29. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-47
Gambar 2.30. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-48
Gambar 2.31. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	II-49
Gambar 2.32. Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016.....	II-52
Gambar 2.33. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2015	II-52
Gambar 2.34. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2015.....	II-53
Gambar 7.1. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD.....	VII-2



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Berkaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022. RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lampung Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Lampung Barat dengan setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kabupaten Lampung Barat akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-

langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2017-2022.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan Tahap III (ketiga) RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dari sisi proses, RPJMD Kabupaten Lampung Barat disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 7 dan Pasal 8):

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan Politik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

Selain berorientasi proses, RPJMD Kabupaten Lampung Barat juga berorientasi pada substansi, dan disusun menggunakan pendekatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 9 dan Pasal 10):

1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya

3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah; mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten serta dilakukan penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2015-2019 sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 050/4936/SJ tanggal 23 Desember 2016. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Salah satu langkah awal Pendekatan Politik dilakukan melalui pembahasan Rancangan Awal RPJMD di DPRD Kabupaten Lampung Barat, yang mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah mengajukan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 dimaksudkan untuk menjabarkan secara rinci tahapan 5 (lima) tahun selama Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2022 untuk mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025, yaitu "LAMPUNG BARAT SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI YANG SEJAHTERA 2025".

Pada Tanggal, 11 Desember 2017 Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri telah melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus, S.Pd sebagai Bupati Lampung Barat dan Drs. Hi. Mad Hasnurin sebagai Wakil Bupati Lampung Barat Periode 2017-2022.





1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);

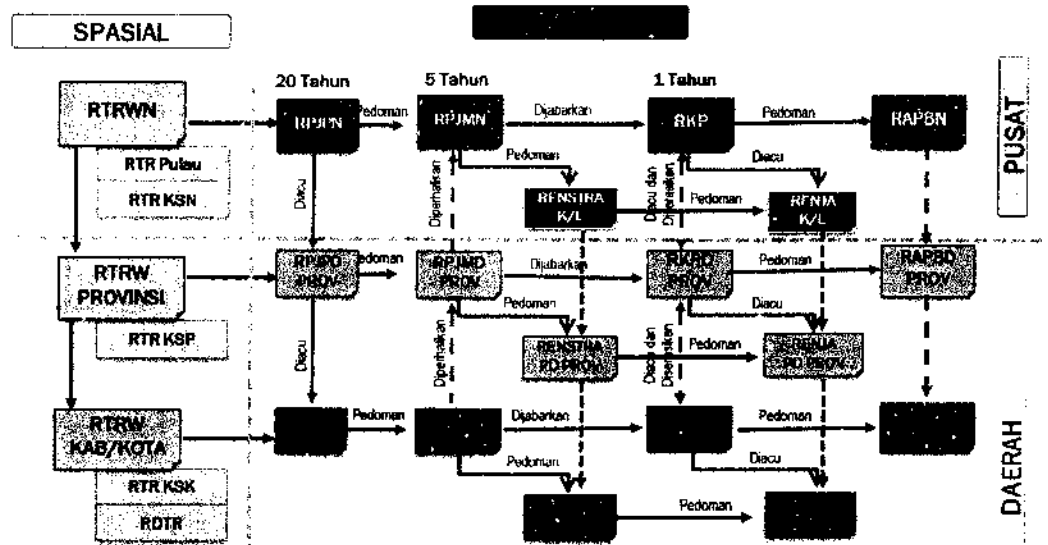
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan nasional.

Dalam perkembangannya, dokumen perencanaan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah terdiri dari beberapa dokumen yang saling berhubungan dan sebagian besar dipertimbangkan berdasarkan periode pembangunan. Secara rinci hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Gambar di atas menunjukkan bahwa RPJPD merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, sedangkan dokumen RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD. Dokumen RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari gambar diatas menunjukan bahwa perencanaan pembangunan antara pusat

dan daerah harus berjalan secara sinergis dan berhierarki.

RPJMD Lampung Barat tahun 2017-2022 merupakan Tahap Lima Tahun Ke -3 (2016 - 2020) dari RPJPD Lampung Barat tahun 2005-2025. RPJMD tahap ketiga ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap



sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi.

Tahapan ini ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang diwarnai oleh kearifan lokal, diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumberdaya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing. Kemajuan dan kesejahteraan akan terukur oleh berbagai instrumen, antara lainnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan sudah mencapai nilai 74 atau lebih (Metode lama), Laju pertumbuhan penduduk di bawah 1,5%, Pertumbuhan ekonomi mencapai angka di atas angka 5,8%, pendapatan per kapita penduduk mencapai angka di atas Rp. 12.000.000,00 atas dasar harga berlaku, kondisi jalan dan jembatan yang mantap 60% di seluruh kecamatan, Berkembangnya pembangunan jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi di sebagian besar wilayah pekon diindikasikan dengan target capaian jangkauan minimal 90% pekon.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah:

1. Untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Lampung dan daerah kabupaten/kota lainnya.
2. Untuk mendukung koordinasi dan saling melengkapi antar pelaku pembangunan Kabupaten Lampung Barat, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat, menjamin penggunaan sumber daya Kabupaten Lampung Barat secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, partisipatif, kedilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

3. Menjadi rujukan bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan janji-jani Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai visi dan misi, sehingga upaya pembangunan lebih sinergis dan koordinatif.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, dan sistematika penulisan.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi statistik dan deskripsi tentang kondisi umum Kabupaten Lampung Barat masa lalu dan saat ini, yang dimaksudkan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi Kabupaten Lampung Barat dalam jangka waktu lima tahun ke depan pada berbagai aspek pembangunan.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

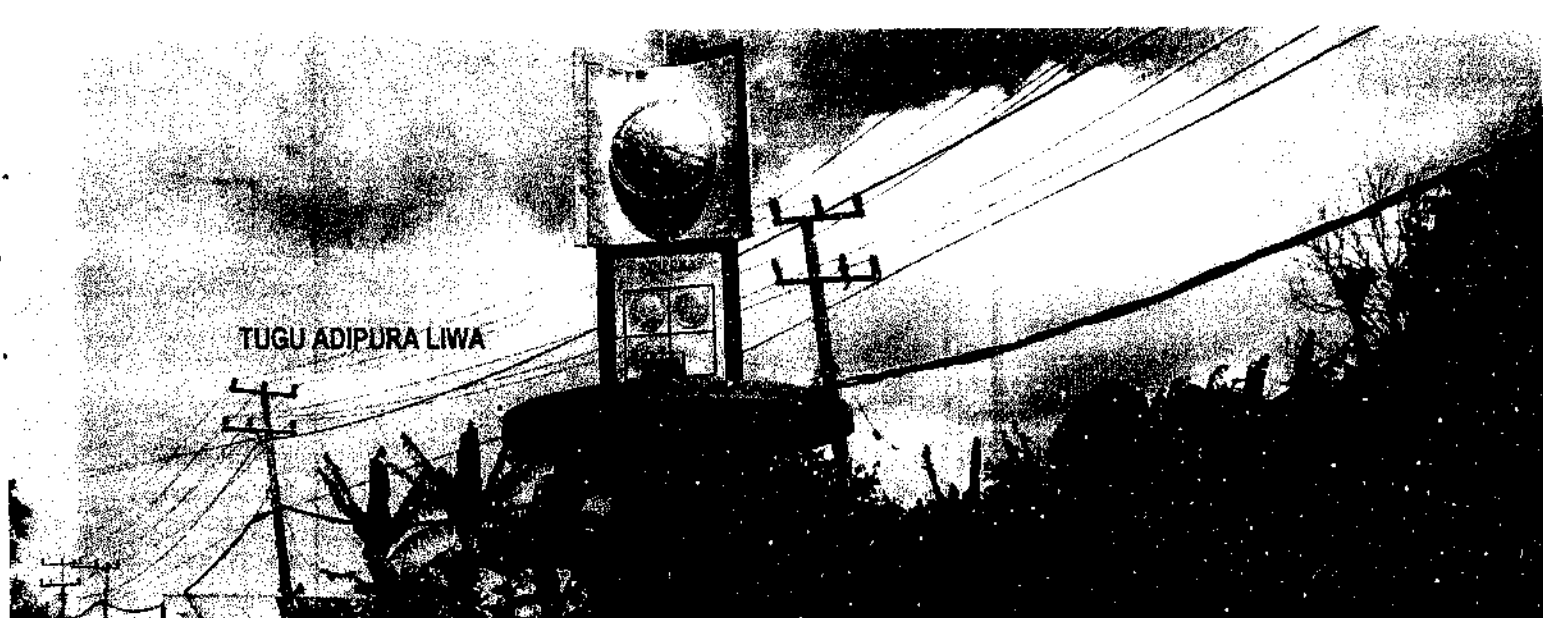
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan yang akan diperbaiki dan diselesaikan melalui pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.



- V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Dalam bagian ini diuraikan mengenai visi RPJMD atau visi kepala daerah terpilih, pernyataan misi beserta tujuan dan sasarannya.
- VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam bagian ini diuraikan strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Bagian ini menguraikan berbagai program pembangunan daerah menurut urusan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dalam bagian ini dijelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
- IX. PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

RI No. 3452); dan pada Tahun 2012 mengalami pemekaran menjadi DOB Pesisir Barat melalui UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 231, Tambahan Lembaran Negara RI No: 5364), maka luas indikatif wilayah administrasi Lampung Barat yang semula $\pm 5.050,01 \text{ km}^2$ setelah pemekaran menjadi $\pm 2.142,78 \text{ km}^2$ (dimana $\pm 2.907,23 \text{ km}^2$ merupakan luas wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat) atau sekitar 6,2% dari luas wilayah administrasi Provinsi Lampung (Luas Provinsi Lampung $\pm 34.623,80 \text{ km}^2$).

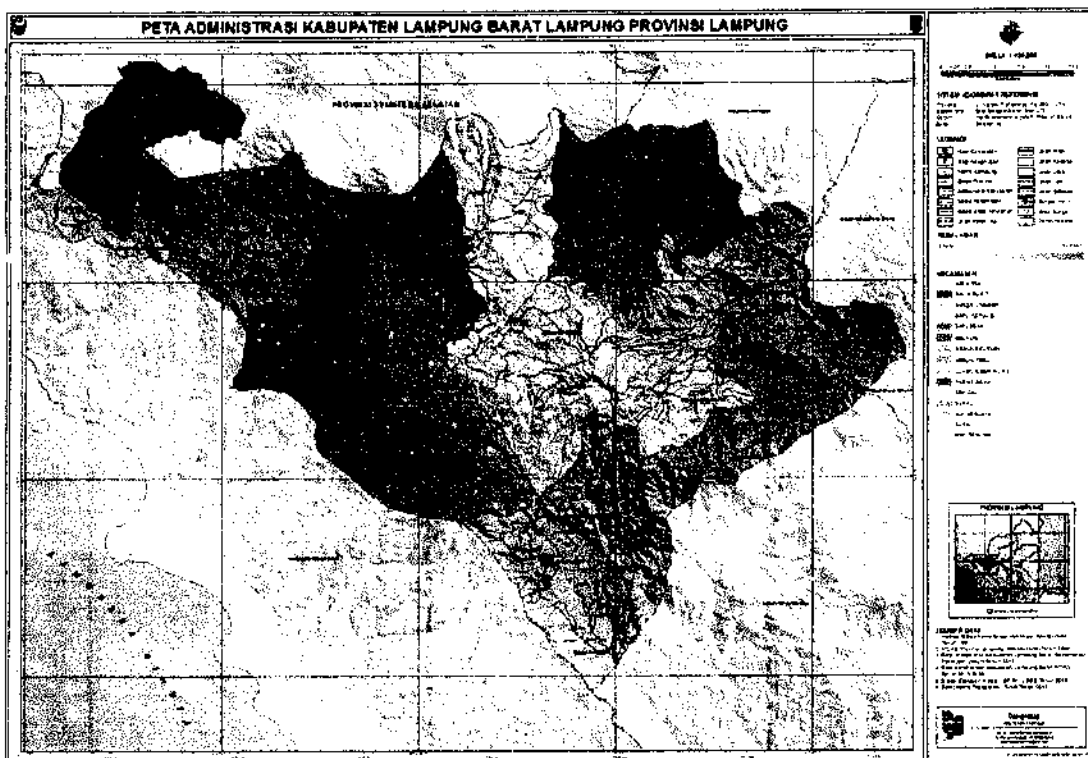
Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Pekon/Kelurahan, dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Pekon	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota
1. Balik Bukit	182,298	10	2	Pasar Liwa
2. Sukau	231,571	10	-	Buay Nyerupa
3. Lumbok Seminung	23,250	11	-	Lumbok
4. Belalau	226,204	10	-	Kenali
5. Sekincau	122,771	4	1	Pampangan
6. Suoh	177,254	7	-	Sumber Agung
7. Batubrak	271,480	11	-	Pekon Balak
8. Pagar Dewa	114,374	10	-	Basungan
9. Batu Ketulis	107,637	10	-	Bakhu
10. Bandar Negeri Suoh	177,337	10	-	Srimulyo
11. Sumber Jaya	202,798	5	1	Tugu Sari
12. WayTenong	121,100	8	1	Mutar Alam
13. Gedung Surian	90,448	5	-	Gedung Surian
14. Kebun Tebu	15,134	10	-	Pura Jaya
15. Air Hitam	79,124	10	-	Semarang Jaya
Lampung Barat	2.142,780	131	5	LIWA

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Barat



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2017

Batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Liwa-Balik Bukit | : 04 km; |
| 2. Liwa-Sukau | : 16 km; |
| 3. Liwa-Lumbok Seminung | : 48 km; |
| 4. Liwa-Batubrak | : 21 km; |
| 5. Liwa-Belalau | : 34 km; |
| 6. Liwa-Bandar Negeri Suoh | : 48km; |
| 7. Liwa-Batu Ketulis | : 40km; |
| 8. Liwa-Suoh | : 40 km; |
| 9. Liwa-Pagar Dewa | : 77 km; |
| 10. Liwa-Sekincau | : 30 km; |
| 11. Liwa-Sumber Jaya | : 67 km; |
| 12. Liwa-Way Tenong | : 60km. |

B. Letak dan Kondisi Geografis

1) Posisi Astronomis

Berdasarkan Georeferensi: Datum WGS 84 UTM - 48S dari Peta Rupa Bumi Provinsi Lampung (RBI 1:50K), posisi astronomis Lampung Barat terletak pada Koordinat 04°51'26" - 05°20'26" Lintang Selatan dan 103°50'13" - 104°33'49" Bujur Timur.

2) Posisi Geostrategis

Lampung Barat dilalui oleh ruas jalan nasional yang berfungsi sebagai penghubung (feeder) antara koridor barat dengan koridor tengah lintas sumatera, dan dilalui pula oleh ruas jalan provinsi yang menghubungkan Liwa (Lampung Barat) - Muara Dua (OKU Selatan). Kondisi geografis dan system konektivitas yang terbangun tersebut, menjadikan Lampung Barat



memiliki nilai strategis bagi Propinsi Lampung sebagai berikut:

- a) Pendukung Koridor Barat Pembangunan Provinsi Lampung dengan Fungsi utama sebagai daerah Konservasi dan Pariwisata. Fungsi Konservasi karena Lampung Barat memiliki kawasan hutan Konservasi TNBBS, Kawasan Konservasi Eksitu Kebun Raya Liwa, dan Hutan Lindung, dengan luas mencapai 61,5% dari luas administrasinya. Lampung Barat merupakan hulu dari 3 sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Mesuji Tulang Bawang, DAS Musi, dan DAS Semaka, yang sangat berperan penting menjaga stabilitas siklus hidrologi dan ketersediaan sumber air baku bagi Kabupaten lain di sekitarnya. Lampung Barat memiliki pula 3 region Cekungan Air Bawah Tanah (CAT) yaitu CAT Metro-Kotabumi, CAT Kota Agung, dan CAT Ranau. Adapun Fungsi Pariwisata, karena Lampung Barat memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Ranau, serta kawasan ekowisata TNBBS sebagai warisan dunia, dan Kebun Raya Liwa berdasarkan Perda Propinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 ditetapkan sebagai kawasan strategis Propinsi Lampung yang berfungsi sebagai kawasan konservasi eksitu.
- b) Sebagai Pintu Gerbang Perekonomian Prov. Lampung di Bagian Barat Liwa dalam RTRWN ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Sistem Perkotaan yang Melayani Sekala Regional (Jasa Pertanian, Perikanan, Budaya, Penelitian dan Pengembangan) meliputi Kawasan Strategis Agropolitan Way Tenong, Kawasan ANDALAN Liwa – Krui dan Produsen Kopi Robusta Lampung
- c) Pendukung Ketahanan Energi, Listrik Baru Terbarukan meliputi WKP Geothermal Sekincau, WKP Geothermal Danau Ranau dan PLTA Way Besai.

3) Kondisi/Kawasan

Kabupaten Lampung Barat secara ekoregion merupakan wilayah yang dominan masuk dalam ekosistem dataran tinggi hingga ekosistem

pegunungan, yang dicirikan dengan bentang alam yang bergelombang, dan berbukit-bukit. Wilayahnya terletak di sisi bagian timur dari punggung perbukitan Bukit Barisan Selatan yang membentang dari utara hingga selatan sepanjang sisi barat pulau Sumatera, membentuk sabuk api (ring of fire) Sumatera.

Terdapat beberapa gunung di Kabupaten Lampung Barat yang membentuk benteng alam, yaitu Gunung Pesagi (2.127 m) yang merupakan gunung tertinggi di Lampung Barat. Gunung Seminung (1.804 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), dan beberapa perbukitan seperti Bukit Sepulang, Bukit Rigin, Bukit Palakiah, Bukit Serarukuh. Sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

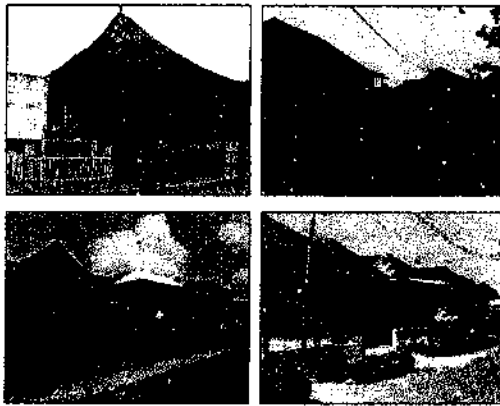
Gunung Pesagi merupakan gunung tertinggi di Lampung Barat. Di Pekon Hujung yang terletak di kaki Gunung Pesagi terdapat pemukiman tradisional masyarakat asli Lampung. Pekon Hujung telah ditetapkan sebagai desa wisata.

Sebagian besar wilayah Lampung Barat merupakan kawasan perdesaan (95%), sedangkan sisanya merupakan kawasan perkotaan (5%). Dari 136 pekon/kelurahan di Lampung Barat, yang merupakan kawasan perkotaan adalah, Kelurahan Way Mengaku dan Kelurahan Pasar Liwa (Kecamatan Balik Bukit), kelurahan Sekincau (Kecamatan Sekincau), kelurahan Fajar Bulan (Kecamatan Way Tenong), dan kelurahan Tugusari (Kecamatan Sumberjaya), sedangkan yang sudah menunjukkan ciri perkotaan, antara lain pekon Kubu Perahu (Kecamatan Balik Bukit), dan pekon Purajaya (Kecamatan Kebun Tebu).

Lampung Barat dikenal dengan sebutan Tanah Sei Betik atau tanah yang indah dengan tata kehidupan masyarakat dengan sistem Patrilineal, dimana harta pusaka, Gelar dan nama Suku diturunkan menurut garis Ayah/Bapak. Suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Lampung Barat berasal dari Kerajaan Skala Brak yang banyak mendapat pengaruh dari Kerajaan Pagar Ruyung (Sumatera Barat). Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Barat terdiri atas 6 (enam) Kebuayan, yaitu : Buay Belunguh (Kenali), Buay Pernong (Batu Brak), Buay Bejalan Di Way (Kembahang), Buay Nyerupa (Sukau), Buay Bulan/Nerima

(Lenggiring), dan Buay Menyata/Anak Mentuha (Luas). Suku Lampung tersebar disemua kecamatan, konsentrasi terbesar pemukiman tradisional masyarakat asli suku Lampung berada diantara Danau Ranau dan kaki Gunung Pesagi, yaitu meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Sukau, Balik Bukit, Batu Brak, dan Kecamatan Batahalau.

Gambar 2.2. Pemukiman Tradisional



C. Topografi

1) Kemiringan Lahan

Berdasarkan peta kelerengan skala 1:50.000, Lampung Barat memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi, terbagi menjadi 5 (lima) kelas kelerengan, sebagai berikut:

- Kelas Kelerengan A (0 – 8%) seluas 35,01% dari total luas wilayah administrasi Lampung Barat. Dominan tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Suoh, BNS, Way Tenong, Air Hitam, Kebun Tebu, dan Gedung Surian.
- Kelas Kelerengan B (8% - 15%), seluas 19,14% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar merata hampir diseluruh kecamatan
- Kelas Kelerengan C (15% - 25%), seluas 20,79% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar merata hampir diseluruh kecamatan
- Kelas Kelerengan D (25% - 45%), seluas 19,80% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar dominan di bagian utara, barat, dan selatan wilayah administrasi Lampung Barat yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya

- Kelas Kelerengan E (> 45%) mencapai luasan 5,26% dari luas wilayah administrasi Lampung Barat, sebagian besar berada dalam kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

2) Ketinggian Lahan

Kabupaten Lampung Barat merupakan dataran tinggi hingga pegunungan, dengan ketinggian tempat yang bervariasi mulai dari 200 mdpl hingga > 2.000 mdpl. Titik terendah berada di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh dengan ketinggian tempat 225 mdpl s/d 250 mdpl, sedangkan titik tertinggi berada di puncak Gunung Pesagi dengan ketinggian mencapai 2.175 mdpl. Secara Keseluruhan ketinggian tempat di Kabupaten Lampung Barat berkisar antara 225-650 mdpl.

Berdasarkan Peta Topografi Lampung Barat, persentase luas lahan berdasarkan tingkat elevasinya diklasifikasikan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|--------|
| a) 225 mdpl - 650 mdpl | = 76 % |
| b) 651 mdpl - 1025 mdpl | = 20 % |
| c) 1.026 mdpl - 1.375 mdpl | = 3 % |
| d) 1.376 mdpl - 2.175 mdpl | = 1 % |

D. Geologi

1) Struktur dan Karakteristik

Karakteristik bentukan alam (Geomorfologi) Kabupaten Lampung Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 grup *landform* (bentang alam) utama, yaitu, Fluvial (F), Struktural (S), dan Vulkanik (V).

Grup Fluvial. Bentuk lahan ini terbentuk dari bahan endapan sungai dan hasil proses fluvial di kaki lereng perbukitan/pegunungan yang landai. Tersebar antara ketinggian 200 s/d 250 mdpl di sepanjang cekungan pada aliran sungai Way Semaka dan Way Besai Hulu pada ketinggian 830 s/d 910 mdpl. Bentuk lahan ini dicirikan dengan adanya cekungan fluvial atau rawa belakang, kipas alluvial dan kipas alluvial aktif. Struktur geologi terdiri dari Formasi Alluvium (Qa). Relatif subur untuk pengembangan pertanian lahan basah. Penyebaran di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Kebun Tebu, Air Hitam, dan Gedungsurian.

Grup Struktural. Bentuk lahan struktural menunjukkan ciri dominan dari proses endogen



(pengangkatan dan perlipatan) lapisan lempeng bumi. Bentuk lahan ini terdiri dari dataran bergelombang sampai berbukit dan gugusan pegunungan memanjang diselingi lembah-lembah dengan sistem aliran sungai terkontrol oleh kondisi struktur batuan, serta bidang patahan dan garis patahan. Bentuk lahan ini membentuk deretan perbukitan Bukit Barisan Selatan, yang memanjang dari Kecamatan Lumbok Seminung hingga kecamatan Suoh. Struktur geologi terdiri dari Formasi Ranau (QTr), Formasi Hulu Simpang (Tomh), Formasi Bai (Tmba), Formasi Seblat (Toms), Formasi batuan gunung api quarter (Qv). Meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Sukau, Balik Bukit, Batu Brak, dan Kecamatan Belalau.

Grup Vulkanik. Grup vulkanik terbentuk karena aktivitas vulkan/gunung berapi. Grup ini dicirikan oleh bentuk kerucut vulkan, aliran lahar atau wilayah yang merupakan akumulasi bahan vulkanik. Secara umum bentuk lahan ini dapat dibedakan berdasarkan litologi induknya yaitu dari jenis andesitis dan basal yang terletak pada ketinggian 700 s/d 1.150 mdpl. Grup Vulkanik terdapat di Sebelah Utara hingga Timur Kabupaten Lampung Barat. Struktur geologi terdiri dari formasi Sekincau Vulcanics (Qhvs) dan sedikit Formasi Granite (Tmgr) yang tersebar mulai dari Gunung Seminung di Kecamatan Lumbok Seminung - Gunung Pesagi (Kec Balik Bukit - Belalau - Batu Ketulis), Gunung Sekincau (Sekincau, Way Tenong) hingga Kecamatan Pagar Dewa dan Sumber Jaya, serta formasi Alluvium (Qa) yang tersebar di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Kebun Tebu, dan Gedung Surian.

Umumnya tanah yang terbentuk dari proses vulkanik mempunyai kesuburan tinggi karena pelapukan batuan vulkanik menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah cukup bervariasi, seperti Podsolik (Tropudults, Dystropepts, Humitropepts), Latosol (Eutropepts), andosol (Dystrandeps), Aluvial (Trapaquepts, Tropofluents), Gleisol (Hydraquents, Sulfaquents), dan Regosol (Tropopsamments).

Jenis tanah Andosol seperti yang ada di kecamatan Sumber Jaya, Way Tenong, Belalau, Batu Brak, dan Balik Bukit sesuai untuk budidaya tanaman kopi robusta dan hortikultura

(wortel, kol, tomat, cabe). Jenis tanah aluvial sesuai untuk budidaya tanaman padi sawah.

2) Potensi Kandungan

a) Potensi Mineral Logam dan Non Logam.

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Lampung Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit, batu gamping, metamorf, lempung, endapan alluvium, tufa masam, dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.: 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, telah menetapkan wilayah pertambangan di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam seluas ± 66.560,2 Ha, WUP Bukan Logam dan Batuan seluas ± 73.412 Ha, dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) seluas ± 60.690,9 Ha, serta 52 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas ± 850 Ha.

Blok WPR tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Lampung Barat melalui Keputusan Bupati Nomor: B/193/KPTS/II.13/2014, tanggal 21 Maret 2014 tentang Peta Wilayah Pertambangan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, skala 1:100.000.

b) Potensi Geothermal

Posisi Lampung Barat yang berada pada jalur patahan yang memiliki resiko tinggi terhadap kebencanaan geologi, mengandung pula potensi geologi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kedaulatan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan panas bumi (*geothermal*). Lampung Barat memiliki empat kawasan potensi geothermal, yaitu:

- **Panas Bumi Danau Ranau**, telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1151.K/30/MEM/2011, tanggal 21 April 2011. WKP Panas Bumi danau Ranau memiliki luasan 8.561 Ha, meliputi Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung) dan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan), dengan perkiraan potensi 210 MWe.

- **Panas Bumi Sekincau**, telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 7439.K/30/MEM/2016, tanggal 14 Oktober 2016. Luasan WKP Sekincau ± 42.810 Ha, meliputi kecamatan Sekincau, Way Tenong, Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh, dengan perkiraan potensi 378 MWe – 485 MWe. Ditetapkannya WKP Sekincau, maka wilayah potensi panas bumi yang berada di Gunung Sekincau, Bacingot, Purunan, Suoh Antatai, sudah masuk dalam WKP Panas Bumi tersebut.
- **Panas Bumi Fajar Bulan**, masih merupakan area prospek *geothermal*, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi sebagian Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, sebagian kecamatan Gedung Surian dan kecamatan Sumberjaya (sisi barat hingga barat daya dari HL Reg 45 B Bukit Rigit). Perkiraan potensi 150-250 MWe.
- **Panas Bumi Way Umpu**, masih merupakan area prospek *geothermal*, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi Kecamatan Pagar Dewa, kecamatan Sumberjaya hingga Kabupaten Way Kanan. Perkiraan potensi 110-220 Mwe.

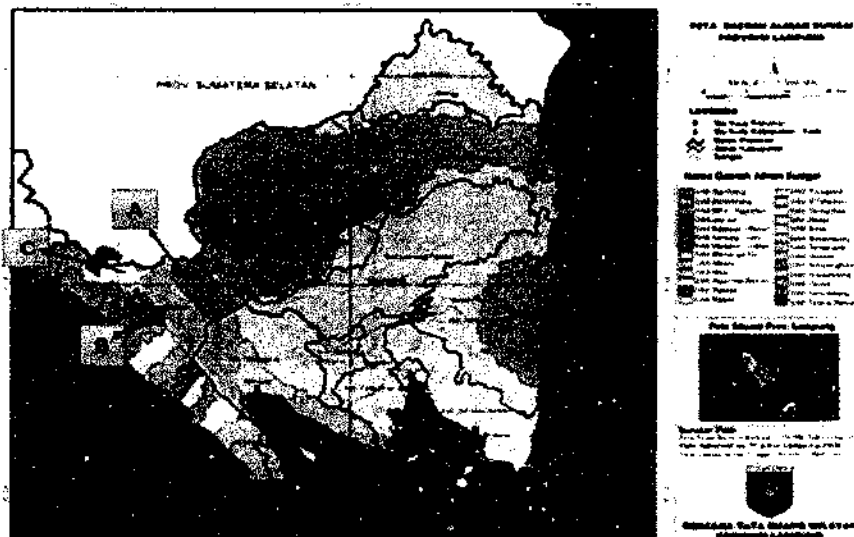
E. Hidrologi

Posisi geografis Lampung Barat yang merupakan dataran tinggi yang dipengaruhi oleh 2 tipe iklim, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas siklus hidrologi bagi Propinsi Lampung maupun Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pembentukan hujan sekaligus sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang membentuk system daerah aliran sungai.

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Lampung Barat merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, karenanya, sangat berperan penting terhadap kinerja sistem hidrologi di dua provinsi tersebut, yaitu sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) dengan lebih dari 170 anak sungai. Sungai-sungai besar sebagai inlet dari sistem DAS, diantaranya adalah sungai Way Besai, Way Umpu, Way Giham, yang membentuk sub DAS Way Besai Hulu, yang merupakan bagian dari sistem DAS Mesuji - Tulang Bawang, sungai Way Semaka yang membentuk sub DAS Semaka, dan sungai Way Warkuk yang bermuara di danau Ranau sebagai sub DAS Warkuk yang merupakan bagian dari sistem DAS Musi.

Gambar 2.3. Peta Daerah Aliran Sungai di Propinsi Lampung.



Sumber: RTRW Propinsi Lampung 2010-2030, keterangan: A: Sub DAS Way Besai Hulu (DAS Mesuji Tulang Bawang), B: DAS Semaka, C: sub DAS Way Warkuk – danau Ranau (DAS Musi)



DAS Tulang Bawang (wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang), memiliki luasan ± 982.292 Ha, dimana sekitar 6,8% dari luasan tersebut atau sekitar 67.411 Ha berada di Kabupaten Lampung Barat sebagai hulu dari sungai-sungai besar pembentuk DAS Tulang Bawang. Berdasarkan data BPDAS Tahun 2016, sub DAS dari DAS Tulang Bawang yang wilayahnya masuk Kabupaten Lampung Barat antara lain sub DAS Way Besai (41.780 ha), Way Giham (15.315 ha), Way Rarem (1.972 ha), dan Way Tahmi (8.345 ha), yang wilayah alirannya mencakup Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, Pagar Dewa, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Kecamatan Sumberjaya.

DAS Way Semaka masuk dalam DAS prioritas Provinsi Lampung, dimana wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus, dengan luas daerah catchment area $\pm 1.614,5$ km².

2) Sungai dan Danau

Lampung Barat dialiri tiga sungai besar yaitu Way Besay, Way Semangka, dan Way Warkuk serta memiliki danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Panjang sungai Way Semaka $\pm 95,47$ km, dengan hulu sungai berada di gunung Pesagi dan gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan bermuara di Teluk Semaka (Kabupaten Tanggamus). Beberapa anak sungai yang mengalir menuju sungai Semaka yang berada di Kabupaten Lampung Barat antara lain: Way Kegeringan, Way Lebuy, Way Hantatai, Way Haru, Way Maraman, Way Meneng, Way Ngarip, Way Meleubi Balak, Way Andarumon, Way Pampangan, Way Bumbon, Way Bata, Way Laga, dan Way Pasir. Anak-anak sungai tersebut berpotensi untuk pengembangan mikrohidro (kapasitas < 10 MW), pemanfaatan air baku untuk irigasi, dan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Danau Ranau merupakan outlet dari sub DAS Komerling, yang merupakan bagian dari DAS Musi. Luas sub DAS Komerling $\pm 407.898,78$ Ha, sedangkan luas Outlet Danau Ranau mencapai ± 508 km² (50.800 Ha) yang terdiri dari luas daratan dan luas perairan. Luas perairan Danau Ranau mencapai $\pm 12.623,52$ Ha (beberapa literatur menyebutkan luas danau Ranau adalah $\pm 12.551,23$ Ha), dan luas

daratan (daerah tangkapan air/catchment area) mencapai $\pm 38.176,48$ Ha, dengan panjang total garis sempadan danau mencapai: $\pm 64,7$ km.

Perairan danau seluas 2.792,19 Ha (22,12%) masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung), dengan panjang garis sempadan danau $\pm 23,6$ km. Berdasarkan data dari BBWS wilayah VII Musi, jumlah sungai yang bermuara di Danau Ranau sebanyak ± 40 sungai. Sungai terpanjang adalah sungai Way Warkuk dengan panjang badan sungai mencapai ± 26 km.

Selain Danau Ranau, Lampung Barat juga memiliki 4 danau kecil yang terletak di Kecamatan Suoh yaitu Danau Lebar (67,6 Ha), Danau Asam (121,1 Ha), Danau Minyak (10 Ha), dan Danau Belibis (2 Ha). Danau Belibis saat ini sudah tertutup vegetasi rawa dan mengalami sedimentasi. Keempat danau tersebut berada pada zona Pemanfaatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Wilayah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai Ekowisata. Keempat danau tersebut terbentuk sebagai akibat proses tektonik letusan gunung Ratu pada Tahun 1933.

Kabupaten Lampung Barat selain memiliki potensi air permukaan juga memiliki potensi imbuhan air atau Cekungan Air Tanah (CAT). Berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, CAT yang berada di Lampung Barat sebagai berikut:

- a) **CAT Kota Agung** yang berada di Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus.
- b) **CAT Ranau** yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan; dan
- c) **CAT Metro-Kotabumi** yang berada di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan.



3) Debit

Berdasarkan data debit sungai Way Semaka Tahun 1990-2004 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung, proyeksi debit banjir Sungai Semaka untuk 100 Tahun sebesar 511,27 m³/det, debit andalan harian rata-rata mencapai 12,47 m³/det. Debit maksimum sebesar 48,98 m³/det (terjadi pada bulan Oktober-Februari), dan debit minimum sebesar 7,15 m³/det (Juli-September).

Muara atau bagian hilir sungai Way Warkuk berada di Kota Batu (Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan), sedangkan bagian tengah dan hulu sungai Way Warkuk berada di Kecamatan Sukau dan Balik Bukit (Kabupaten Lampung Barat). Sungai Way Warkuk merupakan sungai utama penyuplai air bagi danau Ranau, diperkirakan besar debit rata-rata sungai Way Warkuk mencapai ± 18,5 m³/dtk/Tahun

F. Klimatologi

1) Tipe Iklim

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan klasifikasi Oldeman dan Las Davies (1979) memiliki dua tipe iklim, yaitu: Tipe

Iklim A, terdapat di bagian Barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Tipe Iklim B, terdapat di bagian Timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dengan terbentuknya DOB Kabupaten Pesisir Barat maka tipe iklim di wilayah Kabupaten Lampung Barat hanya memiliki tipe iklim B, dengan curah hujan di Kabupaten Lampung Barat berkisar antara 2.000 – 2.500 mm per Tahun, bulan basah berkisar antara 7-9 bulan, dan suhu rata-rata berkisar antara 20-25°C. dengan persentase penyinaran matahari (intensitas cahaya) berkisar 37,9 – 50,0%.

2) Curah Hujan

Rata-rata curah hujan Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi Balik Bukit dan Belalau, antara Tahun 2012 s/d 2014 sebesar 2.388,2 mm per Tahun. Pada Tahun 2012 rata-rata curah hujan Tahunan sebesar 1.966,1 mm, dan pada Tahun 2014 curah hujan rata-rata Tahunan mencapai 2.526,1mm.

Rata-rata curah hujan bulanan terendah terjadi pada bulan Maret dan Juni sebesar 93,8 mm dan 95,8 mm, sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Nopember sebesar 453,3 mm. Data Curah hujan Tahun 2012-2014 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Curah Hujan Bulanan Tahun 2012 s/d 2014 Kabupaten Lampung Barat.

Bulan	2012	2013	2014	Rata-rata (mm)
Januari	214,0	249,1	186,0	216,4
Februari	197,6	137,4	238,0	191,0
Maret	39,0	61,7	180,6	93,8
April	205,0	318,9	202,7	242,2
Mei	154,3	150,4	280,0	194,9
Juni	114,0	103,5	69,9	95,8
Juli	59,1	504,0	122,9	228,7
Agustus	33,5	126,0	286,4	148,6
September	24,6	278,0	25,5	109,4
Oktober	253,4	212,6	142,4	202,8
Nopember	405,0	379,4	575,4	453,3
Desember	266,6	151,5	216,3	211,5
CH Tahunan (mm/thn)	1.966,1	2.672,5	2.526,1	2.388,2

Sumber: Stasiun Terpadu Liwa, 2015

3) Suhu dan Kelembaban Udara

Selama Tahun 2016, rata-rata suhu udara di Kabupaten Lampung Barat berkisar antara 20.90°C s/d 22.50°C. Rata-rata Suhu terendah

terjadi pada bulan Agustus, sedangkan rata-rata suhu tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Mei.



Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 87.10 % s/d 93.50 %. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Desember, sedangkan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari. Regim suhu berkisar dari panas (isohypothermic) pada dataran rendah Such

sampai dingin (isomesic) di daerah perbukitan. Regim kelembaban tergolong basah (udic), dengan kelembaban berkisar antara 50% s/d 80%. Secara lengkap data suhu dan kelembaban udara pada Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	27.50	19.60	22.50	108.10	71.50	93.50
Februari	27.50	19.20	22.00	97.60	71.50	88.30
Maret	27.50	19.60	22.10	98.20	74.00	90.80
April	26.80	19.70	22.40	97.90	75.50	90.50
Mei	27.20	19.60	22.50	97.30	72.60	89.60
Juni	26.50	17.90	21.40	97.80	72.50	90.30
Juli	26.50	17.40	21.20	98.10	72.10	89.70
Agustus	26.60	17.40	20.90	98.00	72.00	89.90
September	26.50	18.00	21.10	98.20	71.50	89.70
Oktober	26.20	18.70	21.40	96.20	74.00	89.50
November	27.50	19.00	21.30	98.40	78.30	92.50
Desember	26.20	18.80	21.40	93.20	75.90	87.10

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

G. Penggunaan Lahan

Beberapa Tahun terakhir pemanfaatan lahan di Kabupaten Lampung Barat mengalami pertumbuhan yang cenderung statis atau tidak mengalami peningkatan yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat, wilayah administrasi Lampung Barat terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan hutan (non budidaya). Kawasan hutan meliputi luasan mencapai 126.956,27 Ha atau sekitar 59,25% dari luas administrasi atau sekitar 61,27 % dari luas daratan, sedangkan sisanya sekitar 40,75% atau sekitar ± 87.318,28 Ha merupakan kawasan budidaya.

1) Kawasan Budidaya

Berdasarkan peta land cover pada dokumen Review RTRWK Lampung Barat Tahun 2016-2036, penutupan lahan di Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan data RBI Tahun 2014 skala 1:50.000 terdiri dari:

Tabel 2.4. Tutupan Lahan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No.	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan	51.257	24
2.	Kebun Campuran	118.186	55
3.	Ladang / Tegalan	13.729	6
4.	Permukiman	3.450	2
5.	Rawa	1.189	1
6.	Sawah	6.734	3
7.	Semak Belukar	12.659	6
8.	Tubuh Air	7.075	3
	Luas Indikatif Lahan	214.278	100

Sumber: Review RTRW Kabupaten Lampung Barat 2016-2036



2) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari: Kawasan Hutan Negara, dan kawasan berfungsi lindung. Kawasan Hutan Negara terdiri dari Hutan Lindung Register, dan

Hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kawasan berfungsi lindung terdiri dari Hutan Adat atau Hutan Marga, dan Kebun Raya Liwa, serta lahan yang memiliki kelengkapan > 40%.

Tabel 2.5. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi di Lampung Barat

HUTAN LINDUNG (HL) REGISTER		
1) HL Reg. 48 B Bukit Palakiah	1.800,17	Sukau
2) HL Reg. 45 B Bukit Rigis	8.345,00	Sumberjaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Air Hitam
3) HL Reg. 44 B Way Tenong – Kenali	13.040,00	Belalau, Batu Ketulis, Pagar Dawa, Way Tenong, Sumberjaya (Perbatasan Lampung Barat dan OKU Selatan hingga Kab Way Kanan)
4) HL Reg. 43 B Krui Utara	14.030,00	Sukau, Balik Bukit, Batu Brak (Perbatasan Lampung Barat dan OKU Selatan)
5) HL Reg. 17 B Bukit Serarukuh	1.596,10	Batu Ketulis
6) HL Reg. 9 B Gunung Seminung	1.050,00	(Luas berdasarkan SK Menhut No. 4.044/menhut-VII/KUH/2014) Lombok Seminung (luas sebelumnya 420 Ha).
TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS)		
1) Resort Suoh	37.560,00	Suoh, Bandar Negeri Suoh
2) Resort Ulu Belu	6.741,00	Suoh, Bandar Negeri Suoh
3) Resort Sekincau	13.415,00	Sekincau, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian
4) Resort Balik Bukit	23.011,00	Balik Bukit, Batu Brak
5) Resort Lombok (sebagian)	6.998,00	Luas total Resort Lombok: 24.238 Ha, sebagian besar (± 17.240 Ha) masuk Kabupaten Pesisir Barat (di Kecamatan Lemong) yang masuk di wilayah Lampung Barat berada di Kec Lombok Seminung, dan Sukau (± 6.998 Ha)
LUAS TOTAL	126.956,27	61,5% dari total Luas Wilayah Administrasi Lampung Barat

Sumber: SK Menhutbun 256/KPTS-IV/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung, dan SK Dirjen PHKA No. SK 80/IV-KKBHL/2014 tentang Zonasi TNBBS serta Blok Pengelolaan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan.

Hutan Marga atau Hutan adat di Lampung Barat tersebar di Kecamatan Belalau, Kecamatan Batu Ketulis, Kecamatan Batu Brak dan Kecamatan Way Tenong. Keberadaannya sudah mulai berkurang, system pewarisan dan pola pengelolaannya menjadi salah satu penyebab semakin menyempitnya luas hutan adat. Beberapa hutan Adat yang masih ada di

Lampung Barat antara lain: Hutan Adat Kalpataru yang terletak di Pekon Padang Tambak (Way Tenong) dengan luas sekitar 100 Ha, Hutan Adat marga Sukaraja seluas 60 Ha (Way Tenong), Hutan Adat Bedudu seluas 200 Ha (Belalau), Hutan Adat Sukarame seluas 420 Ha (Batu Brak), dan Hutan Adat Bakhu seluas 240 ha (Batu Ketulis).

Kawasan berfungsi lindung yang bernilai strategis bagi Lampung Barat adalah Kebun Raya Liwa, seluas 86,6 Ha yang berfungsi sebagai konservasi eksitu, ilmu pengetahuan, penelitian, wisata, dan jasa lingkungan (iklim mikro). Kebun Raya Liwa masuk dalam Roadmap pengembangan Kebun Raya Indonesia hingga Tahun 2019, dengan tema adalah tanaman hias hutan hujan pegunungan Sumatera.

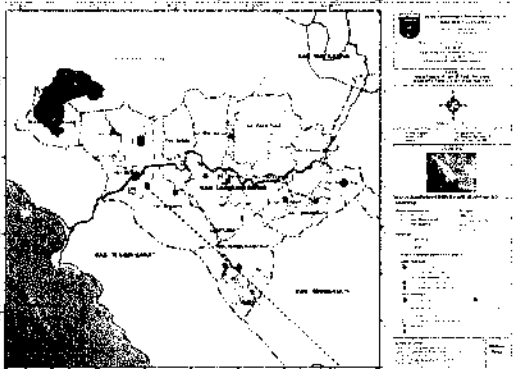
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana struktur ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2030 meliputi 6 (enam) struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan prasarana energi, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya.

A. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan yang akan dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan lokal yang dipromosikan, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan. Secara Lebih Rinci, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan Kabupaten Lampung Barat disajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2.4. Rencana Pusat Kegiatan Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Review RTRW Kabupaten Lampung Barat 2016-2036.

Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRWK Lampung Barat tahun 2010-2030,

pengembangan system pusat kegiatan wilayah, meliputi:

- a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Liwa, yang diarahkan sebagai pengembangan system kawasan perkotaan dengan skala layanan regional dan kabupaten.
- b) Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi PKL Fajar Bulan (Kecamatan Way Tenong) untuk mendukung Kawasan Strategis Agropolitan, PKLp Lumbok (Kecamatan Lumbok Seminung) untuk mendukung Kawasan Strategis Agrominapolitan, dan PKLp Purajaya (Kecamatan Kebun Tebu) untuk mendukung kawasan strategis cepat tumbuh. PKL melayani antar kecamatan.
- c) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi pekan Kenali sebagai pusat pelayanan antar kawasan untuk kepentingan pelestarian budaya (Cagar Budaya), dan PPK Sumber Agung (Suoh) sebagai pusat pelayanan bagi pengembangan kawasan strategis PLTP Sekincau.
- d) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi seluruh ibu kota kecamatan yang tidak menjadi PPK atau PKL/PKLp. PPL difungsikan sebagai pusat pelayanan skala local, yaitu hanya skala kecamatan, meliputi PPL Buay Nyerupa (Sukau), PPL Pekon Balak (Batu Brak), PPL Srimulyo (BNS), PPL Bakhu (Batu Ketulis), PPL Pampangan (Sekincau), PPL Basungan (Pagar Dewa), PPL Semarang Jaya (Air Hitam), PPL Tugu Sari (Sumberjaya), PPL Gedung Surian (Gedung Surian).

B. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Sistem jaringan prasarana transportasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:

1) Pengembangan Jaringan Jalan

- a) Jaringan jalan nasional ruas yang melalui Kecamatan Sumber Jaya melintasi Tugusari, Fajar Bulan, Bakhu, Kenali, Pekon Balak dan Liwa.
- b) Jaringan jalan provinsi yang menghubungkan Liwa – Batas Provinsi Sumatera Selatan dan antara Sukabumi dan Suoh.
- c) Jaringan jalan kabupaten terdiri dari 161 Ruas jalan dengan panjang total 724Km.

- d) Jalan umum yang akan menjadi jalan lingkar Kota Liwa di bagian Utara, dan Jalan Umum yang menghubungkan IKK Sekincau – IKK Basungan – IKK Banjit.
 - e) Peningkatan fungsi dan status jaringan jalan Nasional (Liwa-Padang Tambak-Bukit Kemuning) dan Propinsi (Sp Sukarno-Batas OKUS dan Ruas Pekon Balak-Suoh).
- 2) **Pengembangan Terminal**
- a) Terminal Tipe B di Kota Liwa; bersifat penyempurnaan
 - b) Terminal Tipe C untuk Fajar Bulan; bersifat penyempurnaan
 - c) Terminal Tipe C untuk Sumber Agung, Kenali, dan Tugu Sari; bersifat pengembangan
- 3) **Pengembangan Angkutan Umum**
- a) Peningkatan kualitas moda angkutan umum sesuai dengan standar
 - b) Pengembangan halte
 - c) Pengintegrasian masing-masing trayek dan halte menjangkau keseturuhan wilayah pedesaan.
- 4) **Pengembangan Pelabuhan**
Pelabuhan di Kabupaten Lampung Barat yang dimaksud adalah pelabuhan penyeberangan Danau Ranau yang terdapat di Desa Lombok, Kecamatan Lombok Seminung. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan lokal yang melayani angkutan penumpang dan barang secara terbatas yang difungsikan hanya untuk menyeberangi Danau Ranau menuju daerah sekitarnya

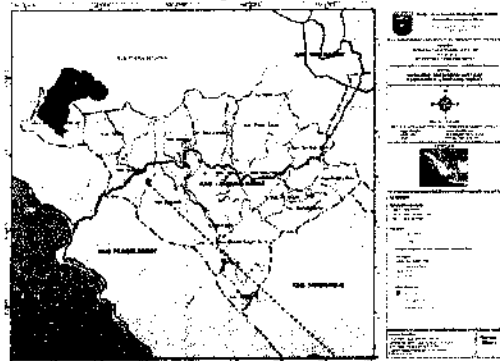
C. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi di Kabupaten Lampung Barat, meliputi:

- 1) Pengembangan/ peningkatan jaringan distribusi tegangan menengah ke pusat kegiatan fungsional.
- 2) Pengembangan dan peningkatan kualitas gardu-gardu listrik untuk meningkatkan daya energi listrik pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan.
- 3) Peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan pemukiman baru di kawasan perwilayahan.

- 4) Peningkatan gardu pendistribusian listrik pada kawasan yang diprioritaskan

Gambar 2.5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi



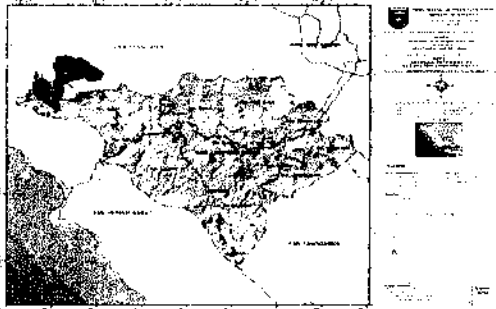
Sumber: Review RTRW Kabupaten Lampung Barat 2016-2036

D. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Lampung Barat, meliputi telepon untuk rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler. Sedangkan untuk rencana pengembangan prasarana informatika, yaitu:

- 1) Menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern.
- 2) Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan.
- 3) Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten.
- 4) Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama.

Gambar 2.6. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi



Sumber: Review RTRW Kabupaten Lampung Barat 2016-2036

E. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

1) Air Bersih

Rencana pengembangan utilitas air bersih di Kabupaten Lampung Barat, antara lain:

- a) Pengembangan fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah kecamatan yang belum terdapat instalasi pengelolaan air bersih
- b) Pendistribusian air bersih yang merata di wilayah dengan penambahan jaringan distribusi
- c) Pengembangan instalasi air bersih pada kawasan pariwisata potensial

2) Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan irigasi di Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan cara:

- a) Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
- b) Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
- c) Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
- d) Peningkatan pengairan irigasi teknis yang terdapat di Sumber Jaya, Way Tenong, Sukau, dan Balik Bukit.
- e) Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Lampung Barat.

3) Drainase

- a) Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas kegiatan yang tinggi.

- b) Pengembangan sistem drainase tertutup untuk mengantisipasi tersumbatnya saluran oleh timbunan sampah.

- c) Pada kawasan dengan kepadatan rendah, saluran drainase dapat dipadukan penggunaannya dengan saluran air kotor.

F. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

a) Sistem Persampahan

Rencana pengelolaan sampah untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat dibedakan menjadi menurut kawasan penanganan, yaitu kawasan Perkotaan Liwa dan kawasan pertanian/perkebunan Way Tenong dan sekitarnya. Namun untuk TPST direkomendasikan beberapa unit, yaitu untuk kawasan Way Tenong (di Sumber Jaya), Baik Bukit, dan Suoh. Hal ini terkait dengan efisiensi transportasi dan karakteristik kawasan yang cukup berbeda.

b) Sanitasi

Berdasarkan hal tersebut diatas maka rencana pengembangan sanitasi di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

- a) Pada wilayah perkotaan pengembangan sanitasi diarahkan kepada pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing rumah tangga.
- b) Pada wilayah perdesaan penanganan limbah khusus rumah tangga dapat dikembangkan fasilitas sanitasi pada setiap KK serta fasilitas sanitasi umum.
- c) Peningkatan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya

G. Kawasan Strategis

Kawasan Strategis di Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Lampung Barat 2010-2030 dan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang RTRW Propinsi Lampung 2009-2029, menyebutkan bahwa Kawasan Strategis di Kabupaten Lampung Barat, terdiri dari:

- 1) Kawasan Strategis Propinsi Lampung untuk sudut pandang kepentingan ekologi, konservasi, dan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

- a. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang saat ini statusnya



- sebagai Warisan Dunia Hutan Hujan Tropika Sumatera.
- b. Kebun Raya Liwa, sebagai kawasan konservasi eksitu.
- 2) Kawasan Strategis Provinsi Lampung untuk sudut pandang kepentingan ekonomi dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Lampung Barat, yaitu:
 - a. Kawasan Strategis Agropolitan Way Tenong, dengan kopi robusta sebagai basis ekonomi wilayahnya.
 - 3) Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Barat berdasarkan sudut pandang kepentingan sumberdaya alam dan penerapan teknologi, yaitu:
 - b. Kawasan Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sekincau.

Mengingat terjadinya pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Pesisir Barat melalui UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Propinsi Lampung, maka pada tahun 2016, dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan review terhadap RTRWK Lampung Barat tahun 2010-2030. Berdasarkan hasil PK RTRWK Lampung Barat tersebut, ada penambahan terhadap Kawasan Strategis di Kabupaten Lampung Barat, yaitu:

- 1) Kawasan Strategis untuk kepentingan lingkungan hidup, yaitu kawasan geopark TNBBS di Kecamatan Suoh, dan Desa Konservasi di Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Air Hitam
- 2) Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial dan budaya, yaitu: Kawasan Cagar Budaya Kenali – Kembahang, meliputi Kecamatan Batu Brak dan Kecamatan Belalau
- 3) Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, yaitu Kawasan Agrominapolitan di Kecamatan Lumbok Seminung, dengan basis ekonomi adalah perikanan, ekowisata (KSPN Danau Ranau), dan PLTP danau Ranau.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

A. Tanah Longsor

Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan kawasan rawan bencana longsor. Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Kecamatan Gedung Surian yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor.

B. Banjir

Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (*gradien*) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor "bakat" atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi *surface run off* (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar.

C. Gempa Bumi

Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara regional terletak pada Zona Sumber Gempabumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang



terletak di sebelah barat wilayah Lampung Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempabumi. Analisis regional menunjukkan kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan episentrum.

Pola struktur di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarah tenggara-baratlaut dan timurlaut-baratdaya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempabumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan salahsatu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada sistem patahan terutama pada daerah

yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (*unconsolidated*), yang pada umumnya berumur Kuartar (Peta Seismotektonik Indonesia).

Gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan gempa dangkal (dengan hiposenter 0-90 kilometer) dengan kekuatan 5 dan 6 skala Richter. Sejarah terjadinya gempa bumi menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk wilayah gempabumi yang merusak (Wilayah /Samudera Indonesia). Pusat-pusat gempa berada pada arah barat dan barat daya wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Wilayah yang merupakan daerah resiko gempabumi di Kabupaten Lampung Barat yaitu:

- Daerah di sekitar zona patahan, seperti di sepanjang Sesar Semangko dari Teluk Karang brak sampai Liwa;
- Daerah pada sebaran litologi berupa aluvial dan batuan berumur Kuartar;
- Daerah pemukiman padat penduduk;
- Daerah dengan bangunan-bangunan permanen ataupun bangunan yang tidak tahan gempa.

Data kecamatan dan pekon/kelurahan rawan bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat

NO	Kecamatan	Ancaman Bencana					
		Gempa Bumi	Banjir	Tanah Longsor	Gunung Api	Kebakaran	Puting Beliu
1	Balik Bukit	100% 12	92% 11	100% 12	0	100% 12	100% 12
2	Batu Brak	100% 11	9% 1	100% 11	0	100% 11	100% 11
3	Belalau	100% 10	30% 3	100% 10	0	100% 10	100% 10
4	Batu Ketuis	100% 10	0% 0	100% 10	0	100% 10	100% 10
5	Sekincau	100% 5	0% 0	100% 5	0	100% 5	100% 5
6	Pagar Dewa	100% 10	0% 0	100% 10	0	100% 10	100% 10
7	Way Tenong	100% 9	0% 0	100% 9	0	100% 9	100% 9

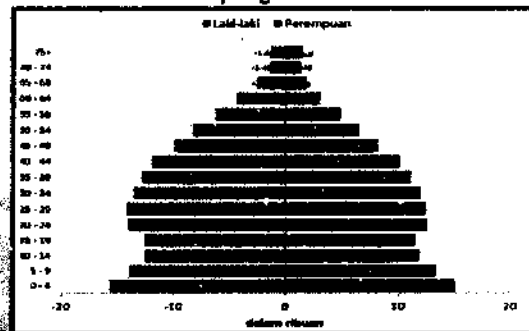
NO	Kecamatan	Ancaman Bencana					
		Gempa Bumi	Banjir	Tanah Longsor	Gunung Api	Kebakaran	Puting Beliung
8	Air Hitam	100%	0%	100%		100%	100%
		10	0	10	0	10	10
9	Sumber Jaya	100%	0%	100%		100%	100%
		6	0	6	0	6	6
10	Gedung Surian	100%	40%	100%		100%	100%
		5	2	5	0	5	5
11	Kebun Tebu	100%	0%	60%		100%	100%
		10	0	6	0	10	10
12	Sukau	100%	0%	100%		100%	100%
		10	0	10	0	10	10
13	Lombok Seminung	100%		100%		100%	100%
		11	0	11	0	11	11
14	Suoh	100%	100%	29%	100%	100%	100%
		7	7	2	7	7	7
15	Bandar Negeri Suoh	100%	30%	30%	100%	100%	100%
		10	3	3	10	10	10
PEKON/KELURAHAN		136	27	120	17	136	136
RAWAN BENCANA		100%	20%	88%	13%	100%	100%

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

2.1.4. Demografi

Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan, dengan jumlah Penduduk pada Tahun 2016 sebesar 295.689 jiwa (157.088 laki – laki dan 138.601 perempuan). Ditinjau dari tingkat usianya, penduduk Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh penduduk usia muda, yaitu berkisar antara 20 Tahun hingga 45 Tahun. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Barat masih timpang atau tidak merata antar wilayah. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kebun Tebu 1.436 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batu Brak yaitu 49,75 jiwa/km²

Gambar 2.7. Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016



Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Way Tenong yaitu 33.616 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lombok Seminung 6.699 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk dan



kepadatan penduduk per kecamatan disajikan pada Tabel di bawah ini.

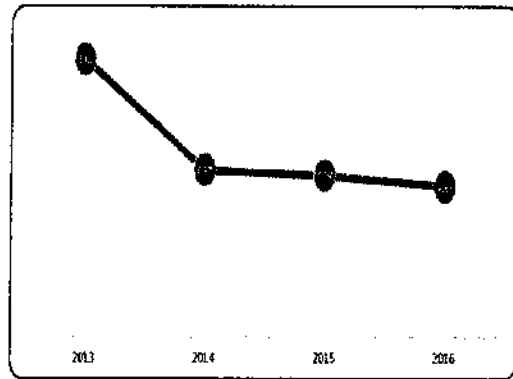
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
1. Balik Bukit		
2. Sukau	21,095	94,55
3. Lumbok Semining	16,599	89,06
4. Belalau	12,490	57,31
5. Sekincau	18,216	165,72
6. Suoh	18,202	159,1
7. Batubrak	19,012	49,75
8. Pagar Dewa	19,926	180,83
9. Batu Ketulis	14,929	143,96
10. Bandar Negeri Suoh	27,169	106,54
11. Sumber Jaya	23,789	121,76
12. Way Tenong	33,616	288,13
13. Gedung Surian	15,458	177,39
14. Kebun Tebu	20,943	1.436,42
15. Air Hitam	12,070	158,34
Lampung Barat	295,689	143,23

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Ditinjau dari perkembangannya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu lima Tahun terakhir cenderung menurun. Pada Tahun 2013 yang lalu, penduduk Kabupaten Lampung Barat tumbuh sebesar 1,62 persen, dan terus mengalami perlambatan hingga Tahun 2016 menjadi sebesar 0,88 persen. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2016

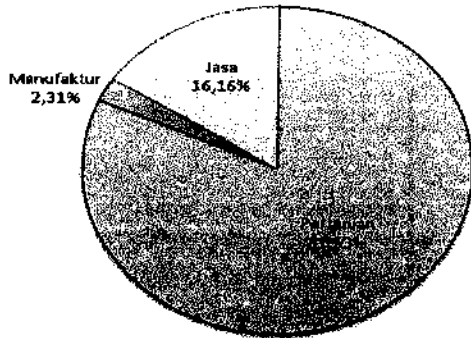


Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk itu sendiri, karena penduduk usia kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Hingga Tahun 2015 lebih dari 80 persen penduduk usia kerja (+ 15 Tahun) di Kabupaten Lampung Barat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan (122.855 jiwa). Bekerja di sektor industri sebanyak 3.485 jiwa (2,31 persen). Sedangkan yang melakukan pekerjaan disektor jasa sebanyak 24.352 jiwa (16,16 persen). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2012 adalah sebesar 84,20 persen, sebesar 78,38 persen pada Tahun 2013, sebesar 74,71 persen pada Tahun 2014, dan sebesar 74,06 persen pada Tahun 2015. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) pada Tahun 2012, terdapat diantaranya 84 orang yang termasuk dalam angkatan kerja dan dari 100 penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas), pada Tahun 2013 terdapat di antaranya 78 orang yang termasuk dalam angkatan kerja, pada Tahun 2014 terdapat 75 orang yang termasuk angkatan kerja. Selanjutnya pada Tahun 2015 terdapat 74 orang yang termasuk angkatan kerja.



Gambar 2.9. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016



Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

A.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kabupaten Lampung Barat berkembang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya nilai PDRB yang terbentuk setiap Tahunnya. Jika pada Tahun 2012 nilai tambah dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Barat membentuk aktivitas ekonomi sebesar Rp. 3,75 triliun, maka pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 5,64 triliun.

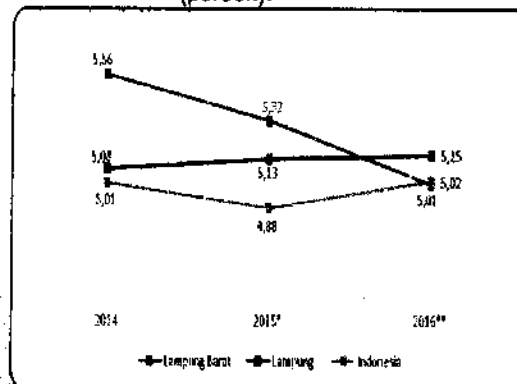
Tabel 2.8. PDRB Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016

Tahun	Manufaktur	Jasa	Lain-lain
2012	3.750.000.000	3.870.000.000	3.870.000.000
2013	4.156.375.800	3.677.316.360	7.020.000.000
2014	4.658.128.370	3.881.688.100	5.320.000.000
2015	5.127.309.980	4.088.443.370	5.320.000.000
2016	5.642.906.060	4.293.143.680	6.010.000.000

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Lampung Barat selama empat Tahun terakhir cukup tinggi yaitu 10,59% pada Tahun 2012 yaitu, terus naik hingga 12,07 % pada Tahun 2013, selanjutnya sedikit melambat hingga menjadi 10,07% pada Tahun 2014, dan 10,05% pada Tahun 2015. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2015 sedikit mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,32 persen. Hingga Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih cukup baik, yaitu diatas 5 persen tepatnya 5,32 persen.

Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Indonesia Tahun 2013-2016 (persen).



Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Indonesia, selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat berada diatas laju pertumbuhan ekonomi



Provinsi Lampung dan Indonesia. Hanya saja pada Tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sedikit berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Indonesia.

1) Struktur PDRB

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016 yang tercermin dari distribusi presentase PDRB menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi rata-rata diatas 50 persen dengan tren yang menurun pada setiap Tahunnya. Kategori ekonomi yang mampu memberikan aktivitas ekonomi terbesar kedua pada PDRB adalah kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda yaitu 11,46 persen, diikuti administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial sebesar 6,14 persen. Sebaliknya kategori ekonomi yang berperan terkecil pada pembentukan aktifitas ekonomi Kabupaten Lampung Barat adalah kategori pengadaan listrik dan gas yang kurang dari 0,01 persen. Kategori terkecil kedua yang berperan

dalam pembentukan aktifitas ekonomi Lampung Barat adalah kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,11 persen.

Pada kurun waktu 5 Tahun yaitu 2012 hingga 2016 terdapat perubahan aktifitas ekonomi, dimana kategori pertanian dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda secara perlahan menunjukkan penurunan aktifitas ekonominya dan bergeser secara perlahan pada aktifitas ekonomi kategori jasa. Pergeseran aktivitas ekonomi ini justru menunjukkan kemajuan aktifitas ekonomi yang baik karena merupakan ciri khas dari wilayah berkembang jika kategori ekonominya bergeser ke kategori non pertanian. Pergeseran ekonomi ini disebabkan antara lain karena kemajuan ekonomi serta perkembangan jumlah penduduk dari Tahun ke Tahun. Secara rinci struktur perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016 yang tercermin dari distribusi presentase PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Distribusi Presentase PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lampung Barat 2012 – 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,12	50,86	50,50	50,04	51,36
Pertambangan dan Pengalihan	1,93	1,94	2,13	2,43	2,37
Industri Pengolahan	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,11	0,11	0,10
Konstruksi	3,64	3,62	3,56	3,41	3,58
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,87	11,52	11,29	11,23	11,40
Transportasi dan Pergudangan	2,02	2,14	2,28	2,55	2,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,01	1,05	1,12	1,18	1,22
Informasi dan Komunikasi	2,52	2,52	2,44	2,44	2,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,06	2,08	1,98	1,92	1,94
Real Estate	4,41	4,40	4,54	4,23	4,48
Jasa Perusahaan	0,15	0,17	0,19	0,18	0,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,78	6,01	6,31	6,24	6,36
Jasa Pendidikan	3,96	4,14	4,18	4,19	4,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	1,30	1,33	1,31	1,39
Jasa lainnya	1,15	1,11	1,11	1,20	1,27

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017



A.2 PDRB Menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Lampung Barat menuju ke arah yang semakin baik seiring dengan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan

ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 281 745,03	3 557 306,58	3 829 449,84	4 228 493,02	4 473 329,58
2. Konsumsi LNPRT	70 933,95	80 813,35	93 384,07	101 154,05	116 116,13
3. Konsumsi Pemerintah	728 419,15	829 904,44	947 630,33	1 109 659,25	1 214 392,40
4. PMTB	1 302 250,41	1 421 980,30	1 532 943,70	1 683 351,14	1 979 665,32
5. Perubahan Inventori	35 980,90	108 166,45	24 698,55	18 044,77	32 498,04
6. Ekspor	1 520 005,98	1 903 864,47	2 136 601,50	2 254 040,23	2 479 295,65
7. Impor	3 181 085,15	3 745 659,79	3 906 579,04	4 267 432,49	4 652 391,05
Total PDRB	3 758 250,27	4 156 375,80	4 658 128,97	5 127 309,98	5 642 906,06

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Nilai PDRB Lampung Barat (adh Berlaku) selama periode tahun 2012 s.d 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2.11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 994 104,14	3 100 661,86	3 268 365,59	3 422 498,18	3 498 143,60
2. Konsumsi LNPRT	66 452,49	69 309,45	73 425,97	77 853,06	86 547,08
3. Konsumsi Pemerintah	637 750,67	675 263,68	701 342,56	774 513,75	813 868,76
4. PMTB	1 215 504,04	1 270 569,87	1 330 691,71	1 373 959,99	1 499 322,46
5. Perubahan Inventori	26 845,94	13 458,73	6 254,87	7 604,49	12 145,65
6. Ekspor	1 431 128,29	1 511 352,13	1 589 521,92	1 478 942,30	1 509 217,72
7. Impor	2 930 786,65	2 963 299,37	3 087 714,52	3 046 928,39	3 126 101,89
Total PDRB	3 440 998,92	3 677 316,36	3 881 888,10	4 088 443,37	4 293 143,38

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017



Selain dinilai atas dasar harga (ADH) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan

Tabel 2.12. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2012—2016

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Konsumsi Rumah Tangga	87,32	85,39	82,21	82,47	79,27
2. Konsumsi LN/WT	1,89	1,94	2,30	1,97	2,06
3. Konsumsi Pemerintah	19,38	19,97	28,34	21,54	21,52
4. PMTB	34,65	34,21	32,95	32,81	35,08
5. Persewaan Imponen	0,56	2,40	0,51	3,31	0,54
6. Ekspor	40,41	45,81	45,87	43,96	43,84
7. Impor	34,64	50,12	63,87	63,21	62,65
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2012–2016, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 83 s.d 91 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, demikian halnya dengan ekspor mempunyai peran relative besar, karena sekitar 40 s.d 46 persen produk Lampung Barat mampu diekspor keluar Kabupaten Lampung Barat. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 32 s.d 35 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 19-22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2012-2016 perdagangan antar daerah di luar Kabupaten Lampung Barat yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Kecenderungan perdagangan antar daerah di

perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2012–2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Lampung Barat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

luar Kabupaten Lampung Barat dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi "defisit".

Selanjutnya, nampak bahwa konsumsi Rumah Tangga memberi kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Barat tahun 2016 yaitu sebesar 79,27 persen. Kemudian urutan kedua ditempati oleh ekspor yang memberikan kontribusi sebesar 43,94 persen. PMTB menempati urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 35,08 persen.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat tahun 2016 mencapai 5,01 persen. Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai 5,32 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan Lampung Barat negative karena mulai tahun 2012 perhitungan PDRB Lampung Barat dipecah menjadi Lampung Barat dan pesisir Barat.

B. Inflasi

Tabel 2.13. Inflasi Lampung Barat Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Inflasi	4,94%	4,84%	2,99%

Sumber : BPS Lampung Barat

Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi, dianggap inflasi jika terjadi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi. Dalam beberapa penggunaan inflasi digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang, yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Atau ada juga yang

mengartikan inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa.

Inflasi di Lampung Barat cenderung baik, dalam 3 tahun terakhir tingkat inflasi Lampung Barat berada di bawah 5%. Pada tahun 2015 inflasi Lampung Barat sebesar 4,94%, membaik pada tahun 2016 menjadi 4,84% dan semakin membaik pada tahun 2017 menjadi 2,99%.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

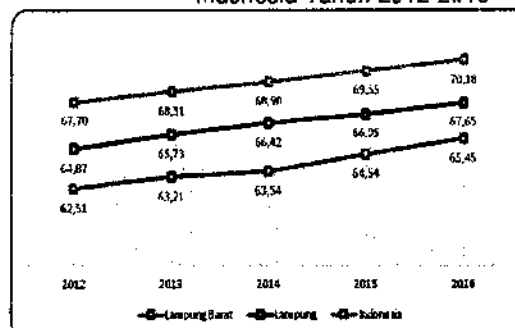
Persoalan mengenai capaian pembangunan manusia dewasa ini telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Konsep IPM mulai digunakan UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pembangunan manusia di suatu negara/daerah dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi ini direpresentasikan oleh indikator. Untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan direpresentasikan melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan untuk dimensi standar hidup layak direpresentasikan melalui pengeluaran perkapita.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2013-2016

terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 IPM Kabupaten Lampung Barat tercatat sebesar 62,51, Tahun 2013 sebesar 63,21, Tahun 2014 sebesar 63,54, Tahun 2015 sebesar 64,54 dan Tahun 2016 sebesar 65,45.

Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Lampung, 2017

Dilihat dari gambar, meskipun terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung dan IPM Indonesia, IPM Kabupaten Lampung Barat masih berada dibawah IPM Provinsi Lampung dan IPM Indonesia.

Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016

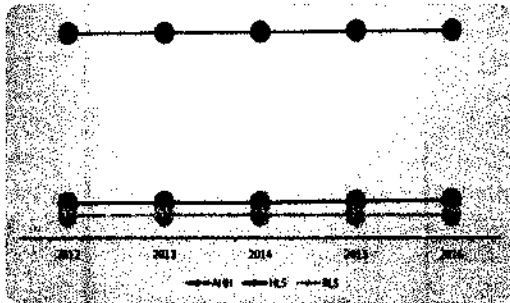


Sumber: BPS Lampung, 2017

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Lampung Barat tersebut berada dalam kategori/status sedang. Hanya terdapat dua daerah dengan kategori IPM yang tinggi, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Jika ditinjau pada setiap komponen pembentuknya, baik itu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selalu mengalami peningkatan pada setiap Tahunnya. Perkembangan AHH, HLS, dan RLS Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu Tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.13. Perkembangan AHH, HLS, dan RLS Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Angka Kematian Ibu dan Bayi

Tabel 2.14. Angka Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
AKI (102 PER 100.000 KH)	<102	<102	<102	<102	<102
KASUS KEMATIAN IBU	13 kasus	6 kasus	2 kasus	6 kasus	3 kasus
AKB (PER 1000)	487	261	200	100	71000
KASUS KEMATIAN BAYI	25 kasus	11 kasus	24 kasus	27 kasus	7 kasus

Angka kematian Ibu selama tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan, tetapi hanya pada tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 AKI sebanyak 13 kasus, lalu turun pada tahun 2013 menjadi 6 kasus dan terus mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 2 kasus. AKI mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 6 kasus tetapi kembali turun pada tahun 2016 menjadi 3 kasus.

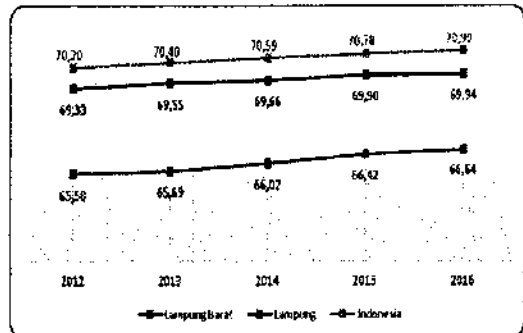
Angka kematian Bayi selama tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 AKB sebanyak 25 kasus, lalu turun pada tahun 2013 menjadi 11 kasus lalu meningkat kembali pada

tahun 2014 menjadi 24 kasus. AKB mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 27 kasus lalu turun kembali pada tahun 2016 menjadi hanya 7 kasus.

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Selama periode 2012 hingga 2016, Kabupaten Lampung Barat telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir. Pada Tahun 2012, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Lampung Barat hanya sebesar 65,58 Tahun, dan pada Tahun 2016 telah mencapai 66,64 Tahun.

Gambar 2.14. Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat



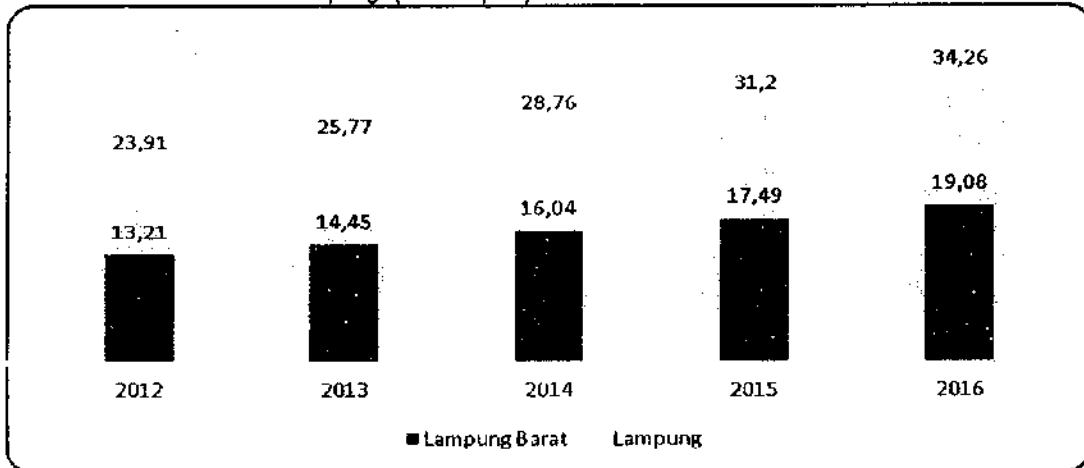
Sumber: BPS Lampung, 2017

Meskipun terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Angka Harapan Hidup Indonesia, Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Barat masih berada dibawah Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Angka Harapan Hidup Indonesia.

PDRB Perkapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.15. Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung (Juta Rupiah)



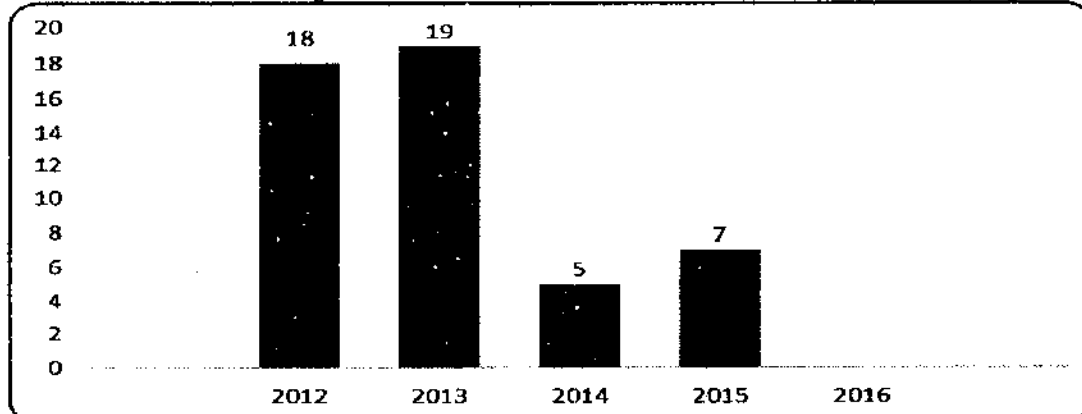
Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 selalu mengalami kenaikan.

B. Balita Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Lampung Barat mengalami fluktuasi dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016. Kinerja pemerintah dalam mengatasi kasus balita gizi buruk menunjukkan hasil yang semakin baik. Tahun 2012 tercatat 18 kasus, Tahun 2013 meningkat menjadi 19 kasus, Tahun 2014 turun menjadi 5 kasus, Tahun 2015 naik menjadi 7 kasus dan pada Tahun 2016 tidak ada kasus gizi buruk atau 0 kasus. Kasus gizi buruk di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 hingga Tahun 2016 di sajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2.16. Perkembangan Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2012-2016

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan gizi masyarakat tidak hanya diukur berdasarkan kasus gizi buruk yang ditangani, namun juga dipengaruhi oleh capaian penanganan kasus *stunting* (pendek), *wasting* (kurus) dan kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang). Pada tahun 2016, kasus balita kurus (*wasting*)

sebanyak 138 balita dan menurun menjadi 48 kasus pada tahun 2017. Kasus balita *underweight* tahun 2015 sebanyak 134 kasus dan terus mengalami penurunan di tahun 2016 sebanyak 124 kasus dan 107 kasus di tahun 2017. Persentase prevalensi *stunting* berdasarkan data PSG Dinas Kesehatan

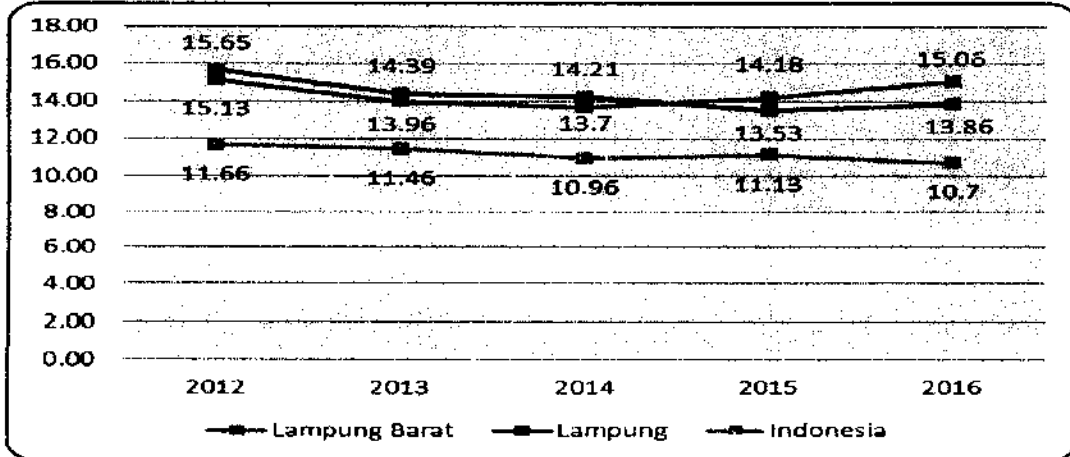


Provinsi Lampung Tahun 2017, pada tahun 2016 sebesar 33.2% dan meningkat menjadi 37.3% di tahun 2017.

C. Kemiskinan

Persentase penduduk Kabupaten Lampung Barat yang berada di bawah garis kemiskinan dari Tahun 2012 hingga 2016 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Perkembangan secara rinci dijelaskan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2.17. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012-2016

Persentase penduduk miskin di Lampung Barat berfluktuasi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 meskipun masih berada di atas persentase kemiskinan di Provinsi Lampung dan persentase secara nasional namun secara umum dapat dikatakan bahwa persentase penduduk miskin di Lampung Barat mengalami penurunan yaitu Tahun 2012 sebesar 15,13 persen dan menjadi 15,06 persen pada Tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015, terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di tahun 2016. Perhitungan kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu pengeluaran masyarakat dari makanan dan non makanan yang menjadi dasar untuk menghitung garis kemiskinan. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan

persentase penduduk miskin, hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat yang rendah dan pengaruh tingkat inflasi, di mana harga-harga barang mengalami kenaikan sehingga jumlah yang dikonsumsi penduduk juga menjadi sedikit. Selain itu, karakteristik penduduk Lampung Barat masih didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor pertanian (baik berusaha, pekerja bebas/serabutan, pekerja tidak dibayar). Usaha pertanian membutuhkan proses dan waktu, belum lagi jika pengaruh cuaca dan musim yang buruk akan memengaruhi hasil pertaniannya. Sehingga ketika harga-harga naik, tentu akan langsung terasa oleh petani yang berdampak pada rendahnya kemampuan daya beli.



Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin				Total
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	
1.	Balik Bukit	5.681	4.527	1.944	546	12.698
2.	Sukau	6.439	3.985	1.265	235	11.924
3.	Lumbok Seminung	2.588	1.433	401	52	4.474
4.	Batu Brak	3.325	2.724	1.188	251	7.488
5.	Belalau	4.049	3.268	1.618	225	9.160
6.	Batu Ketulis	4.393	3.446	909	120	8.868
7.	Bandar Negeri Suoh	9.190	5.384	1.313	155	16.042
8.	Suoh	2.874	3.272	859	72	7.077
9.	Sekincau	3.206	2.966	1.047	183	7.402
10.	Way Tenong	2.784	1.774	493	90	5.141
11.	Pagar Dewa	2.875	2.155	651	97	5.778
12.	Air Hitam	1.648	1.341	394	39	3.422
13.	Gedung Surian	2.277	2.560	1.166	267	6.270
14.	Kebun Tebu	3.149	2.527	897	195	6.768
15.	Sumberjaya	3.666	2.760	951	176	7.553
		JUMLAH				120.065

Sumber: BDT 2015, TNP2K

Tabel 2.16. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

No.	Tahun	P1	P2
		(Tingkat Kedalaman Kemiskinan)	(Tingkat Keparahan Kemiskinan)
1	2012	2,41	0,35
2	2013	1,76	0,46
3	2014	1,82	0,36
4	2015	2,37	0,56
5	2016	2,89	0,78

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesejangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin. Nilai P1 Lampung Barat menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, P1 yang semakin tinggi menggambarkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) Lampung Barat juga menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, yang berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin meningkat.

2.2.3. Fokus Olahraga

Tabel 2.17. Perkembangan Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Lampung Barat

NO	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	0,44	0,44	0,73	0,89	
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0	0	0,03	0,03	0,03

Sumber : Dinas Porpariwisata, 2017



Tabel 2.18. Perkembangan Olahraga Tahun 2017 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	Jumlah Olahraga	Jumlah Peserta
1	Lumbok	0	0
2	Seminung		
3	Sukau	0,38	0
4	Balik Bukit	7,26	0,24
5	Batu Brak	1,26	0
6	Suoh	1,07	0
7	Bandar Negeri Suoh	0	0
8	Belalau	0	0
9	Batu Ketulis	0	0
10	Sekincau	2,58	0
11	Way Tenong	2,32	0
12	Sumberjaya	2,80	0
13	Kebun Tebu	0,47	0
14	Gedung Surian	0,57	0
15	Air Hitam	1,59	0
16	Pagar Dewa	0	0

Sumber : Dinas Porapariwisata, 2018

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pelayanan dasar

1) Pendidikan

a) Rasio Kelas Terhadap Siswa

Rasio kelas terhadap siswa di Kabupaten Lampung Barat pada jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK selama Tahun 2015-2017 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2015 rasio kelas terhadap siswa pada jenjang pendidikan SD adalah sebesar 32, yang berarti bahwa setiap kelas menampung siswa sebanyak 32 orang. Pada Tahun 2017 rasio kelas terhadap siswa pada jenjang pendidikan SD mengalami perbaikan, yaitu menjadi sebesar 20, yang berarti bahwa setiap kelas menampung siswa sebanyak 20 orang. Pada jenjang pendidikan SMP rasio kelas terhadap siswa selama Tahun 2012-2017 justru mengalami peningkatan, hal ini berarti peningkatan jumlah siswa tidak disertai dengan peningkatan jumlah ruang kelas. Pada

jenjang pendidikan SMA/SMK, rasio kelas terhadap siswa sempat mengalami peningkatan pada Tahun 2016, namun kembali menurun pada Tahun 2017.

Tabel 2.19. Rasio Kelas Terhadap Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2017

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
SD	32	20	20
SMP	35	26	27
SMA	28	30	27
SMK	25	29	26

BPS Lampung Barat, 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2017/2018 Bab V bagian kesatu pasal 24, menyebutkan bahwa : Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Sehingga jika dibandingkan situasi rasio kelas terhadap siswa di Kabupaten Lampung Barat masih berada di kondisi ideal, namun yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan sarana pendukungnya.

2) Kesehatan

a) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu target utama pemerintah dari tingkat nasional hingga tingkat daerah kabupaten. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, maka kualitas pelayanan kesehatan merupakan faktor utama yang harus selalu diprioritaskan. Sementara itu



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

baik/buruknya kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah tersebut. Hingga Tahun 2016 Kabupaten Lampung Barat

memiliki 6 Puskesmas Rawat Inap, 9 Puskesmas Non Rawat Inap, 3 Puskesmas PONEB, dan 6 Klinik Swasta.

Tabel 2.20. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Puskesmas Rawat Inap	6	1	3
2	Puskesmas Non Rawat Inap	9	-	4
3	Puskesmas PONEB	3	-	-
4	Klinik Swasta	6	-	-

Dinas Kesehatan Lampung Barat, 2017

No	Kecamatan	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas PONEB	Klinik Swasta
1	Air Hitam	1	1	1	4
2	Balik Bukit	1	4	2	5
3	Bandar Negeri Suoh	1	3	1	2
4	Batu Brak	1	3	1	4
5	Batu Ketulis	1	2	1	9
6	Belalau	1	2	1	4
7	Gedung Surian	1	3	1	3
8	Kebun Tebu	1	1	-	6
9	Lumbok Seminung	1	1	2	3
10	Pagar Dewa	1	4	2	5
11	Sekincau	1	3	3	1
12	Sukau	1	3	1	4
13	Sumber Jaya	1	1	1	4
14	Suoh	1	3	1	3
15	Way Tenong	1	4	2	1
	Jumlah	15	38	20	58

No	Kecamatan	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas PONEB	Klinik Swasta
1	Liwa	2	1	-	24
2	Buay Nyerupa	1	-	-	12
3	Lombok	1	-	-	9
4	Kenali	1	-	-	10
5	Sekincau	1	-	-	20
6	Srimulyo	1	1	-	6

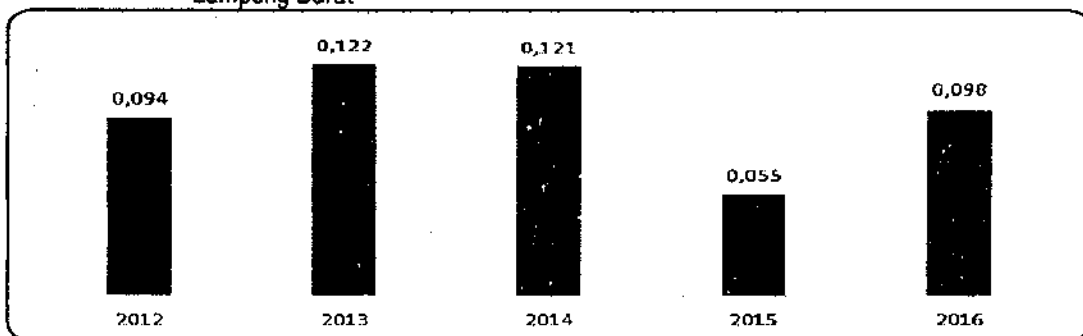


Batu Brak	1	-	-	7	
Sumberjaya	1	-	-	16	
Fajar Bulan	2	-	-	16	
Bungin	1	-	-	12	
Bandar Negeri Suoh	1	-	-	33	
Pagar Dewa	1	-	-	20	
Kabun Tabu	1	-	-	33	
Air Hitam	1	-	-	7	
Batu Katalis	2	-	-	4	
RSU Alimuddin Umar	8	1	7	98	
Dinas Kesehatan					
	26	3	7	327	

b) **Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk**
 Hingga Tahun 2017 Kabupaten Lampung Barat telah memiliki dua unit rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah "Alimuddin Umar" dengan tipe C dan Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda". Hingga Tahun 2017 RSUD Alimuddin Umar memiliki 130 tempat tidur dengan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka penggunaan tempat tidur sebesar 29,27 persen dan Hingga Tahun 2017 Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda" memiliki 47 tempat tidur dengan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka penggunaan tempat tidur sebesar 54 persen.

c) **Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**
 Rasio dokter persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah dokter per seribu penduduk. Jumlah dokter di Kabupaten Lampung Barat mengalami perkembangan yang tidak konsisten sehingga rasio dokter per satuan penduduk berfluktuasi dalam kurun waktu 2012 hingga 2016. Pada Tahun 2012 rasionya tercatat 0,094, Tahun 2013 naik menjadi 0,122, pada Tahun 2014 turun menjadi 0,121, Tahun 2015 turun kembali menjadi 0,055, dan Tahun 2016 naik menjadi 0,098.

Gambar 2.18. Perkembangan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016, Kabupaten Lampung Barat

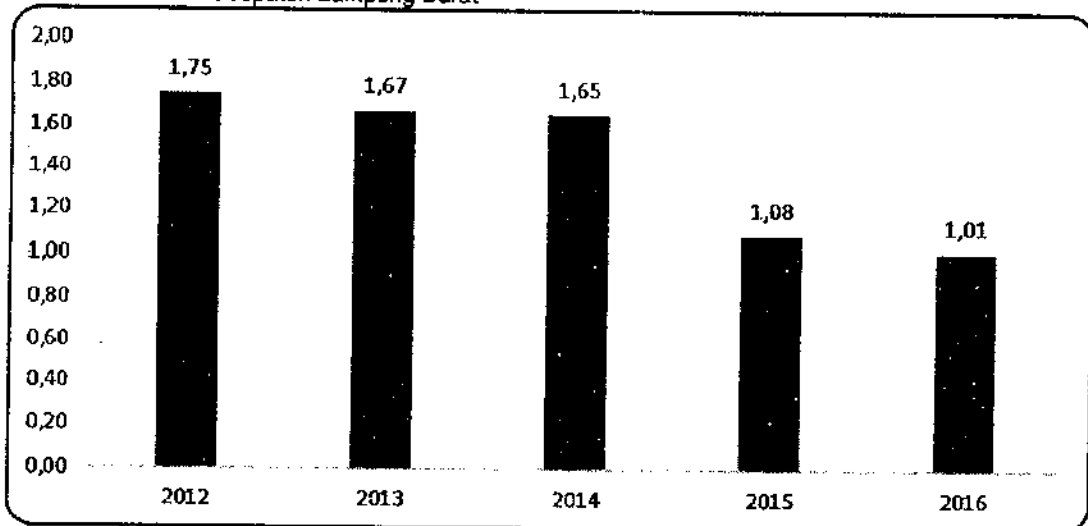


BPS Lampung Barat, 2017

d) **Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

Rasio tenaga medis adalah jumlah perbandingan antara jumlah tenaga medis terhadap 1000 penduduk. Rasio ini mengukur tingkat ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) yang melayani kelompok masyarakat.

Gambar 2.19. Perkembangan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat



Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa rasio tenaga medis per satuan penduduk Tahun 2012 sampai dengan 2016 terus menurun. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penambahan tenaga medis sehingga rasionya terus menurun. Tercatat rasio tenaga medis per satuan penduduk tertinggi terjadi di Tahun 2012 sebesar 1,75 dan terendah terjadi di Tahun 2016 sebesar 1,01.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Pekerjaan Umum

1) Jaringan jalan

Pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu isu yang sangat strategis di Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini. Hingga bulan Maret Tahun 2017, panjang jaringan jalan kabupaten adalah sebesar 724 Km. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (43,57%) telah berpermukaan aspal/beton, tetapi yang berpermukaan tanah juga masih tinggi yaitu sebesar 33,58 persen. Panjang jalan di Kabupaten Lampung Barat dirinci menurut jenis permukaan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.21. Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Barat Dirinci Menurut Jenis Permukaan Tahun 2017 (Maret)

Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Persentase (%)
Aspal/Beton	315,43	43,57
Tanah	75,98	10,49
Lain-lain	89,47	12,36
Jumlah	243,12	33,58
Total	724	100

Sumber: Bappeda Lampung Barat, 2017

Jika ditinjau menurut kondisinya, sebagian besar jalan di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Maret 2017, jalan dengan kondisi rusak berat masih cukup tinggi yaitu 36,73%. Panjang jalan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 dirinci menurut kondisinya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.22. Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Barat Dirinci Menurut Kondisinya Tahun 2017 (Maret)

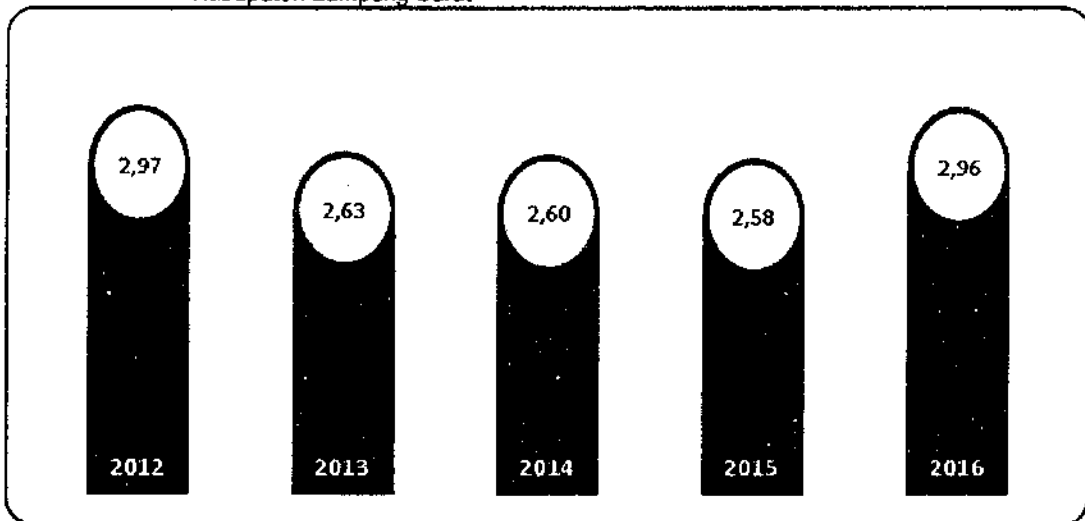
	317,58	43,87
	53,14	7,34
	87,35	12,06
	265,93	36,73
	724	100

Sumber: Bappeda Lampung Barat, 2017

2) Tempat ibadah

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan/peribadatan menurut ajaran masing-masing. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat.

Gambar 2.20. Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016, Kabupaten Lampung Barat



Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Dilihat dari gambar di atas, Perkembangan rasio tempat ibadah selama periode Tahun 2012-2016, tempat ibadah masih sekitar 2 tempat ibadah per seribu penduduk.

3) Jaringan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Daerah Irigasi yang terdapat di kabupaten Lampung Barat adalah 118 dengan luas baku 11.447 Ha.

Berdasarkan hasil data tinjauan di Lapangan oleh Dnas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat luas Daerah irigasi tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23. Jumlah dan Luas Daerah Irigasi berdasarkan wilayah kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah DI	Luas Baku DI (Ha)	Luas Fungsi DI (ha)
1	Sumber Jaya	12	842,92	357,00
2	Kebun Tebu	16	1.466,28	617,00
3	Gedung sunan	15	1.066,31	467,00
4	Air Hitam	1	154,00	42,00
5	Way Tenong	20	1.315,89	738,00



No	Kecamatan	Jumlah DI	Luas Baku DI (Ha)	Luas Fungsi DI (ha)
6	Sekincau			
7	Pagar Dewa	2	92,13	87,00
8	Bandar Negeri Suoh	6	1.434,00	609,00
9	Suoh	13	2.572,69	892,00
10	Batu Ketulis	1	7,00	6,00
11	Belalau	3	292,00	68,00
12	Batu Brak	2	74,00	30,00
13	Balik Bukit	5	219,00	92,00
14	Sukau	14	1.414,00	905,40
15	Lumbek Semingung	8	492,29	283,00
Total		118	11.442,51	5.193,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Lampung Barat, 2017

Berdasarkan Kondisi fisik infrastruktur Irigasi Tahun 2016 4.684,18 Ha (40,94%), dalam kondisi baik, 5.080,82 Ha (44,40%) Kondisi Sedang dan 1.677,51 Ha (14,66%) dalam kondisi rusak dengan total Indeks Pertanian (IP) sebesar 114,98%. Dilihat dari persentase luas fungsi kurang dari 50%, hal ini menunjukkan potensi pengembangan sangat besar, terdapat kendala yang dihadapi untuk menambah luas fungsi DI antara lain :

- Sebagian luasan Daerah Irigasi merupakan lahan perkebunan produktif
- Sebagian luasan Daerah irigasi telah beralih fungsi menjadi permukiman
- Ketersediaan air irigasi
- Kondisi Lahan berbukit dengan kondisi tanah yang labil.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan merupakan suatu upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia dan sekaligus untuk meningkatkan mutu kehidupan lingkungan, memberikan arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan, dan pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, bahwa bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat, karenanya penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Penataan Kawasan Kumuh masuk dalam tujuan global kesebelas, yaitu: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan, dengan sasaran global hingga tahun 2030 adalah menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

Kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/341/KPTS/II.06/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Barat seluas 39,3 Ha, yang tersebar di 13 lokasi pada 9 Kecamatan.

Tabel 2.24. Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Barat

Kecamatan	Luas (Ha)	Kecamatan	Kecamatan	Koordinat		No
				Lintang	Bujur	
Pasar Liwa	9,6	Pasar Liwa	BALIK BUKIT	5° 02' 16,94" LS	104° 04' 54,90" BT	1
Pajar Bulan	5,3	Pajar Bulan	WAY TENONG	5° 02' 30,06" LS	104° 24' 35,17" BT	2
Kagungan	0,3	Kagungan	L. SEMINUNG	4° 56' 09,43" LS	103° 55' 14,60" BT	3
Sehingau	0,9	Sehingau	SEKINGAU	5° 03' 27,02" LS	104° 16' 32,04" BT	4
Tugu Ratu	1,5	Tugu Ratu	SUOH	5° 18' 47,00" LS	104° 19' 19,00" BT	5
Panlao	0,9	Pasar Liwa	BALIK BUKIT	5° 00' 50,54" LS	104° 04' 22,44" BT	6
Pampangan	1,6	Pampangan	SEKINGAU	5° 00' 16,32" LS	104° 17' 32,58" BT	7
Giham Sukaraju	8,8	Giham Sukaraju	SEKINGAU	5° 01' 59,22" LS	104° 18' 19,60" BT	8
Bedudu	3,2	Bedudu	BELALAU	5° 01' 07,50" LS	104° 11' 29,58" BT	9
Utas	4,6	Utas	BALIKETULIS	4° 53' 23,58" LS	104° 12' 32,12" BT	10
Basungan	0,8	Basungan	PAGAR DEWA	4° 57' 01,32" LS	104° 23' 46,45" BT	11
Negeri Jaya	1,1	Negeri Jaya	BNS	5° 14' 34,10" LS	104° 17' 29,00" BT	12
Pagar Dewa	0,4	Pagar Dewa	PAGAR DEWA	4° 57' 40,10" LS	104° 21' 06,10" BT	13
TOTAL (HA)	39,3					

Sumber : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/341/KPTS/II.06/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Barat.

a) Rasio Rumah Layak Huni

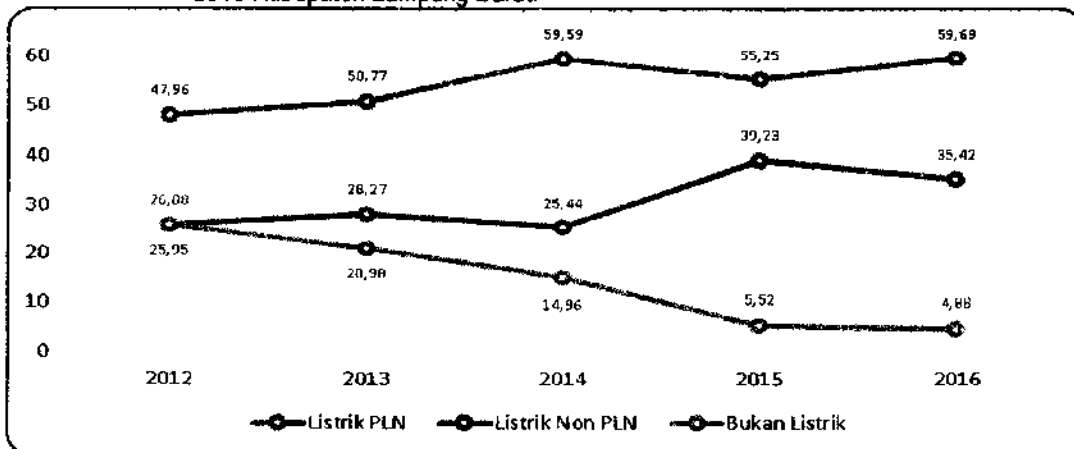
Kondisi perumahan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 terdapat 8,91 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m². Jumlah rumah tangga yang memiliki atap dari asbes dan seng sebesar 57,83%, hal ini dikarenakan Lampung Barat merupakan daerah rawan bencana gempa bumi. Demikian juga dengan jumlah rumah yang berdinding bukan tembok sebesar 67,23%.

b) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Persentase ini merupakan salah satu ukuran untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dari sisi perumahan. Persentase rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat yang menggunakan listrik dalam kurun waktu 2012-2016 disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.21. Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2017



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik cenderung meningkat dalam kurun waktu 2012-2016 dengan penurunan persentase di Tahun 2015. Di sisi lain, persentase rumah tangga yang tidak menggunakan listrik terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012-2016.

5) Sosial

Upaya penanganan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting yang menjadi Tabel.2.25. Data PMKS dan PMKS Yang Sudah Ditangani di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 - 2017

	Jumlah PMKS	PMKS Ditangani	Jumlah PMKS	PMKS Ditangani
Anak Balita Terancam (ABT)	97	27	99	63
Anak yang berhadapan dengan hukum	2	2	4	4
Anak Jalanan				
Anak dengan Kedisabilitas-an (ADK)	86	86	122	122
Anak yang memerlukan perlindungan khusus				
Lansia ultra lansia	601		437	
Penyandang disabilitas	464	86	412	412
Tuna Sosial	3	3		
Gelandangan	-	-	5	5
Perempuan			3	3
Pemulung	33	33	30	30
Kelompok Masyarakat				
Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	2		11	
Orang dengan HIV/AIDS (OHA)				
Korban			4	4

prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Lampung Barat. Langkah yang telah dilaksanakan antara lain yaitu dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dengan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Barat.

	Jumlah PMKS	PMKS Ditangani	Jumlah PMKS	PMKS Ditangani
penyalahgunaan NAPZA				
Korban Kekerasan	4	4	3	3
Korban tindak kekerasan				
Korban bencana alam	32	32	31	31
Korban bencana lainnya	16	16	4	
Perempuan rawan sosial ekonomi	596	596	646	646
Keluarga bermasalah sosial psikologis			32	32
Komunitas rentan				

Tabel di atas menunjukkan PMKS di Lampung Barat yang dikelompokkan menjadi 26 (dua puluh enam) jenis PMKS, belum semua jenis PMKS dapat telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

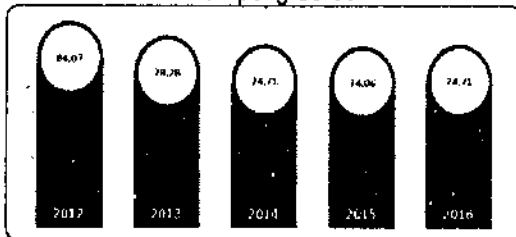
B. Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. TPAK Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tercatat Tahun 2012 TPAK sebesar 84,0 persen, Tahun 2013, sebesar 78,28 persen, Tahun 2014 sebesar 74,71 Tahun 2015 sebesar 74,06, dan Tahun 2016 sebesar 74,71. Rata-rata TPAK Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2012-2016 adalah 77,78 persen. Angka tersebut berarti dari 100 penduduk Kabupaten Lampung Barat usia 15 Tahun keatas, sebanyak 77 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada kurun waktu 2012-2016. Secara rinci perkembangan TPAK Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016 disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 2.22. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2017

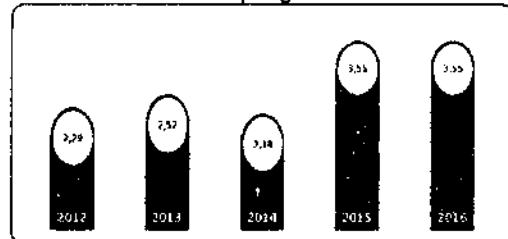
b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tercatat Tahun 2012 TPT sebesar 2,29 persen, Tahun 2013, sebesar 2,52 persen, Tahun 2014 sebesar 2,18 persen, Tahun 2015 sebesar 3,55 persen, dan Tahun 2016 sebesar 3,55 persen. Rata-rata TPT Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2012-2016 adalah 3,52 persen. Angka tersebut berarti dari 100

penduduk Kabupaten Lampung Barat usia 15 Tahun ke atas pada kurun waktu 2012-2016 yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 3 orang merupakan pengangguran. Secara rinci perkembangan TPAK Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016 disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.23. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2017

2) Koperasi

Pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 73 koperasi antara meliputi : Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pertanian, Koperasi Perkebunan, Koperasi Perikanan, Koperasi Peternakan, Koperasi Kehutanan, Koperasi Pertambangan, Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Kerajinan Rakyat, Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi ABRI/POLRI, Koperasi Karyawan, Koperasi Veteran, Koperasi Pemuda, koperasi Wanita, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi lainnya.

Tabel 2.26. Data Koperasi Tahun 2017

Uraian	2017
Jumlah Koperasi (unit)	73
Jumlah Anggota (orang)	6.716
Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	24

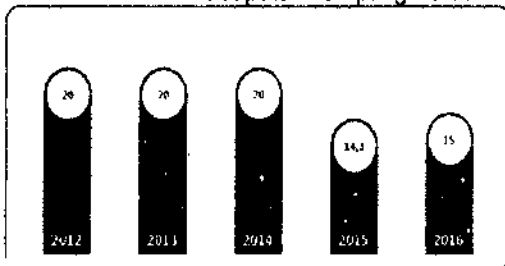
3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Pemberdayaan Perempuan

Rasio ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan dan keadilan gender di bidang pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik, juga masih sangat rendah, terutama keterlibatan perempuan di dalam proses pengambilan

keputusan. Rasio ini mengukur proporsi keterlibatan kaum perempuan di lembaga pemerintahan sebagai cerminan dari tingkat ketimpangan gender, baik yang disebabkan oleh adanya kebijakan diskriminatif, maupun yang dihasilkan dari budaya masyarakat. Pada Tahun 2016, rasio perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebesar 33 persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tahun 2016 Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 15 persen.

Gambar 2.24. Perkembangan Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



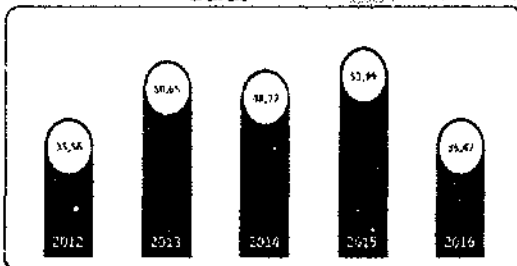
Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

4) Lingkungan Hidup

a) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih

Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih menggambarkan akses penduduk Kabupaten Lampung Barat terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air bersih menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih menunjukkan semakin baik nya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Gambar 2.25. Perkembangan Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat



Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Berdasarkan gambar di atas, Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih mengalami perkembangan yang tidak konsisten. Dimana rata-rata Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih selama kurun waktu 2012-2016 sebesar 44,78, dengan persentase tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 53,99 persen dan persentase terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 35,47 persen.

b) Persentase Penanganan Sampah

Instansi pengelola persampahan di Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Lampung Barat di mana untuk teknis operasional pengumpulan/ koleksinya dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan Tingkat pelayanan pengelolaan persampahan saat ini mencapai 45 %, dimana total sampah yang terangkut mencapai 32 m³/hari dari total timbulan sampah yang mencapai 70 m³/hari.

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hingga Tahun 2016 sebanyak 13,39 persen penduduk berusia 0-17 Tahun yang tidak memiliki Akta Kelahiran, sedangkan sisanya memiliki meskipun tidak semua dapat menunjukkan Akta Kelahiran yang dimilikinya. Sementara itu, hampir seluruh penduduk usia lima Tahun keatas di Kabupaten Lampung Barat memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

6) Pembangunan Desa

Pembangunan perdesaan merupakan salah satu fokus utama pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat saat ini, hal tersebut mengingat hampir seluruh kawasan di Kabupaten Lampung Barat adalah perdesaan. Indikator utama keberhasilan pembangunan desa yang digunakan pada saat ini adalah Indeks Kemajuan Desa (IKD). IKD disusun berdasarkan penilaian pada 5 (lima) aspek yaitu aspek prasarana dasar, aspek sarana, aspek sosial ekonomi masyarakat, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan. Dari hasil perhitungan 5 aspek di atas yang terdiri dari 29 variabel, maka hasil perhitungan IKD untuk masing-masing kecamatan adalah seperti tabel di bawah ini :



Tabel 2.27. Jumlah Desa/Pekon Tertinggal Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 dan 2018

NO.	KECAMATAN	2015	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Balik Bukit	-	-
2.	Balau	3	2
3.	Bandar Negeri Suoh	1	2
4.	Batu Brak	1	2
5.	Sukau	-	-
6.	Sumber Jaya	-	-
7.	Way Tenong	-	-
8.	Gedung Surolo	-	-
9.	Kebun Tebu	-	-
10.	Air Hitam	4	4
11.	Pagar Dewa	2	2
12.	Batu Ketulis	3	3
13.	Kebun Negeri Suoh	2	2
14.	Lumbok Seminung	10	4
15.	JUMLAH	28	19

Sumber : Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/301/KPTS/III.02/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Indeks Kemajuan Desa Kabupaten Lampung Barat

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Sektor pertanian (dalam hal ini tanaman pangan dan hortikultura) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan di kabupaten Lampung Barat dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2016 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan menyumbang 53.40% kepada PDRB Lampung Barat. Selain untuk mendukung perekonomian daerah, sektor pertanian khususnya tanaman pangan mempunyai tugas utama menjamin ketersediaan pangan khususnya beras. Menjamin ketersediaan pangan yang cukup di kabupaten Lampung Barat akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Pelaksanaan pembangunan pertanian di Lampung Barat tidak terlepas dari ketersediaan lahan pertanian sebagai sarana pengembangan pertanian. Keragaan lahan di Kabupaten Lampung Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28. Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Lampung Barat (Hektar) Tahun 2017

Kecamatan	Penggunaan Lahan	
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah
(1)	(2)	(3)
040 Balik Bukit	713	16.012
041 Sukau	1.780	7.696
042 Lumbok Seminung	817	2.537
050 Balau	490	23.033
051 Sekincau	70	7.322
052 Suoh	2.365	23.730
053 Batu Brak	416	10.228
054 Pagar Dewa	276	15.392
055 Batu Ketulis	187	20.249
055 Bandar Negeri Suoh	3.635	3.697
060 Sumber Jaya	472	3.113
061 Way Tenong	682	11.411
052 Gedung Surolo	459	5.374
063 Kebun Tebu	768	14.797
064 Air Hitam	313	5.075
JUMLAH	13.443	169.665

* Survey Pertanian (SP) Lahan Tahun 2017

Potensi penggunaan lahan di kabupaten Lampung Barat yang merupakan wilayah budidaya seluas 183.108 hektar dengan rincian lahan sawah seluas 13.443 hektar dan pertanian bukan sawah seluas 169.665 hektar. Berdasarkan data Survey Pertanian (SP) tahun 2017 lahan sawah yang beririgasi seluas 11.119 hektar dan tadah hujan seluas 2.324 hektar. Potensi pertanaman yang ada di lahan sawah adalah padi. Untuk peningkatan Indeks Pertanaman dan perbaikan pola tanam dalam rangka memutuskan mata rantai hama dan penyakit dapat dilakukan pertanaman palawija seperti jagung dan kedelai. Sentra pertanaman padi di kabupaten Lampung Barat adalah kecamatan bandar Negeri Suoh, Suoh, Sukau, Lumbok Seminung, Kebun Tebu dan Balik Bukit.

Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari lahan untuk Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat, Padang Penggembalaan, Hutan Negara dan Lainnya (tambak, kolam dan empang). Potensi lahan pertanian bukan sawah yang dapat dikembangkan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura adalah lahan tegal/kebun. Komoditas yang sebagian besar dikembangkan adalah hortikultura baik sayuran dan buah-buahan. Sayuran yang dibudidayakan sebagian petani di Lampung Barat antara lain Kubis, Wortel, Cabe Merah Besar, Cabai Rawit, Tomat, Sawi dan Labu Siam. Sentra sayuran di Lampung Barat adalah kecamatan Balik Bukit, Sekincau, Sukau dan Way Tenong. Buah-buahan yang dibudidayakan di Lampung Barat dan mulai dikembangkan adalah pisang, jeruk, alpukat, salak dan durian. Pisang merupakan



komoditas yang sudah lebih intensif dibudidayakan. Sentra pisang di Lampung Barat adalah kecamatan Air Hitam dan Way Tenong.

Selain potensi lahan yang tersedia, pelaksanaan pembangunan pertanian tidak terlepas dari petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Lampung Barat. Hal ini berarti bahwa petani berperan penting dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kegiatannya petani tidak dapat berjalan sendiri, harus mendapat dukungan agar peran petani menjadi maksimal. Dukungan tersebut berupa bantuan modal, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, teknologi budidaya, sarana prasarana produksi pertanian dan pengembangan kelembagaan

(pemerintah atau swasta) sehingga pembangunan pertanian dapat dilaksanakan lebih terarah dengan tetap berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Hasil dari pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang didukung oleh potensi yang ada dan peran petani serta difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Lampung Barat adalah capaian produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2017, produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29. Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 dan Tahun 2017

No.	Komoditi	Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	
		2016	2017		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Padi Sawah	136.858	146.393	5,14	27.317	28.460
2	Padi Ladang	5	-	-	2	-
		136.864	146.393	5,14	27.319	28.460
3	Jagung	795	825	4,19	185	197
4	Kedelai	136	88	1,29	108	68
5	Kacang Tanah	215	231	1,22	181	189
6	Kacang Hijau	2	-	-	2	-
7	Ubi Kayu	2.575	3.645	23,83	124	153
8	Ubi Jalar	3.558	3.997	10,60	360	377
9.	Sayuran	57.333	62.794		3.755	4.133
10.	Buah-buahan	14.422	16.848		808	787

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2017

a. Padi

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami kenaikan produksi dari 136.858 ton pada tahun 2016 menjadi 146.393 ton pada tahun 2017.

Dari besaran produksi padi pada tahun 2017, ketersediaan beras pada tahun 2017 sebesar 72.794 ton. Kebutuhan beras perkapita adalah 137,9 kg/kapita/tahun, sedangkan kebutuhan beras Lampung Barat adalah 40.776 ton, sehingga pada tahun 2017 kabupaten Lampung Barat terdapat surplus beras 32.018 ton.

b. Palawija

Palawija dalam hal ini terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi

jalar. Khusus untuk kabupaten Lampung Barat, palawija bukan merupakan komoditas prioritas atau unggulan. Bukan merupakan tanaman pokok yang dibudidayakan oleh petani, dimana berfungsi sebagai tanaman selingan atau merotasi tanaman untuk memutus mata rantai hama dan penyakit di komoditas sayuran atau dibudidayakan oleh petani yang bermodal kecil. Komoditas palawija yang banyak diusahakan oleh petani adalah jagung, kacang tanah dan ubi jalar. Komoditas tersebut mudah dibudidayakan dan mempunyai prospek yang baik untuk dijual di pasaran.

Kondisi perkembangan produksi palawija mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, sebagian besar komoditas palawija



(jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar) terjadi kenaikan produksi dibanding tahun 2016.

c. Hortikultura

Hortikultura terdiri dari komoditas sayuran dan buah. Lampung Barat yang sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi merupakan sentra produksi sayuran dataran tinggi di provinsi Lampung. Komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan di Lampung Barat adalah bawang daun, wortel, kubis, kentang, kembang kol, sawi, cabe, tomat dan labu siam. Komoditas buah yang banyak dibudidayakan di Lampung Barat antara lain pisang, alpukat, durian, salak, jeruk, pepaya dan manggis.

Sayuran dan buah mengalami peningkatan produksi pada tahun 2017 dibanding dengan produksi tahun 2016.

B. Perkebunan

Kopi robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Areal pertanaman kopi tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dan budidaya kopi robusta telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal 11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.30. Perkembangan Luas Lahan Komoditas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011-2017 (Ha)

NO.	KOMODITAS	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kopi Robusta	53.559,9	53.601,0	53.606,0	53.611,5	53.777,1
2.	Lada	7.634,3	7.682,7	7.685,7	7.692,0	7.710,7
3.	Kakao	1.229,0	1.231,0	1.231,0	1.211,4	1.205,4
4.	Aren	321,5	339,0	105,0	373,0	404,1

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017

Tabel 2.31. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2013-2017 (ton)

NO.	KOMODITAS	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kopi Robusta	48.098,7	42.745,3	52.644,9	57.664,5	54.411,3
2.	Lada	3.495,00	3.501,3	3.643,9	3.627,9	3.227,5
3.	Kakao	673,4	705,5	739,5	693,4	685,5
4.	Aren	245,1	252,0	264,3	270,1	293,1

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017

Tabel 2.32. Perkembangan Produktivitas Komoditas Perkebunan Lampung Barat Tahun 2013-2017 (kg/ha)

NO.	KOMODITAS	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kopi Robusta	965,3	8852,9	1.050,0	1.150,0	1.081,1
2.	Lada	615,5	611,2	635,0	630,0	561,7
3.	Kakao	927,0	705,5	739,5	900,0	878,8
4.	Aren	1.365,4	1.366,0	1.380,0	1.385,0	1.378,1

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017



Produktivitas kopi yang merupakan produk utama perkebunan di Lampung Barat tahun 2017 mengalami penurunan dari sebesar 1.150 Kg/Ha/Th pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.081,1 Kg/Ha/Th pada tahun 2017. Walaupun demikian kisaran produktivitas yang dicapai petani di berbagai karakteristik wilayah menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Terdapat kebun kopi yang hanya mampu mencapai produktivitas 600 Kg/Ha/Th, tetapi beberapa petani mampu mencapai produktivitas yang cukup tinggi yaitu mencapai 3.500 Kg/Ha/Th.

C. Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan mempunyai peranan dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan hewani asal ternak dan meningkatkan akses masyarakat peternak terhadap pangan melalui peningkatan pendapatan dari hasil usaha pemeliharaan ternak.

Beberapa keberhasilan yang dicapai Kabupaten Lampung Barat tampak pada populasi ternak dan produksi ternak seperti dijelaskan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.33. Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2015 dan 2016.

	2015	2016	
Sapi Potong (ekor)	5.734	6.348	10,7
Kerbau (ekor)	352	393	11,6
Kambing (ekor)	74.956	76.830	2,5
Domba (ekor)	5.548	5.797	4,5
Ayam buras (ekor)	1.891.886	1.986.471	4,9
Itik (ekor)	56.164	58.993	5,0
Produksi			
Daging (kg)	205.608	261.195	27,0
Telur (butir)	3.674	13.650	140,5
Susu (liter)	24.487	33.425	36,5
Konsumsi			
Daging (Kg/kap/th)	1,58	1,58	-
Telur (butir/kap/th)	4,62	4,62	-

* Angka sementara

Sumber : Statistik Peternakan

Populasi ternak menunjukkan peningkatan/pertumbuhan setiap tahunnya terlihat pada beberapa jenis ternak, diantaranya sapi potong meningkat sebesar 10,7 %, kerbau meningkat sebesar 11,6%, ternak kambing meningkat sebesar 2,5%, domba meningkat sebesar 4,5%, ayam buras meningkat sebesar 4,9% dan itik meningkat sebesar 5%.

D. Perikanan

Dinas Perikanan Lampung Barat memiliki potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan perairan umum serta penangkapan ikan perairan umum yang tersebar di 15 kecamatan.

Tabel 2.34. Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di kolam, budidaya di perairan umum (KJA dan Keramba Tancap) dan mina padi

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	
		Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Ikan Mas	1.293,00	1.188,5
2.	Ikan Nila	2.860,27	3.836,8
3.	Ikan Nilem	31,60	24,84
4.	Ikan Gurame	3,45	3,62
5.	Ikan Tawes	6,75	5,43
6.	Ikan Lele	150,00	5,92
7.	Ikan Tambakan	8,40	2,76
8.	Ikan Patang	--	68,24
9.	Ikan Lainnya	9,40	8,87
Jumlah		4.362,87	5.144,96



Sedangkan Potensi lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 3.584,7 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 1.510,5 Ha, sementara untuk budidaya mina padi potensi lahan 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 122,6 Ha. Potensi pengembangan perikanan budidaya di darat didominasi 4 (empat) kecamatan, yaitu Sumberjaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, dan Batu Brak.

Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan perikanan budidaya adalah Perairan Umum Danau Ranau dengan luas potensi 2.792 Ha yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pengembangan perikanan budidaya di perairan umum Danau Ranau difokuskan untuk pengembangan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak di 3 (tiga) pekon/desa yaitu Kagungan, Sukabanjar dan tawan sukamulya. Hingga saat ini potensi perairan Danau Ranau yang dimanfaatkan baru mencapai 6,05 Ha dari potensi lahan yang bisa dikembangkan untuk budidaya KJA sebesar 141,6 Ha berdasarkan perencanaan zonasi Dinas Perikanan Lampung Barat. Hingga saat ini jumlah KJA yang ada di perairan umum Danau Ranau yaitu ± 90 (sembilan puluh) unit.

Tabel 2.35. Produksi Budidaya Perairan Umum, Budidaya Kolam dan Mina Padi

No	Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Budidaya Perairan Umum	1.422,23	2.365,66
2	Budidaya Kolam	2.917,90	2.694,54
3	Mina Padi	22,74	129,78
	Jumlah	4.362,87	5.144,98

Untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat meliputi perairan danau, sungai, waduk, rawa dan galian air lainnya (GAL).

Tabel 2.36. Potensi kegiatan penangkapan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017

No	Indikator	Volume
1.	Jumlah nelayan	857 orang
2.	Jumlah armada :	
	- Perahu tanpa motor (jukung)	82
	- Perahu bermotor	16
3.	Produksi Penangkapan	528,35

E. Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki banyak area alami yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata berbasis lingkungan mulai dari danau, pegunungan, wisata alam, air terjun, dan wisata petualangan. Setiap tahunnya cukup banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu tujuan wisata utama. Potensi-potensi wisata alami di Kabupaten Lampung Barat diantaranya adalah Arung Jeram Way Besai, Air Terjun Cengkaan, Air Terjun Cipta Mulya, Daerah Wisata Pekon Hujung, Gunung Pesagi, Daerah Agrowisata, Lumbok Seminung Resort, Kawasan Air Panas Gemburak, Taman Nasional Bukit Barisan, Danau Vulkanis Suoh dan masih banyak area alami lainnya yang dapat dijadikan daerah tujuan wisata.

Disamping objek wisata alam, Lampung Barat juga memiliki objek wisata budaya dan sejarah, seperti peninggalan zaman prasejarah, situs-situs megalitik, rumah tradisional Lampung, dan berbagai macam budaya khas daerah Lampung. Kabupaten Lampung Barat memiliki ciri adat budaya yang khas mengingat Lampung Barat merupakan asal usul Lampung atau dikenal dengan *The Origin of Lampung*. Hal ini mengindikasikan bahwa wisatawan yang ingin lebih mengenal adat istiadat dan budaya Lampung harus berkunjung ke daerah Lampung Barat karena masyarakat daerah ini masih menjaga tradisi dan menyimpan aset-aset budaya daerah.

Pada Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Trend wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat sebagian besar adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus seperti touring/jelajah alam, dan juga penelitian terutama pada situs-situs budaya dan Kawasan Taman Nasional

Bukit Barisan Selatan. Munculnya destinasi wisata baru yang mulai dikenal masyarakat menjadi salah satu pendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung Barat. Destinasi wisata tersebut antara lain Keramikan dan Kawah Nirwana Suoh, Puncak Bawang Bakung Geredai, Taman Hamtebiu dan Kebun Raya Liwa. Berikut tabel perkembangan kunjungan wisatawan nusantara :

Tabel 2.37. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Lampung Barat tahun 2013 – 2017

No	Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	13.646	13.735	13.825	14.567	15.918
2	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	365	412	421	396	531
	Jumlah Total	14.011	14.147	14.246	14.863	16.449

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2017, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat tercatat sebanyak 16.449 yang terdiri dari 15.918 orang kunjungan Wisatawan Nusantara atau naik 9,27% dari tahun 2016 dan 531 orang kunjungan Wisatawan Mancanegara atau naik 34 % dari tahun 2016.

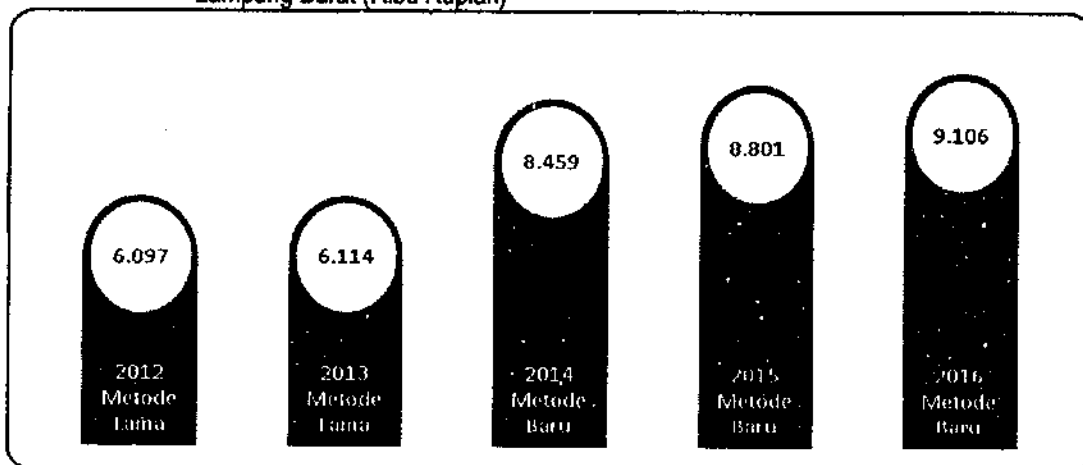
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Daya Beli)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Semakin tinggi pendapatan

masyarakat, semakin tinggi pula pengeluarannya. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Gambar 2.26. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat (Ribu Rupiah)



Sumber: BPS Lampung Barat, 2017



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan selalu meningkat dalam kurun waktu 2012-2016. Keadaan tersebut menandakan kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Barat yang semakin baik yang ditandai dengan kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Aksesibilitas erat kaitannya dengan jumlah dan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi. Peningkatan aksesibilitas daerah diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas. Semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan suatu daerah, semakin mudah pula daerah tersebut terkoneksi dengan daerah lainnya. Ruas jalan strategis yang dimiliki kabupaten Lampung Barat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Aksesibilitas Daerah

Tabel 2.38. Ruas Jalan Strategis Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

NO.	NAMA RUAS	PANJANG (KM)
1	Jalan Nasional Bukit Kemuning - Padang tambak	48,34
	Akses Simpang Tebu Mutar Alam	
	Jalan Provinsi Sp. Tebu - Bungin - Trimulyo	24,57
	Bungin - Gunung Terang	12,90
2	Mutar Alam - Gunung Terang	8,10
	Jalan Nasional Padang Tambak - Bts. Kota Lwa	37,70
	Akses Sp. Giham, Sp. Luas	
	Pahayu Jaya - Basungan	7,60
	Sukajaya - Basungan	15,70
	Sp. Luas - Hujung	4,30
	Sp. Giham - Pahayu	14,30
	Luas - Argomulyo	8,60
	Serengit - Argomulyo	6,20
	Kenali - Hujung	5,10
	Akses Sekincau - Way Ngison - Akses Bedudu	
	Sekincau - Waspada	5,50
	Tiga Jaya - Waspada	3,60
	Sekincau - Tiga Jaya	3,60
	Batu Kabayan - Waspada	6,50
	Way Ngison - Pahiton	5,80
	Sukarame - Bedudu	3,50
Sukarame - Pahiton	5,30	
Akses Kenali		
Kenali - Kembahang	9,30	
Akses Utama Jalan Provinsi Pekonbalak - Suoh		
Jalan Provinsi Pekon Balak - Sukabumi - Suoh	33,63	
Jalan Provinsi Suoh - Sp. Blok 9	30,48	
3	Jalan Nasional Jenderal Sudirman Lwa	6,21
	Akses Utama, Kawasan Sekuling dan Sp. Penataran	



NO.	NAMA RUAS	PANJANG (KM)
	Mahadewa - Sukarame	2,40
	Padang Dalam - Sekubng	1,60
	Sp. Sebelat - Sukarame	8,30
	Jalan Provinsi Lwa - Bts. Sum- sel	19,11
4	Jalan Nasional Kota Lwa - Sp. Gunung Kemala	29,17
	Akses Utama Simpang Lumbok Seminung	
	Jalan Provinsi Jl. Radin Intan (Jalur 2 Kota Lwa)	6,18
	Jalan Provinsi Lwa - Bts. Sum- sel	19,11
5	Jalan Provinsi Lwa - Bts. Sum-sel	19,11
	Akses Utama Simpang Lumbok Seminung	
	Biray Nyaripa - Japaraga	4,50
	Pagar Dewa - Lumbok	14,50
	Lumbok - Belatong	9,60
	Lumbok - Sukabanjar	4,90

Sumber: Dinas PU PR Kabupaten Lampung Barat, 2017

B. Luas Wilayah Produktif

Pelaksanaan pembangunan pertanian di Lampung Barat tidak terlepas dari ketersediaan lahan pertanian sebagai sarana pengembangan pertanian. Keragaman lahan di Kabupaten Lampung Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.39. Persentase luas Wilayah Produktif Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
1	Kebun Tabu	11.878	15.555	76,36
2	Sumberjaya	3.401	3.585	94,87
3	Gedung Surian	5.787	5.832	99,23
4	Way Tenong	3.790	12.093	31,34
5	Ali Hitam	5.287	5.293	99,89
6	Belalau	22.679	23.523	96,41
7	Batu Ketulis	19.665	20.446	96,18
8	Batu Brak	10.541	10.745	98,10
9	Sakunau	6.538	7.392	88,45
10	Pagar Dewa	20.330	20.668	98,37
11	Suoh	9.514	26.095	36,46
12	Bandar Negeri Suoh	6.732	7.332	91,82
13	Balik Bukit	12.415	16.731	74,20
14	Sukau	8.398	9.475	88,63
15	Lumbok Seminung	5.390	5.836	92,36
	Jumlah	152.344	190.600	79,93

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lampung Barat, 2016



Dari Tabel di atas menunjukkan Luas lahan Produktif Lampung Barat sebesar 152.344. Sedangkan luas wilayah budidaya sebesar 190.600 dengan rasio 79,93 persen.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Investasi

Tabel 2.40. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Lampung Barat

Tahun (1)	Uraian	PMDN	PMA	Total
2013				
2014				
2015				2
2016				
2017		3		3

Sumber : Dinas PM, PTSP Naker 2017

Tabel 2.41. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Lampung Barat

Tahun	Persetujuan	Realisasi
2013		
2014		
2015	150.000.000	650.000.000
2016		
2017	958.246.731.888	3.167.204.248

Sumber : Dinas PM, PTSP Naker 2017

Tabel 2.42. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	-	35	20	0	7
Jumlah seluruh PMA/PMDN	-	7	-	-	-
Rasio daya Serap tenaga kerja	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PM, PTSP Naker 2017

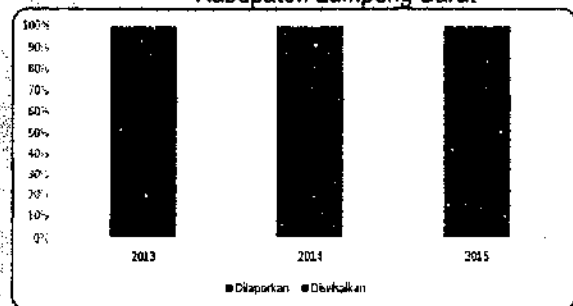
B. Keamanan dan Ketertiban

1) Kriminalitas

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian, atau tindak kejahatan yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 sebanyak 155 peristiwa, Tahun 2014 sebanyak 78 peristiwa, dan Tahun 2015 sebanyak 194 peristiwa. Jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi selama kurun waktu 2013-2015 terus mengalami peningkatan. Persentase penyelesaian tindak kejahatan Tahun 2013 sebesar 59 persen, Tahun 2014 66 persen, dan Tahun 2015 sebesar 67 persen. Secara lebih rinci perkembangan tindak kejahatan yang dilaporkan

dan diselesaikan dalam kurun waktu 2013-2015 disajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2.27. Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2010-2015 Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Statistik Keamanan Provinsi Lampung, 2016

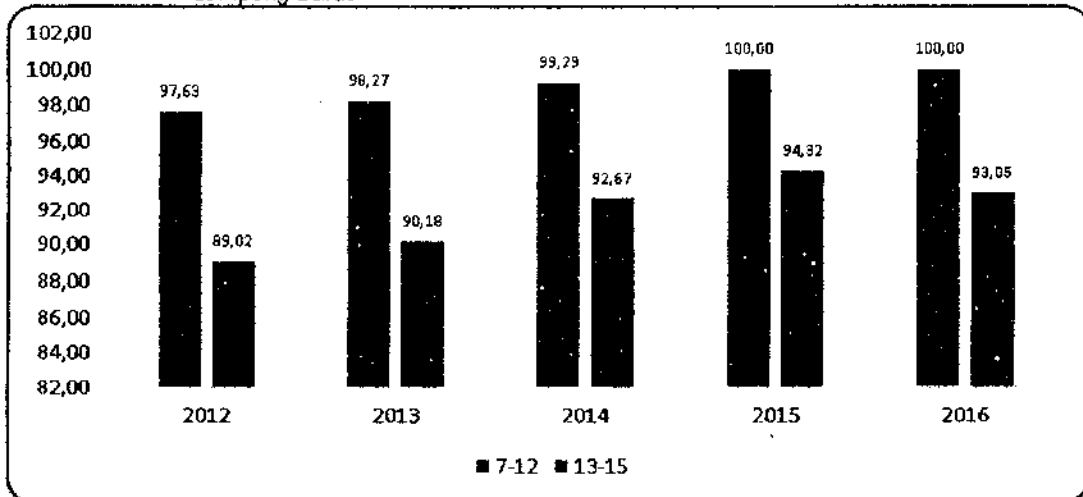
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang

lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Perkembangan APS Kabupaten Lampung Barat di sajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.28. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012-2016

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan APS umur 7-12 Tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Hingga di Tahun 2015 dan 2016 APS umur 7-12 Tahun mencapai 100 persen. Perkembangan APS umur 13-15 dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 terus mengalami peningkatan, namun Tahun 2016 mengalami penurunan. Dengan APS tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 94,32 persen. Sedangkan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 Tahun mengalami peningkatan menjadi 86,32 persen.

Dibandingkan APS umur 7-12 tahun, APS umur 13-15 tahun pencapaiannya masih lebih rendah. Masih rendahnya APS untuk umur 13-15 tahun dapat disebabkan karena faktor-faktor berikut:

1. Faktor Ekonomi

Masih banyak rumah tangga yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin sehingga tidak memiliki cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi perekonomian yang tidak menunjang ini membuat orang tua murid untuk lebih mengutamakan

pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sudah dirasa sulit dan anak-anak usia 13-15 tahun sudah mulai dilibatkan untuk membantu orang tua di ladang/kebun.

2. Faktor geografi (jarak ke sekolah yang jauh)

Akses ke pelayanan pendidikan setingkat SMP lebih sulit dibandingkan akses pelayanan pendidikan setingkat SD. Jarak yang lebih jauh untuk mencapai pelayanan pendidikan setingkat SMP menjadi salah satu kendala. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan pelayanan pendidikan setingkat SMP yang jumlahnya tidak sebanyak pelayanan pendidikan setingkat SD.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

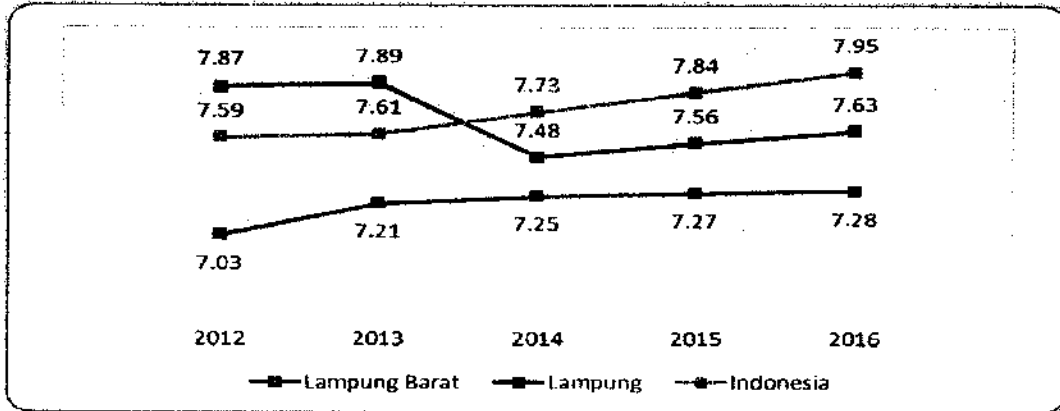
Selama periode 2012 hingga 2016, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang positif Rata-rata Lama Sekolah merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik. Hingga Tahun 2016, secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Barat usia 25



Tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Barat masih berada dibawah Angka

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Indonesia Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.29. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: BPS Lampung, 2017

C. Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca-tulis penduduk dewasa (Literacy Rate). Kemampuan baca-tulis tercermin dari data angka melek huruf. Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna memberantas buta huruf, antara lain adalah dengan adanya program Kejar Paket A dan B yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya yang tinggal di daerah perdesaan.

Tabel 2.43. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2016

Jenis Kelamin	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Laki-laki	98,54	98,72	98,92
Perempuan	96,19	96,18	97,64
Jumlah	97,46	97,55	98,32

Sumber: Pengolahan Susenas 2014-2016

Berdasarkan data Susenas tahun 2014, angka melek huruf di Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 97,46 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 97,55 persen pada tahun 2015, dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 98,32 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat semakin membaik dan tahun ke tahun. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka angka melek huruf laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,54 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 96,19 persen sedangkan

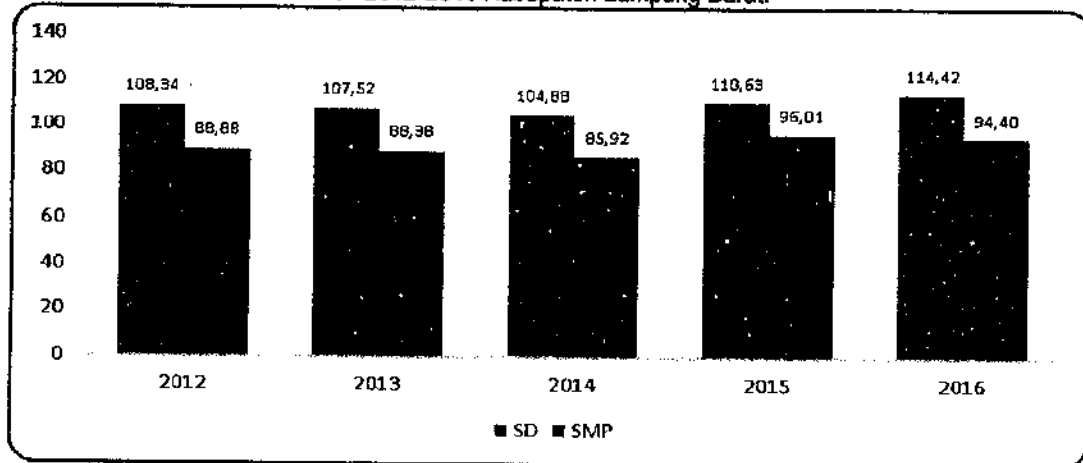


pada tahun 2015, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,72 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 96,18 persen, pada tahun 2016, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,92 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 97,64 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tren angka melek huruf laki-laki.

D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 2.30. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012-2016

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD dan SMP terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012-2016, meskipun pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 APK SD berada pada angka 108,34 menurun menjadi 107,52 dan 104,88 pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 110,63 dan 2016 kembali meningkat menjadi 114,42. Pada tahun 2012 APK SMP berada pada angka 88,88 menurun menjadi 88,38 dan 85,92 pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015 mengalami

peningkatan menjadi 96,01 dan 2016 kembali meningkat menjadi 94,40.

E. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Indikator lain yang biasa digunakan dalam analisis pendidikan adalah indikator tingkat pendidikan penduduk yang menunjukkan persentase penduduk yang telah mencapai pendidikan yang seharusnya telah dilewati pada usia tertentu. Semakin tinggi indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan yang dimiliki oleh penduduk.

Tabel 2.44. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2016

	Tidak/belum pernah sekolah	Tdk punya ijazah SD	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015						
Laki-laki	2,28	16,20	35,98	24,22	17,41	3,92
Perempuan	4,28	15,92	36,47	23,71	15,30	4,32
Lampung Barat	3,20	16,07	36,21	23,98	16,44	4,10
2016						
Laki-laki	0,72	13,86	52,09	15,22	15,05	3,06
Perempuan	0,79	11,28	53,18	14,99	7,48	2,29
Lampung Barat	0,76	12,48	52,67	15,10	6,35	2,65

Sumber: Pengolahan Susenas 2015-2016



Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah dasar pada tahun 2015 adalah sebesar 36,21 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 36 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah dasar. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah pertama pada tahun 2015 adalah sebesar 23,98 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 24 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah atas pada tahun 2015 adalah sebesar 16,44 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 16 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas.

sebanyak 15 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah atas pada tahun 2016 adalah sebesar 6,35 persen. Artinya bahwa pada tahun 2016, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 6 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas.

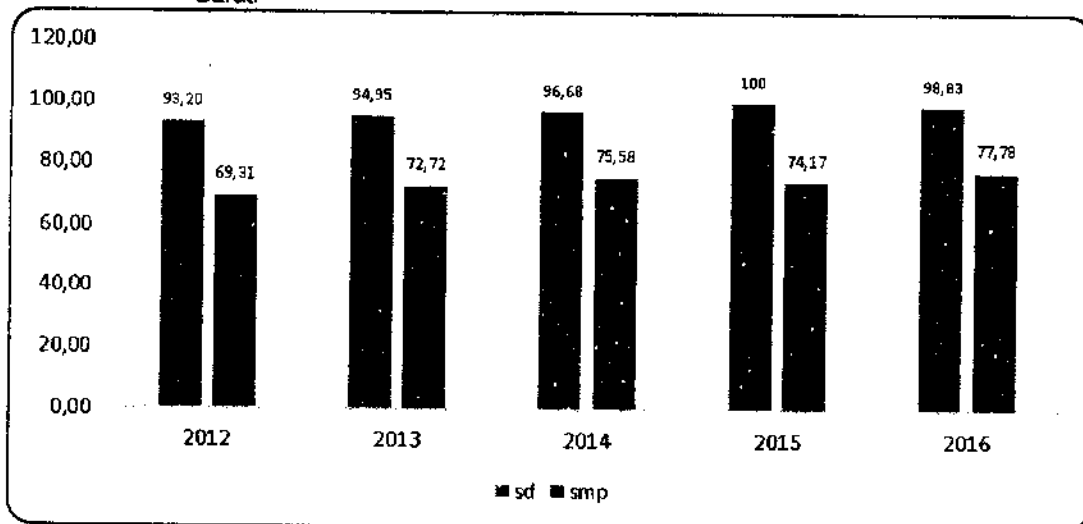
F. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Selanjutnya, Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah dasar pada tahun 2016 adalah sebesar 52,67 persen. Artinya bahwa pada tahun 2016, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 53 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah dasar. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah pertama pada tahun 2016 adalah sebesar 15,10 persen. Artinya bahwa pada tahun 2016, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada

APM jenjang pendidikan SD dari Tahun 2012 hingga 2015 terus meningkat namun turun di Tahun 2016. Sementara itu, APM jenjang pendidikan SMP dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 hanya mengalami penurunan Tahun 2015. Secara lebih rinci APM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016 di sajikan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 2.31. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2012-2016



G. Rasio Guru Terhadap Siswa

Rasio guru terhadap siswa merupakan cerminan ketersediaan guru dalam mendidik siswa. Rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Lampung Barat pada jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK selama Tahun 2015-2017 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2015 rasio guru terhadap siswa pada jenjang pendidikan SD adalah sebesar 13, yang berarti bahwa rata-rata setiap guru mengajar siswa sebanyak 13 orang. Pada Tahun 2016 rasio guru terhadap siswa pada jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan menjadi 15 orang dan pada Tahun 2017 kembali sebanyak 13 orang. Pada jenjang pendidikan SMP, rasio guru terhadap siswa selama Tahun 2012-2017 mengalami peningkatan. Pada jenjang pendidikan SMA, rasio kelas terhadap siswa sempat mengalami peningkatan pada Tahun 2016, namun kembali menurun pada Tahun 2017. Sementara itu pada jenjang pendidikan SMK rasio guru terhadap siswa selama Tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.45. Perkembangan Rasio Guru Terhadap Siswa Tahun 2015-2017 Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten Lampung Barat

Jenjang Pendidikan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
SD	13	15	13
SMP	9	12	12
SMA	12	16	14
SMK	12	15	22

Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 17 disebutkan bahwa "Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:

- a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
- b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
- c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
- d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
- e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
- f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
- g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;

h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
Merujuk pada standar rasio peserta didik terhadap guru, maka kondisi di Kabupaten Lampung Barat masih memenuhi kondisi ideal.

b) Sebaran Guru

Meski rasio guru terhadap siswa masih memenuhi kriteria sesuai standar, namun sebarannya belum merata pada setiap kecamatan. Untuk sebaran guru SD terbanyak pada kecamatan Balik Bukit, Way Tenong, Sukau dan Batu Brak, sedangkan untuk guru SMP terbanyak ada di Kecamatan Balik Bukit. Sebaran guru yang tidak merata ini dapat dipengaruhi oleh jumlah sekolah yang ada di masing-masing kecamatan tersebut namun pada beberapa kecamatan jumlah guru yang ada masih sangat sedikit. Disamping itu dapat juga dilihat dari perbandingan antara ketersediaan guru PNS dan Non PNS, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah guru Non PNS yang lebih banyak dibandingkan guru PNS.

Tabel 2.46. Jumlah Sebaran Guru SMP Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	PNS	Non PNS
Kecamatan Air Hitam	16	19
Kecamatan Balik Bukit	105	87
Kecamatan Bandar Negeri Suci	11	35
Kecamatan Batu Brak	13	23
Kecamatan Batu Kuning		21
Kecamatan Bolalau	20	5
Kecamatan Gedung Suten	20	30
Kecamatan Kebun Tebu	26	33
Kecamatan Lumbok Sembung	13	28
Kecamatan Pagar Dewa	8	25
Kecamatan Saungau	32	22
Kecamatan Sukau	14	60
Kecamatan Sumber Jaya	30	21
Kecamatan Suci	12	28
Kecamatan Way Tenong	55	47
TOTAL	390	482

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017



Tabel 2.47. Jumlah Sebaran Guru SD Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	2015	2016	2017
Kecamatan Balik Bukit	232	211	183
Kecamatan Bumi Kencana	107	121	128
Kecamatan Belalau	90	117	117
Kecamatan Ceking Sungsai	58	53	53
Kecamatan Kebun Tebu	69	32	32
Kecamatan Lumbok Semang	36	30	30
Kecamatan Pagar Dewa	25	79	79
Kecamatan Sekincau	40	35	35
Kecamatan Sukau	113	72	72
Kecamatan Sumber Jaya	83	63	63
Kecamatan Suoh	32	86	86
Kecamatan Way Tenong	139	92	92
TOTAL	1210	787	787

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

c) Guru Bersertifikasi

Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai pendidik dilakukan salah satunya dengan menerapkan guru bersertifikasi, berikut adalah guru di Kabupaten Lampung Barat yang sudah bersertifikasi. Jika dibandingkan antara jumlah guru SD dan SMP yang ada di Kabupaten Lampung Barat, maka belum 100% guru yang ada sudah bersertifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya minat dari beberapa guru dimaksud untuk mendapatkan sertifikasi dikarenakan faktor usia yang sudah tidak mendukung.

Tabel 2.48. Data Guru Bersertifikasi di Kabupaten Lampung Barat

Kategori	2015	2016	2017
TK	16	23	23
SD	837	846	846
SMP	281	282	282
SMA	161	162	0
SMK	57	59	0
Pengawas	56	47	39
JUMLAH	1408	1419	1190

H. Rasio Lulusan S1, S2, S3

Tabel 2.49. Rasio Lulusan S1, S2, S3 Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Jumlah Lulusan S1	253	259	244
2	Jumlah Lulusan S2	22	21	18
3	Jumlah Lulusan S3	5.463	5.544	5.159
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	324.530	320.550	302.109
5	Jumlah Penduduk	1,68%	0,17%	1,71%
	Rasio Lulusan S1/S2/S3			

Sumber : Dinas Dukcapil 2017

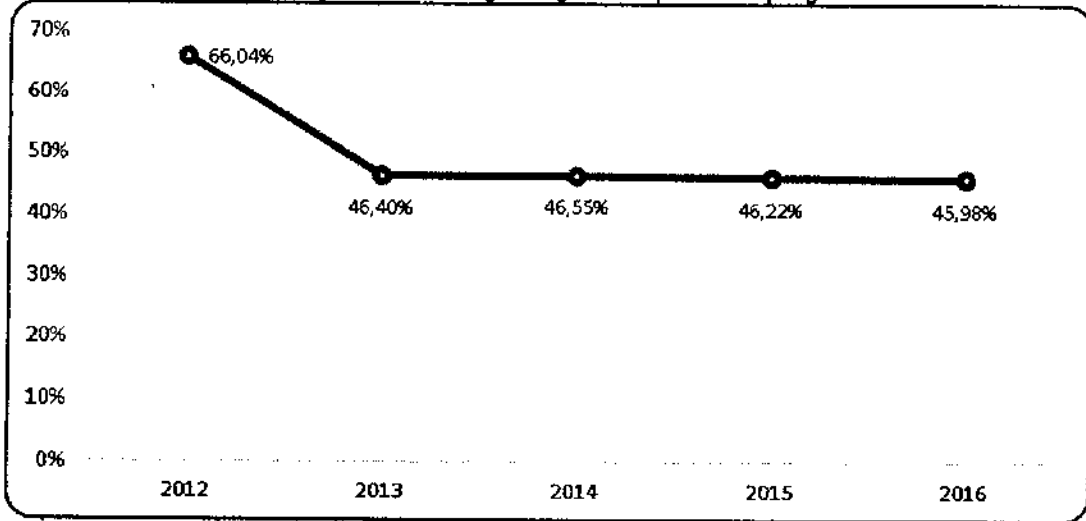
Rasio lulusan S1, S2, S3 Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio lulusan S1, S2, S3 sebesar 1,68% turun pada tahun 2016 menjadi 0,17% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,71%.

1. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 Tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 Tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 Tahun (angkatan kerja).

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.32. Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016.



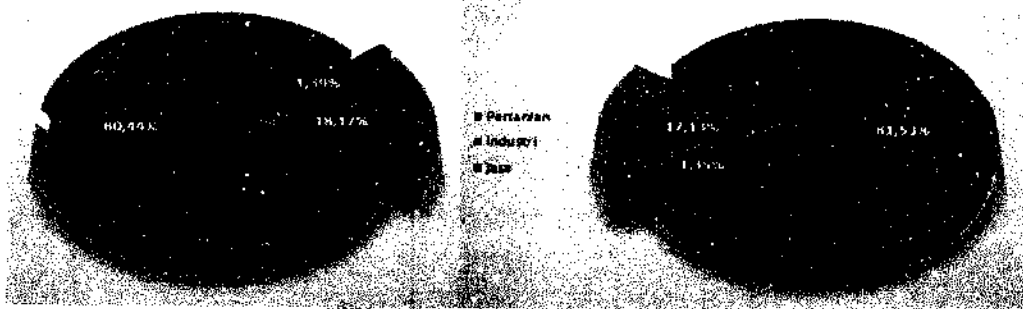
Sumber: BPS Lampung Barat, 2017

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan cukup tinggi terjadi di Tahun 2012. Kemudian turun di Tahun 2013. Selanjutnya dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 rasio ketergantungan relatif konstan diangka 46 persen dan turun di Tahun 2016 menjadi 45 persen.

J. Angkatan Kerja

Struktur perekonomian Lampung Barat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada, struktur perekonomian Lampung Barat masih bertumpu pada sektor pertanian sehingga penyerapan tenaga kerja terbesar ada di sektor pertanian, yang pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 80,44 persen dan meningkat menjadi 81,53% pada tahun 2015. Sektor lain yang cukup dominan adalah sektor perdagangan dan sektor jasa.

Gambar 2.33. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2015



Sumber: BPS Lampung Barat, Sakemas 2014-2015

Tabel 2.50. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2015

Lapangan Pekerjaan	2013			2014			2015		
	Lk	Pr	Tot	Lk	Pr	Tot	Lk	Pr	Tot
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(8)	(9)	(10)
Pertanian (A)	85,03	80,29	83,24	83,59	75,25	80,44	83,62	77,74	81,53
Industri (M)	2,92	1,14	2,25	1,51	1,20	1,39	1,67	0,76	1,35
Jasa (S)	12,05	18,57	14,51	14,89	23,55	18,16	14,71	21,50	17,13

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, Sakernas 2013-2015

Sektor lapangan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pekerja. Di Kabupaten Lampung Barat, mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja memiliki tingkat pendidikan kurang dari tamat SD. Kondisi inilah

yang menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar karena pekerja di sektor ini tidak membutuhkan keahlian (*skill*) khusus dan pendidikan tertentu.

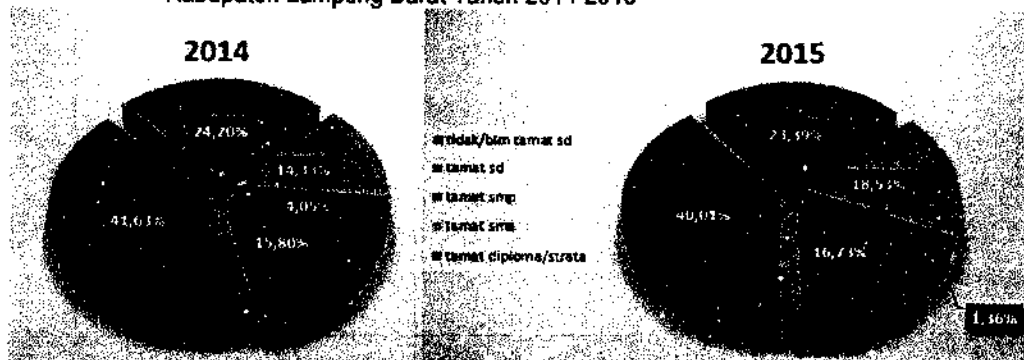
Tabel 2.51. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2015

Tingkat Pendidikan	2013 Lk	2013 Pr	2013 Tot	2014 Lk	2014 Pr	2014 Tot	2015 Lk	2015 Pr	2015 Tot
Tidak/Belum Tamat SD	10,70	17,17	13,14	14,69	17,67	15,80	15,59	18,78	16,73
Tamat SD	44,07	40,80	44,04	41,25	42,26	41,63	37,95	43,71	40,01
Tamat SLTP	28,44	19,26	24,98	24,67	23,38	24,20	24,44	21,48	23,39
Tamat SMA	14,84	14,99	14,90	16,32	10,94	14,33	20,24	15,44	18,53
Tamat	1,95	4,59	2,94	3,05	5,75	4,05	1,78	0,59	1,36

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, Sakernas 2013-2015

Kabupaten Lampung Barat banyak yang bekerja di sektor informal, sehingga penduduk yang bekerja sebagian besar berpendidikan tamat SD, sebesar 41,63 persen pada tahun 2014 dan 40,01 persen pada tahun 2015.

Gambar 2.34. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014-2015



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, Sakernas 2013-2015

TUGU SEKURA

**BAB III
GAMBARAN KEUANGAN
DAERAH**

**3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 3 Tahun terakhir (2015-2017) selalu mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 13,36 persen. Pos pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 38,38

persen, sedangkan Dana Perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 11,35 persen dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan pertumbuhan 21,54 persen.

Ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017, Pendapatan Pos Dana Perimbangan merupakan pos pendapatan dengan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 76,36 persen. Sementara itu, pos PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 5,54 persen. Untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah memberikan kontribusi sebesar 18,10 persen.

Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015–2017

No	Uraian	Realisasi Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	838.035.024.892,12	1.020.814.975.453,67	1.070.941.870.982,41
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.434.649.521,12	49.094.157.584,87	83.971.467.451,18
1.1.1	Pajak Daerah	2.220.125.484,50	2.071.434.589,00	10.144.981.620,00
1.1.2	Retribusi Daerah	1.915.353.280,00	1.562.971.350,00	1.888.603.985,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kawasan Lindung	2.851.265.584,52	2.950.989.465,82	3.213.618.613,65
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34.013.745.492,10	35.853.788.769,99	68.724.263.232,53
1.2	DANA PERIMBANGAN	639.899.114.768,00	826.678.258.881,00	773.064.817.356,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Hasil Bumi dan Bangunan Daerah	24.712.092.768,00	23.672.746.841,00	29.680.799.339,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	491.134.702.000,00	523.586.535.000,00	519.160.196.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	128.052.420.000,00	280.000.977.040,00	224.223.822.017,00



No	Uraian	Realisasi Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1.3				
1.3.1	Hibah	12.649.457.000,00	6.469.105.000,00	54.009.539.000,00
1.3.2				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsial dan Pemerintah Daerah lainnya	35.484.878.603,00	57.144.646.988,00	58.287.227.175,23
1.3.4				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			

Sumber : LKPJ Pemda

Tingginya kontribusi Dana Perimbangan (DAU+DAK) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber ekstem, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam posisi yang rendah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, belanja daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu tiga Tahun terakhir (2015-2017) selalu mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan belanja daerah selama kurun waktu 2015-2017 adalah sebesar 15,73 persen. Ditinjau dari masing-masing pos belanja

utamanya, tingkat perkembangan masing-masing pos belanja daerah cukup berfluktuatif. Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,51 persen, sedangkan Belanja Langsung tumbuh rata-rata sebesar 17,31 persen.

Pada pos Belanja Tidak Langsung, rata-rata pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu tiga Tahun terakhir (2015-2017) terjadi pada komponen Belanja Bantuan Sosial, yaitu sebesar 83,33% persen. Pada pos Belanja Langsung, rata-rata pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu tiga Tahun terakhir (2015-2017) terjadi pada komponen Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 35,36 persen. Ditinjau dari tingkat distribusinya (proporsi), komponen Belanja Daerah dengan proporsi tertinggi pada Tahun 2017 adalah Belanja Langsung sebesar 54,35 persen, sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar 45,15 persen.

Tabel 3.2. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2017

No	Uraian	Realisasi Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
2	BELANJA DAERAH	839.980.183.387,95	999.116.609.787,58	1.124.155.643.697,71
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	391.142.623.422,95	493.621.103.433,00	507.504.400.216,00
2.1.1	Belanja Pegawai	310.356.480.689,95	354.926.912.246,00	322.247.840.316,00
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah	11.424.910.000,00	26.527.965.554,00	23.086.385.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Uraian	Realisasi Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	671.281.800,00	726.872.350,00	1.077.477.100,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	68.375.699.933,00	140.497.894.283,00	159.871.619.393,00
2.1.8	Belanja Tidak Berwujud	277.071.600,00	844.862.000,00	1.121.077.815,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	448.837.559.965,00	505.495.506.354,58	616.651.243.481,71
2.2.1	Belanja Pegawai	43.486.806.205,00	47.803.322.782,00	51.853.072.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.128.911.278,00	153.830.334.399,00	216.129.179.666,00
2.2.3	Belanja Modal	287.221.740.482,00	370.063.349.773,58	348.668.991.804,71

Sumber: LKPJ Pemda

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu Tahun 2015-2017 selalu mengalami surplus dan cenderung meningkat. Peningkatan terhadap surplus pembiayaan tersebut sebagai akibat dari peningkatan penerimaan pembiayaan dan kecenderungan penurunan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama kurun waktu tersebut.

Tabel 3.3. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2017

No	Uraian	Realisasi Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.522.798.747,65	73.522.915.581,82	83.235.274.347,11
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	73.522.798.747,65	73.522.915.581,82	83.235.274.347,11
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-



No	Uraian	Realisasi Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.522.798.747,65	73.522.915.581,82	83.235.274.347,11
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.183.729.000,00	7.950.000.000,00	2.400.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.183.729.000,00	7.950.000.000,00	2.400.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.183.729.000,00	7.950.000.000,00	2.400.000.000,00

Sumber: LKPJ Pemda

3.1.2. Neraca Daerah

A. Perkembangan Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada periode tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sebagaimana mestinya, jumlah aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat selalu mengalami peningkatan selama kurun waktu 2012-2016.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 4.239,60 persen. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Secara keseluruhan, ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Rata-rata perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2012-2016 adalah sebesar 12 persen.

Tabel 3.4. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2016

dalam juta rupiah

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	60.870,18	66.561,26	70.796,19	67.920,34	182.334,76	7,56%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	21,80	45,85	5,60	15,87	1,98	-123,90%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	162,44	14,65	1.818,29	0	11,40	3055,14%
6	Kas di Bendahara BLUD RSUD AU	0	297,87	7,91	233,33	69,21	628,83%
7	Kas Lainnya	0	0	0	1.346,98	959,17	9,75%



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuh an
8	Setara Kas	0	0	0	0	0	0,00%
9	Investasi dalam Deposito	0	0	0	0	0	0,00%
10	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0,00%
11	Investasi Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
12	Piutang Pajak Daerah	0	0	0	700,86	714,59	0,48%
13	Piutang Pajak	268,92	219,91	661,21	0	0	45,61%
14	Piutang Retribusi	1.408,52	1.490,75	1.91,24	0,37	222,36	10,45%
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	0	0	0,00%
16	Piutang Lain-lain PAD yg	0	0	0	3.468,11	3.193,28	-2,15%
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	0	0	0	7.323,38	6.547,40	-2,96%
18	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	31.719,02	9.595,21	-57,64%
19	Piutang Pendapatan lainnya	0	0	0	0	0,59	0,00%
20	Piutang lainnya	1.134,26	21.473,01	28.895,97	0	0	456,34%
21	Piutang BLUD RSUD AU	0	0	0	0	0	0,00%
22	Penyesihan Piutang Pendapatan	0	0	0	4.804,95	2.283,50	28,07%
23	Beban Jasa di bayar dimuka	0	0	0	4,89	16,45	17,57%
24	Persediaan Bahan Pakai Habis	0	0	0	307,14	259,48	-4,59%
25	Persediaan Bahan /Material	0	0	0	8.277,31	7.535,08	-2,46%
26	Persediaan Barang Lainnya	0	0	0	0	115,25	0,00%
27	Persediaan	6.332,28	7.483,51	8.646,88	0	0	8,43%
28	Jumlah Aset Lancar	89.488,41	97.576,80	111.381,30	116.512,60	109.322,89	13,30%
29	INVESTASI JANGKA PANJANG						
30	Investasi Non Permanen	2.630,75	1.430,76	1.237,05	924,28	551,10	-21,11%
31	Dana Bergilir	0	0	0	924,28	551,10	-16,93%
32	Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
33	Jumlah Investasi Nonpermanen	2.630,75	1.430,76	1.237,05	924,28	551,10	-35,04%
34	Investasi Permanen	0	0	0	0	0	0,00%
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.695,61	10.608,65	15.162,61	17.662,75	29.470,88	22,55%
36	Jumlah Investasi Permanen	11.695,61	10.608,65	15.162,61	17.662,75	29.470,88	22,55%
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang	14.326,36	12.039,41	16.399,66	18.587,04	30.021,98	17,92%
38	ASET TETAP						
39	Tanah	158.083,08	157.650,55	120.709,70	124.908,02	125.015,28	-5,04%
40	Peralatan dan Mesin	189.659,58	249.940,02	183.860,05	228.736,29	245.161,98	16,28%
41	Gedung dan Bangunan	548.574,08	617.501,71	461.079,62	540.158,07	509.816,29	-0,39%
42	Jumlah Aset Tetap	896.316,74	1.025.092,28	765.649,37	893.802,38	880.003,55	-1,12%
43	Jumlah Aset	985.805,15	1.122.669,08	1.277.030,67	1.210.315,24	1.189.326,44	-1,64%



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuh an
44	Aset Tetap Lainnya	24.032,78	28.565,03	20.886,50	29.187,87	29.154,02	7,89%
45	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	-619.906,87	-701.684,53	2,91%
46	Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
47	Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
48	ASET LAINNYA						
49	Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
50	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0,00%
51	Keuntungan/kehilangan/Sisa Kredit	0	0	0	0	0	0,00%
52	Aset Tak Berwujud	437,39	752,03	904,90	476,36	623,46	17,12%
53	Bagian Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0,00%
54	Aset Lain-lain	8.784,58	15.568,84	116.068,67	125.128,67	206.902,89	192,52%
56	Jumlah Aset Lainnya	8.784,58	15.568,84	116.068,67	125.128,67	206.902,89	192,52%
57	JUMLAH ASET	1.957.103,1	2.234.463,0	1.892.836,2	1.583.391,3	1.824.475,8	-1,06%
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	16,61	24,75	13,91	22,49	35,60	25,93%
60	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	2.798,73	1.750,22	0	0	0,00%
61	Utang Belanja	0	0	0	2.515,43	2.538,11	0,22%
62	Utang BLUD RSUD AU	0	0	0	0	0	0,00%
63	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16,61	2.823,48	1.764,13	2.538,03	3.746,56	4234,32%
64	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
65	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0,00%
66	Utang Luar Negeri	0	0	0	0	0	0,00%
67	Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0,00%
68	Utang Jangka Panjang lainnya	0	0	0	431,56	431,56	0,00%
69	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	431,56	431,56	0,00%
70	JUMLAH KEWAJIBAN	16,61	2.823,48	1.764,13	2.969,59	4.178,12	4239,60%
71	EKUITAS DANA LANCAR						
72	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SIPA)	60.275,39	66.870,22	73.522,80	0	0	5,22%
73	Pendapatan Ditangguhkan	182,44	14,65	9,95	0	0	-30,77%
74	Cadangan Piutang	2.401,70	23.183,67	29.187,77	0	0	222,80%
75	Cadangan Persediaan	6.332,28	7.483,51	8.648,88	0	0	8,43%
76	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0	-2.798,73	-1.750,22	0	0	-9,37%
77	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	69.171,80	94.753,32	109.617,17	0	0	13,17%
78	EKUITAS DANA						



NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
	INVESTASI						
79	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	14.326,36	12.039,41	16.399,66	0	0	5,06%
80	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.887.914,7	2.136.886,2	1.781.454,9	0	0	-2,19%
80	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	9.225,88	16.320,88	116.978,27	0	0	173,41%
81	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0,00%
82	Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0	0	0,00%
83	Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0	0	0,00%
84	Ekuitas Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
85		0	0	0	1.580.421,8	1.820.297,6	3,28%
86	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.887.914,7	2.136.886,2	1.781.454,9	1.580.421,8	1.820.297,6	-0,39%
87	JUMLAH EKUITAS DANA	1.887.914,7	2.136.886,2	1.781.454,9	1.580.421,8	1.820.297,6	-1,2%
88	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.957.103,1	2.234.463,0	1.892.636,2	1.583.391,3	1.824.475,8	-1,08%

Sumber: BPKD Lampung Barat, 2017

B. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

1. Rasio Cair (*quick ratio*)

Rasio cair menggambarkan kemampuan daerah untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar di luar persediaan yang ada. Secara umum, rasio di atas 1 menunjukkan hasil yang baik, sedangkan rasio di bawah 1 menunjukkan hasil sebaliknya. Perkembangan rasio cair Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2012-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Tahun 2012, rasio cair menunjukkan angka sebesar 3.784,2%, berubah menjadi 31,9% di Tahun 2013, 58,2% di Tahun 2014, 42,5% di Tahun 2015, dan 27,1% di Tahun 2016.

2. Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset

Rasio Kewajiban terhadap Total Aset menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membiayai pembangunan dengan kemampuan sendiri. Rasio yang semakin kecil menunjukkan hasil yang baik, artinya semakin sedikit dana yang

berasal dari hutang untuk pembiayaan daerah. Perkembangan rasio kewajiban terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2012-2016 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada Tahun 2012 menunjukkan angka 0,0000085, Tahun 2013 sebesar 1.192,4, Tahun 2014 sebesar 0,0013, Tahun 2015 sebesar 2,5, dan Tahun 2016 sebesar 0,00093.

C. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu cara untuk mengukur tingkat solvabilitas pemerintah adalah dengan mengukur rasio kewajiban terhadap ekuitas. Perkembangan rasio kewajiban terhadap ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2012-2016 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada Tahun 2012 rasio ini sebesar 0,0000085, Tahun 2013 sebesar 1.204,6, Tahun 2014 sebesar 0,0013, pada Tahun 2015 sebesar 2,5, dan Tahun 2016 sebesar 0,00093.



3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Kebijakan Umum Tahun 2015

Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi Aset Daerah;
3. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

B. Kebijakan Umum Tahun 2016

Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah antara lain BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak Bumi dan Bangunan berikut prosedur dan mekanismenya.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

C. Kebijakan Umum Tahun 2017

Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak retribusi daerah;

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Dari segi penerimaan, pembiayaan diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran Tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, juga dilakukan penerimaan dari hasil pinjaman daerah, guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat;
2. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, pemerintah kabupaten telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah
3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

3.3. Kerangka Pendanaan

Seperti telah tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263 ayat (3), bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. Visi, misi dan program Kepala Daerah yang dimaksud adalah visi, misi dan program Kepala Daerah yang disampaikan kepada masyarakatnya pada saat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya pada masa kampanye. Visi, misi dan program Kepala Daerah yang disampaikan tersebut merupakan caminan dari "janji" kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) Tahun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa RPJMD merupakan dokumen rencana untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.



Untuk merealisasikan janji kampanye Kepala Daerah yang tertuang di dalam visi, misi, dan program prioritas, perlu didukung oleh kapasitas riil keuangan daerah yang memadai. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berdasarkan data historis yang selanjutnya diproyeksikan menjadi potensi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022, kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat dirasakan masih harus ditingkatkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui:
 - 1) Pemutakhiran data objek pajak PBB P2
 - 2) Meningkatkan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB P2 baik objek pajak permukiman maupun objek pajak khusus (bangunan komersil: BTS, Ruko, Hotel/Penginapan, SPBU, dll)
 - 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi daerah lainnya.
 - b. Optimalisasi penerimaan PAD dari sumber selain pajak dan retribusi daerah, yaitu optimalisasi kinerja BUMD agar dapat berkontribusi bagi PAD.
2. Peningkatan Pendapatan Transfer (DAU+DAK)
 - a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
 - 1) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21/25/29
Melakukan koordinasi dengan Ditjen Pajak untuk pemutakhiran data subjek PPh Pasal 21/25/29 yang bekerja di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

- 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Transfer Pemerintah Provinsi
Mendorong wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan balik nama terhadap kendaraan yang dimilikinya.
3. Lain-lain Pendapatan yang sah
 - a. Mendorong kepedulian dan peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk ikut meningkatkan pendapatan daerah,
 - b. Mendorong pertumbuhan investasi/ penanaman modal di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c. Meningkatkan pencapaian target kinerja pemerintah daerah baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun dalam hal penyediaan pelayanan publik dalam rangka memperoleh dana insentif (fiskal) dari pemerintah pusat dan provinsi.
 4. Dana Desa
Mendorong penggunaan dana Desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Desa dengan perencanaan pembangunan Kabupaten.



1.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

a) Proyeksi Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan cerminan kemampuan anggaran dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, pendapatan daerah merupakan hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima

Tahun kedepan yang didasarkan pada pertumbuhan selama lima Tahun yang lalu. Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022

1	PENDAPATAN DAERAH	1.135.994.846.661	1.272.094.331.327	1.397.053.764.460	1.534.509.140.906	1.685.710.054.996
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.153.983.659	49.669.382.025	54.636.320.227	60.099.952.250	66.109.947.475
1.1.1	Pajak Daerah	9.949.919.629	10.944.911.592	12.039.402.751	13.243.343.026	14.567.677.329
1.1.2	Retribusi Daerah	2.129.705.700	2.342.676.270	2.576.943.897	2.834.638.287	3.118.102.115
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	3.400.933.330	3.741.026.663	4.115.129.329	4.526.642.262	4.979.306.488
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	29.673.425.000	32.640.767.500	35.904.844.250	39.495.328.675	43.444.861.543
1.2	DANA PERIMBANGAN	960.612.627.000	969.173.889.700	1.063.841.278.670	1.167.975.406.537	1.282.522.947.191
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26.240.072.000	28.864.079.200	31.750.487.120	34.925.535.832	38.418.089.415
1.2.2	Dana Alokasi Umum	521.743.958.000	573.918.353.800	631.310.189.180	694.441.208.098	763.885.328.908
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	312.628.597.000	366.391.456.700	400.780.602.370	438.608.662.607	480.219.528.868
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	230.228.236.002	253.251.059.602	278.576.165.562	306.433.782.119	337.077.160.331
1.3.1	Hibah	51.756.600.000	56.932.260.000	62.625.486.000	68.888.034.600	75.776.838.060
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	66.406.856.002	73.047.541.602	80.352.295.762	88.387.525.339	97.226.277.873
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	112.064.780.000	123.271.258.000	135.598.383.800	149.158.222.180	164.074.044.398
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.135.994.846.661	1.272.094.331.327	1.397.053.764.460	1.534.509.140.906	1.685.710.054.996

Sumber: Data diolah, 2017



b) Proyeksi Belanja

Belanja tidak langsung dan belanja langsung Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 diperkirakan akan terus meningkat. Hasil proyeksi terhadap belanja tidak langsung dan belanja langsung Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.6. Proyeksi Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022

Nomor Urut	Uraian	Rencana Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	546.296.574.838	600.926.232.322	661.018.855.554	727.120.741.109	799.832.815.220
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.400.841.829.762	1.842.851.386.708	1.925.833.722.198	1.018.588.353.055	1.154.792.807.627
	JUMLAH BELANJA	1.947.138.404.600	1.443.277.619.030	1.586.852.577.752	1.745.709.094.164	1.954.625.622.847

Sumber: Data diolah, 2017

c) Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 diperkirakan akan terus meningkat. Hasil proyeksi terhadap Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.7. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.232.882.000	11.278.170.200	12.405.987.220	13.646.585.942	15.011.244.536
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		1.622.557.000			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	1.200.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.956.500.000	2.196.150.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.956.500.000	2.196.150.000
Pembiayaan Neto	8.752.882.000	9.628.170.200	10.590.987.220	11.650.085.942	12.815.094.536

Sumber: Data diolah, 2017

d) Proyeksi Surplus/Defisit

Pada RPJMD tahun 2017-2022, diperkirakan kemampuan keuangan daerah Lampung Barat mengalami defisit. Defisit yang diperkirakan berkisar antara Rp.161-256 milyar untuk tahun 2019-2022. Secara lengkap tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Proyeksi Defisit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
DEFISIT	802.390.675.939	161.555.117.503	179.207.826.072	194.549.867.316	256.100.473.315

Sumber: Data diolah, 2017



3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang (2018-2022), kapasitas keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat diharapkan akan semakin meningkat. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan belanja daerah. Proyeksi kapasitas keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.9. Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Rencana Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	1.135.894.846.661,00	1.272.094.331.327,10	1.397.053.764.459,81	1.534.509.140.905,79	1.685.710.054.996,37
2	Perencanaan Pembinaan	10.252.882.000,00	11.278.170.200,00	12.405.987.220,00	13.646.585.942,00	15.011.744.582,21
	Jumlah	1.146.247.728.661,00	1.283.372.501.527,10	1.409.459.751.679,81	1.548.155.726.847,79	1.700.721.299.532,57

Sumber: Data diolah, 2017

Kapasitas kemampuan keuangan daerah merupakan total dana yang diperkirakan dapat tersedia untuk membiayai program/kegiatan pembangunan (pagu indikatif) sesuai urutan prioritas. Kebijakan alokasi anggaran kedalam prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2018-2022 adalah sebagai berikut

Prioritas I

Dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II

Dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran sebagai berikut:

- a. Program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada Tahun rencana. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki

kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misdaerah.

- b. Program prioritas ditingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan PD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Secara garis besar Prioritas II dialokasikan untuk mendanai Urusan Pilihan, Urusan Penunjang dan Urusan Pendukung.

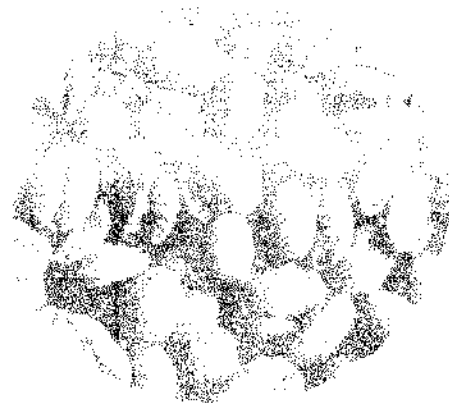
Prioritas III

Dialokasikan untuk mendanai belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi masyarakat, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.



Tabel 3.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.146.247.728.661	1.283.372.501.527	1.409.459.751.680	1.548.155.726.848	1.700.721.299.533
Prioritas I	891.311.705.788	997.938.669.709	1.095.982.967.348	1.203.831.673.745	1.322.465.261.786
Prioritas II	147.253.725.664	164.869.580.568	181.067.490.390	198.885.191.194	216.484.662.078
Prioritas III	107.682.297.220	120.564.251.250	132.409.303.944	145.438.861.908	159.771.375.668





Kebun Raya Liwa

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah;

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

A. Bidang Pendidikan

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pendidikan, yaitu:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
2. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi masih rendah.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh faktor keterbatasan akses dan pendapatan masyarakat untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

B. Bidang Kesehatan

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan kesehatan, yaitu:

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar.
2. Kurangnya jumlah dan distribusi yang tidak merata tenaga kesehatan.
3. Kurangnya ketersediaan dan mutu famasi dan peralatan kesehatan.
4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

1. Masih rendahnya kondisi jalan mantap.
2. Masih ada wilayah yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan jalan dan transportasi.
3. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi.
4. Belum optimalnya pelayanan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi baik di



kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan.

5. Belum semua kawasan strategis memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
6. Perlunya penguatan penataan ruang eksisting guna kepentingan investasi, dan bangunan serta ketersediaan lahan untuk kepentingan publik.
7. Kurangnya kualitas infrastruktur pedesaan.

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu:

1. Kesadaran masyarakat melaksanakan pembangunan ber-IMB masih rendah.
2. Masih adanya kawasan permukiman yang belum terlayani air bersih dan sanitasi yang layak.
3. Masih adanya kawasan pemukiman kumuh (seluas 39,3 Ha) dan rumah tidak layak huni.



E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masih kurangnya kesiagaan bahaya kebakaran.
2. Masih kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam.
3. Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja).
4. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan masyarakat.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum.

F. Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan

1. Belum adanya roadmap pembangunan desa dan kawasan pedesaan.
2. Terbatasnya kapasitas pemerintahan pekon.
3. Belum kuatnya pondasi perekonomian pekon.
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pekon.
5. Lemahnya akses terhadap sentra-sentra produksi dan pelayanan publik.

G. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Lampung Barat mengalami permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
2. Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB.
3. Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan bagi ketahanan keluarga.
4. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi dan pembangunan.
5. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya dan penanggulangannya.
6. Masih kurangnya keberpihakan pembangunan terhadap perempuan dan anak.



H. Pemuda dan Olahraga

Permasalahan bidang pemuda dan olah raga di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Masih rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif.
2. Kurangnya minat generasi muda untuk berwirausaha.
3. Kurangnya prestasi olah raga;
4. Kurangnya pembinaan dan pelayanan bidang olahraga;
5. Belum berkembangnya olahraga tradisional.

I. Bidang Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Belum sepenuhnya hasil budaya dan kearifan lokal masyarakat terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual.
2. Belum terintegrasinya hasil seni budaya Lampung Barat bagi pengembangan industri pariwisata.
3. Masih lemahnya upaya-upaya pelestarian situs-situs peninggalan budaya (cagar budaya).
4. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok budaya dan kesenian;
5. Kurangnya bantuan peralatan/fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya.

J. Bidang Keagamaan

Permasalahan bidang agama di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Masih perlunya pembinaan dan insentif guru ngaji;
2. Kurangnya kesadaran belajar agama pada generasi muda.

K. Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Belum optimalnya sistem informasi dan pelayanan bidang ketenagakerjaan.
2. Rendahnya kualitas tenaga kerja.
3. Kurangnya pendidikan/latihan keterampilan kerja.

L. Bidang Perdagangan, UMKM dan Koperasi

Permasalahan yang terdapat pada bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, UMKM dan Koperasi di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan;
2. Rendahnya daya saing produk UMKM;
3. Belum optimalnya peranan koperasi pada sektor riil;
4. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas;
5. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas yang terbatas;
6. Belum perkembangnya pemasaran produk UMKM;
7. Rendahnya aksesibilitas permodalan dan perbankan; dan
8. Rendahnya penguasaan teknologi oleh sektor UMKM dan Koperasi.

M. Bidang Kepariwisata

Permasalahan yang terdapat pada bidang pariwisata di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata;
2. Kurangnya sumberdaya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi dan kualitas;
3. Belum intensifnya pemasaran wisata berbasis teknologi informasi;
4. Sarana dan prasarana pada obyek wisata kurang mendapat perawatan;
5. Infrastruktur, khususnya jalan menuju obyek wisata belum mantap;
6. Belum ada keterpaduan antara pariwisata dengan produk-produk unggulan daerah;

N. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Permasalahan yang terdapat pada bidang iptek di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Belum optimalnya upaya-upaya pengembangan teknologi tepat guna;
2. Masih rendahnya implemmentasi hasil penelitian di tingkat lapangan;
3. Kurangnya kerjasama kepada Lembaga Penelitian setingkat Nasional dan Internasional;

O. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat antara lain:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam belum memperhatikan kaidah konservasi;



2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan;
3. Kurangnya penegakan hukum lingkungan;
4. Belum optimalnya penanganan persampahan dengan cara 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*);
5. Masih rendahnya jangkauan pelayanan persampahan;
6. Produktivitas pertanian dan perkebunan masih rendah;
7. Belum semua kawasan hutan dilakukan penetapan batas;
8. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekitar hutan;
9. Kondisi bentang alam yang rawan terhadap resiko bencana;
13. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan kelembagaan perlindungan perlindungan perempuan
14. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak
15. Peningkatan perlindungan anak dan efektifitas kelembagaan perlindungan anak

4.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan kajian terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung serta analisis terhadap kondisi Kabupaten Lampung Barat, beberapa isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Beberapa isu strategis di bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama antara lain adalah:

1. Pengendalian jumlah penduduk melalui KB dan pembangunan keluarga
2. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia
3. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan
5. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkualitas
6. Penguatan tata kelola pendidikan
7. Peningkatan pendidikan keagamaan
8. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
9. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
10. Peningkatan budaya dan prestasi olah raga
11. Pelestarian warisan budaya
12. Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia

B. Bidang Ekonomi

1. Peningkatan penerimaan daerah dan kualitas belanja daerah
2. Optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah
3. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
4. Peningkatan pariwisata
5. Peningkatan ekonomi kreatif
6. Peningkatan investasi
7. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
8. Pengembangan kerja sama bidang ekonomi

C. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Pemanfaatan IPTEK bagi pembangunan daerah

D. Bidang Hukum dan Birokrasi

1. Kualitas penegakan hukum
2. Pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelayanan publik

E. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

1. Pembangunan data dan informasi geospasial
2. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
4. Ketersediaan tanah bagi pembangunan
5. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan
5. Pembangunan kawasan strategis
7. Pembangunan daerah/desa tertinggal

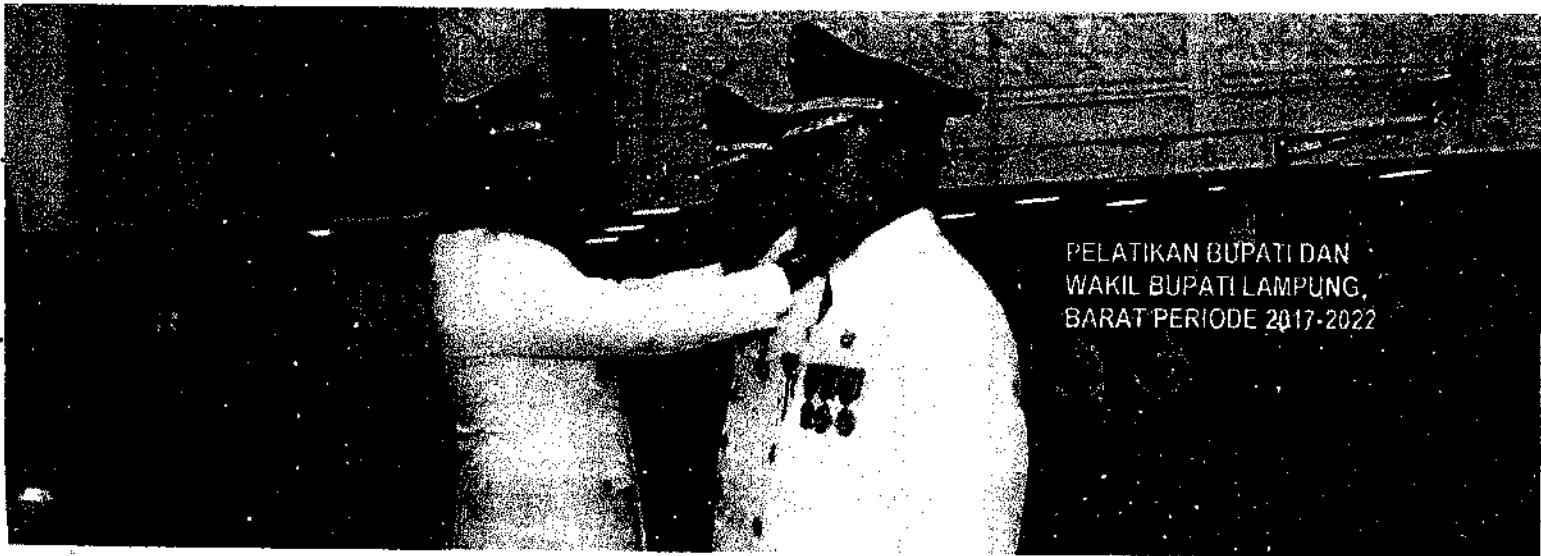
F. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah
2. Kesiapan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi
3. Diversifikasi dan konservasi energi



4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur
 2. Pengembangan agribisnis
 3. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan dan peternakan
 4. Konservasi dan tata kelola hutan
 5. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana
- G. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**
1. Kemandirian pangan





PELATIKAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMPUNG,
BARAT PERIODE 2017-2022

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMN. Visi dan misi kepala daerah yang dimaksud adalah visi dan misi kepala daerah yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi kepala daerah tersebut merupakan cerminan dari kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, saat ini telah sampai pada periode pembangunan jangka menengah tahap 3 dari RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2005-2025, yaitu periode 2017-2022. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap 3 dari RPJP Kabupaten Lampung Barat 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi pedoman utama dalam pembangunan lima tahun Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2022 yang dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

5.1. VISI

Visi RPJMD Kabupaten Lampung Barat merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Lampung Barat yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka Visi RPJMD Kabupaten Lampung Barat mencerminkan kondisi Kabupaten Lampung Barat yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi kepala daerah Kabupaten Lampung Barat terpilih untuk masa jabatan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut (telah disesuaikan dengan kaidah dan prinsip perencanaan pembangunan daerah):

"TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA"

Dalam rumusan visi ini, *hebat* bermakna: "Semangat untuk Mengoptimalkan Potensi yang Ada dan Sangat Besar untuk Kesejahteraan Masyarakat."

HEBAT merupakan akronim dari: *Harmoni, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa*
HARMONI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *harmoni* berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, *harmoni* bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.



ELOK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosial-kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.

BERDAYA SAING

Berdaya saing bermakna memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Segecap kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Lampung Barat diarahkan untuk mampu berkompetisi baik pada tingkat regional maupun internasional.

AMAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aman berarti: bebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya), terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir. Dalam rumusan visi ini, AMAN bermakna Keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Lampung Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, kondisi ini perlu di pelihara dan dipertahankan sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

TAQWA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taqwa berarti: terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; kesalehan hidup. Dalam rumusan visi ini, Taqwa bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek pembangunan.

SEJAHTERA

Sejahtera dalam rumusan visi ini bermakna: "Masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai." Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segecap sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Sejahtera juga mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Kesejahteraan dari sudut pandang pelayanan publik menunjuk kepada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejahtera merupakan Tujuan Akhir atau Keadaan yang diharapkan. Dalam kondisi sejahtera, jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah), derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius, toleran, seluruh warga masyarakat bebas menjalankan aktivitas keagamaannya, bermoral tinggi, rukun, harmonis dan berbudaya.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.



Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah periode 2017-2022, rumusan misi pembangunan daerah untuk mencapai Visi "**TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA**" dapat formulasikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini karena jika visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran untuk mencapai rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 5.1.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun				OPD Penanggung Jawab		
				Data Awal Tahun 2017	2018	2019	2020		2021	2022
VISI										
TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA										
Misi 1										
Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan										
1.1		Tujuan 1.1								
		Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)	51,21%	55,50%	62,00%	68,00%	74,00%	80,00%	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
			Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen)	72,22%	75,22%	78,22%	81,22%	84,22%	87,22%	Dinas PUPR
			Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	42%	45%	49%	53%	56%	60%	Dinas PUPR
			Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	9,06%	15,28%	25,93%	36,66%	47,40%	58,13%	Dinas PUPR, Dinas Sosial
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,16	60,35	61,28	62,98	63,57	64,12	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR, Bappeda, Satpol PP





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal Tahun 2017	Target Capaian Tahun				OPD Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021		2022
1.1.1		Sasaran 1.1.1 Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)	51,21%	55,50%	62,00%	68,00%	74,00%	80,00%	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
			Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen)	72,22%	75,22%	78,22%	81,22%	84,22%	87,22%	Dinas PUPR
1.1.2		Sasaran 1.1.2 meningkatkan konektivitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (Persen)	30,88%	32,35%	33,82%	35,29%	36,76%	38,24%	Dinas Perhubungan
			Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet (Persen)	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	Dinas Kominfo
			Persentase desa yang dialiri listrik (Persen)	82,35%	86,03%	89,71%	93,38%	97,06%	100,00%	Sekretariat Daerah
1.1.3		Sasaran 1.1.3 tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	42%	45%	49%	53%	56%	60%	Dinas PUPR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal Tahun 2017	Target Capaian Tahun				OPD Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021		2022
1.1.4		Sasaran 1.1.4 meningkatkan perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase Penangan Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	9,06%	15,28%	25,93%	36,66%	47,40%	58,13%	Dinas PUPR, Dinas Sosial
			Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	90,91%	92,30%	93,27%	94,25%	95,22%	96,20%	Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (PoIh)	57,16	60,35	61,28	62,98	63,57	64,12	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.5		Sasaran 1.1.5 meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Pemantauan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas PUPR, Bappeda, Satpol PP
1.1.6		Sasaran 1.1.6 meningkatkan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan								



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal Tahun 2017	Target Capaian Tahun			OPD Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020		2021
1.2		Tujuan 1.2 Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap bencana	Persentase desa tangguh bencana (Persen)	1,47%	4,41%	13,23%	17,64%	22,05%	BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas PMP
1.2.1		Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana (Persen)	1,47%	4,41%	13,23%	17,64%	22,05%	BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas PMP
			respon time tanggap bencana (Jam)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	BPBD, dinas sosial, Satpol PP



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal Tahun 2017	Target Capaian Tahun			OPD Penanggung Jawab		
					2018	2019	2020			
2	Misi 2.									
	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing									
2.1	Tujuan 2.1									
	Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang berdaya saing		indeks pembangunan manusia (Poin)	66,06	66,21	66,98	67,75	68,54	69,34	Seluruh OPD (Bappeda)
2.1.1	Sasaran 2.1.1									
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat		Usia harapan hidup (Tahun)	66,64	66,94	67,24	67,54	67,84	68,14	dinas kesehatan, RSUD AU
			angka kematian ibu (Per 10.000 Kelahiran Hidup)	105/100000 kelahiran hidup	149	139	130	121	110	dinas kesehatan, RSUD AU
			angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	1,6/1000 KH	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	dinas kesehatan, RSUD AU
			Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	dinas kesehatan, RSUD AU
2.1.2	Sasaran 2.1.2									
	meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Angka Partisipasi Kasar (APK)	111,83	111,84	111,87	111,89	111,91	111,93	dinas pendidikan dan Kebudayaan
			- SD (Persen)	99,31	99,33	99,53	99,73	99,93	99,95	
			- SMP (Persen)							



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun			OPD Penanggung Jawab			
				Data Awal Tahun 2017	2018	2019		2020	2021	2022
2.1.4		Sasaran 2.1.5 meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi (Persen)	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Dinas Pora Pariwisata
2.1.5		Sasaran 2.1.6 meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah Pemuda yang berprestasi (Orang)	20	25	30	35	40	45	Dinas Pora Pariwisata
2.1.6		Sasaran 2.1.7 terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	laju pertumbuhan penduduk (Persen)*	1.17	1.16	1.14	1.12	1.02	0.96	dinas PPKBPPPA
2.1.7		Sasaran 2.1.8 meningkatnya ketahanan pangan	Angka Kelahiran Total (TFR) (Persen)	2.55%	2.51%	2.44%	2.38%	2.27%	2.26%	dinas PPKBPPPA
			Skor pola pangan harapan (Poin)	87,5	88,4	89,1	90	91,1	92,4	Dinas ketahanan pangan, dinas TPH, dinas Perkebunan dan peternakan, dinas perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun				OPD Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019	2020		2021
3	Misi 3								
		Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal							
3.1		Tujuan 3.1							
		meningkatnya pertumbuhan perekonomian kabupaten lampung barat	Laju pertumbuhan ekonomi (Persen) *)	5,01% 5,20%	5-20% 5,40%	5,40%-5,60%	5,60%-5,80%	5,80%-6,00%	Bappeda, dinas TPH, dinas perikanan, dinas perkebunan dan peternakan
3.1.1		Sasaran 3.1.1							
		meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Juta Rupiah) *)	2.767.567,14	2.985.690,05	3.197.846,81	3.410.003,57	3.622.160,33	dinas TPH, dinas perikanan, dinas perkebunan dan peternakan
3.1.1.2		Sasaran 3.1.2							
		meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan (Juta Rupiah) *)	125.064,06	137.057,71	150.201,54	164.605,87	180.391,57	Dinas Perikanan
3.1.2		Sasaran 3.1.3							
		Meningkatnya Pertumbuhan industri Sektor Pariwisata	Rata rata lama tinggal (Hari)	1,00	1,50	2,00	2,00	2,50	Dinas Pora Pariwisata
			Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	16.449	16.778	17.114	17.456	18.161	Dinas Pora Pariwisata





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal Tahun 2017	Target Capaian Tahun			GPD Penanggung Jawab		
					2018	2019	2020		2021	2022
3.1.3		Sasaran 3.1.4 Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri dan perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri (Juta Rupiah) *)	245.241,98	247.694,40	250.171,34	252.673,06	255.199,79	257.751,79	dinas koperindag, Sekretariat Daerah
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan (Juta Rupiah) *)	643.153,98	649.585,52	656.081,37	662.642,19	669.268,61	675.961,30	dinas koperindag, Sekretariat Daerah
3.1.4		Sasaran 3.1.5 Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi (Rupiah)	3.167.204.246	3.325.564.458	3.491.842.681	3.666.434.815	3.849.756.556	4.042.244.384	dinas PMPTSPNaker
3.1.5		Sasaran 3.1.6 Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Jumlah koperasi yang Sehat (Unit)	0	3	6	9	12	15	dinas koperasi ukm
			Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	-13,65%	2%	4%	6%	8%	10%	dinas koperasi ukm



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	OPD Penanggung Jawab
4	Misi 4									
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Tujuan 4.1 terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa	indeks reformasi birokrasi (Predikat)	-	-	C	C	C	C	seluruh OPD (Sekretariat Daerah)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)		CC	B	B	BB	BB	BB	seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan inspektorat)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)		-	-	C	C	C	C	Seluruh OPD Pelayanan (Sekretariat Daerah)
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Seluruh OPD (BPKD)
		Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Predikat)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	seluruh OPD (Sekretariat Daerah)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun				OPD Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019	2020		2021
4.1.1		Sasaran 4.1.1 meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung barat	Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	-	C	C	C	C	seluruh OPD (Sekretariat Daerah)
4.1.2		Sasaran 4.1.2 meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung barat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	B	B	BB	BB	BB	seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan Inspektorat)
4.1.3		Sasaran 4.1.3 meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Seluruh OPD (BPKD) Seluruh OPD Pelayanan (Sekretariat Daerah)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun					OPD Penanggung Jawab			
				Data Awal Tahun 2017	2018	2019	2020	2021		2022		
4.1.4		Sasaran 4.1.4 meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0%	0%	0%	seturuh OPD (Sekretariat Daerah)
4.1.5		Sasaran 4.1.5 menurunnya desa tertinggal	Persentase desa tertinggal (Persen)	29%	19,84%	9,92%	0%	0%	0%	0%	0%	seturuh opd (dinas PMP)
5	Misi 5	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif										
5.1		Tujuan 5.1 Terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	satpol PP, kesbangpol
5.1.2		Sasaran 5.1.1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	satpol PP, kesbangpol
			Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	satpol PP, kesbangpol





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun				OPD Penanggung Jawab	
				Data Awal Tahun 2017	2018	2019	2020		2021
5.1.3	Sasaran 5.1.2 menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	100%	Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	dinas PPKBPPPA
5.1.4	Sasaran 5.1.3 meningkatkan kesetaraan gender	91.54	Indeks pembangunan gender (Poin)	91.60	91.64	91.70	91.74	91.80	dinas PPKBPPPA
5.1.5	Sasaran 5.1.4 menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	49.16	indeks pemberdayaan gender (Poin)	50.2	51.2	52.2	53.2	54.2	dinas PPKBPPPA
5.1.6	Sasaran 5.1.5 Menurunnya pengangguran	14,32%	Angka Kemiskinan (Persen)	14,00%	13,75%	13,00%	12,50%	12,00%	dinas sosial, dinas koperindag, Bappeda Bappeda
		0,36	indeks gini (Poin)	0,34	0,32	0,3	0,28	0,26	
		0,96%	tingkat pengangguran terbuka (Persen)	0,90%	0,85%	0,80%	0,75%	0,71%	dinas PMPTSP naker, Dinas Pora Pariwisata, dinas koperasi ukm;



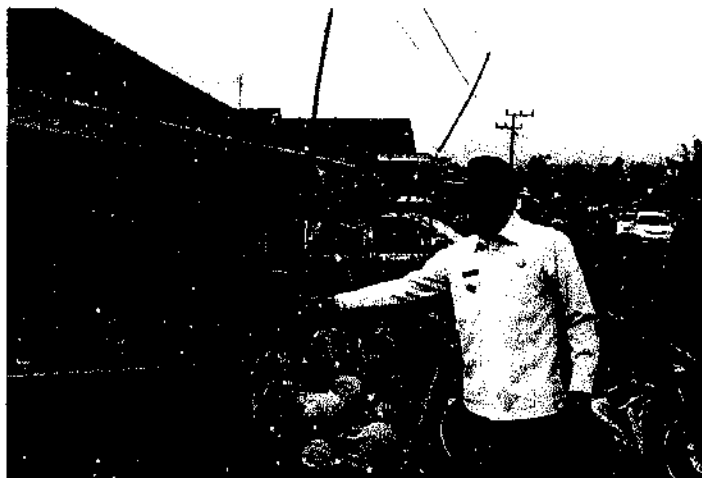
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah (PD) atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Kabupaten Lampung Barat. Secara konseptual strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan tujuan membutuhkan kesatuan tujuan untuk untuk mendapatkan kesatuan tindak.

Penentuan alternatif strategi dilakukan dengan analisis SWOT (*Strength, weakness, Opportunity, Threat*) dengan bahan utama permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Bab IV. Permasalahan dan isu strategis tersebut diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal.





Tabel 6.1. Analisis SWOT Misi 1

IDENTIFIKASI SWOT MISI 1	
<p>Mendukung pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lingkungan.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kecelakaan transportasi rendah 2. Biaya baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari telah terpenuhi 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tinggi 4. Merupakan hulu dari 3 DAS berperan penting sebagai daerah penyangga dan penjaga sistem hidrologi bagi daerah hilir di provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jalan dengan kondisi mantap masih rendah 2. Belum semua pusat-pusat kegiatan dapat dijangkau oleh angkutan umum 3. Kebutuhan rambu lalu lintas belum terpenuhi 4. Cakupan/ jangkauan pelayanan telekomunikasi dan internet masih rendah 5. Cakupan, kapasitas, kualitas, dan aksesibilitas prasarana dan sarana sanitasi lingkungan masih rendah 6. Banyaknya rumah tangga dengan luas lantai rumah kurang dari 19 meter persegi dan rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar leher angsa 7. Tingkat pelayanan pengelolaan persampahan belum optimal 8. Kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya belum terpenuhi 9. Penataan ruang belum terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder) 10. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat belum ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada setiap kecamatan 11. Banyaknya bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan 12. Prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana pada kawasan-kawasan rawan bencana



Dari tabel 6.1 dapat ditentukan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur/prasarana, sarana, fasilitas pendukung sistem jaringan transportasi daerah Pengembangan prasaranan dan sarana perhubungan
2. Perluasan cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi dan informasi
3. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi
4. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum pelayanan dasar permukiman
5. Fasilitasi peningkatan akses dan kualitas infrastruktur jaringan listrik daerah
6. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
7. Pelaksanaan penataan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder)
8. Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan utilitas pendukung mitigasi bencana dengan menerapkan teknologi.





Tabel 6.2. Analisis SWOT Misi 2

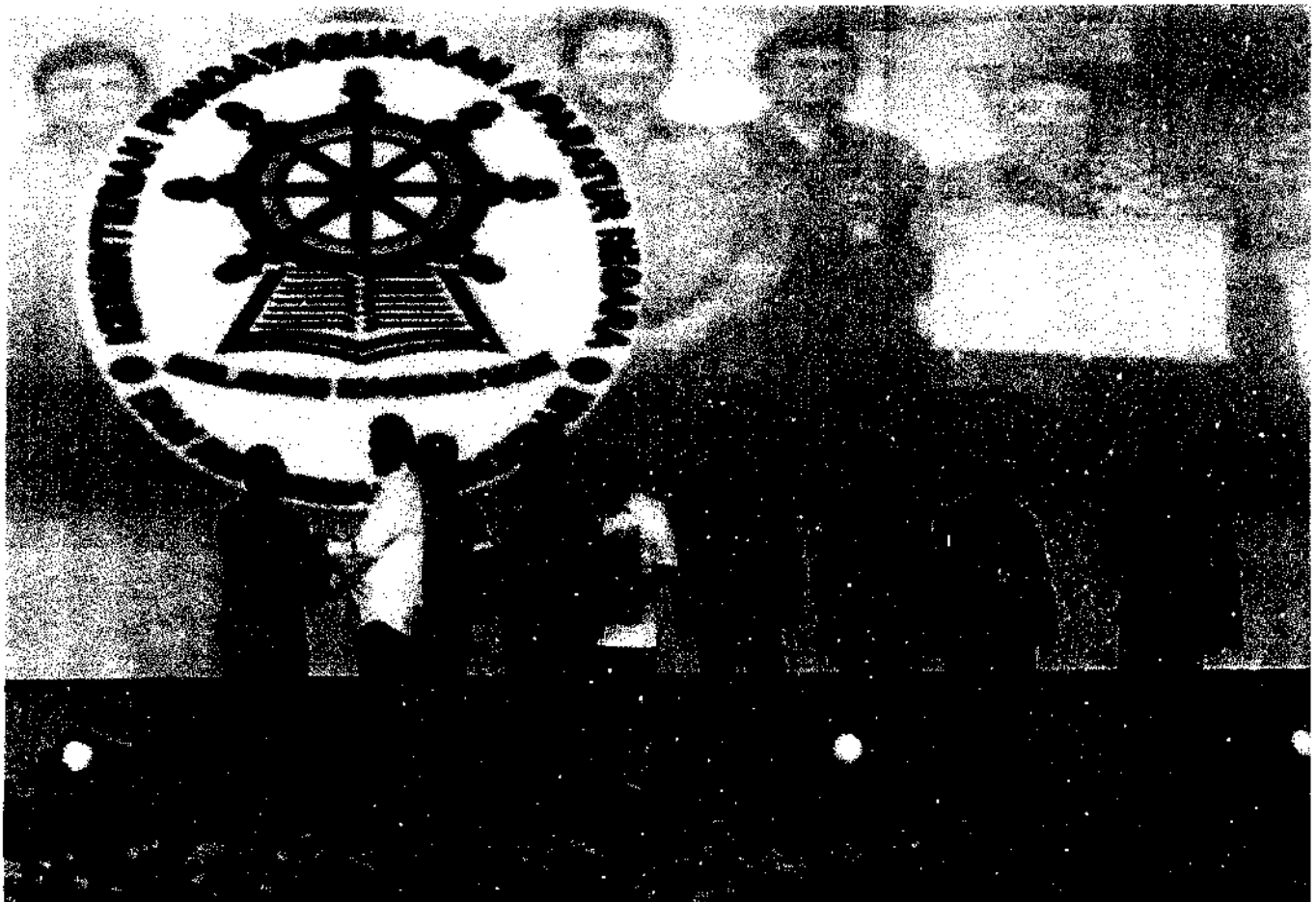
IDENTIFIKASI SWOT MISI II	
Misi 2: Meningkatkan kemampuan keluarga miskin (KPM) yang rentan terhadap bencana	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>1. Adanya tim penggerak masyarakat di tingkat desa/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan sosial dan kesehatan di tingkat masyarakat.</p> <p>2. Adanya Tim Penggerak Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlatih dan terampil.</p> <p>3. Adanya Tim Penggerak Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlatih dan terampil.</p> <p>4. Adanya Tim Penggerak Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlatih dan terampil.</p> <p>5. Adanya Tim Penggerak Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlatih dan terampil.</p> <p>6. Adanya Tim Penggerak Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlatih dan terampil.</p> <p>7. Adanya Tim Penggerak Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlatih dan terampil.</p> <p>8. Adanya Tim Penggerak Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlatih dan terampil.</p> <p>9. Adanya Tim Penggerak Masyarakat Desa/Kelurahan yang terlatih dan terampil.</p>	<p>1. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>2. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>3. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>4. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>5. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>6. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>7. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>8. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>9. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>10. Masih terdapat keluarga miskin yang rentan terhadap bencana.</p> <p>11. Kurangnya kesadaran masyarakat.</p> <p>12. Kurang memadainya fasilitas kesehatan.</p> <p>13. Tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana.</p> <p>14. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesehatan masyarakat.</p> <p>15. Masih tingginya angka pra-sejahtera.</p> <p>16. Angka pernikahan dini (wanita yang melakukan perkawinan dibawah usia 16 tahun) di Kabupaten Lampung Barat masih tinggi.</p>
PELUANG	ANCAMAN
<p>1. Sifat kemandirian masyarakat yang tinggi.</p> <p>2. Banyaknya program-program pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.</p> <p>3. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih.</p> <p>4. Banyaknya sumber daya manusia yang terampil dan terlatih.</p>	<p>1. Bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian.</p> <p>2. Bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian.</p> <p>3. Bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian.</p> <p>4. Bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian.</p>

Sumber: Hasil analisis, 2017



Dari tabel 6.2 dapat ditentukan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil dan merata.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi Ibu Hamil.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Peningkatan dan perluasan akses layanan pendidikan masyarakat yang Bermutu
5. Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja angkatan kerja
7. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
8. Peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan
9. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga





Tabel 6.3. Analisis SWOT Misi 3

IDENTIFIKASI SWOT MISI III	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>1. Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah ekonomi Kabupaten Lampung Barat berada diatas jajar pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung dan Indonesia</p> <p>2. Nilai investasi di Jawa secara umum telah pada level yang tinggi dan akan terus meningkat dengan kontribusi yang signifikan</p> <p>3. Kabupaten Lampung Barat memiliki daerah pertanian yang potensial</p> <p>4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah pemerintah yang memiliki komitmen yang tinggi dan didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas</p> <p>5. Lampung Barat adalah salah satu kawasan Perkebunan Kota Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia</p> <p>6. Memiliki banyak potensi unggulan seperti pariwisata, keindahan alam, kesatuan budaya sebagai daya tarik wisata</p> <p>7. Posisi Kabupaten Lampung Barat sebagai destinasi investasi di wilayah kabupaten kearah daerah di Pulau Sumatera</p> <p>8. Memiliki banyak potensi unggulan seperti kawasan strategis pertanian, industri, jasa</p>	<p>1. masih rendahnya PDRB per kapita</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Lampung Barat</p> <p>3. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian</p> <p>4. Rendahnya produktivitas hasil perkebunan unggulan</p> <p>5. Belum optimalnya pengembangan kawasan agropolitan</p> <p>6. Terus menurunnya persentase luas lahan produktif</p> <p>7. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral seperti keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang</p> <p>8. Rendahnya daya saing perdagangan daerah</p> <p>9. Pola pemasaran produk pertanian masih konvensional</p>
PELUANG	ANCAMAN
<p>1. Peningkatan ketersediaan sarana</p> <p>2. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah</p> <p>3. Peningkatan akses pembiayaan dan jangkauan pemasaran UMKM</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan, pariwisata dan investasi</p> <p>2. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)</p> <p>3. Optimalisasi Promosi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan</p> <p>4. Peningkatan akses pembiayaan dan jangkauan pemasaran UMKM.</p>

Sumber: Hasil analisis, 2017

Dari tabel 6.3 dapat ditentukan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Revitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas destinasi wisata

3. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan, pariwisata dan investasi
4. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)
5. Optimalisasi Promosi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan
6. Peningkatan akses pembiayaan dan jangkauan pemasaran UMKM.



Tabel 6.4. Analisis SWOT Misi 4

IDENTIFIKASI SWOT MISI IV	
<p>KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan 2. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan 3. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan 4. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan 5. Sistem perencanaan yang komprehensif dan terpadu 6. Sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan terpadu 7. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik 8. Tercapainya standar pelayanan minimum dalam pembayar pelayanan publik sebelumnya 	<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kemampuan dan kuantitas data terdapatnya sumber daya aparatur pemerintah kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan pendidikan 2. Kualitas (life) balakang pendidikan dan kemampuan keawakan Kabupaten Lampung Barat kompetensi belum optimal 3. Masih terdapat ketidaksesuaian penempatan pegawai (PNS) antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaannya 4. Pemahaman yang belum merata dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan diantara masing-masing OPD 5. Jumlah dan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat belum merata 6. Ketersediaan jabatan fungsional dan struktural dengan ketersediaan SDM belum optimal
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya fokus kerja online prakarsa untuk peningkatan perlindungan anak dan ketertarikan kelambagaan pendidikan anak 2. Adanya fokus program pemerintah pusat untuk pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelayanan publik 3. Adanya fokus program pemerintah pusat untuk penguatan kelambagaan perlindungan perlindungan perempuan 4. Adanya fokus program pemerintah pusat untuk pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelayanan publik 	<p>ANCAMAN</p>

Sumber: Hasil analisis, 2017

Dari tabel 6.4 dapat ditentukan strategi yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait;
2. Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN dalam mengimplementasikan pelayanan prima;
6. Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait;
7. Penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya lokal.





Tabel 6.5. Analisis SWOT Misi 5

IDENTIFIKASI SWOT MISI V	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sebagai bagian dari kehidupan yang berkelanjutan</p> <p>2. Keberadaan lembaga-lembaga yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan</p> <p>3. Adanya lembaga-lembaga yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan</p> <p>4. Adanya lembaga-lembaga yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan</p> <p>5. Ketersediaan sumber daya manusia yang mudi</p>	<p>1. Ketersediaan anggaran hukum yang terbatas mempengaruhi kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat akan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>2. Kecenderungan meningkatnya angka PMKS dan kekerasan dalam rumah tangga</p> <p>3. Kurangnya keterlibatan gender dalam pembangunan dan kontrol sosial</p> <p>4. Terbatasnya saluran dan sarana prasarana pendukung kreativitas dan pelestarian seni budaya</p> <p>5. Belum sepenuhnya hasil budaya dan kearifan lokal masyarakat yang terdapat sebagai kekayaan intelektual (HAKI)</p>
PELUANG	ANCAMAN
<p>1. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p> <p>2. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p> <p>3. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p> <p>4. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p> <p>5. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p>	<p>1. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p> <p>2. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p> <p>3. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p> <p>4. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p> <p>5. Bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan</p>

Sumber: Hasil analisis, 2017

Dari tabel 6.5 dapat ditentukan strategi pembangunan sebagai berikut

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum masyarakat, perlindungan masyarakat.
2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
3. Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan
4. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
5. Peningkatan produktivitas dan Pengamanan lahan pertanian pangan
6. Peningkatan kesempatan kerja dan menumbuhkembangkan kewirausahaan
7. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja angkatan kerja
8. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan inklusi.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 6.6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI: TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA		Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1	Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan			
Tujuan 1.1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan			
		Sasaran 1.1.1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	1 Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur/prasarana, sarana, fasilitas pendukung sistem jaringan transportasi daerah
		Sasaran 1.1.2	meningkatnya konektivitas antar wilayah	2 Perluasan cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi dan informasi
		Sasaran 1.1.3	tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	3 Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi
		Sasaran 1.1.4	meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	4 Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum pelayanan dasar permukiman
		Sasaran 1.1.5	meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5 Fasilitas peningkatan akses dan kualitas infrastruktur jaringan listrik daerah
		Sasaran 1.1.6	meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	6 Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
				7 Pelaksanaan penataan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

VISI: TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA				
Tujuan		Sasaran		Strategi
Tujuan 1.2	Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap bencana	Sasaran 1.2.1	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	1 Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan utilitas pendukung mitigasi bencana dengan menerapkan teknologi
Misi 2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing			
Tujuan 2.1	Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang berdayasaing	Sasaran 2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	1 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil dan merata 2 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	3 Peningkatan dan perluasan akses layanan pendidikan masyarakat yang bermutu
		Sasaran 2.1.3	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	4 Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan
		Sasaran 2.1.4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	5 Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja angkatan kerja
		Sasaran 2.1.5	Meningkatnya prestasi olahraga	6 Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		Sasaran 2.1.6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	7 Peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

VISI: TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA				
Tujuan		Sasaran		Strategi
		Sasaran 2.1.7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	8 Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Sasaran 2.1.8	Meningkatnya ketahanan pangan	9 Peningkatan produktivitas dan Pengamanan lahan pertanian pangan.
Misi 3	Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal			
Tujuan 3.1	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lampung barat	Sasaran 3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1 Revitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
		Sasaran 3.1.2	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	2. Revitalisasi sektor perikanan
		Sasaran 3.1.3	Meningkatnya pertumbuhan industri sektor pariwisata	3 Peningkatan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas wisata
		Sasaran 3.1.4	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri dan perdagangan	4 Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan, Pariwisata dan Investasi
		Sasaran 3.1.5	Meningkatnya nilai investasi	5 Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)
				6 Optimalisasi Promosi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

VISI: TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	Sasaran 3.1.6 Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	7 Peningkatan akses pembiayaan dan jangkauan pemasaran UMKM
Misi 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	
Tujuan 4.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan berwibawa	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	1 Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait 2 Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah
	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	3 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya kualitas layanan Kabupaten Lampung Barat	4 Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah
	Sasaran 4.1.4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan	5 Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN dalam mengimplementasikan pelayanan prima 6 Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

VISI: TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	Sasaran 4.1.5 Menurunnya desa tertinggal	7 Penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya lokal
Misi 5 Tujuan 5.1	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera	
	Sasaran 5.1.1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	2 Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum masyarakat, perlindungan masyarakat
	Sasaran 5.1.2 Menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	3 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi 4 Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan
	Sasaran 5.1.3 Meningkatnya kesetaraan gender	5 Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
	Sasaran 5.1.4 Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	6 Peningkatan kesempatan kerja dan menumbuhkembangkan kewirausahaan
	Sasaran 5.1.5 Menurunnya pengangguran	7 Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja angkatan kerja



Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Secara rinci dukungan program pembangunan dalam RPJMD terhadap pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

A. SPM Bidang Pendidikan

Arah kebijakan Pembangunan Daerah mengenai penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten mencakup :

1. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, didukung oleh program :
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar didukung oleh program :
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, didukung oleh program :
 - Program Pendidikan Non Formal

B. SPM Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. pelayanan kesehatan ibu hamil, didukung oleh program :
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin, didukung oleh program :
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, didukung oleh program :
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
4. pelayanan kesehatan balita, didukung oleh program :
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, didukung oleh program :
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif, didukung oleh program :
 - Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut, didukung oleh program :
 - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi, didukung oleh program :
 - Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, didukung oleh program :
 - Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, didukung oleh program :
 - Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, didukung oleh program :
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh-manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif, didukung oleh program :
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, didukung oleh program :
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, didukung oleh program :
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
 - Program Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah

D. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, didukung oleh program :
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, didukung oleh program :
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman

E. SPM Bidang Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, didukung oleh program :
 - Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
 - Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
2. pelayanan informasi rawan bencana, didukung oleh program :
 - Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, didukung oleh program :
 - Program Kesiapsiagaan

- Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
4. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana, didukung oleh program :
 - Program Kesiapsiagaan
 - Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
 5. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran, didukung oleh program :
 - Program Kesiapsiagaan
 - Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

F. SPM Bidang Sosial

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, didukung oleh program :
 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan eks trauma
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, didukung oleh program :
 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan eks trauma
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti, didukung oleh program :
 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan eks trauma
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, didukung oleh program :
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, didukung oleh program :
 - Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana

Table 5.8 Program Pembangunan Daerah yang diarahkan ke Indikator Tahun 2019-2022 Kabupaten Lampung Barat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Output/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Peningkat Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Rp	Rp	Rp	Rp			
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian							
	VISI																	
	TERWUJUDNYA LAMUNG, BABAT HEBAT DAN SEJANTERA																	
	Misi 1 Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek masyarakat, budaya dan berkeseluruhan lingkungan																	
	Tujuan 1.1 Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeseluruhan lingkungan																	
		Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)	51,21%	55,50%	62,00%	68,00%	74,00%	80,00%	86,00%									Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen)	72,22%	75,22%	81,22%	84,22%	87,22%	87,22%	87,22%									Dinas PUPR
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi (Persen)	42,00%	45,00%	52,00%	56,00%	60,00%	60,00%	60,00%									Dinas PUPR
		Persentase Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	9,05%	15,28%	25,93%	36,58%	47,40%	58,13%	68,86%									Dinas PUPR, Dinas Sosial
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,15	60,35,00%	61,28,00%	62,98	63,37	64,12	64,12									Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pemanfaatan Laban Sosial RTAW (Persen)	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									Dinas PUPR, Bappeda, Satpol PP
	Sasaran 1.1.1 Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap																	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
		Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)	51,21%	55,50%	62,00%	68,00%	74,00%	80,00%	86,00%									Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen)	72,22%	75,22%	81,22%	84,22%	87,22%	87,22%	87,22%									Dinas PUPR
01 03 5	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	51,21%	55,50%	301.425.000,000	68,00%	136.031.555,000	74,00%	159.316.983,300	80,00%	177.005.750,000	80,00%	177.005.750,000	80,00%	177.005.750,000	80,00%	894.944.269,000	Dinas PUPR

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan D.	Indikator Kinerja Output/Impact/ Outcome	Kondisi Klasifikasi Awal RPMD (Triahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
01.03.06	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan Jembatan	Perentase jalan dan jembatan terpelihara	51,21%	11.450.000.000	62,00%	5.550.000.000	58,00%	6.560.000.000	74,00%	8.992.000.000	80,00%	9.590.400.000	88,00%	42.242.400.000	Dinas PU PR		
01.03.07	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base jalan dan jembatan	Perentase tersedianya data ruas jalan dan jembatan	100,00%	200.000.000	100,00%	240.000.000	100,00%	288.000.000	100,00%	345.600.000	100,00%	414.720.000	100,00%	1.488.320.000	Dinas PU PR		
01.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Perentase aset berse dalam kondisi baik	100,00%	1.200.000.000	100,00%	990.000.000	100,00%	3.288.000.000	100,00%	3.345.600.000	100,00%	3.414.720.000	100,00%	12.236.320.000	Dinas PU PR		
01.03.09	Program Tanggap Pencapaian jalan dan jembatan	Perentase pemeliharaan jembatan dan jalan dan jembatan	100,00%	300.000.000	100,00%	410.000.000	100,00%	432.000.000	100,00%	518.400.000	100,00%	622.800.000	100,00%	2.582.480.000	Dinas PU PR		
01.03.11	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air jalannya	Peningkatan ketersediaan air tanah	20,00%	5.000.000.000	24,00%	1.500.000.000	26,00%	1.800.000.000	28,00%	2.150.000.000	30,00%	2.592.000.000	30,00%	13.052.000.000	Dinas PU PR		
01.03.12	Program Pengendalian Bau	Peningkatan luas sodanab, hiliris, kalijir	35,00%	36.500.000.000	39,00%	15.299.500.000	41,00%	20.205.400.000	43,00%	25.031.280.000	45,00%	26.483.280.000	45,00%	123.503.480.000	Dinas PU PR		
01.03.13	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Peningkatan luas lahan sumber daya air	30,00%	3.200.000.000	33,00%	500.000.000	37,00%	1.000.000.000	39,00%	720.000.000	40,00%	1.364.000.000	40,00%	6.784.000.000	Dinas PU PR		
01.03.14	Program Pembangunan saluran drainase/ Borong gunung/moat	Perentase pemangsaan per limpasan	75,00%	31.275.000.000	85,00%	1.700.000.000	90,00%	2.530.000.000	95,00%	4.216.000.000	100,00%	5.259.200.000	100,00%	45.130.400.000	Dinas PU PR		
01.03.15	Program pengembangan tata ruang/rompong	Perentase penanaman kegiatan longsor (air/aku tanah labil)	65,00%	13.065.000.000	75,00%	1.425.000.000	80,00%	2.620.000.000	85,00%	4.144.000.000	90,00%	5.172.800.000	90,00%	26.426.800.000	Dinas PU PR		
01.03.16	Program Pengembangan Klasifikasi Pengaliran air murni dan air limbah	Perentase air minum jangan	73,00%	24.328.250.000	80,00%	11.796.500.000	84,70%	13.291.500.000	88,60%	14.575.500.000	93,50%	17.568.300.000	92,50%	86.560.050.000	Dinas PU PR		
01.03.17	Program Pengembangan Infrastruktur Pertesaan	Perentase sanitasi jajaj	78,84%	93.157.000.000	85,84%	26.601.387.685	89,34%	39.682.200.000	92,94%	47.940.000	96,34%	66.981.870.800	96,34%	357.947.368.785	Dinas PU PR		
01.03.18	Perencanaan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum	Perentase jalan jembatan dalam kondisi baik	32,68%	93.157.000.000	61,44%	26.601.387.685	77,13%	29.682.200.000	87,59%	39.682.200.000	98,83%	66.981.870.800	98,83%	357.947.368.785	Dinas PU PR		
01.03.19	Perencanaan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum	Perentase Fasilitas Unitim dalam kondisi baik	6,90%	50.000.000	55,00%	6.755.500.000	60,00%	7.100.000.000	65,00%	7.510.000.000	70,00%	7.937.000.000	70,00%	29.727.500.000	Dinas PU PR		

Kode	Misi/Tujuan/Strategi/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja ukuran/Impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Sasaran 1.1.2 meningkatkan koneksi antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan mode transportasi (Perseki)	30,88%	32,35%	33,82%	35,20%	36,76%	38,24%	38,24%	38,24%	38,24%	38,24%	38,24%	38,24%	38,24%	Dinas Perhubungan	
		Persentase desa yang terhubung dengan teknologi komunikasi dan internet (Perseki)	57,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	Dinas Kominfo	
		Persentase desa yang memiliki akses jaringan listrik (Perseki)	82,35%	86,03%	89,71%	93,38%	97,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Secretariat Daerah	
02 09 6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Balai Konديل Bank	35%	35%	40%	45%	59%	450.000.000	450.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000	55%	4.537.000.000	4.537.000.000	Dinas Perhubungan		
02 09 7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Dirhabilitasi	30%	30%	35%	40%	40%	310.000.000	310.000.000	265.000.000	265.000.000	56%	1.158.000.000	1.158.000.000	Dinas Perhubungan		
02 09 8	Pengukuran dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Persentase keamanan Jalan yang Berkecukupan lalu lintas	10%	10%	11%	11%	12%	3.776.600.000	3.776.600.000	2.692.120.000	3.820.582.000	13%	16.988.171.800	16.988.171.800	Dinas Perhubungan		
02 09 9	Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Moda Transportasi yang bebas uji laikarung	51%	49%	49%	49%	50%	1.360.300.000	1.360.300.000	2.860.300.000	1.760.500.000	50%	15.118.575.200	15.118.575.200	Dinas Perhubungan		
02 09 10	Peningkatan Pelayanan Angka Pengalangan Lalu Lintas	Persentase Menurunnya Angka Pengalangan Lalu Lintas	10%	10%	12%	12%	15%	436.796.000	436.796.000	398.900.000	459.040.000	15%	2.170.413.000	2.170.413.000	Dinas Perhubungan		
02 09 11	Pengendalian Lalu Lintas dan Partaikman Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	0	0	0	0	0	174.000.000	174.000.000	185.500.000	185.000.000	0	895.976.200	895.976.200	Dinas Perhubungan		
02 10 5	Program Pengembangan Komunitas, Informasi, dan Media Massa	44 desa yang terhubung dengan jaringan Telekomunikasi dan Internet	20,06%	55,00%	75,00%	75,00%	75,00%	4.016.842.499	4.016.842.499	4.817.144.478	4.817.144.478	75,00%	19.087.228.237	19.087.228.237	Dinas Kominfo		
02 10 6	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Aplikasi	Jumlah Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Aplikasi	500,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	16.772.000	16.772.000	16.772.000	16.772.000	80,00%	218.092.000	218.092.000	Dinas Kominfo		
02 10 7	Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi E-Government	% OPD yang melaksanakan E- Government	0,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	2.437.644.500	2.437.644.500	2.437.644.500	2.437.644.500	60,00%	11.086.694.000	11.086.694.000	Dinas Kominfo		
05 02 8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	100,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	453.214.000	453.214.000	475.736.000	475.736.000	100,00%	2.061.096.000	2.061.096.000	Secretariat Daerah		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Kualitas (Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RP/MD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kualitas pada akhir periode RP/MD	Peringkat Daerah Pembangunan Lingkar
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Sasaran 1.1.3 tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	42%	45%	41%	54%	56%	60%	60%	60%	60%	60%		Dinas PUPR			
01.03.10	Program Pengirangan dan Pengaliran Jaringan Irigasi, Kawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Persentase jaringan irigasi berfungsi baik	42,60%	45,00%	49,00%	58,00%	59,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	192.267.327,000	Dinas PU PR			
	Sasaran 1.1.4 meningkatkan perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan keberlanjutan	Persentase Pemukiman Rumahan Tidak Layak Huni (Persen)	9,00%	15,20%	25,93%	36,60%	47,40%	58,13%	58,13%	58,13%	58,13%	58,13%		Dinas PUPR, Dinas Sosial			
		Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	90,91%	92,80%	93,27%	94,28%	95,29%	96,20%	96,20%	96,20%	96,20%	96,20%		JHnas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan			
01.04.1	Program Pengirangan/ Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Berperumahan Rendah (MBR)	9,27%	15,45%	20,65%	25,81%	30,97%	36,13%	36,13%	36,13%	36,13%	36,13%	1.100.000,000	Dinas PU PR			
01.04.2	Program Lingkungan Perumahan dan Perumahan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Berperumahan Rendah (MBR)	9,27%	15,45%	20,65%	25,81%	30,97%	36,13%	36,13%	36,13%	36,13%	36,13%	4.489.401,700	Dinas PU PR			
01.05.1	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Tahap)	57,16	61,35	61,26	62,99	63,27	64,12	64,12	64,12	64,12	64,12		Dinas Lingkungan Hidup			
02.05.5	Program Pengendalian Pencemaran dan Pencusuan Lingkungan Hidup	Menurunkan jumlah Kasus Pencemaran/ Perusakan Lingkungan Hidup	0,00%	35,00%	30,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6.245.338,900	Dinas Lingkungan Hidup			
02.05.6	Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran Pencusuan Lingkungan Hidup	Persentase Ketercukupan Peningkatan Pengendalian Pencusuan Lingkungan Hidup	0,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	45,00%	45,00%	1.955.765,800	Dinas Lingkungan Hidup			
02.05.7	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	14.895.543,444	Dinas Lingkungan Hidup			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Output/Impact/ Outcome	Kondisi Klasifikasi Aspek KPI/MD (tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Klasifikasi pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Peningkat jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
02.05.09	Program Perhutanan dan konservasi Sumber Daya Alam	Mendukung: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,16%	60,35%	494.614.000	750.000.000	915.000.000	85,57%	855.000.000	64,12%	952.500.000	3.757.144.000	64,12%	Dinas Lingkungan Hidup			
02.05.09	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perikanan	Persebaran Ketersediaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	0,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	-	100,00%	-			
02.05.10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perikanan	Persebaran Ketersediaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	35,00%	45,00%	8.335.046.800	3.640.396.500	4.260.959.000	50,00%	4.593.545.000	70,00%	4.932.271.500	25.752.235.600	70,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
02.05.10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perikanan	Persebaran Ketersediaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	0,00%	20,00%	10.131.390.800	3.769.134.400	3.976.456.800	20,00%	4.179.161.000	20,00%	4.521.477.000	25.697.619.200	20,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
02.05.11	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keluhan Lingkungan dan Tata Kota	Persebaran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keluhan Lingkungan dan Tata Kota	0,00%	15,00%	3.590.000.000	700.000.000	920.000.000	25,00%	1.702.000.000	30,00%	1.715.000.000	7.537.800.000	35,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
02.05.12	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Perumahan Umum	Persebaran Ketersediaan Pemeliharaan Sarana Perumahan Umum	20,00%	25,00%	4.092.694.286	2.369.970.000	2.595.044.000	30,00%	2.757.552.000	40,00%	2.873.400.000	14.697.765.200	45,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
	Sasaran 1.1.6 meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan	Persebaran Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW (persen)	60,00%	100,00%	-	-	-	100%	-	100%	-	-	100%	Dinas PUPR, Bappeda, Satpol PP			
01.03.18	Program Pemecatan Tata Ruang	Peningkatan tata kota bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang	30%	65%	500.000.000	721.210.615	861.500.000	100%	1.018.808.000	100%	1.202.360.000	4.304.070.615	100%	Dinas PUPR			
01.03.19	Program Pengendalian Pemukiman Ruang	Peningkatan tata kota bangunan sesuai dengan program pemukiman ruang	80%	85%	150.000.000	180.000.000	216.000.000	92%	259.000.000	96%	311.040.000	1.116.240.000	96%	Dinas PUPR			
01.03.1	Program Pemecatan Ruang	Persebaran Pemanfaatan Ruang Sesuai Perencanaan	75%	80%	619.176.000	503.784.650	305.000.000	90%	345.000.000	100%	385.000.000	2.157.960.650	100%	Bappeda			

Kode	Misi/Tujuan/Strategi/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja dulu/impak/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPI/MD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangko Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Tujuan 1.2			4,41%		8,82%		13,23%		17,64%		22,05%		22,05%			
	Meningkatnya daya tanggap masyarakat berhadapan bencana	Persentase desa yang memiliki (Persen)	1,47%	4,41%	8,82%	13,23%	17,64%	22,05%	22,05%	22,05%	22,05%	22,05%	22,05%	22,05%		RPBD Dinas PUPK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Saprol PP, Dinas PMP	
	Sub-tujuan 1.2.1			4,41%		8,82%		13,23%		17,64%		22,05%		22,05%			
	Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana	Persentase desa yang memiliki (Persen)	1,47%	4,41%	8,82%	13,23%	17,64%	22,05%	22,05%	22,05%	22,05%	22,05%	22,05%	22,05%		RPBD, Dinas PUPK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Saprol PP, Dinas PMP	
		Respon time tanggap bencana (jam)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam		RPBD, Dinas Sosial, Saprol PP	
04.05.5	Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah ASN/Manuskrip yang memiliki kemampuan penanggulangan bencana	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.890.260.500	RPBD	
04.05.6	Kesiapsiagaan	Persentase desa/pekon yang terakses informasi peringatan dini bencana dan penanggulangan bencana	70%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	3.532.636.500	RPBD	
04.05.7	Penegakan dan Mitigasi Bencana	Persentase jumlah dokumen informasi Pm bencana	50%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	10.125.000.000	RPBD	
04.05.8	Tanggap darurat	Persentase bencana yang ditangani secara optimal	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	7.668.975.000	RPBD	
04.05.9	Manajemen Logistik dan Perbaikan Penanggulangan Bencana	Persentase upaya perbaikan logistik dan penanganan penanggulangan bencana	0%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	9.747.640.000	RPBD	
04.05.10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	0%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	2.107.304.873	RPBD	
04.05.11	Kapabilitas dan rekonstruksi	Persentase bencana penelitian di wilayah pangsa bencana yang berhasil direalisasikan	90%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	44.772.049.000	RPBD	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPMD (tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pundanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
01.02.7	Program Pengembangan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	0 Puskesmas	466.520.000	15 Puskesmas	566.172.000	15 Puskesmas	557.024.000	15 Puskesmas	603.476.000	15 Puskesmas	649.228.000	15 Puskesmas	2.783.120.000	Dinas Kesehatan		
01.02.8	Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dasar	5 Puskesmas	155.000.000	15 Puskesmas	136.569.000	15 Puskesmas	210.062.000	15 Puskesmas	235.000.000	15 Puskesmas	260.000.000	15 Puskesmas	996.500.000	Dinas Kesehatan		
01.02.9	Program Standartisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPT Puskesmas yang melakukan audit dan utama	6 Puskesmas	5.945.104.500	3 Puskesmas	6.601.716.000	3 Puskesmas	6.957.113.100	3 Puskesmas	7.326.900.000	4 Puskesmas	8.125.512.830	15 Puskesmas	34.816.410.410	Dinas Kesehatan		
01.02.10	Program Pengadaan, Kontingensi dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Inggotora	Jumlah Puskesmas dengan sarana prasana dan alat Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Inggotora	4 Puskesmas	109.314.727.000	3 Puskesmas	71.665.300.000	3 Puskesmas	63.229.631.000	3 Puskesmas	55.875.383.500	3 Puskesmas	51.643.225.850	15 Puskesmas	353.726.266.350	Dinas Kesehatan		
01.02.11	Program Keunggulan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan penaiban formal sesuai dengan aturan	25%	1.421.424.000	0,45	1.477.451.200	60%	1.661.661.440	80%	1.854.062.728	100%	2.210.367.523	100%	8.645.266.891	Dinas Kesehatan		
01.02.12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan vakisin serta sarana penunjang PK	90%	4.503.131.915	0,25	4.264.053.040	95%	5.669.514.848	100%	6.852.817.778	100%	8.126.740.938	100%	29.410.258.419	Dinas Kesehatan		
01.02.13	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Alokasi anggaran obat per kapita per tahun	11325 Rp	12000 Rp	11500 Rp	13000 Rp	13500 Rp	14000 Rp	14000 Rp	14000 Rp	14000 Rp	14000 Rp	14000 Rp	Dinas Kesehatan			
01.02.14	Program Jamban Kesehatan Nasional	Persentase obat dan makanan yang memenuhi standar	90%	133.340.000	5 Kec	247.628.400	5 Kec	284.134.000	5 Kec	328.042.896	5 Kec	380.094.325	15 Kecamatan Kec	1.372.642.701	Dinas Kesehatan		
01.02.15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas melakukan promosi Kesehatan Masyarakat	16684 Orang	162.000.000	300700 Orang	194.400.000	300703 Orang	27.370.222.880	300703 Orang	27.370.222.880	300703 Orang	32.838.667.456	300703 Orang	102.200.494.736	Dinas Kesehatan		
01.02.16	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas melakukan promosi Kesehatan Masyarakat	15 Puskesmas	6.594.777.000	15 Puskesmas	10.874.260.000	15 Puskesmas	11.332.807.600	15 Puskesmas	11.645.400.000	15 Puskesmas	11.645.400.000	15 Puskesmas	53.218.441.600	Dinas Kesehatan		
01.02.17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pleton memanfaatkan 10% APB Des untuk sektor Kesehatan	10 Pleton	10 Pleton	30 Pleton	30 Pleton	30 Pleton	30 Pleton	30 Pleton	30 Pleton	30 Pleton	30 Pleton	131 Pleton	-	-		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja utama/impak/ outcome)	Kondisi Awal RPMD Tahun 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pelaksanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Lingkungan Sehat	Jumlah Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah tertinggal, swasembada dan kondisi bencana.	5 Puskesmas	1.469.612.210	8 Puskesmas	1.579.429.210	11 Puskesmas	1.687.024.210	15 Puskesmas	1.735.149.200	15 Puskesmas	1.735.149.200	15 Puskesmas	8.095.649.440	Dinas Kesehatan		
01.02.19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	49%	380.000.000	55%	550.000.000	68%	300.000.000	65%	515.000.000	70%	470.000.000	70%	2.195.000.000	Dinas Kesehatan		
01.02.20	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.	Jumlah pekon deklarasi UPT Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan perencanaan Puskesmas	8 Pekon 3 Puskesmas	303.000.000	15 Pekon 15 Puskesmas	397.828.150	15 Puskesmas	448.480.800	15 Puskesmas	494.132.450	15 Pekon 15 Puskesmas	539.786.100	75 Pekon 15 Puskesmas	2.183.270.500	Dinas Kesehatan		
01.02.21	Program Upaya Kesehatan Rutin	Jumlah Puskesmas menjalankan Sistem Informasi Puskesmas (SIPP) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan Protop rujukan	3 Puskesmas 0%	6.007.097.000	15 Puskesmas 1	6.027.453.000	100%	10.024.073.000	100%	10.878.073.000	100%	4.068.825.000	100%	38.955.521.000	Dinas Kesehatan		
01.02.22	Program peningkatan kesadaran ibu melahirkan dan anak	Persentase Antenatal Care (ANC) Persentase Perinatal Care (PNC)	0,8 0,8	3.950.000.000	0,85 0,85	3.979.000.000	99%	4.354.000.000	95%	4.650.000.000	100%	4.700.000.000	100%	21.643.000.000	Dinas Kesehatan		
01.02.23	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	UPT Puskesmas melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok Jumlah desa/pekon melaksanakan program pengendalian PTM	15 Puskesmas 108 Desa	1.827.196.000	15 Puskesmas 115 Desa	1.075.450.000	15 Puskesmas	2.045.173.500	15 Puskesmas	2.278.908.125	150 Desa 15 Puskesmas	2.584.418.344	150 Desa 15 Puskesmas	10.411.055.969	Dinas Kesehatan		
01.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Iwra dan NAPZA	UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan dan pengujian kesehatan Iwra UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan dan pengujian NAPZA	2 Puskesmas 1 Puskesmas	300.000.000	15 Puskesmas 15 Puskesmas	340.000.000	15 Puskesmas	390.000.000	15 Puskesmas	435.000.000	150 Desa 15 Puskesmas	480.000.000	150 Desa 15 Puskesmas	1.945.000.000	Dinas Kesehatan		
01.02.25	Program Pelayanan Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase penduduk miskin yang mendapat pelayanan dasar gratis di Puskesmas.	100%	5.056.000.000	0	5.056.000.000	0%	5.056.000.000	0%	5.056.000.000	0%	5.056.000.000	100%	5.056.000.000	Dinas Kesehatan		
01.02.26	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase pekon yang memiliki outlet titik pembayaran peserta UKN Mandiri	43% dari 136 pekon kabupaten	11.574.540.000	0	11.574.540.000	0%	11.574.540.000	0%	11.574.540.000	0%	11.574.540.000	50%	11.574.540.000	Dinas Kesehatan		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tunjangan/output/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Pengurus Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Kp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
01	02	5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	19124 orang	14903310000	28081 orang	15052343100	21065 orang	15804060255	22140 orang	165955486268	23247 orang	17424466681	105677 orang	79780790304	RSUD AU	
01	02	6	Program Promosi Kesehatan dan Keberdayaan Masyarakat	3 jenis	64550000	3 jenis	89799500	3 jenis	103269445	3 jenis	1123301043	3 jenis	114276166	15 jenis	489225214	RSUD AU	
01	02	7	Program pengabdian sarana dan prasarana dan pelayanan rumah sakit/rumah sakit jawa/rumah sakit paciparan/ rumah sakit mata	80,00%	18816897000	85,00%	4961647350	90,00%	3097691459	90,00%	3252379179	100,00%	3415208134	100,00%	31543936112	RSUD AU	
01	02	8	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jawa/rumah sakit paciparan/ rumah sakit mata	80,00%	479636000	85,00%	495185300	90,00%	519444465	95,00%	545939598	100,00%	573236368	100,00%	2633937921	RSUD AU	
01	02	9	Program upaya kegiatan Masyarakat	640 orang	35000000	1007 orang	368200000	1067 orang	423430600	1097 orang	444691500	1007 orang	466831575	5035 orang	2053463075	RSUD AU	
01	02	10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	10,00%	126099000	10,00%	145013850	10,00%	156415928	10,00%	169010817	10,00%	182751565	50095	779491160	RSUD AU	
01	02	11	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	79(B) Prediktab	465316057	>80(B) Prediktab	270704350	>80(B) Prediktab	737774565	>80(B) Prediktab	747550322	>80(B) Prediktab	360307224	>80(B) Prediktab	2181654018	RSUD AU	
			Sasaran 2.3.2 meningkatkan akreditasi dan kualitas pendidikan														
				11,83	111,84	111,87	111,89	111,91	111,91	111,91	111,91	111,93	111,93	111,93	111,93		
				99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31		
				100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
				91,8	91,82	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87		
				7,28	7,3	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33		
				12,17	12,27	12,29	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31		
				90,1	90,35	90,60	90,75	90,83	90,83	90,83	90,83	90,83	90,83	90,83	90,83		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Output/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peringkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	No				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Nilai rata-rata Nasional (UN)																	
		- SD (Paket)	209,91	210,01	210,11	210,21	210,31	210,41	210,51	210,61	210,71	210,81	210,91	211,01	211,11	211,21	211,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		- SMP/PAUD	235,81	236,01	236,21	236,41	236,61	236,81	237,01	237,21	237,41	237,61	237,81	238,01	238,21	238,41	238,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01 01 1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	31,70%	32,11%	32,52%	32,93%	33,34%	33,75%	34,16%	34,57%	34,98%	35,39%	35,80%	36,21%	36,62%	37,03%	37,44%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01 01 6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persentase Anak yang mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	95,80%	95,93%	96,06%	96,19%	96,32%	96,45%	96,58%	96,71%	96,84%	96,97%	97,10%	97,23%	97,36%	97,49%	97,62%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01 01 7	Program Pendidikan Non Formal	Persentase penduduk Tingkat SD yang mengikuti Pendidikan Non Formal	83,53%	84,37%	85,21%	86,06%	86,90%	87,74%	88,58%	89,42%	90,26%	91,10%	91,94%	92,78%	93,62%	94,46%	95,30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01 01 8	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pendidikan oleh Pembah Lampung Barat	0,00%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	80,00%	96,00%	112,00%	128,00%	144,00%	160,00%	176,00%	192,00%	208,00%	224,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01 01 9	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01 01 10	Program Pembinaan Kesehatan dan Kebudayaan di Lingkungan Sekolah	Jumlah lengkap perbaikan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01 01 11	Pembinaan Ketenagagaan	Persentase tenaga pendidik yang dibina	0,4475	0,4393	0,4311	0,4229	0,4147	0,4065	0,3983	0,3901	0,3819	0,3737	0,3655	0,3573	0,3491	0,3409	0,3327	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
02 17 5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Perpustakaan	25%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
02 17 6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan perpustakaan	Jumlah Sarana Prasarana Perpustakaan yang tersedia	0	30 Unit	17 Unit	22,950,000,000	16 Unit	22,950,000,000	16 Unit	22,950,000,000	16 Unit	22,950,000,000	16 Unit	22,950,000,000	16 Unit	22,950,000,000	16 Unit	22,950,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/Problematika Detail	Indikator Kinerja ujjian/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal SPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tingkat	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
	Sasaran 2.1.7 Meningkatkan jumlah perempuan/pengaduh penduduk	1.16	1.14	1.12	1.02	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	Dinas PPKBPPPA	
02.08.5	Program Keluarga Berencana	2.51%	2.44%	2.38%	2.27%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	Dinas PPKBPPPA	
02.08.6	Program Pengembangan Model Operasional BKB- Pasuruan-PAUD	47.60%	50.10%	53.10%	56.10%	59.10%	60.10%	60.10%	60.10%	60.10%	60.10%	60.10%	60.10%	60.10%	60.10%	Dinas PPKBPP dan PA	
02.08.7	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KB yang Mandiri dalam MKIP	5.514	6.632	7.500%	8.670%	9.500%	10.670%	11.500%	12.670%	13.500%	14.670%	15.500%	16.670%	17.500%	18.670%	Dinas PPKBPP dan PA	
02.08.8	Program Kesehatan Reproduktif Remaja	35.10%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	Dinas PPKBPP dan PA	
02.08.9	Program Pengawasan Konseling Remaja	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	3 kelampok	Dinas PPKBPP dan PA	
02.08.11	Program peningkatan penguasaan narikoba, PMS termasuk HIV/AIDS	10.00%	9.00%	8.00%	7.00%	6.00%	5.00%	4.00%	3.00%	2.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Dinas PPKBPP dan PA	
02.06.5	Pelayanan Pemeliharaan Penduduk	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Dinas Kependudukan dan Sipil	
02.06.6	Pelayanan Akta Pencapaian Sipil	85.00%	87.00%	90.00%	92.00%	95.00%	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Kependudukan dan Sipil	
02.06.7	Pengukuhan Informatasi Kependudukan	28 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	Dinas Kependudukan dan Sipil	

Kode	Misi/Tujuan/Strategi/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja kuantitatif/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Peningkat Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tingkat	Rp		
				Tingkat	Rp	Tingkat	Rp	Tingkat	Rp	Tingkat	Rp	Tingkat	Rp				
02.06.8	Pemantauan dan inovasi pelayanan	Persentase capaian layanan kependudukan	0%	60,00%	149.960.000	70,00%	171.304.000	80,00%	196.999.600	90,00%	226.540.540	100,00%	240.571.971	100,00%	1.004.345.111	Dinas Kependudukan dan Sipil	
	Sasaran 2.1.8 meningkatkan kemampuan pangan	Skor pola pangan harian (FOP)	87,50	88,40		89,1	90		91,1	92,4	92,4	92,4			Dinas Kerjasama pangan, dinas TPH, dinas Perkebunan dan perikanan, dinas perikanan		
02.03.5	Program Pengembangan Ketersediaan dan Pemasokan Rawa Pangan	Persentase terdapat penyediaan ketersediaan energi dan protein wilayah	5%	10%	1.277.000.000	15%	2.891.000.000	20%	2.901.000.000	25%	3.205.000.000	30%	3.305.000.000	30%	13.497.000.000	Dinas Kelautan Pangan	
02.03.6	Program Penyiapan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan data dan informasi ketahanan pangan	75%	100%	666.000.000	100%	440.000.000	100%	465.000.000	100%	470.000.000	100%	470.000.000	100%	2.511.000.000	Dinas Kelautan Pangan	
02.03.7	Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Keamanan Pangan	Persentase penurunan variabel stok dan harga pangan	5%	5%	506.000.000	10%	423.000.000	15%	438.000.000	20%	463.000.000	25%	463.000.000	25%	2.313.000.000	Dinas Kelautan Pangan	
02.03.8	Program Pengembangan Pengembangan Kapasitas Pangan dan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas keamanan pangan	2%	2%	1.223.000.000	4%	795.000.000	6%	995.000.000	8%	1.050.000.000	10%	1.055.000.000	10%	5.118.000.000	Dinas Kelautan Pangan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Detail	Indikator Kinerja tambahan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RUPMD (7-tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peningkat Darah Peningkat Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tingkat	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
	03.01.1 Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro- bisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal		5,01%	5,00%-5,20%	5,20%-5,40%	5,40%-5,60%	5,60%-5,80%	5,80%-6,00%	5,80%-6,00%	5,80%-6,00%	5,80%-6,00%							
	Tujuan 3.1 Meningkatkan perekonomian kemampuan berpikir benar	Laju pertumbuhan ekonomi (Persen *)	5,01%	5,00%-5,20%	5,20%-5,40%	5,40%-5,60%	5,60%-5,80%	5,80%-6,00%	5,80%-6,00%	5,80%-6,00%	5,80%-6,00%							
	Sasaran 3.1.1 Meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Serta (PDRB) subsektor Pertanian, Perikanan, Pertanian, Perikanan, Perburuan dan Jasa Perikanan	Produk Domestik Regional Serta (PDRB) subsektor Pertanian, Perikanan, Perburuan dan Jasa Perikanan (Juta Rupiah) *)	2.767.567,14	2.485.694,05	3.197.846,81	3.410.063,57	3.622.160,33	3.834.317,09	3.834.317,09	3.834.317,09	3.834.317,09							
03.01.5	Program Perencanaan Pembangunan Pertanian	Peningkatan data perencanaan dan evaluasi	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		158.655,000	20%	158.655,000	100%	770.610,000	Dinas TPH
03.01.6	Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Tani	Jumlah hektar pertanian per tahun dan Mutu Hasil Tani	2,1%	2,25 Kali	2,3 Kali	2,34 Kali	2,39 Kali	2,44 Kali	2,49 Kali	2,54 Kali	2,59 Kali		1.190.364,000	2,44 Kali	1.236.797,000	2,44 Kali	5.473.395,000	Dinas TPH
03.01.8	Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah produksi/padi dan jagung per hektar pertanian	5,14 ton	5,25 ton	5,34 ton	5,43 ton	5,52 ton	5,61 ton	5,70 ton	5,79 ton	5,88 ton		6.494.150,000	10%	6.785.457,000	10%	31.780.316,500	Dinas TPH
03.01.9	Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelangkaan Tani	Persentase peningkatan kelembagaan tani dan kelembagaan Tani	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%		662.000,000	15%	662.000,000	15%	4.025.000,000	Dinas TPH
		Persentase peningkatan kompetensi penyuluh pertanian	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%			20%		20%		Dinas TPH

Kode	Misi/Tujuan/Struktur/ Program/ Peningkatan Daerah	Indikator Kinerja Output/Output/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pesisir												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Peningkat Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			Kondisi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
03 01 5	Program Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Muli Perikanan Perikanan	Persentase peningkatan produktivitas perikanan perikanan	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	5,722,458,200	5%	32,102,634,650	DISBUNNAK		
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman perikanan	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		5%		DISBUNNAK		
		Persentase peningkatan mulut tanaman perikanan	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		50%		DISBUNNAK		
03 01 6	Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perikanan dan perikanan dan perikanan	Persentase penyediaan prasarana dan sarana perikanan dan perikanan dan perikanan	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4,915,000,000	25%	21,217,329,000	DISBUNNAK		
		Persentase kelompok yang mendapat kelas keunggulan	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		25%		DISBUNNAK		
		Persentase kelompok yang unggul	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		25%		DISBUNNAK		
03 01 8	Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	Persentase peningkatan sumber perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	311,500,000	100%	1,771,812,000	DISBUNNAK		
03 01 9	Peningkatan Produk Hasil Perikanan	Persentase peningkatan angka kelahiran ternak	6,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	1,250,000,000	100,00%	6,915,200,000	DISBUNNAK		
		Jumlah jenis bibit ternak	0 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis		3 jenis		DISBUNNAK		
		Jumlah kelompok budidaya ternak	0 kelompok	20	20	20	20	20	20	20	20	20		100		DISBUNNAK		
03 01 10	Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Nilai Cakupan Interval Sapi	0 Bulan	12-13 Bulan	12-13 Bulan	12-13 Bulan	12-13 Bulan	12-13 Bulan	12-13 Bulan	12-13 Bulan	12-13 Bulan	12-13 Bulan	270,000,000	12-13 Bulan	1,235,700,000	DISBUNNAK		
		Nilai Cakupan Interval Kambing	0 Bulan	7-8 Bulan	7-8 Bulan	7-8 Bulan	7-8 Bulan	7-8 Bulan	7-8 Bulan	7-8 Bulan	7-8 Bulan	7-8 Bulan		7-8 Bulan		DISBUNNAK		
		Nilai S/C (Service per Conception)	0 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali		2,3 Kali		DISBUNNAK		
		Nilai BCS (Body Condition Scoring)	0,00%	3-3,5%	3-3,5%	3-3,5%	3-3,5%	3-3,5%	3-3,5%	3-3,5%	3-3,5%	3-3,5%		3-3,5%		DISBUNNAK		
		Jumlah usaha pengolah sapi	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		10 Unit		DISBUNNAK		
		Jenis produk perikanan yang dibakukan pengolahan hasilnya	0 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis		1 jenis		DISBUNNAK		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tetapan/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RP/MD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RP/MD	Peningkat Pengaruh Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	No		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Perentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Person)	-13,65%	2,00%		4,00%		6,00%		8,00%		10,00%		10,00%			
02.11.5	Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan Koporeni	Jumlah Koperasi terbita (dan terfasilitasi)	58 Koperasi	50 Koperasi	475.000.000	60 Koperasi	266.000.000	63 Koperasi	300.000.000	69 Koperasi	330.660.000	76 Koperasi	367.426.000	76 Koperasi	1.739.586.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.11.6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM Layak Pembinaan	0 UMKM	177 UMKM	568.000.000	186 UMKM	390.500.000	195 UMKM	439.550.000	205 UMKM	472.505.000	214 UMKM	519.755.500	476 UMKM	2.574.310.500		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.11.7	Program Penyulutan Dasar Bergalur	Jumlah UMKM terbita Jumlah Mitra BLUD	5010 UMKM 394 mitra	5834 UMKM 40 Mitra	260.000.000	6066 UMKM 40 Mitra	145.006.000	6310 UMKM 40 Mitra	159.500.000	6563 UMKM 40 Mitra	175.450.000	6825 UMKM 40 Mitra	192.945.000	6825 UMKM 200 Mitra	432.945.600		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pengembangan Daerah	Indikator Kinerja utama/important/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RP/MD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka-Perencanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RP/MD	Peringkat Daerah Pengembang Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Meningkatkan dan kelembagaan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik																	
	Tahun 2018																	
		Indeks reformasi birokrasi (Indikator)																
		Indeks Sistem Administratif Kinerja Inovasi Pemerintah (SASIP) (Predikat)	CC															
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)																
		Opinion Polling Persepsi Kewaspadaan (OPK) (Predikat Optimal)	WTP															
		Frekuensi Laporan Pengaduan Masyarakat (LPPM) (Predikat)	Sangat Tinggi															
	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks reformasi birokrasi (Predikat)																
05 03 1	Program Penguatan Administrasi Pelayanan Perkantoran	Pembinaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Tepat Waktu	1	10.708.748.400	1	11.223.743.500	1	11.223.743.500	1	11.223.743.500	1	11.223.743.500	1	11.223.743.500	1	11.223.743.500	1	Sekretariat Daerah
05 03 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembinaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	16.766.064.800	40%	9.746.113.550	60%	10.642.358.065	60%	10.642.358.065	100%	11.616.294.643	100%	11.616.294.643	100%	11.616.294.643	100%	Sekretariat Daerah
05 03 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Aparatur yang Berprestasi dan Berkeadilan	100%	164.776.000	20%	794.376.000	60%	223.278.696	60%	246.936.856	100%	270.530.542	100%	270.530.542	100%	270.530.542	100%	Sekretariat Daerah
05 03 4	Program Peningkatan Kepuasan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan aparatur yang tidak mengikuti paulding dan pelatihan formal sesuai dengan BKNIB	100%	284.338.000	40%	311.000.000	60%	311.000.000	60%	311.000.000	100%	311.000.000	100%	311.000.000	100%	311.000.000	100%	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
05.03.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	289.980.000	271.110.000	274.533.000	274.533.000	328.340.800	1.431.961.300	Sekretariat Daerah
05.03.6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Prehayaan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	3.273.634.000	3.625.816.370	3.933.398.007	4.321.737.807	18.500.802.884	18.500.802.884	Sekretariat Daerah
05.03.7	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pembentukan produk hukum yang teralisasi	100%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	1.669.575.500	2.227.828.405	2.612.222.068	2.695.872.170	10.765.277.611	10.765.277.611	10.765.277.611	Sekretariat Daerah
05.03.9	Program Fasilitas dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah masyarakat yang mendapat kegiatan pembinaan di Kabupaten Lampung Barat	3000 orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	1045 Orang	4780 Orang	0	0
05.03.10	Program Peningkatan Pangai dan Peran Kekeluargaan Daerah di Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Pangai dan Peran Kekeluargaan Daerah di Kabupaten Lampung Barat	100%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	11.107.338.500	14.273.871.370	14.491.894.665	16.727.226.890	69.376.577.325	69.376.577.325	Sekretariat Daerah
05.03.11	Program Peningkatan Sistem Manajemen Pemasalahan	Persentase Peningkatan Sistem Manajemen Pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat	100%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	11.357.000	13.620.970	14.983.067	16.481.374	66.725.111	66.725.111	66.725.111	Sekretariat Daerah
05.03.13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur di Kabupaten Lampung Barat	100%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	1.182.937.500	1.415.424.586	1.794.768.222	1.639.730.284	7.660.879.252	7.660.879.252	7.660.879.252	Sekretariat Daerah
05.03.14	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat	100%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	415.765.000	531.620.650	549.502.215	569.459.837	2.595.644.402	2.595.644.402	2.595.644.402	Sekretariat Daerah
05.03.15	Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako di Sembako	Persentase Peningkatan Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako di Kabupaten Lampung Barat	100%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	1.930.761.000	117.689.000	139.453.000	142.464.000	2.427.301.300	2.427.301.300	2.427.301.300	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja nyawa/mp.x./ outcome)	Kondisi Kinerja Awal KIPMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode KIPMD		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
05.03.16	Program Peningkatan Investasi dan Promosi Daerah Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Investasi dan Promosi Daerah Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	1.791.000.000	40%	1.966.165.000	60%	1.236.733.000	80%	2.382.497.000	100%	9.809.393.000	Sekretariat Daerah		
05.03.17	Program Penyempurnaan dan Kelembagaan Kelembagaan Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Penyempurnaan dan Kelembagaan Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	230.000.000	40%	230.000.000	60%	250.000.000	80%	250.000.000	100%	400.000.000	Sekretariat Daerah		
05.03.18	Program Peningkatan Pelaku Ekonomi	Persentase Peningkatan Pendataan Pelaku Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	67.630.000	40%	74.393.000	60%	82.832.300	80%	90.016.000	100%	412.889.300	Sekretariat Daerah		
05.03.19	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	361.275.000	40%	373.825.000	60%	386.825.000	80%	410.825.000	100%	1.946.575.000	Sekretariat Daerah		
05.03.20	Program Perbaikan dan Penguatan Aparatur Pengdaer Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Peningkatan Kelembagaan dan Penguatan Aparatur Pengdaer Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	260.135.000	40%	460.000.000	60%	521.000.000	80%	564.100.000	100%	2.434.749.000	Sekretariat Daerah		
05.03.21	Program Peningkatan Ansar Lembaga Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Peran Ansar Lembaga Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	61.681.500	40%	71.914.900	60%	534.636.300	80%	583.545.021	100%	3.247.022.335	Sekretariat Daerah		
05.03.22	Program Peningkatan Kerjasama Sosial di Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Kerjasama Sosial di Kabupaten Lampung Barat	0%	20%	157.784.500	40%	176.430.000	60%	194.073.000	80%	210.863.010	100%	971.099.820	Sekretariat Daerah		
04.01.3	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Peningkatan Kerjasama Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	59.075.000	40%	64.982.500	60%	71.460.700	80%	78.628.825	100%	360.658.783	Sekretariat Daerah		
04.01.3	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat	100%	100%	2.119.629.000	100%	1.848.677.200	100%	2.016.044.910	100%	2.197.649.412	100%	10.576.914.935	Sekretariat Daerah		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/Pengembangan Daerah	Indikator Kinerja topan/impak/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal BPKMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pelembagaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
02.10.1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Rakor ds Media Massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.873.548.000	4.451.352.980	4.745.430.690	4.324.867.011	5.467.015.703	23.622.214.204	Bekasandir Ubereah
04.03.4	Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	0,00%	44,04%	62,69%	81,00%	81,35%	81,35%	81,35%	81,35%	81,35%	81,35%	8.746.566.083	7.951.387.350	8.746.566.083	9.621.178.654	16.587.294.562	45.180.773.191	BKPSDM
		Pelajar yang memiliki Sertifikat Diklat Keahlian sesuai dengan jenjangnya	64,00%	74,00%	81,00%	81,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%							BKPSDM
04.03.5	Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Layanan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu : % Penyesuaian SK Kenaikan Pangkat % Penyesuaian Kenaikan Gaji Berkala % Penyesuaian SK Pensiun % Penyesuaian KARPEG, KARBES, KARSU, TASPEN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.135.570.300	4.571.182.960	5.053.664.588	5.597.194.286	6.180.562.084	25.336.179.538	BKPSDM
		Aktifitas Disibac Kaps Berjalan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							BKPSDM
		Manajemen yang diuji esensial dengan Syarif Jabatan	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%							BKPSDM
		Pegawai yang memiliki hak sesuai peraturan perundang-undangan	18,00%	40,00%	68,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%							BKPSDM
		Pendidikan terhadap pelanggaran disiplin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							BKPSDM
05.04.4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan SDH	Persentase rencana hasil pengawasan yang diindaklanjuti	60%	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	2.777.139.800	2.672.644.000	2.777.139.800	2.960.610.000	3.157.726.000	14.037.166.050	Inspekturat
05.04.5	Peningkatan Profesionalitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase AP/ P yang memiliki kompetensi esensial dengan jenjang jabatan	85%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	372.761.800	339.855.800	454.856.000	500.340.000	550.372.000	2.218.184.800	Inspekturat
05.04.6	Pemilihan dan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	214.488.500	205.565.800	216.855.000	248.450.000	273.523.000	1.106.150.560	Inspekturat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Output/Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			
				Target	Kp	Target	Kp	Target	Kp	Target	Kp	Target	Kp					
04 04 5	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kajian hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial/bud dan kerjasama yang dihasilkan	1 Dokumen	3 Dokumen	762.800.000	762.800.000	3	Dokumen	2.335.000.000	2.335.000.000	6	Dokumen	2.585.000.000	2.585.000.000	74	Dokumen	12.402.800.000	Rahibang
05 02 6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwalian Rakyat Daerah	Jumlah kelain hasil penelitian dan pengembangan bidang IPTEK dan Inovasi yang dimanfaatkan	2 Dokumen	3 Dokumen	15.642.119.000	15.642.119.000	100%	Dokumen	14.105.500.000	14.105.500.000	100%	Dokumen	15.051.500.000	15.051.500.000	100%	Dokumen	71.992.852.500	SEKRETARIAT DPRD
-	-	Persentase rayat yang terselenggara dengan baik	100%	100%	-	-	100%	Dokumen	-	-	100%	Dokumen	-	-	100%	Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
05 02 7	Program Peningkatan Teknologi Informatika	Persentase fasilitas penyusunan produk hukum daerah	100%	60%	514.352.000	514.352.000	55%	Dokumen	497.500.000	497.500.000	65%	Dokumen	593.275.000	593.275.000	75%	Dokumen	2.501.976.500	SEKRETARIAT DPRD
02 04 1	Program Peningkatan kemampuan, peningkatan dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah milik pemerintah Kab. Lampung Barat berstatus baik	32%	43,32%	16.341.681.500	16.341.681.500	54,64%	Dokumen	4.656.000.000	4.656.000.000	77,28%	Dokumen	5.987.200.000	5.987.200.000	93,00%	Dokumen	38.139.651.500	Dinas PU PR
02 04 2	Program Peningkatan Konflik-konflik Perumahan	Persentase penanganan permasalahan tanah	0%	20,00%	80.000.000	80.000.000	30,00%	Dokumen	144.000.000	144.000.000	50,00%	Dokumen	172.800.000	172.800.000	60,00%	Dokumen	766.800.000	Dinas PU PR
03 14 1	Program Pengembangan Desa/Inkubasi/Studentik	Jumlah Dana Informasi Hasil Pembangunan yang Abstrak	50%	50%	75.545.500	75.545.500	75%	Dokumen	370.648.000	370.648.000	75%	Dokumen	570.648.000	570.648.000	75%	Dokumen	2.358.137.500	Dinas Kombio
02 12 1	Program Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sasi	% Data Informasi Publik yang abstrak, Anas dan Indeks Kerpenyawaan Masyarakat (IKM)	0%	75%	184.435.000	184.435.000	75%	Dokumen	104.669.000	104.669.000	75%	Dokumen	106.161.600	106.161.600	75%	Dokumen	568.415.000	Dinas Kombio
02 16 1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Budaya Daerah yang dilestarikan	2 Budaya	6 Budaya	973.805.000	973.805.000	600%	Budaya	670.069.000	670.069.000	12	Budaya	970.000.000	970.000.000	12	Budaya	4.840.006.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 16 2	Program Pengembangan Kelayaan Budaya	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	2 Budaya	4 Budaya	1.770.469.000	1.770.469.000	400%	Budaya	837.000.000	837.000.000	4	Budaya	947.000.000	947.000.000	4	Budaya	5.123.489.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 16 3	Program Pengkajian Keragaman Budaya	Jumlah budaya daerah yang mengikuti event nasional/ internasional	4 Budaya	4 Budaya	1.703.375.000	1.703.375.000	400%	Budaya	1.867.000.000	1.867.000.000	4	Budaya	2.062.000.000	2.062.000.000	4	Budaya	9.801.375.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Utama (Output/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPMD 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
04.02.6	Program Mibikin dan Keribus Daerah	Persentase realisasi PKD	100%	632.175.000	100%	656.975.000	100%	641.975.000	100%	674.253.415	100%	714.178.757	100%	3.296.557.172	RPKD		
04.02.7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Dokumen Penulisan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	146 Dokumen	1.382.740.000	29 Dokumen	1.362.740.000	29 Dokumen	1.362.740.000	29 Dokumen	1.362.740.000	29 Dokumen	1.387.740.000	146 Dokumen	6.863.760.000	RPKD		
04.02.8	Program Peningkatan dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perserbitan APBD yang tepat waktu dan akurat	100%	5.660.475.620	100%	3.704.547.618	100%	3.857.899.460	100%	4.026.716.858	100%	4.212.584.846	500%	21.462.214.402	RPKD		
04.02.9	Program Pengelolaan Rancang Milik Daerah	Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	RPKD		
04.02.10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Nilai rata-rata hasil perubahan pengelolaan keuangan daerah	66	-	75	-	78	-	80	-	81	-	81	-	RPKD		
04.02.11	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	RPKD		
04.02.12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan akurat	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	RPKD		
04.02.13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Persentase penyusunan Laporan Rekening Milik Daerah (LRMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	RPKD		
04.02.14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Pre-diklat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RPKD		
04.02.15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Lampung Barat	100%	1.182.937.500	40%	1.628.016.666	60%	1.415.424.986	80%	1.794.268.222	100%	1.639.730.164	100%	7.660.879.257	Seluruh OPD Pelayanan (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Kualitas Awal RPJMD (Tahun 2017)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Peningkatan Pawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Sasaran 4.1.4 meningkatkan penyelenggaraan Program Pembangunan Daerah	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LUPPD) (Predikat)	Sangat Tinggi	20%	766.660.000	40%	822.553.600	80%	854.924.460	Sangat Tinggi	100%	1.098.416.906	Sangat Tinggi	100%	4.427.485.966	Sekelompok Daerah	
04 01 2	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat	100%	40%	766.660.000	40%	822.553.600	80%	854.924.460	Sangat Tinggi	100%	1.098.416.906	Sangat Tinggi	100%	4.427.485.966	Sekelompok Daerah	
	Sasaran 4.1.5 meningkatkan desa tertinggal	Persentase desa tertinggal (Predikat)	29,00%	19,84%		9,97%		0%			0%						
02 07 5	Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam peningkatan pekerjaan terlinggih	9,94%	19,95%	2.067.581.600	24,96%	2.163.553.000	34,93%	2.379.903.000	Sangat Tinggi	39,95%	2.617.845.500	Sangat Tinggi	39,95%	11.215.532.100	Dinas PMP	
02 07 7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Merencanakan PAD	Persentase BUMDes (BUMKam) yang menghasilkan PAD	3,82%	7,63%	2.951.156.000	13,27%	3.599.972.500	22,90%	3.801.726.000	Sangat Tinggi	36,17%	4.213.898.600	Sangat Tinggi	36,17%	17.771.353.100	Dinas PMP	
		Persentase pekon yang aktif melaksanakan gopong royong	7,63%	11,45%	0,00%	19,08%	26,71%	34,35%	0,00%	0,00%	41,98%	0,00%	41,98%	41,98%	Dinas PMP		
		Persentase PUK yang memiliki UPEK aktif	0 Pasyanda	2 Pasyanda		6 Pasyanda	10 Pasyanda	12 Pasyanda	15 Pasyanda	15 Pasyanda	15 Pasyanda	15 Pasyanda	15 Pasyanda	15 Pasyanda	Dinas PMP		
02 07 10	Perbaikan Administrasi dan Kelengkapan Pekon	Persentase pekon yang memenuhi syarat-syarat administrasi	60,31%	64,89%	3.915.271.000	70,23%	2.076.000.000	74,81%	2.362.800.000	Sangat Tinggi	80,15%	4.144.886.000	Sangat Tinggi	80,15%	15.029.659.000	Dinas PMP	
		Persentase anggota LHP dan LPMK aktif dalam perencanaan pembangunan	60,31%	64,89%		70,23%	74,81%	80,15%			80,15%		80,15%	80,15%	Dinas PMP		
	Misi 5 Memperkuat keberdayaan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif																
	Tujuan 5.1 Tertumbuhnya masyarakat yang tertib dan sejahtera	Persentase konduk SABA yang terseleksi (Perman)	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		100,00%	100,00%	Sekelompok Kabupaten		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/Pengembangan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/ outcome	Kondisi Kuarter Awal RPMD (tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tingkat Rp	Tingkat %		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
04 01	Pengembangan Data dan Informasi Pengembangan	Persentase Kebersediaan Data/Inf/Inas Pelaksanaan Hasil Pembangunan Daerah Yang Up To Date	75%	854.335.500	85%	1.377.500.000	90%	1.383.750.000	95%	1.335.025.000	100%	1.447.527.500	100%	6.398.157.906	Bappeda		
	Sasaran 5.1.5																
	Menunjang penggunaan	tingkat pengamatan terbuka (Pervit)	9,96%		0,00%		0,00%		0,75%		0,71%		0,71%		Dinas PMPTSP Dakeri, Dinas Pera Pariwisata, dinas Koperasi lain;		
02 01 1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki kejuruan dan/ sertifikasi	95,00%	821.938.000	95,00%	1.240.782.000	100,00%	1.353.445.500	100,00%	1.724.121.100	100,00%	1.968.250.700	100,00%	7.886.537.900	Dinas Perencanaan Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
02 01 2	Peningkatan Kemampuan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan tersepat di lapangan pekerjaan	15,00%	120.400.000	25,00%	185.469.700	25,00%	136.516.000	25,00%	210.167.600	30,00%	171.384.000	30,00%	823.737.300	Dinas Perencanaan Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
02 01 3	Pertumbuhan dan Lemaba Keterhambatan	Persentase persediaan yang telah siap pakai peraturan Keterhambatan	0%	270.000.000	10%	335.368.100	22%	357.890.000	32%	393.621.800	41%	432.983.000	54%	1.775.750.900	Dinas Perencanaan Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		



Bupati Lampung Barat Meninjau
Lokasi Bencana Banjir

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih

dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala perangkat daerah.

Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala perangkat daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerantarkan.

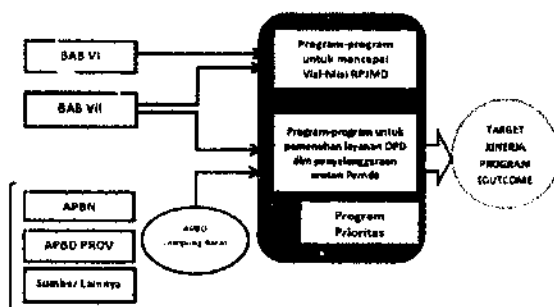
Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan

jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 7.1. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD



PITU PROGRAM UNGGULAN

1. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR MANTAP

- Pembangunan jalan poros penghubung kecamatan dan jalan kabupaten
- Pembangunan jembatan, irigasi, listrik dan sarana air bersih

2. PENATAAN KOTA LIWA SEBAGAI KOTA BUDAYA

- Penataan dan pembangunan ruang terbuka seperti alun-alun taman bermain
- Pembangunan rumah budaya
- Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

3. SEMUA BISA MELANJUTKAN SEKOLAH

- Mengangkat guru honor mumi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak
- Seragam gratis bagi siswa-siswi tidak mampu

- Bantuan bagi siswa berprestasi yang diterima diperguruan tinggi negeri
- Meningkatkan mutu pendidikan
- Mewujudkan mimpi masyarakat kecil untuk menjadi dokter melalui program beasiswa bagi siswa Lampung Barat berprestasi

4. PELAYANAN MASYARAKAT SEHAT

- Peningkatan sarana dan prasaranan puskesmas dan rumah sakit daerah
- Penambahan tenaga medis dan paramedis
- Perluasan jaminan kesehatan yang tidak masuk PBI-JKN

5. MENSEJAHTERAKAN PETANI

- Optimalisasi badan usaha milik pekon sebagai penyalur pupuk
- Mendorong badan usaha milik pekon menjadi eksportir kopi, bermitra dengan pengumpul dan kelompok tani
- Peningkatan produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian
- Pembelian gabah petani melalui pengembangan lumbung pangan
- Mendorong badan usaha milik pekon untuk stabilisasi harga gabah

6. MASYARAKAT BERDAYA SAING DAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

- Pemberdayaan pemuda dan kelompok perempuan melalui rumah produktif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja
- Optimalisasi potensi wisata melalui pengembangan desa-desa wisata
- Memfasilitasi perubahan alih status lahan kehutanan yang dikelola oleh masyarakat menjadi hak milik
- Mempercepat penyelesaian penegasan tapal batas
- Meningkatkan insentif aparatur pekon
- Pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, murah/gratis, dan transparan

7. PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA

- Bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni
- Umroh bagi guru ngaji, imam masjid, marbot, aparatur dan masyarakat berprestasi
- Meningkatkan insentif guru ngaji, imam masjid, marbot dan penerimanya
- Meningkatkan nilai serta jumlah penerima bantuan rumah ibadah dan pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan lainnya



Tabel 7.1 Pemetaan Program Unggulan dan Program Prioritas

1	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Perencanaan Tata Ruang
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong/Brojong
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pembangunan Jalan dan Pembangunan Ruang
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan Kabupaten/Kota
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pengembangan, Pemeliharaan dan Konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pengendalian Banjir
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Perencanaan Tata Ruang
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Peningkatan Pengendalian Pokusi/Limbah
MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Kesiapsiagaan	
MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
MENGEMBANGKAN WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Program Tanggap Darurat	



		Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
		Program Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
		Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	2. PENATAAN KOTA LIWA SEBAGAI KOTA BUDAYA	Program Pengembangan Kebun Raya
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Program Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Pencahayaan Umum
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERDAYASAING	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	3. SEMUA BISA MELANJUTKAN SEKOLAH	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
		Program Pendidikan Non-Formal
		Pembinaan Ketenagaan
		Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Program Penyelenggaraan Pendidikan
		Program Pembinaan Kegiatan dan Kejuruan di Lingkungan Sekolah
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga di Lingkungan Sekolah
	4. PELAYANAN MASYARAKAT SEHAT	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pengawasan Obat dan Makanan
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Program Standarsasi Pelayanan Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin



			Program pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan/budkesmas pembantu dan keluarga
			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
			Program peningkatan pelayanan kesehatan berbasis
			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
			Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
			Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NABZA
			Program Pengembangan Kesehatan Tradisional
			Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Program Upaya Kesehatan Rujukan
			Program Jaminan Kesehatan Nasional
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan
3	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERORIENTASI PADA AGRO-BISNIS DAN AGRO-WISATA BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL	5. MENSEJAHTERAKAN PETANI	Program perencanaan pembangunan pertanian
			Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Ruang Lahan Pertanian
			Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani
			Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Ternak
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Rata-rata
			Program Peningkatan Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan
			Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
			Program Pengembangan dan pelayanan usaha



		peternakan
		Program peningkatan kemampuan masyarakat dan memajukan
		Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan
		Perikanan
		Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan
		Program Pengembangan Peningkatan ragam konsumsi pangan dan Keamanan Pangan
		Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Pemasaran Berwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Kemiripan
4	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AMANAH DENGAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK	6 MASYARAKAT BERDAYA SAING DAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Aplikasi
		Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
		Program peningkatan pelayanan angkutan
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
		Program peningkatan kelalkan pengoperasian kendaraan bermotor
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan
		Program Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		Program Kesiapsiagaan
		Program pengembangan data/informasi Pembangunan
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
		Program Pengendalian Administrasi Pembangunan
		Program Kerjasama Pembangunan
		Pengembangan Wilayah Perbatasan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data



		Program penyalangan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB
		Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Administrasi dan Pengawasan
		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
		Program Realisasi Administrasi kependudukan
5	WENGEY BANEKARI BESIKERHIM TAS AGAMIS SE-BA DAL PARTISIPASI	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan</p> <p>Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Sosial</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program pemberdayaan penyandang cacat dan Eks trauma</p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>Pembinaan Partisipasi Pengorganisasian/Asuhan/Jompo</p> <p>Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan</p>



Tabel 7.2 Pemetaan Janji Politis, Strategi dan Kebijakan

JANJI POLITIS (PITU PROGRAM)	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>1. INFRASTRUKTUR MANTAP</p> <p>a. Penguatan jalan poros antar kecamatan & Jalan Kabupaten</p> <p>b. Memantapkan infrastruktur pendukung perekonomian dan kesra (irigasi, listrik, & sarana air bersih)</p>	<p>1 <i>mengoptimalkan infrastruktur terbangun yang berorientasi pada kebermanfaatan (benefit), keberlanjutan (sustainable), dan daya dukung wilayah</i></p>	<p>1 Memperkuat sistem jaringan jalan strategis yang berorientasi pada konektivitas antar simpul yang efektif, kebermanfaatan ekonomi, mendukung mitigasi bencana, dan pengendali pertumbuhan kawasan terbangun serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan</p> <p>2 mengembangkan sistem transportasi dan komunikasi yang menghubungkan pusat-pusat produksi, pelayanan publik, pusat-pusat perdagangan, kawasan wisata dan kawasan permukiman yang telah diproyeksikan secara tata ruang sebagai pusat pertumbuhan (kawasan strategis)</p> <p>3 Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kualitas kawasan permukiman dilakukan dengan prinsip pro poor, pro growth, pro economic, pro environment, dan pro disaster</p>
	<p>2 <i>mengoptimalkan perwujudan model konservasi (hulu-hilir) yang mengintegrasikan antara pemenuhan kebutuhan dasar, investasi dan produksi dengan kapasitas daya dukung lingkungan hidup</i></p>	<p>1 Memperkuat kualitas lingkungan hidup daerah mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian, guna mempertegas peranan dan komitmen Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi</p> <p>2 Memaksimalkan pemanfaatan jasa lingkungan bagi pemenuhan kebutuhan dasar, investasi, dan produktivitas lahan khususnya bagi masyarakat perdesaan, secara</p>



<p>2. LIWA SEBAGAI KOTA BUDAYA</p>	<p>3 <i>mereposisikan aspek kebencanaan ke dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan investasi</i></p>	<p>lestari dan berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 memperluas status pekon siaga bencana dengan kehidupan budaya masyarakatnya yang responsive terhadap bencana 2 membangun hubungan kerjasama tripartit dalam memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis ilmu pengetahuan, dan teknologi (termasuk didalamnya teknologi informatika) serta kearifan lokal 3 Penerapan pendekatan insentif dan disinsentif, dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang guna menjamin tersedianya ruang yang berkualitas, berkarakter, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
------------------------------------	---	--

JANJI POLITIS (PITU PROGRAM)	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>3. SEMUA BISA MELANJUTKAN SEKOLAH</p> <ol style="list-style-type: none"> a Mengangkat guru honor menjadi guru kontrak b Seragam gratis bagi siswa c Bantuan siswa berprestasi d Meningkatkan mutu pendidikan e Beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran PTN 	<p>1 <i>Pembangunan pendidikan dan keترampilan berorientasi pada peningkatan prestasi, mendorong kewirausahaan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing, dengan melibatkan peran serta masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penerapan standar akreditasi bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, kearah pemenuhan mutu sekolah, mutu belajar, dan mutu siswa 2 penerapan insentif dan reward bagi peningkatan mutu guru, mutu siswa, hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi



		<ol style="list-style-type: none">3 mendorong terciptanya minat membaca hingga ke tingkat desa, dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara partisipatif4 Mendorong peningkatan prestasi dibidang Olah Raga baik skala Provinsi maupun Nasional menuju ketersediaan atlet profesional, mendukung promosi daerah, dan pelestarian budaya5 meningkatkan kerjasama tripartit dalam rangka menyiapkan ketersediaan sumberdaya pemuda yang berkualitas, pro aktif dalam mendukung penciptaan peluang usaha yang kondusif dan produktif
4. MASYARAKAT SEHAT a Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit daerah b Ambulance Hebat c Perluasan jaminan kesehatan	<ol style="list-style-type: none">2 <i>Pengembangan system rujukan yang dimulai dari sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan sarana pelayanan kesehatan lanjutan.</i> 3 <i>Menjamin aksesibilitas seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin terhadap akses kesehatan dan gizi yang layak dan tercukupi.</i>	<ol style="list-style-type: none">1 Mendorong terakreditasinya seluruh sarana dan prasarana kesehatan, guna terjaminnya mutu tenaga medis dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat2 Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, partisipatif dan responsif, guna mengantisipasi kendala aksesibilitas, keterjangkauan, dan meluasnya resiko kesehatan 1 Mendorong peran serta aktif masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dimulai dari tataran rumah tangga hingga satuan permukiman2 Menjamin ketercukupan gizi masyarakat melalui: pengembangan diversifikasi pangan, distribusi pangan, dan kontrol pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan perangkat pekon



JANJI POLITIS (PITU PROGRAM)	STRATEGI	KEBIJAKAN
5. MENSEJAHTERAKAN PETANI		
a Optimalisasi Badan Usaha Milik Pekon	1 Mendorong peran BUMDes sebagai mesin perekonomian di pekon dengan unit usaha yang mengedepankan potensi lokal masing-masing pekon.	1 Memperkuat peranan Badan Usaha Milik Pekon (Bumpekon) untuk mendorong pertumbuhan dan nilai tambah ekonomi di tingkat pekon, penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi hambatan produksi dan pemasaran yang merugikan petani 2 Menjalin hubungan kemitraan yang sehat antar pelaku usaha dalam rangka pembentukan jaringan pemasaran yang kuat, mengurangi persaingan, dan kontinuitas produksi, sehingga komoditas yang menjadi branding daerah dapat dipertahankan dan dikembangkan
b Peningkatan produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian		
c Pembelian gabah petani melalui pengembangan lumbung pangan		
d Pekon Hebat		
e Rumah Produktif & Kreatif	2 Mendorong berkembangnya industri kreatif yang bersumber potensi lokal Lampung Barat.	1 menstimulasi tumbuh dan berkembangnya klaster UMKM melalui kemudahan izin usaha, promosi dan pemasaran produk, serta peningkatan ketrampilan, dan mutu produk 2 membangun koperasi yang sehat sebagai lembaga ekonomi mikro yang berorientasi pada pengembangan unit usaha kreatif, perlindungan terhadap persaingan ekonomi yang tidak sehat, dan menjamin kelancaran produksi dan usaha bagi para anggotanya 3 Memperkuat klaster industri yang berbasis komoditas unggulan daerah, guna peningkatan nilai tambah, dan berorientasi pada pariwisata



<p>f Optimalisasi potensi wisata</p>	<p>3 <i>Pengembangan pariwisata dengan mengintegrasikan antara sektor pertanian, budaya dan karakteristik wilayah.</i></p>	<p>1 Mengembangkan amnesitas wisata (fasilitas wisata) secara partisipatif untuk menambah nilai keunggulan daerah tujuan wisata, menciptakan kenyamanan dan kemudahan berinvestasi dan keterjangkauan</p> <p>2 Menempatkan Lampung Barat sebagai daerah kunjungan wisata utama khususnya destinasi ekowisata utama di Propinsi Lampung</p>
--------------------------------------	--	--

<p>JANJI POLITIS (PITU PROGRAM)</p>	<p>STRATEGI</p>	<p>KEBIJAKAN</p>
<p>6. PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK</p> <p>a Penegasan tapal batas</p> <p>b Pelayanan publik yang mudah, cepat, murah/gratis dan transparan</p> <p>c Meningkatkan insentif aparatur pekon</p>	<p>1 <i>Penyempurnaan sistem pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, secara cepat, tepat, transparan dan berprestasi</i></p> <p>2 <i>meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada perangkat desa, agar terwujud tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel, transparan dan selaras</i></p>	<p>1 mengoptimalkan sistem komunikasi publik guna mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pengawasan kinerja pemerintah, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</p> <p>2 merestrukturisasi kelembagaan perangkat daerah serta penataan sumberdaya aparatur sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kompetensi</p> <p>3 Pembinaan ASN yang intensif dan kontinyu, dengan menerapkan reward and punishment guna menciptakan budaya dan etos kerja yang baik</p> <p>1 memperkuat kemampuan perangkat pekon dalam menjalankan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di tingkat pekon yang bersumber pada dana pekon</p>



		2 penerapan reward and punishment bagi perangkat pekan yang memiliki kinerja pelayanan publik yang baik
JANJI POLITIS (PITU PROGRAM)	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>PENINGKATAN IMAN & TAQWA</p> <p>a Safari Jumat</p> <p>c Meningkatkan insentif guru ngaji, imam masjid, marbot dan jumlah penerima</p> <p>d Meningkatkan nilai serta jumlah penerima bantuan rumah ibadah dan pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan lainnya</p> <p>e Bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni</p>	<p>1 memperkuat hubungan horizontal antara lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan forkopinda, guna mengantisipasi konflik SARA, terorisme, kenakalan remaja, dan narkoba</p> <p>2 peningkatan peranan wanita untuk aktif mengatasi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, serta kesejahteraan keluarga</p>	<p>1 membangun sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informatika, serta peningkatan kualitas dan kompetensi polisi pamong praja dan damkar</p> <p>2 meningkatkan kepedulian masyarakat untuk meningkatkan sistem keamanan lingkungan secara partisipatif dan terkoordinatif</p> <p>3 mengintensifkan dialog keagamaan dan pembinaan keagamaan dalam mengantisipasi timbulnya konflik sara</p> <p>4 membangun sistem dan mekanisme bantuan hukum dalam perlindungan terhadap kekerasan anak dan rumah tangga</p> <p>1 Mendorong keterwakilan kaum wanita dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah</p> <p>2 Mendorong peran aktif wanita dalam berwirausaha untuk mendukung perekonomian keluarga</p> <p>3 mendorong keterlibatan swasta, lembaga amal, lembaga sosial kewanitaan, lembaga pemerintahan untuk lebih responsif terhadap penyandang</p>



			permasalahan sosial
		3 <i>menempatkan Lampung Barat sebagai pusat kajian seni budaya lampung untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun sosial</i>	1 Mengembangkan potensi keunikan seni dan budaya Lampung Barat berorientasi pada bisnis, mendukung wisata, sekaligus tetap mempertahankan kelesatarian budaya 2 Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan

Tabel 7.3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Lampung Barat
dalam juta rupiah

No	Kapabilitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
	BELANJA	1.947.138,38	1.443.277,59	1.586.852,55	1.740.709,06	1.954.625,59
		-	-	-	-	-
A	Belanja Tidak Langsung	546.296,55	600.926,21	661.018,83	727.120,71	799.832,78
1	Belanja Pegawai	363.375,94	399.713,53	439.684,89	483.653,38	532.018,71
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	899,88	989,87	1.088,85	1.197,74	1.317,51
4	Belanja Hibah	11.355,91	12.491,50	13.740,65	15.114,72	16.626,19
5	Belanja Bantuan Sosial	150,00	165,00	181,50	199,65	219,62
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota & Pemdes	1.116,52	1.228,17	1.350,99	1.486,09	1.634,70
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	168.507,45	185.358,20	203.894,01	224.283,42	246.711,76
8	Belanja Tidak Terduga	890,85	979,94	1.077,93	1.185,72	1.304,29
B	Belanja Langsung	1.400.841,83	842.351,39	925.833,72	1.013.588,35	1.154.792,81
1	Belanja Pegawai	149.378,35	89.823,89	98.726,00	108.083,69	123.140,99
2	Belanja Barang dan Jasa	573.377,03	344.781,92	378.951,99	414.870,74	472.666,98
3	Belanja Modal	678.086,44	407.745,57	448.155,73	490.633,92	558.984,84

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra perangkat daerah. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.4.

Tabel 7.4. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2022
Kabupaten Lampung Barat

KODE	Bidang Urutan Pendidikan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPM/DP (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangka Caerah Penanggung jawab												
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021		Tahun 2022									
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp	TARGET	Rp								
01	KEHUTANAN																					
01	01	PELAYANAN DASAR																				
01	01	01	1	Persepsi Pelayanan Administrasi Perkantoran Waktu	100%	2.536.383,000	3.170.291,000	100%	3.327.055,000	3.442.636,000	100%	3.527.895,000	100%	16.003.500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
01	01	02	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10%	24.000,000	10.000,000	15%	10.000,000	20%	10.000,000	25%	10.000,000	30%	50.000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
01	01	03	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	45%	990.586,000	1.042.690,000	50%	1.042.690,000	55%	1.042.690,000	60%	1.042.690,000	65%	5.169.346,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
01	01	04	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100%	179.990,000	154.900,000	100%	154.900,000	100%	154.900,000	100%	179.990,000	100%	824.500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
01	01	05	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	31,09%	3.943.603,000	2.179.793,000	32,11%	2.679.703,000	32,19%	2.679.703,000	32,15%	4.879.600,000	32,17%	16.463.795,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
01	01	06	6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	95,90%	100.891.344,900	81.990.875,000	95,93%	93.275.678,500	95,95%	93.275.678,500	95,97%	112.504.591,200	95,99%	517.455.173,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
01	01	07	7	Program Pendidikan Non Formal	83,53%	2.928.249,000	2.163.220,000	84,37%	2.163.220,000	85,21%	2.613.220,000	86,06%	4.520.800,000	86,92%	20.087.909,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
01	01	08	8	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	0%	1.086.278,000	1.145.000,000	31%	1.145.000,000	46%	1.145.000,000	64%	1.170.000,000	80%	5.758.278,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
01	01	09	9	Program Peningkatan Pendidikan	100%	119.827,000	4.683.246,000	100%	7.737.411,000	100%	7.737.411,000	100%	8.053.221,000	100%	28.483.887,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
01	01	10	10	Program Pembiayaan Kesenian dan Kebudayaan di Lingkungan Sekolah	7 jenis	160.583,000	290.000,000	7 jenis	370.000,000	7 jenis	450.000,000	7 jenis	430.000,000	7 jenis	1.680.503,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						

KODE	Bidang Urusan, Penertiban, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RP/MD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RP/MD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tahun 2016		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	TARGET	Rp	
01 01 11	Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Sekolah	Jumlah cabang olahraga yang ditombakan	8 Cabang olahraga	170.050.000	8 Cabang olahraga	351.000.000	8 Cabang olahraga	390.000.000	8 Cabang olahraga	448.000.000	8 Cabang olahraga	440.000.000	8 Cabang olahraga	1.791.050.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01 01 12	Pembinaan Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang dibina	39,43%	3.746.319.500	83,43%	2.465.448.500	85,49%	4.085.421.500	88,49%	10.805.420.500	89,93%	12.695.478.500	92,93%	43.688.033.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
01 02	Kesehatan														
01 02 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	0%	1.020.953.400	100%	1.742.269.000	100%	2.082.162.000	100%	2.165.915.000	100%	2.499.097.000	100%	9.469.316.400	Dinas Kesehatan
01 02 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia	Jumlah Puskesmas melaksanakan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	3 Puskesmas	772.400.000	100%	1.595.726.000	100%	620.900.000	100%	918.000.000	100%	982.799.045	100%	5.674.834.045	Dinas Kesehatan
01 02 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Keuangan yang dibuat dalam 1 tahun	100%	129.130.000	100%	192.509.000	100%	159.010.000	100%	190.812.940	100%	278.975.152	100%	690.437.912	Dinas Kesehatan
01 02 4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah DPT Puskesmas yang melaksanakan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	12 Puskesmas	2.576.434.000	15 Puskesmas	2.462.707.300	15 Puskesmas	2.985.875.800	15 Puskesmas	3.549.390.400	15 Puskesmas	4.233.659.320	15 Puskesmas	15.807.746.010	Dinas Kesehatan
01 02 5	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase kasus gizi buruk di bangkai	100%	600.000.000	100%	801.133.500	100%	1.002.974.948	100%	1.138.166.737	100%	1.338.802.485	100%	5.101.078.976	Dinas Kesehatan
01 02 6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan lansia	15 Puskesmas	225.000.000	15 Puskesmas	52.000.000	15 Puskesmas	275.000.000	15 Puskesmas	325.000.000	15 Puskesmas	380.000.000	15 Puskesmas	1.237.000.000	Dinas Kesehatan
01 02 7	Program Penguatan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan tradisional	0 Puskesmas	466.520.000	15 Puskesmas	506.172.000	15 Puskesmas	557.874.000	15 Puskesmas	603.476.000	15 Puskesmas	649.120.000	15 Puskesmas	2.783.120.000	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pencapaian dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPMD 2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peringkat Dinam Peningkatan Jawab		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
01 02 8	Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang menjalankan kegiatan kerja dasar kesehatan kerja dasar	5 Puskesmas	155.000.000	15	136.500.000	15	230.000.000	15	235.000.000	15	260.000.000	15	956.500.000	Dinas Kesehatan		
		Jumlah Puskesmas yang menjalankan kegiatan olahraga (ada kelompok olahraga)	5 Puskesmas		15		15		15		15		15				
01 02 9	Program Sundryasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi madya dan utama	8 Puskesmas	5.945.164.500	4 Puskesmas	6.461.716.000	2 Puskesmas	6.957.117.100	9 Puskesmas	7.328.900.000	4 Puskesmas	8.125.512.810	15	348.184.110.410	Dinas Kesehatan		
01 02 10	Program Penguatan, Peningkatan dan Perubahan Sistem dan Perekoneksian Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dengan sarana prasarana dan alat kesehatan yang lengkap	4 Puskesmas	104.314.271.000	3 Puskesmas	73.665.300.000	3 Puskesmas	63.224.630.000	3 Puskesmas	56.875.383.500	3 Puskesmas	51.643.225.850	15	333.788.266.350	Dinas Kesehatan		
01 02 11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	35%	1.421.424.000	45%	1.477.651.200	60%	1.681.681.440	80%	1.854.062.720	100%	2.210.367.520	100%	8.645.206.891	Dinas Kesehatan		
01 02 12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas serta sarana penunjang IPK	90%	4.503.131.815	95%	4.264.853.640	95%	5.669.514.848	100%	6.852.817.778	100%	8.226.740.938	100%	29.416.358.419	Dinas Kesehatan		
01 02 13	Program Penguasaan Obat dan Makanan	Alokasi anggaran obat per kapita per tahun	11325 Rp	12600 Rp	12500 Rp	13000 Rp	13500 Rp	13500 Rp	13500 Rp	13500 Rp	14000 Rp	14000 Rp	-	-	Dinas Kesehatan		
		Jumlah Kecamatan yang telah dilakukan pengawasan obat dan makanan	5 Kec	133.340.000	5 Kec	247.028.400	5 Kec	284.194.080	5 Kec	388.044.896	5 Kec	380.094.325	15 Kecamatan Kec	1.372.842.701	Dinas Kesehatan		
		Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat	90%		95%				100%		100%				Dinas Kesehatan		
01 02 16	Program Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Peserta JKN	186804 Orang	165.000.000	300703 Orang	190.140.000.000	300703 Orang	22.812.602.400	300703 Orang	27.170.222.880	300703 Orang	32.838.667.456	300703 Orang	102.300.494.726	Dinas Kesehatan		
01 02 17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas melakukan promosi kesehatan	15 Puskesmas	8.594.777.000	15 Puskesmas	10.690.577.000	15 Puskesmas	10.874.286.000	15 Puskesmas	11.333.807.600	15 Puskesmas	11.645.000.000	15 Puskesmas	53.118.441.660	Dinas Kesehatan		
		Jumlah Pelkon menaikan 10% APB Des untuk sektor kesehatan	10 Pelkon		30 Pelkon		30 Pelkon		30 Pelkon		31 Pelkon						
01 02 18	Program Unjaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, khusus dan kondisi khusus	2 Puskesmas	1.668.612.210	6 Puskesmas	1.579.493.210	11 Puskesmas	1.625.429.210	15 Puskesmas	1.687.029.210	15 Puskesmas	1.735.149.210	15 Puskesmas	8.095.649.040	Dinas Kesehatan		

KODE	Gedung Urusan Pencertakan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Ruang Lingkup jabab				
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
01 02 19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	49%	350.000.000	550.000.000	60%	300.000.000	515.000.000	70%	470.000.000	2.195.000.000	Dinas Kesehatan			
01 02 20	Program Kebijakan dan Mandukua Pembangunan Kesehatan	Jumlah PKK deklarasi ODF	B PKK	303.000.000	397.820.150	15 puskesmas	448.480.870	494.133.450	15 puskesmas	579.786.106	2.183.248.500	Dinas Kesehatan			
01 02 21	Program Upaya Kesehatan Rujukan	Tumbuh Puskesmas memiliki Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	3 Puskesmas		6.023.453.000	100%	11.024.073.000	10.828.073.000	100%	4.068.825.000	36.955.521.000	Dinas Kesehatan			
01 02 22	Program peningkatan keselamatan dan melahirkan dan anak	Persentase Antenatal Care (ANC)	50%	3.960.000.000	3.979.000.000	85%	4.314.000.000	4.650.000.000	100%	4.700.000.000	21.643.000.000	Dinas Kesehatan			
01 02 23	Program Pengabdian Masyarakat Tidak Melayor Kawasan Tanpa Rokok	Persentase Perokok Cair (PNC)	80%	1.827.105.000	1.875.450.000	85%	2.045.173.500	2.278.908.125	92%	2.564.418.744	10.411.055.900	Dinas Kesehatan			
01 02 24	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah desa/pekon melaksanakan program pengendalian PTM	100 Desa	300.000.000	340.000.000	115 Desa	390.000.000	435.000.000	136 Desa	489.000.000	1.545.000.000	Dinas Kesehatan			
01 02 25	Program Pelayanan Kesehatan Produduk Miskin	UPK Puskesmas melaksanakan pelayanan dan pencapaian kelulusan Desa	2 Puskesmas	5.036.000.000		100%			15 Puskesmas		50.568.000.000	Dinas Kesehatan			
01 02 26	Program Kemitraan penyediaan pelayanan kesehatan	Persentase pekon yang memiliki outlet untuk pembayaran peserta IKU Mandiri	49% dari 136 pekon kelurahan	11.574.540.000		50%			15 Puskesmas		11.574.540.000	Dinas Kesehatan			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Proyek Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Pasangan Urusan Peninggah Jawab									
				Tahun 2018		Tahun 2019				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
				Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01 02	Kesehatan																	
01 02 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan tingkat W800	100%	6.846.546.550	85%	7.168.872.878	94%	6.267.204.551	95%	8.680.565.208	106%	9.114.593.469	100%	40.097.284.064	100%			RSUD AU
01 02 2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang terpenuhi dinas serta pengelompokannya sesuai dengan aturan	80%	9.100.000	83%	15.474.000	90%	20.111.000	95%	21.116.550	100%	22.172.178	100%	87.969.938	100%			RSUD AU
01 02 3	Program Peningkatan Sertifikasi Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dapat ditindaklanjuti dan tepat waktu	100%	123.180.000	100%	101.043.000	100%	106.095.150	100%	111.399.909	100%	141.969.904	100%	583.607.963	100%			RSUD AU
01 02 4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	80%	2.204.875.000	85%	1.982.336.250	90%	2.091.948.063	95%	2.198.665.744	100%	2.336.161.532	100%	10.799.286.589	100%			RSUD AU
01 02 5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	Jumlah kunjungan pasien	19.124 orang	14.905.310.000	2001 orang	15.052.342.100	21085 orang	15.804.960.255	22110 orang	16.595.208.266	23487 orang	17.424.968.687	105677 orang	79.780.790.304	105677 orang			RSUD AU
01 02 6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah media promosi kesehatan dan informasi dan KS	0 jenis	64.550.000	9 jenis	89.794.500	3 jenis	183.269.425	3 jenis	112.930.303	3 jenis	119.276.186	15 jenis	489.225.214	15 jenis			RSUD AU
01 02 7	Program pengabdian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	80%	18.816.807.000	83%	4.961.047.350	90%	3.097.694.453	95%	3.251.574.175	100%	3.415.208.174	100%	31.543.936.112	100%			RSUD AU
01 02 8	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paripapir/rumah sakit jiwa	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara	80%	479.636.000	85%	495.184.300	90%	519.942.465	95%	548.939.588	100%	573.236.808	100%	2.613.937.921	100%			RSUD AU
01 02 9	Program upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pasien ICD F81 rawat inap dan pasien kunjungan negara	640 orang	350.000.000	1007 orang	366.200.000	1007 orang	423.430.000	1007 orang	444.601.500	1007 orang	406.831.575	5035 orang	2.053.063.075	5035 orang			RSUD AU
01 02 10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai aturan	10%	1.266.099.000	10%	1.451.018.500	10%	1.564.415.928	10%	1.664.010.817	10%	1.822.951.565	50%	779.491.160	50%			RSUD AU
01 02 11	Program Standartasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kapasitas Masyarakat	79(E) Predikat	465.316.057	>80(B) Predikat	270.704.150	>80(B) Predikat	737.774.555	>90(B) Predikat	327.552.072	>80(B) Predikat	360.307.224	>80(B) Predikat	2.161.654.018	>80(B) Predikat			RSUD AU

KODE	Bidang/Unitas Pemerintahan dan Program/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal KPI/MD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Fertig/Selesai										
				Tahun 2018		Tahun 2019				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
				Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01	01	03	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
01	03	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berkualitas	100%	1.403.184.900	100%	1.035.829.995	100%	1.217.460.700	100%	1.391.587.800	100%	1.108.178.095	Dinas PU PR					
01	03	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berkualitas	60%	36.707.807.000	70%	12.244.587.700	80%	12.150.000.000	90%	16.077.050.000	100%	20.770.705.000	Dinas PU PR					
01	03	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	185.000.000	100%	126.000.000	100%	151.200.000	100%	181.440.000	100%	219.600.000	Dinas PU PR					
01	03	4	Program Peningkatan Pengolahan Sistem Informasi Kapasitas Kinerja dan Kemampuan SKPD	100%	124.300.000	100%	147.740.000	100%	177.280.000	100%	212.744.000	100%	255.292.000	Dinas PU PR					
01	03	5	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	55,50%	303.425.000.000	62,00%	219.145.000.000	68,00%	136.631.556.000	74,00%	154.336.469.300	80,00%	177.005.750.000	Dinas PU PR					
01	03	6	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	55,50%	11.456.000.000	62,00%	5.550.000.000	68,00%	6.460.000.000	74,00%	8.492.000.000	80,00%	9.590.400.000	Dinas PU PR					
01	03	7	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	100%	200.000.000	100%	240.000.000	100%	286.000.000	100%	345.000.000	100%	414.760.000	Dinas PU PR					
01	03	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabinisasi	100%	1.200.000.000	100%	990.000.000	100%	3.286.000.000	100%	3.345.800.000	100%	3.414.720.000	Dinas PU PR					
01	03	9	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	100%	300.000.000	100%	410.000.000	100%	432.000.000	100%	518.400.000	100%	622.000.000	Dinas PU PR					
01	03	10	Program Pengembangan dan Penguasaan Jaringan Higasi, Rawan dan Jaringan Pengaliran lainnya	42,00%	88.390.407.000	49,00%	21.044.500.000	53,00%	23.462.500.000	56,00%	27.164.100.000	60,00%	32.206.020.000	Dinas PU PR					
01	03	11	Program Pengembangan, pemeliharaan dan konservasi sumber daya air lainnya	20,00%	5.000.000.000	24,00%	1.500.000.000	26,00%	1.800.000.000	28,00%	2.160.000.000	30,00%	2.592.000.000	Dinas PU PR					
01	03	12	Program Pengembangan dan Penguasaan Sistem Irigasi	35,00%	36.500.000.000	39,00%	15.294.500.000	41,00%	20.200.400.000	43,00%	25.011.200.000	45,00%	26.463.280.000	Dinas PU PR					
01	03	13	Program Pengembangan dan Penguasaan Sumber Daya Air	30,00%	3.200.000.000	35,00%	500.000.000	37,00%	1.000.000.000	38,00%	740.000.000	40,00%	1.364.000.000	Dinas PU PR					

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Struktur Pembinaan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Fungsionalisasi Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				%		%		%		%		%		%		
01.03.14	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/locleer	Persentase penanganan air limpasan	75,00%	31.275.000.000	85,00%	1.700.000.000	90,00%	2.680.000.000	95,00%	4.210.000.000	100,00%	5.254.200.000	100,00%	4.510.200.000	Dinas PU PR	
01.03.15	Program pembangunan tanggul/tebet/vecuag	Persentase kejelasan longsor dan/atau ombak banjir	65,00%	13.065.000.000	75,00%	1.425.000.000	80,00%	2.620.000.000	85,00%	4.144.000.000	90,00%	5.172.800.000	90,00%	26.876.800.000	Dinas PU PR	
01.03.16	Program Pengembangan Kinerja Pengaliran air minum dan air limbah	Persentase air minum jernih	73,00%	23.328.350.000	80,00%	11.796.500.000	84,70%	13.291.500.000	86,60%	14.575.500.000	92,50%	17.568.300.000	92,50%	86.506.050.000	Dinas PU PR	
01.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Persediaan Air	Persentase status layak	78,84%	-	85,84%	-	89,34%	-	92,84%	-	96,34%	-	96,34%	-	Dinas PU PR	
01.03.18	Program Pembangunan Tata Ruang	Persentase lahan lingkungan dalam kondisi baik	32,68%	93.157.000.000	61,44%	28.801.887.685	77,13%	29.602.160.308	87,35%	39.885.200.000	98,83%	56.901.620.800	98,83%	257.947.368.785	Dinas PU PR	
01.03.19	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan tata kota dengan penataan ruang	30,06%	500.000.000	100,00%	721.210.615	100,00%	861.650.000	100,00%	1.018.000.000	100,00%	1.202.560.000	100,00%	4.304.070.615	Dinas PU PR	
01.03.20	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas	Peningkatan tata kota dengan penataan ruang	80,00%	150.000.000	90,00%	180.000.000	92,00%	216.000.000	94,00%	255.200.000	96,00%	311.040.000	96,00%	1.116.240.000	Dinas PU PR	
01.03.1	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas	Peningkatan tata kota dengan penataan ruang	0,00%	-	55,00%	6.755.500.000	60,00%	7.100.000.000	65,00%	7.510.000.000	70,00%	7.932.000.000	70,00%	29.297.580.000	Dinas PU PR	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
01.03	Pelayanan Umum dan Kesehatan															
01.03.1	Pelayanan Tata Ruang	Persentase Pemeliharaan Ruang Sempai Perumahan	75%	619.176.800	80%	503.784.650	90%	305.000.000	95%	345.000.000	100%	385.000.000	100%	2.157.960.650	Bappeda	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
01.04	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan															
01.04.1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Koneksi Layak Huni Masyarakat Berperumahan Standar MBRS	9,27%	1.900.000.000	20,65%	-	25,81%	980.000.000	30,97%	1.000.000.000	36,13%	1.100.000.000	36,13%	4.500.000.000	Dinas PU PR	
01.04.2	Program Unggulan Perumahan dan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Berperumahan Standar MBRS	9,27%	6.413.000.000	20,65%	4.489.401.700	25,81%	4.489.401.700	30,97%	4.489.401.700	36,13%	4.489.401.700	36,13%	24.370.606.800	Dinas PU PR	

KODE	Bidang Urutan Penelitian dan Program P-ortitas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (dicirikan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sasaran Indikasi Peningkatan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01	URUSAN WAJIB														
01.05	PELAYANAN DASAR														
	Kelembagaan, Keterlibatan Umat dan Berbudaya Masyarakat														
01.05.1	Program Pelayanan Administrasi Perkawinan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkawinan Tepat Waktu	100%	3.659.702.500	100%	3.969.871.500	100%	4.632.643.947	100%	5.090.043.151	100%	5.167.350.876	100%	22.504.612.074	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	25%	1.231.389.000	55%	522.884.000	70%	709.320.759	85%	713.232.108	100%	947.477.322	100%	4.239.308.184	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang berpendidikan Dimas Besar	25%	396.253.000	55%	387.278.000	70%	395.005.000	85%	405.000.000	100%	1.927.350.000	100%	3.510.881.000	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang akurat	36 orang	357.841.500	39 orang	200.026.000	100%	264.531.023	100%	911.349.563	84 orang	650.025.000	335 orang	2.433.774.126	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen yang akurat dan tepat waktu	100%	98.380.000	100%	74.380.000	100%	101.897.303	100%	101.897.303	100%	122.345.050	100%	497.954.656	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase terpeliharanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	25%	979.089.000	55%	601.596.000	70%	942.401.678	85%	858.390.045	100%	785.532.615	100%	4.148.037.356	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.7	Program Penertibinan Keamanan Kecamatan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Penertibinan Masyarakat	Persentase terpeliharanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	30%	1.205.881.500	36%	1.117.656.500	72%	655.171.792	86%	678.494.792	100%	1.107.371.493	100%	4.814.578.077	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.8	Program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketertarikan dan keaktifan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam berbagai kegiatan dan ketertarikan utama	0 orang	77.794.000	90 orang	57.097.000	90 orang	86.133.025	90 orang	86.133.025	90 orang	74.898.283	450 orang	382.055.133	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.9	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat (peka)	Jumlah Terhakimnya peserta dari peka masyarakat/Praktik perikanan	48 Kali	46.301.000	48 Kali	51.301.000	48 Kali	75.018.634	48 Kali	75.018.634	48 Kali	65.233.073	48 Kali	312.871.143	Sasaran Indikasi Peningkatan
01.05.10	Program kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase terlaksananya peningkatan komitmen wawasan kebangsaan	25%	524.777.500	55%	525.547.500	76%	362.667.588	85%	310.000.000	100%	295.000.000	100%	2.017.992.588	Sasaran Indikasi Peningkatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Perangka Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
01 05 11	Program Keselamatan SDM Instansi dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase terdapatnya SDM Instansi dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	15%	35%	1.147.288.000	52%	1.940.469.500	66%	2.307.522.156	84%	2.516.273.156	100%	2.488.004.472	100%	11.557.859.784	Satuan Polisi Pamong Praja
01 05 12	Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah meningkatnya SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan musibah Kebakaran	37 orang	0 orang		37 orang	91.880.500	37 orang	95.800.000	37 orang	95.000.000	37 orang	95.000.000	148 orang	376.880.500	Satuan Polisi Pamong Praja
01	BUSUK WAMB PELAYANAN DASAR															
01 06	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	100%	31.313.760	100%	373.120.838	100%	408.833.725	100%	438.290.411	100%	468.943.413	100%	2.002.323.067	DINAS SOSIAL
01 06 2	Pelayanan Sumo dan Prasarana Aparatur	Persentase Sumo dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	60.520.560	100%	744.694.000	100%	714.921.500	100%	803.455.997	100%	913.333.933	100%	3.684.126.012	DINAS SOSIAL
01 06 3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	100%	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	6.000.000	100%	40.000.000	DINAS SOSIAL
01 06 4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Pelaporan dan Keuangan yang ditubahi dan tepat waktu	100%	100%	109.970.000	100%	126.315.200	100%	145.075.329	100%	166.729.747	100%	191.569.209	100%	739.679.791	DINAS SOSIAL
01 06 5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adu Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terdapatnya pendampingan program lanjutan harapp	20 kec	15 kec	1.167.484.455	15 kec	1.620.758.500	15 kec	1.761.448.849	15 kec	1.849.470.234	15 kec	1.975.253.722	15 kec	8.374.415.760	DINAS SOSIAL
		Persentase Peningkatan Keterampilan Sosial (PMKS) yang terintegrasi	20%	20%		4%		60%		80%		100%		100%		DINAS SOSIAL
		Terdapatnya Peningkatan Kualitas Miskin dan PMKS Lainnya	15 kec	15 kec		15 kec		15 kec		15 kec		15 kec		15 kec		DINAS SOSIAL
01 06 6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kegiatan pendampingan operasional karakter	106 Orang	50 Orang	201.181.000	50 Orang	1.238.955.500	50 Orang	1.465.781.405	50 Orang	1.664.685.400	50 Orang	1.896.944.317	250 Orang	6.467.557.626	Dinas Sosial

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Utama (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Peringkat Daerah Peringkat Jawa		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
				20 Buah		30 Buah		40 Buah		50 Buah		60 Buah		75 Orang			200 Buah	
01.06.7	Program Pembinaan dan Pengembangan Cakupan dan Ektifitas Pemukiman	Terlaksananya pemberian bantuan bencana dan penanganan bencana	45 Buah	21.044.000	15 Orang	243.619.000	280.162.357	15 Orang	342.186.722	15 Orang	370.514.730	1.428.325.819	1.428.325.819	Dinas Sosial				
01.06.8	Program Pemberdayaan Kelengkapan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan simulasi untuk umum kepada lembaga	30 Orang	1.087.201.115	50 Orang	1.636.438.500	1.341.919.110	70 Orang	1.491.406.250	80 Orang	1.684.491.391	6.701.456.124	Dinas Sosial					
01.06.9	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan simulasi untuk umum kepada lembaga	40 Lembaga		30 Lembaga			40 Lembaga		60 Lembaga			Dinas Sosial					
01.06.10	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan simulasi untuk umum kepada lembaga	15 Kec		15 Kec			15 Kec		15 Kec			Dinas Sosial					
01.06.11	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan simulasi untuk umum kepada lembaga	50 Orang		50 Orang			60 Orang		80 Orang			Dinas Sosial					
01.06.12	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan simulasi untuk umum kepada lembaga	30%		100%			100%		100%			Dinas Sosial					
01.06.13	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan simulasi untuk umum kepada lembaga	20 Kelompok	4.420.000.000	20 Kelompok	5.032.553.000	5.514.750.000	30 Kelompok	6.703.062.500	30 Kelompok	7.611.521.875	28.701.887.375	Dinas Sosial					
01.06.14	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan simulasi untuk umum kepada lembaga	12 Bulan	115.000.000	12 Bulan	126.450.000	139.150.000	12 Bulan	153.065.000	12 Bulan	176.024.750	769.689.750	Dinas Sosial					
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
02.01.1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/sertifikat	95,00%	821.938.000	95,00%	1.240.782.600	1.351.445.500	100,00%	1.724.121.106	100,00%	1.868.250.700	7.008.337.900	Dinas Penanaman Modal/PTSP dan Tenaga Kerja					
02.01.2	Peningkatan Kesejahteraan Kerja	persentase pencari kerja yang terdaftar dan terampil di lapangan pekerjaan	15%	120.400.000	25%	185.469.700	136.516.000	25%	220.167.600	30%	171.184.000	823.737.300	Dinas Penanaman Modal/PTSP dan Tenaga Kerja					
02.01.3	Perfektifitas dan Pengembangan Lembaga Kejuruan	persentase perguruan yang telah memperoleh perizinan/akreditasi	0%	270.000.000	10%	325.308.100	357.838.800	32%	393.622.800	41%	432.983.000	1.775.750.900	Dinas Penanaman Modal/PTSP dan Tenaga Kerja					

KODE	Bidang Utama Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kendali Kinerja (Angka Rata-Rata (2017))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab											
				Tahun 2016		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021		Tahun 2022								
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp	TARGET	Rp							
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																				
02 02	02 02 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	383.665.200	12 Bulan	406.397.730	12 Bulan	461.499.000	12 Bulan	505.126.000	12 Bulan	552.639.730	12 Bulan	552.639.730	12 Bulan	552.639.730	12 Bulan	552.639.730	12 Bulan	552.639.730	Dinas PPKBPP dan PA
02 02	02 02 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65%	593.421.000	70%	602.634.000	75%	603.041.200	80%	678.596.000	85%	660.706.500	90%	660.706.500	95%	660.706.500	95%	660.706.500	95%	660.706.500	Dinas PPKBPP dan PA
02 02	02 02 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	10 Orang	11.000.000	2 Orang	12.100.000	3 Orang	13.310.000	2 Orang	14.641.000	2 Orang	16.105.000	10 Orang	16.105.000	10 Orang	16.105.000	10 Orang	16.105.000	10 Orang	16.105.000	Dinas PPKBPP dan PA
02 02	02 02 4	Program Peningkatan Pengendalian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100%	111.762.500	100%	95.499.000	100%	104.951.000	100%	115.417.700	100%	126.926.000	100%	126.926.000	100%	126.926.000	100%	126.926.000	100%	126.926.000	Dinas PPKBPP dan PA
02 02	02 02 5	Program Peningkatan Pengabdian Masyarakat Program Pelayanan	60%	69.639.500	70%	75.746.000	80%	83.320.600	80%	91.652.500	85%	106.816.000	85%	106.816.000	85%	106.816.000	85%	106.816.000	85%	106.816.000	Dinas PPKBPP dan PA
02 02	02 02 6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	35%	788.299.000	40%	866.129.000	45%	952.596.000	50%	987.114.000	55%	1.150.432.000	55%	1.150.432.000	55%	1.150.432.000	55%	1.150.432.000	55%	1.150.432.000	Dinas PPKBPP dan PA
02 02	02 02 7	Program Peningkatan peran serta dan kesadaran gender dalam pembangunan	45%	485.000.000	50%	241.500.000	55%	264.756.000	60%	290.825.000	65%	316.807.000	65%	316.807.000	65%	316.807.000	65%	316.807.000	65%	316.807.000	Dinas PPKBPP dan PA
02 02	02 02 8	Program Peningkatan Keterampilan Perempuan dan Anak	3 lembaga	683.297.000	5 lembaga	848.000.000	6 lembaga	1.023.000.000	7 lembaga	941.000.000	8 lembaga	975.000.000	8 lembaga	975.000.000	8 lembaga	975.000.000	8 lembaga	975.000.000	8 lembaga	975.000.000	Dinas PPKBPP dan PA
02 02	02 02 9	Program keserasian kebijakan pelayanan kualitas Anak dan Perempuan	100%	875.318.000	100%	962.500.000	100%	983.500.000	100%	859.758.000	100%	897.000.000	100%	897.000.000	100%	897.000.000	100%	897.000.000	100%	897.000.000	Dinas PPKBPP dan PA
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																				
02 03	02 03 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	329.558.200	100%	304.550.200	100%	304.520.200	100%	304.520.200	100%	304.520.200	100%	304.520.200	100%	304.520.200	100%	304.520.200	100%	304.520.200	Dinas Kerjasama Pesisir
02 03	02 03 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	320.216.000	70%	290.000.000	80%	314.800.000	90%	314.000.000	100%	314.000.000	100%	314.000.000	100%	314.000.000	100%	314.000.000	100%	314.000.000	Dinas Kerjasama Pesisir

KODE	Bidang/Unitas Penerimaan dan Program/Perencanaan Pembangunan	Uraian Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal KIPMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPKMD		Peningkat Energi Persekolahan Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				%		%		%		%		%		%		
02.03.3	Peringatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang telah mengikut pendirian dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	20%	20.000.000	40%	20.000.000	50%	20.000.000	60%	20.000.000	70%	20.000.000	70%	100.000.000	Dinas Kerahajaan Pangan	
02.03.4	Program Pelatihan Pengambilan Sison Keluaran Kinerja dan Kinerja SKPD	Persentase dokumen, penelitian dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	107.906.000	100%	77.900.000	100%	77.900.000	100%	77.900.000	100%	77.900.000	100%	413.306.000	Dinas Kerahajaan Pangan	
02.03.5	Program Pengabdian Masyarakat dan Ketersediaan dan Peningkatan Kualitas Tenaga	Persentase mitra yang peningkatan ketersediaan energi dan proses wilayah	5%	1.277.000.000	15%	2.801.000.000	20%	2.901.000.000	25%	3.405.000.000	30%	3.305.000.000	30%	11.489.000.000	Dinas Kerahajaan Pangan	
02.03.6	Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi/Implementasi Bidang Kerahajaan Pangan	Persentase ketersediaan data dan informasi kerahajaan pangan	75%	666.000.000	100%	440.000.000	100%	465.000.000	100%	470.000.000	100%	470.000.000	100%	2.511.000.000	Dinas Kerahajaan Pangan	
02.03.7	Program Peningkatan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	5%	500.000.000	10%	423.000.000	15%	458.000.000	20%	453.000.000	25%	463.000.000	25%	2.313.000.000	Dinas Kerahajaan Pangan	
02.03.8	Program Pengabdian Masyarakat/Konsultasi dan Kelembagaan Pangan	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi dan keamanan pangan	2%	1.223.000.000	4%	795.000.000	6%	995.000.000	8%	1.050.000.000	10%	1.055.000.000	10%	5.118.000.000	Dinas Kerahajaan Pangan	
02.04	PERUSAHAAN WAJIB SOKN PELAYANAN DASAR															
02.04.1	Program Peningkatan pelayanan, pemeliharaan, pemantauan dan pemeliharaan aset	Persentase tanah milik Pemukiman Kel. Lempung Berat bersertifikat	32,00%	16.241.631.500	54,64%	3.680.000.000	65,96%	4.656.000.000	77,28%	5.567.200.000	85,00%	7.764.800.000	85,00%	38.179.631.500	Dinas PU PR	
02.04.2	Program Peningkatan kondisi-kondisi pemukiman	Persentase pemukiman permukiman layak	0,00%	900.000.000	30,00%	120.000.000	40,00%	144.000.000	50,00%	172.800.000	60,00%	250.000.000	60,00%	766.800.000	Dinas PU PR	
02.05	UKUSAN WAJIB RUN PELAYANAN DASAR															
02.05.1	Program Pelayanan Administrasi/Perencanaan	Persentase Pelayanan Administrasi/Perencanaan	100%	3.098.241.700	100%	5.031.742.330	100%	5.566.286.097	100%	6.072.288.244	100%	6.603.517.068	100%	28.342.076.239	Dinas Lingkungan Hidup	
02.05.2	Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur yang memadai	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	30%	1.437.540.000	40%	1.440.635.800	45%	1.712.270.060	50%	2.074.008.375	55%	2.533.208.973	55%	9.196.671.228	Dinas Lingkungan Hidup	

KODE	Bidang Urusan Pencapaian dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Bareah Peringkat Jawab				
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
01 05 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	20%	25.000.000	30%	70.000.000	35%	75.000.000	40%	80.000.000	45%	85.000.000	45%	315.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang dikembalikan dan tepat waktu	100%	259.900.000	100%	95.990.000	100%	102.729.000	100%	113.001.300	100%	124.992.650	100%	695.923.150	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 5	Program Pengabdian Pencapaian dan Pervakasi Lingkungan Hidup	Menurunnya jumlah kekas Penerimaan/ Perusakan Lingkungan Hidup	0%	1.081.418.900	30,00%	3.105.000.000	25,00%	2.282.000.000	20,00%	1.354.400.000	15,00%	1.422.540.900	15,00%	6.245.358.900	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 6	Program Peningkatan Pengenalan Polisi/Limbah	Persentase Keterlaksanaan Peningkatan Pengenalan Polisi /Limbah	0%	546.065.000	20,00%	110.000.000	25,00%	401.000.000	30,00%	435.000.000	40,00%	467.000.000	50,00%	1.559.765.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 7	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Keterlaksanaan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Hidup	25%	5.553.627.500	35,00%	1.896.039.230	40,00%	2.290.500.000	45,00%	2.460.500.000	50,00%	2.667.726.703	50,00%	14.469.543.444	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 8	Program Peningkatan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Mendukungnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,16 %	494.844.000	61,28 %	750.400.000	62,98 %	915.000.000	65,57 %	6.550.000.000	64,12 %	956.500.000	64,12 %	3.767.144.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 9	Program Pengembangan Kinerja Pengalihan Pencampuran	Persentase Keterlaksanaan Perubahan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0%	100.000	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
02 05 10	Program Peningkatan Kinerja Pengalihan Pencampuran	Persentase Keterlaksanaan Perubahan dan Konservasi Sumber Daya Alam	35%	8.235.068.600	50%	3.640.376.500	55%	4.260.950.000	60%	4.563.545.000	70%	4.932.276.500	70%	25.752.235.000	Dinas Lingkungan Hidup
02 05 11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemantauan Kehidupan Lingkungan dan Tata Kota	Persentase Keterlaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemantauan Kehidupan Lingkungan dan Tata Kota	0%	10.131.398.000	20%	3.789.134.400	20%	3.976.456.000	20%	4.179.161.000	20%	4.531.477.000	20%	26.607.614.200	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	Bidang (ruang) Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Targeta Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Peringkat APBD					
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
02.05.12	Pemangan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Umum	Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Sarana Penunjang Umum	20%	4.074.699,286	30%	2.359.070,000	35%	2.545.044,000	40%	2.757.552,000	45%	2.973.400,000	45%	3.187.400,000	1.468.765,286	Dinas Lingkungan Hidup
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR dan Pemertan Sipil															
02.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	0%	404.889,240	100%	711.298,364	100%	723.979,979	100%	812.915,595	100%	893.146,093	100%	893.146,093	3.536.229,141	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
02.06.2	Program Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Peralatan Aparatur yang memadai	0%	284.665,500	100%	346.791,300	100%	453.678,996	100%	554.835,844	100%	603.561,720	100%	603.561,720	2.263.532,860	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
02.06.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Timbul Aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	0%	15.408,000	100%	16.945,000	100%	18.634,000	100%	20.497,400	100%	22.347,140	100%	22.347,140	94.018,540	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
02.06.4	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	0 dokumen	104.872,000	46 dokumen	89.357,360	46 dokumen	102.760,895	46 dokumen	116.175,030	46 dokumen	160.901,284	230 dokumen	160.901,284	575.326,509	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
02.06.5	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Lama waktu pembuatan KTP	0 hari	1.111.161,001	1 hari	1.568.965,800	1 hari	1.813.055,924	1 hari	2.076.975,360	1 hari	2.337.471,665	1 hari	2.337.471,665	8.908.950,750	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		- Persentase Kependudukan Ek	85%		87%		90%		95%		100%		100%			
		- Persentase Kependudukan KTP	87%		90%		95%		98%		100%		100%			
		- Persentase Kependudukan KIA	83,3%		30,55%		52,77%		75%		100%		100%			
02.06.6	Pelaksanaan Akta Pencatatan Sipil	Coma pembuatan akta	1 hari	1.235.227,000	1 hari	1.650.590,987	1 hari	1.888.485,090	1 hari	2.161.207,701	1 hari	2.465.783,689	1 hari	2.465.783,689	9.401.204,467	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
02.06.7	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan dokumen Kependudukan	28 OPD	363.799,000	26 OPD	515.750,000	26 OPD	532.865,500	26 OPD	554.691,875	26 OPD	578.645,037	26 OPD	578.645,037	2.545.749,032	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
02.06.8	Pemertan dan Inovasi pelayanan	Persentase capaian layanan Kependudukan	0%	148.960,000	70%	171.304,000	80%	196.969,600	90%	228.649,540	100%	260.531,971	100%	260.531,971	1.004.345,111	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR															
02.07	Perberdayaan Masyarakat dan Desa															
02.07.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	348.115,000	100%	287.003,000	100%	316.490,000	100%	346.026,000	100%	381.400,000	100%	381.400,000	1.679.035,000	Dinas PMP

KODE	Bidang Urusan, Penerimaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Peringkat Urusan Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
02.07.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	50%	853.015.000	70%	894.850.000	80%	279.880.000	90%	290.510.000	100%	372.250.000	100%	2.593.500.000	Dinas PMP	
02.07.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	10 orang	36.600.000	4 Orang	12.000.000	2 Orang	13.060.000	2 Orang	14.000.000	2 Orang	15.000.000	10 Orang	84.000.000	Dinas PMP	
02.07.4	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Kelola Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen perencanaan dan keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	103.900.000	100%	88.030.000	100%	94.760.000	100%	101.745.000	100%	106.850.000	100%	497.285.000	Dinas PMP	
02.07.5	Peningkatan Keteralayan Masyarakat Pedesaan	Persentase masyarakat yang berperan serta dalam peningkatan peran terdaging	9,94%	2.087.581.600	24,96%	3.966.600.000	29,94%	2.160.556.000	34,93%	3.379.905.000	39,93%	2.617.995.300	39,93%	11.215.532.100	Dinas PMP	
02.07.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pohon	Persentase BUMDes (MURPetan) yang menginisiasi PAD gotong royong	3,82%	2.953.156.000	15,27%	3.148.600.000	22,90%	3.599.972.500	36,53%	3.601.726.000	38,17%	4.215.698.600	38,17%	17.721.353.100	Dinas PMP	
		Persentase pohon yang ditanam/melaksanakan gotong royong	7,61%		19,08%		26,71%		34,35%		41,90%		41,90%		Dinas PMP	
		Persentase PPK yang memiliki PPK aktif	0 Persando		6 Persando	10 Persando	10 Persando	12 Persando	15 Persando	15 Persando	15 Persando	15 Persando	15 Persando	15 Persando	Dinas PMP	
			3,82%		5,87%	11,43%	13,74%		16,03%		16,03%		16,03%		Dinas PMP	
02.07.10	Perbaikan Administrasi dan Kembangkan Pekar	Persentase pohon yang ditanam/aktif dalam APB/Rekonstruksi waktu	60,31%	3.955.279.000	70,13%	2.076.000.000	74,61%	2.076.000.000	80,15%	2.860.800.000	84,73%	4.344.800.000	84,73%	13.029.955.000	Dinas PMP	
		Persentase anggota JHP dan LPMP aktif dalam perencanaan pembangunan	60,31%		70,23%		74,81%		80,15%		84,73%		84,73%		Dinas PMP	
02	URUSAN WAJIB RUMAH TANGGA															
02.08	Pengabdian Masyarakat dan Kelangkaan Berencana															
02.08.6	Program Keluarga Berencana	Persentase PMS (Materi) (Semua alat/KB modern)	45,80%	7.083.054.000	50,10%	5.438.597.900	53,10%	5.817.837.600	56,20%	5.968.796.459	60,10%	6.336.692.404	60,10%	31.266.976.433	Dinas PPKBPP dan PA	
02.08.7	Program Pembangunan Model Operasional BKB - Poyandia-PAUD	% Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB - Poyandia-PAUD)	44,00%	330.000.000	63,20%	363.000.000	75,00%	245.000.000	86,70%	227.000.000	92,60%	230.000.000	92,60%	1.375.000.000	Dinas PPKBPP dan PA	

KODE	Bidang Urus: 1 Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Fertigkas Isi Pembangunan Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
01 08 9	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan KE/KR yang Mandiri dalam MKRP	% Peserta KE Mandiri dengan Metode Konvensional Jangka Panjang (MKJP)	34,00%	794.000.000	35,45%	78.000.000	36,43%	970.500.000	37,49%	991.000.000	38,43%	1.980.000.000	38,43%	5.436.500.000	Dinas PPKRPP dan PA	
02 08 9	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	% Remaja yang di Bina tentang Kesehatan Reproduksi	10%	250.000.000	40%	285.000.000	45%	306.000.000	50%	328.000.000	55%	344.000.000	55%	1.510.500.000	Dinas PPKRPP dan PA	
02 08 10	Program Pengawasan Kesehatan Remaja	Jumlah Puskintarasasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PKR-KR) yang aktif	0 kelompok	106.570.000	3 kelompok	125.000.000	3 kelompok	135.000.000	3 kelompok	145.000.000	3 kelompok	156.000.000	15 kelompok	581.578.000	Dinas PPKRPP dan PA	
02 08 11	Program peningkatan pengetahuan masyarakat PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase Pemukiman Desa yang telah melaksanakan PMS termasuk HIV/AIDS	0%	104.194.000	9%	114.612.000	8%	126.074.000	7%	138.692.000	6%	950.910.000	0%	1.434.482.000	Dinas PPKRPP dan PA	

KODE	Bidang Usaha, Penertitah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2022		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.	
01	URUSAN WAJIB KON												
01 00	PELAYANAN DASAR												
01 00 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	558.102.500	100%	612.465.400	100%	651.830.300	100%	694.867.250	100%	3.040.019.150	Dinas Perhubungan
01 00 2	Program Pengukuran Sertifikasi Prasarana Aparatur yang Memadai	Persentase Sertifikasi Prasarana Aparatur yang Memadai	50%	377.784.400	70%	388.110.000	80%	150.000.000	100%	152.000.000	100%	1.314.284.400	Dinas Perhubungan
01 00 3	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	20%	50.000.000	40%	66.300.000	40%	65.000.000	50%	70.000.000	50%	300.000.000	Dinas Perhubungan
01 00 4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan	100%		100%	45.000.000	0%	50.000.000	100%		0%	95.000.000	Dinas Perhubungan
02 00 5	Program Peningkatan Pelaksanaan Sistem Kelengkapan dan Konektivitas SIKD	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	112.600.000	100%	92.500.000	100%	109.000.000	100%	151.000.000	100%	566.600.000	Dinas Perhubungan
02 00 6	Penyusunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memenuhi standar	35%	402.000.000	40%	250.000.000	45%	450.000.000	50%	2.750.000.000	55%	4.557.000.000	Dinas Perhubungan
02 00 7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Jalan yang memenuhi standar	30%	70.000.000	35%	248.000.000	40%	310.000.000	40%	265.000.000	50%	1.158.000.000	Dinas Perhubungan
02 00 8	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Persentase penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran	10%	4.262.190.000	11%	2.434.750.000	11%	3.778.600.000	12%	2.692.720.000	13%	3.820.502.000	Dinas Perhubungan
02 00 9	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Persentase Media Transportasi yang memenuhi standar	51,29%	6.076.552.200	40%	2.858.521.000	49%	1.560.500.000	50%	2.866.500.000	56%	15.118.575.200	Dinas Perhubungan
02 00 10	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Persentase pelaksanaan kegiatan yang memenuhi standar	10%	444.240.000	12%	431.533.000	12%	436.790.000	15%	390.800.000	15%	2.170.413.000	Dinas Perhubungan

KODE	Bidang Usaha Penerimaan dan Program/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal SUKMO (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kendali Kinerja pada akhir periode RPMD		Peringkat Desah Peninggang Jawab		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
02																		
02	11																	
02	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelengkapan Administrasi Perangkat Lunak	100%	415.060.000	100%	400.250.000	100%	412.060.000	100%	415.460.000	100%	418.060.000	100%	2.081.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02	11	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	243.000.000	70%	165.000.000	80%	203.100.000	90%	227.000.000	100%	165.000.000	100%	1.051.100.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02	11	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	10 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	13 orang	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02	11	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang akurat di tingkat lokal	100%	123.500.000	100%	89.300.000	100%	89.300.000	100%	89.300.000	100%	114.300.000	100%	505.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02	11	5	Program Peningkatan Kualitas Kelengkapan Koperasi	Jumlah Koperasi terdapat dan terfasilitasi	58 Koperasi	475.000.000	60 Koperasi	265.000.000	63 Koperasi	300.000.000	69 Koperasi	330.600.000	76 Koperasi	367.420.000	76 Koperasi	1.739.680.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02	11	6	Program Pengembangan kewirausahaan dan Kemitraan Komunitas Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM Layak Penerimaan Pembiayaan	0 UMKM	500.000.000	186 UMKM	390.500.000	195 UMKM	420.350.000	205 UMKM	472.500.000	214 UMKM	510.750.500	978 UMKM	2.372.310.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02	11	7	Program Peningkatan Daya Bersaing	Jumlah UMKM terdapat dan Jumlah Mitra BLOD	5619 UMKM 394 mitra	260.000.000	40 Mitra	145.000.000	40 Mitra	150.300.000	40 Mitra	175.450.000	40 Mitra	192.950.000	200 Mitra	932.945.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

KODE	Bidang Urusan, Pemertanian dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Prorgkar Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
02.13	Kepemudanan dan Olahraga														
02.13.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.469.701.650	100%	1.465.279.300	100%	1.611.798.510	100%	1.792.177.290	100%	1.671.364.940	100%	Dinas Pora Pariwisata	
02.13.2	Program Penginapan, Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	1.227.912.000	70%	1.283.232.500	80%	1.411.508.000	90%	1.516.785.000	100%	1.739.579.500	100%	Dinas Pora Pariwisata	
02.13.3	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan	50%	22.000.000	70%	24.200.000	80%	26.620.000	90%	29.282.000	100%	32.110.200	100%	Dinas Pora Pariwisata	
02.13.4	Program Peningkatan Pengabdian Sosial Masyarakat Ciptaan Kinerja dan Kegiatan SKPD	Persentase Dokumen perencanaan dan kegiatan yang mendapat dan tepat	97 dokumen	118.390.000	19 dokumen	162.759.000	19 dokumen	117.651.500	19 dokumen	174.900.000	20 dokumen	192.890.000	97 dokumen	Dinas Pora Pariwisata	
02.13.5	Program ya kegiatan perserta kependudukan	jumlah organisasi pemuda yang aktif	20	1.178.809.000	20	1.591.460.000	20	1.426.590.000	20	1.684.245.000	20	1.726.173.900	20	Dinas Pora Pariwisata	
02.13.6	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan muda baru dan tercapai: hidup Pemuda	jumlah wirawastha muda baru	0 Orang	351.558.000	25 orang	387.153.000	25 orang	425.900.000	25 orang	468.490.000	25 orang	515.939.000	125 orang	Dinas Pora Pariwisata	
02.13.7	Program Pembinaan dan Peningkatan Olahraga	jumlah Klub Olahraga yang aktif	56 Klub	2.914.990.000	56-60 Klub	1.616.600.000	50-60 Klub	1.438.302.960	50-60 Klub	1.775.963.552	50-60 Klub	2.071.156.262	50-60 Klub	Dinas Pora Pariwisata	
02.13.8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik	0%	695.823.000	100%	384.000.000	100%	136.660.000	100%	164.160.000	100%	166.992.000	100%	Dinas Pora Pariwisata	
02.14	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
02.14.7	Program Pengembangan Daya/Informasi/Statistik yang Akurat	jumlah Data Informasi yang dikembangkan yang Akurat	50%	75.455.500	75%	570.648.000	75%	570.648.000	75%	570.648.000	75%	570.648.000	75%	Dinas Kondeb	
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
02.15	Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Selandi	% Data Informasi Publik yang akurat, Aman dan Tulus Kepercayaan Masyarakat (KAM)	0%	184.438.000	75%	103.157.000	75%	104.560.000	75%	106.160.000	75%	70.000.000	75%	Dinas Kondeb	

KODE	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
02	ORGANISASI WAJIB NON KEBUDAYAAN												
02 16	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Budaya Daerah yang diistarkan	2 Budaya	974.006.000	4 Budaya	970.006.000	10	970.006.000	12	995.000.000	12	4.840.006.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 16	2. Program Pengkajian Kebijakan Budaya	Jumlah budaya daerah yang dikembangkan	2 Budaya	1.776.469.000	2 Budaya	812.000.000	4 Budaya	847.000.000	4 Budaya	857.000.000	4 Budaya	5.123.489.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 16	3. Program Pengembangan Keragaman Budaya	Jumlah budaya daerah yang mengikuti event nasional/ internasional	4 Budaya	1.783.375.000	4 Budaya	1.867.000.000	4 Budaya	2.082.000.000	4 Budaya	2.102.000.000	4 Budaya	9.601.375.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												
02 17	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	12 Bulan	276.573.100	12 Bulan	296.944.330	12 Bulan	296.944.330	12 Bulan	296.944.330	60 Bulan	1.455.350.420	Dinas Perencanaan dan Keuangan
02 17	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	344.507.000	10%	246.009.000	10%	371.069.000	10%	371.069.000	50%	1.756.123.000	Dinas Perencanaan dan Keuangan
02 17	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat	10 orang	11.000.000	2 orang	12.100.000	2 orang	12.100.000	2 orang	12.100.000	10 orang	55.400.000	Dinas Perencanaan dan Keuangan
02 17	4. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	103.912.000	40%	77.712.000	60%	77.712.000	100%	102.712.000	100%	499.760.000	Dinas Perencanaan dan Keuangan
02 17	5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Ke Perpustakaan	25%	1.386.102.000	5%	1.632.500.000	5%	1.632.500.000	5%	1.632.500.000	25%	7.918.161.000	Dinas Perencanaan dan Keuangan
02 17	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan pemerintahan	Jumlah Sarana Prasarana yang pergunakan yang memadai	8	109.000.000	30 Unit	23.573.000.000	17 Unit	22.950.000.000	16 Unit	22.950.000.000	94 Unit	92.525.000.000	Dinas Perencanaan dan Keuangan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2011)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Pembayar Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
02	URUSAN WAHIB NON PELAYANAN DASAR														
02 18	02 18 1	Pelayanan dan pelaksanaan dokumen/ arsip daerah	0%	54.376.000	40%	749.675.000	60%	803.675.000	80%	862.675.000	100%	924.675.000	100%	3.765.079.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
02 18	02 18 2	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	0 unit	54.376.000	2 unit	100.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	25 unit	1.054.198.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
02 18	02 18 3	Penyediaan dan Pengalokasian Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Kearsipan	0 unit	0	0 unit	0	6 unit	600.000.000	3 unit	100.000.000	5 unit	100.000.000	16 unit	1.000.000.000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
03	URUSAN PELIHARAAN														
03 04	03 04 1	Program Pelayanan Administrasi/Perkantoran	100%	288.574.000	100%	279.440.000	100%	298.116.000	100%	316.649.600	100%	344.586.560	100%	1.527.366.160	Dinas Perikanan
03 04	03 04 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	574.832.000	100%	556.006.100	100%	585.956.710	100%	650.742.981	100%	721.072.115	100%	3.058.614.310	Dinas Perikanan
03 04	03 04 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	12.000.000	2 orang	11.000.000	2 orang	15.000.000	10 orang	59.000.000	Dinas Perikanan
03 04	03 04 4	Program Peningkatan Pengalokasian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100%	109.400.000	100%	87.400.000	100%	99.100.000	100%	93.100.000	100%	95.990.000	100%	476.300.000	Dinas Perikanan
03 04	03 04 5	Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan	20 Dokumen	406.300.000	20 Dokumen	421.280.000	20 Dokumen	450.300.000	20 Dokumen	492.356.000	20 Dokumen	517.642.480	100 Dokumen	2.277.967.280	Dinas Perikanan
03 04	03 04 6	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap	5,00%	5.560.873.000	7%	4.636.096.100	10%	5.154.035.820	14%	5.805.261.402	19%	6.479.987.542	55%	27.656.173.964	Dinas Perikanan
			3,00%		5%		8%		12%		17%		45%		Dinas Perikanan
			5.673,28 Ton	5.617,45 Ton	6.632,37 Ton	7.566,74 Ton	8.637,62 Ton	9.866,1 Ton	9.866,1 Ton	9.866,1 Ton	9.866,1 Ton	9.866,1 Ton	9.866,1 Ton	9.866,1 Ton	Dinas Perikanan
			31.849,180 Ekor	36.637,000 Ekor	42.174,000 Ekor	48.550,000 Ekor	55.775,000 Ekor	64.141,000 Ekor	64.141,000 Ekor	64.141,000 Ekor	64.141,000 Ekor	64.141,000 Ekor	64.141,000 Ekor	64.141,000 Ekor	Dinas Perikanan

KODE	Rincian Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Jumlah Dana Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
03 04 7	Pengabdian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	29,1 Ton	669.000.000	30,2 Ton	413.500.000	30,7 Ton	459.850.000	31,2 Ton	512.335.000	31,7 Ton	570.268.500	32,2 Ton	2.644.953.500	Dinas Perikanan	
03 04 8	Pembudayaan Kehidupan Kelompok Perikanan	Jumlah produk olahan hasil perikanan	10 Produk	1.024.960.000	10 Produk	928.000.000	12 Produk	1.023.171.600	17 Produk	1.114.948.760	21 Produk				Dinas Perikanan	
03 04 9		Unit Usaha yang beroperasi	30 Ua		30 Ua		30 Ua		30 Ua		30 Ua				Dinas Perikanan	
03 04 10		Persentase kelompok perikanan yang aktif	10%		12%		15%		19%		24%				Dinas Perikanan	
03 05 1	URUSAN PELIHAAH Program Pengembangan Pemukiman Perikanan	Persentase kegiatan promosi pemasaran pariwisata dan ketersediaan informasi kepariwisataan (dalam	0%	10.932.762.000	100%	2.804.706.000	100%	3.385.647.200	100%	4.142.993.000	100%	4.288.448.500	100%	25.534.556.700	Dinas Pura Pariwisata	
03 05 2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% destinasi yang terpelihara	0%	6.122.404.000	100%	2.597.201.300	100%	3.157.068.100	100%	2.865.906.600	100%	3.418.000.000	100%	18.160.574.400	Dinas Pura Pariwisata	
03 05 3		Jumlah destinasi wisata baru	0		2		2		2		2				Dinas Pura Pariwisata	
03 05 4	Program Pengembangan Kemukiman	% rumah dikembangkan yang aktif	0%	1.362.074.000	100%	608.000.000	100%	599.260.000	100%	453.156.000	100%	737.855.000	100%	3.752.327.000	Dinas Pura Pariwisata	
03 01 1	URUSAN PELIHAAH Program Peningkatan Administrasi/Kelembagaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perencanaan Tepat Waktu	100%	1.124.860.000	100%	1.094.952.000	100%	1.189.695.000	100%	1.130.174.000	100%	1.146.427.000	100%	5.610.808.000	Dinas TPH	
03 01 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	452.515.000	100%	474.215.000	100%	461.715.000	100%	462.715.000	100%	462.715.000	100%	2.312.675.000	Dinas TPH	
03 01 3	Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan standar	12,70%	30.000.000	8,45%	30.000.000	8,45%	30.000.000	8,45%	30.000.000	8,45%	30.000.000	42,30%	150.400.000	Dinas TPH	
03 01 4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	120.700.000	100%	78.930.000	100%	79.100.000	100%	79.100.000	100%	104.100.000	100%	461.930.000	Dinas TPH	

KODE	Bidang Urusan Penerimaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Keuangan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Prongkas Daerah Penerimaan Jember										
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022							
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
03 01 5	Program Penerimaan Pembangunan Perikanan	Persentase dan perencanaan dan evaluasi	0%	20%	20%	151.100.000	20%	20%	151.100.000	20%	20%	151.100.000	20%	20%	151.100.000	20%	20%	151.100.000	100%	770.610.000	Dinas TPH
03 01 6	Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Tambakan Perikanan	Jumlah Indeks pertumbuhan per tahun	219 Kali	2,3 Kali	2,3 Kali	1.022.552.000	2,34 Kali	2,34 Kali	1.094.882.000	2,39 Kali	2,44 Kali	1.190.364.000	2,44 Kali	2,44 Kali	1.236.797.000	2,44 Kali	2,44 Kali	1.236.797.000	2,44 Kali	5.423.395.000	Dinas TPH
03 01 7	Program Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah produksi padi per hektar	5,14 ton	5,34 ton	5,34 ton	-	5,43 ton	5,43 ton	-	5,52 ton	5,52 ton	-	5,61 ton	5,61 ton	-	5,61 ton	5,61 ton	-	5,61 ton	-	Dinas TPH
03 01 8	Program Peningkatan Perikanan Perikanan dan Sarana Perikanan	Jumlah luas panen buah-buahan	4.132 ha	4.139 ha	4.139 ha	654.314.000	4.142 ha	4.142 ha	685.632.000	4.145 ha	4.145 ha	644.768.000	4.149 ha	4.149 ha	754.451.000	4.149 ha	4.149 ha	754.451.000	4.149 ha	3.215.870.000	Dinas TPH
03 01 9	Program Peningkatan Peningkatan Perikanan dan Sarana Perikanan	Persentase peningkatan produksi dan sarana perikanan	0%	10%	10%	6.474.600.000	10%	10%	6.474.150.000	10%	10%	6.795.457.000	10-6	10-6	7.086.729.000	10-6	10-6	7.086.729.000	10-6	31.760.216.500	Dinas TPH
03 01	Program Peningkatan Peningkatan Perikanan dan Sarana Perikanan	Persentase peningkatan kompetensi penyuluh perikanan	15%	15%	15%	677.000.000	15%	15%	1.065.000.000	15%	15%	662.000.000	15%	15%	683.000.000	15%	15%	683.000.000	15%	4.025.000.000	Dinas TPH
			5%	20%	20%		20%	20%		20%	20%		20%	20%		20%	20%		100%		Dinas TPH

KODE	Bidang Urusan Penelitian dan Program Penguatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (output)	Kondisi Kinerja Awal RPMD (2017)	Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peningkatkan Pemberdayaan Masyarakat		
				Target		Rencana		Target		Rencana		Target		Rencana		Target		Rencana		Target		Rencana					
				%	Unit	Rp	Unit	%	Unit	Rp	Unit	%	Unit	Rp	Unit	%	Unit	Rp	Unit	%	Unit	Rp	Unit				
01.01.06	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Perikanan	Persentase perkembangan sistem informasi perkebunan yang dinamis dan akurat	100%		665.916.000		100%	203.760.800		100%	272.630.000		100%	311.500.000		100%	318.000.000		100%	318.000.000		100%	1.771.812.000		DISBUNNAK		
01.01.09	Peningkatan Produk Hasil Perikanan	Persentase peningkatan angka kelahiran ternak	0%		1.670.200.000		20%	840.000.000		20%	1.220.000.000		20%	1.265.000.000		20%	1.320.000.000		20%	1.320.000.000		100%	6.315.200.000		DISBUNNAK		
		Jumlah ternak bibit	0 ternak				3 jenis			3 jenis			3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		DISBUNNAK		
		Jumlah kelompok budidaya ternak	0 Kelompok				20			20			20		20		20		20		20		100		DISBUNNAK		
01.01.10	Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Nilai Caving Interval	0 Bulan		184.700.000		Kelompok	245.000.000		Kelompok	270.000.000		Kelompok	270.000.000		Kelompok	270.000.000		Kelompok		270.000.000		12-13 Bulan	1.199.700.000		DISBUNNAK	
		Nilai Caving Interval	0 Bulan				7-8 Bulan			7-8 Bulan			7-8 Bulan		7-8 Bulan		7-8 Bulan		7-8 Bulan		7-8 Bulan		7-8 Bulan		DISBUNNAK		
		Nilai S/P (Service per Conception)	0 Kali				2-3 Kali			2-3 Kali			2-3 Kali		2-3 Kali		2-3 Kali		2-3 Kali		2-3 Kali		2-3 Kali		DISBUNNAK		
		Nilai B/S (Body Condition Score)	0				3-3,5 %			3-3,5 %			3-3,5 %		3-3,5 %		3-3,5 %		3-3,5 %		3-3,5 %		3-3,5 %		DISBUNNAK		
		Jumlah ternak pengolah ikan	0 Unit				2 Unit			2 Unit			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		DISBUNNAK		
		Jenis produk peternakan yang dilakukan pengolahan	0 jenis				1 jenis			1 jenis			1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		DISBUNNAK		
01.01.11	Pengembangan dan Pelayanan Usaha Perikanan	Bersediaanya jumlah ternak yang terjual aset kelompok	0%		343.850.000		20%	120.000.000		20%	130.000.000		20%	130.000.000		20%	130.000.000		20%		130.000.000		100%	653.850.000		DISBUNNAK	
		Jumlah kelompok ternak berprestasi	0 Kelompok				9 Kelompok			9 Kelompok			9 Kelompok		9 Kelompok		9 Kelompok		9 Kelompok		9 Kelompok		9 Kelompok		45 Kelompok		DISBUNNAK
01.01.12	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Masyarakat	Persentase ternak sehat	30%		551.349.000		30%	540.000.000		30%	565.000.000		45%	565.000.000		45%	565.000.000		45%		565.000.000		45%	2.786.349.000		DISBUNNAK	
		Persentase ternak sehat yang sudah disembuhkan	0%				80%			80%			80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		DISBUNNAK
		Jumlah juri sebahli di Kabupaten Lampung Barat yang dilatih	0 Orang				136 Orang			136 Orang			136 Orang		136 Orang		136 Orang		136 Orang		136 Orang		136 Orang		660 Orang		DISBUNNAK
		Jumlah kader kesehatan hewan dan veteriner yang dilatih	0 Orang				136 Orang			136 Orang			136 Orang		136 Orang		136 Orang		136 Orang		136 Orang		136 Orang		860 Orang		DISBUNNAK

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
03	UKUSAN PILIHAN																
03 02	Kebudayaan																
03 02 1	Program Pengembangan Kebudayaan Kabupa Maya	Persentase prasarana penunjang KRL terbangun	35%	2.500.000,000	100%	2.000.000,000	100%	2.400.000,000	100%	2.650.000,000	100%	3.450.000,000	100%	12.236.000,000	Dinas PU PR		
03	UKUSAN PILIHAN																
03 02	Kebudayaan																
03 02 1	Program Pengembangan Kebudayaan Kabupa Maya	Jumlah kunjungan ke KRL	5062 orang	1.505.067,000	15100 orang	3.419.211,000	20130 orang	3.325.725,000	25150 orang	2.977.339,000	30200 orang	2.873.625,000	30200 orang	14.100.967,000	Balibang		
		Jumlah koleksi museum di KRL	294 jenis	300 jenis	311 jenis	320 jenis	315 jenis	320 jenis	325 jenis	320 jenis	325 jenis	325 jenis	325 jenis	325 jenis	Balibang		
03	UKUSAN PILIHAN																
03 06	Pendidikan																
03 06 1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Lalu perputaran barang, transaksi bahan pangan pokok dan barang penting	≤ 5%	170.000,000	≤ 5%	2.600.000,000	≤ 5%	2.600.000,000	≤ 5%	3.146.000,000	≤ 5%	3.400.600,000	≤ 5%	12.196.600,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
03 06 2	Program Standarisasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah site GUTP yang teracana, baik	0 unit	5.200.000,000	40 unit	225.000,000	40 unit	1.375.000,000	40 unit	151.250,000	40 unit	166.375,000	200 unit	5.880.125,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
03 06 3	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam negeri	Pertumbuhan jumlah Pedagang	0%	965.000,000	2%	1.673.543,000	2%	1.079.697,300	2%	1.274.467,030	2%	1.552.263,733	10%	5.684.971,083	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
03 06 4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Pasar Rakyat yang memiliki bangunan kios, los dan fasilitas pendukung	5 Pasar	13.155.000,000	9 pasar	2162.000,000	9 pasar	2.968.000,000	9 pasar	2.273.760,000	9 pasar	2.499.336,000	38 Pasar	21.456.096,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
03	UKUSAN PILIHAN																
03 07	Industri																
03 07 1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah Perusahaan IKM Lapangan Barak	25%	1.520.000,000	4%	837.500,000	4%	971.250,000	4%	1.013.375,000	4%	1.114.712,500	20%	5.406.837,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
03 07 2	Program Peningkatan Pengembangan sektor-sektor industri potensial	Jumlah Produk IKM yang memiliki standar	0 Produk	9.650.075,000	70 Produk	2.442.756,310	72 Produk	2.346.465,688	72 Produk	2.330.535,541	71 Produk	2.489.765,872	355 Produk	19.254.088,351	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
04	URUSAN PENUNJANG																
04	Pengembangan																
04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	271.643.500	100%	276.443.500	100%	303.087.800	100%	332.396.635	100%	364.836.294	100%	1.550.287.984	Bappeda		
04 01 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	75%	84.150.000	85%	255.000.000	90%	230.000.000	95%	245.000.000	100%	261.000.000	100%	1.814.150.000	Bappeda		
04 01 3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan peningkatan formal restel dengan standar	50%	20.000.000	60%	20.000.000	65%	22.000.000	70%	24.200.000	75%	26.620.000	75%	112.820.000	Bappeda		
04 01 4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurasi dan tepat waktu	100%	103.900.000	100%	78.900.000	100%	66.790.000	100%	95.469.000	100%	105.014.600	100%	470.073.000	Bappeda		
04 01 5	Persentase Pembangunan Daerah	Persentase Dapil Musabang yang ditindaklanjuti	80%	1.444.270.000	84%	1.685.347.100	85%	2.075.931.200	88%	2.255.524.991	90%	2.445.577.491	90%	11.906.651.395	Bappeda		
04 01 6	Persentase Pembangunan Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	75%	1.114.316.000	85%	978.256.000	90%	1.086.300.000	95%	1.246.100.000	100%	1.385.915.000	100%	5.794.281.000	Bappeda		
04 01 7	Persentase Peningkatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	75%	502.500.000	85%	575.000.000	90%	631.000.000	95%	693.300.000	100%	761.130.000	100%	3.162.930.000	Bappeda		
04 01 8	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Ketersediaan Realisasi Capaian Kinerja Program UPD Terlewat Target Kinerja Pada Kempa dan RENCANA UPD	80%	1.255.868.000	85%	891.487.900	90%	965.640.700	95%	1.059.324.050	100%	1.451.516.697	100%	5.626.376.447	Bappeda		
04 01 9	Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Hasil Pembangunan Daerah Yang Di Tindak	75%	854.355.000	85%	1.372.506.200	90%	1.383.950.000	95%	1.335.825.000	100%	1.447.527.500	100%	6.398.157.500	Bappeda		

KODE	Bidang Urusan Pembangunan dan Program/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp	Peringkat Daerah Penanggung Jawab										
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
04	URUSAN PENUNJANG																				
04 01	Pengembangan																				
04 01 1	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Peningkatan Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Kabupaten Lampung Barat	100%	59.075.000	40%	64.982.500	60%	71.480.750	80%	78.658.825	100%	86.491.700	100%	360.658.793	Sekretariat Daerah						
04 01 2	Program pemaksimalan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	100%	786.660.000	40%	853.326.000	60%	822.658.600	80%	854.924.460	100%	1.491.416.906	100%	4.427.185.966	Sekretariat Daerah						
04 01 3	Program Pengembangan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat	100%	2.119.665.000	100%	3.448.572.200	100%	2.016.044.920	100%	2.197.649.412	100%	2.394.914.403	100%	10.076.914.935	Sekretariat Daerah						
04 02																					
04 02 1	URUSAN PENUNJANG: Keuangan																				
04 02 1	Program Penguatan Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Pelayanan Tepat Waktu	60 Bulan	657.459.800	12 Bulan	657.459.800	12 Bulan	657.459.800	12 Bulan	657.459.800	12 Bulan	657.459.800	60 Bulan	3.287.499.000	BPKD						
04 02 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pemertua Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak pakai	100%	408.085.000	100%	408.085.000	100%	408.085.000	100%	408.085.000	100%	408.085.000	100%	2.040.425.000	BPKD						
04 02 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur kemasyarakatan yang ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan	100%	415.379.050	100%	415.379.050	100%	427.994.212	100%	437.834.039	100%	447.989.060	100%	2.129.537.361	BPKD						
04 02 4	Program Meningkatkan Aktualitas Data dan Aktualitas Data	Persentase akurasi dan aktualitas data bidang pendapatan daerah	100%	1.290.359.500	100%	1.217.784.000	100%	1.192.514.805	100%	1.371.552.286	100%	1.371.496.014	100%	6.403.906.605	BPKD						
04 02 5	Program Penyalangan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase akurasi dan aktualitas data bidang PBB	100%	109.840.000	100%	120.824.000	100%	132.906.400	100%	146.197.048	100%	160.816.744	100%	670.584.184	BPKD						
04 02 6	Program Melakukan Penyalangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase realisasi PAD	103,89%	632.175.000	100%	936.975.000	100%	644.975.800	100%	674.533.415	100%	714.178.757	100%	3.299.557.172	BPKD						

KODE	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
04 02 7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Dokumen perencanaan dan keuangan yang akurat dan tepat waktu	146 Dokumen	100%	1.387.740.000	100%	1.362.740.000	100%	1.362.740.000	29 Desember	1.362.740.000	100%	1.367.740.000	146 Dokumen	8.653.700.000 BPKD		
04 02 8	Program Kelangkaan dan Pengalokasian Keuangan Daerah	Persentase persentase yang tepat waktu, tepat nilai, dan tepat sasaran	100%	100%	5.660.475.820	100%	3.704.547.638	100%	3.827.864.468	100%	4.016.718.858	100%	4.212.584.846	51,6%	21.464.214.402 BPKD		
		Persentase persentase SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	BPKD		
		Persentase persentase pagu nilai tepat waktu dan akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	BPKD		
		Rata-rata hasil pembinaan pengalokasian keuangan daerah	65,62	75				78		80		81		81	BPKD		
		Persentase persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat	100%	100%				100%		100%		100%		100%	BPKD		
		Persentase persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat nilai	100%	100%				100%		100%		100%		100%	BPKD		
04 02 9	Program Kelangkaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBM) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100%	100%	2.406.410.000	100%	2.406.410.000	100%	1.149.114.840	100%	1.149.114.840	100%	1.149.114.840	100%	5.853.754.520 BPKD		
04 03	URUSAN PENSIJANG Kependidikan																
04 03 1	Program Pelayanan Administrasi/Perkantoran	% Pelaksanaan Administrasi/Perkantoran Tepat Waktu	100%	100%	7.570.764.500	100%	328.646.480	100%	361.511.095	100%	397.662.205	100%	437.428.426	100%	9.496.407.675 BKPSDM		
04 03 2	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	30%	40%	716.130.000	50%	274.543.000	60%	225.997.300	70%	288.597.030	90%	302.456.733	80%	1.607.724.663 BKPSDM		
04 03 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	% Dokumen perencanaan dan keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	103.900.000	100%	86.790.000	100%	95.465.000	100%	105.815.900	100%	115.517.450	100%	506.692.390 BKPSDM		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Enam dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 2016		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	
03 03 4	Pertingkatan Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	0%	35%	8.278.384.580	44%	7.951.387.350	63%	8.746.526.055	81%	9.621.178.694	100%	10.583.296.562	100%	45.180.773.191	BKPSDM
		Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya	64%	68%		74%		81%		88%		94%		94%		BKPSDM
04 03 5	Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Layanan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu % Penyelesaian SK Kemakan Pangkat -% Penyelesaian Kemajuan Gaji Berkala % Penyelesaian SK Pendidik -% penyelesaian KARPEG, KARIS, KARUSU, TASPEN	100%	100%	4.135.770.300	100%	4.571.187.586	100%	5.031.664.588	100%	5.597.940.286	100%	6.180.562.684	100%	25.538.179.538	BKPSDM
		Akurasi Database Kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKPSDM
		Jabatan yang diisi sesuai dengan Syarat Jabatan	95%	96%		96%		96%		96%		96%		96%		BKPSDM
		Pegawai yang memenuhi hak sesuai peraturan perundang-undangan	10%	20%		40%		60%		80%		100%		100%		BKPSDM
		Pemangsaan terhadap pelanggaran disiplin	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKPSDM
04 04	URUSAN PENDIDIKAN, Penelitian dan Pengembangan															
04 04 1	Program Penguatan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Waktu	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	0%	100%	344.812.000	100%	495.680.000	100%	494.317.390	100%	571.710.900	100%	557.476.000	100%	2.336.791.000	Balharbag
04 04 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	0%	100%	208.441.000	100%	562.853.000	100%	185.135.000	100%	215.333.000	100%	165.333.000	100%	1.336.273.200	Balharbag
04 04 3	Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	0%	20%	25.000.000	40%	210.000.000	60%	210.000.000	80%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	865.000.000	Balharbag

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				%		%		%		%		%			
04 04	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat/bertepatan waktu	0%	103.100.000	100%	79.300.000	100%	75.300.000	100%	79.300.000	100%	79.300.000	100%	420.300.000	Balittbang
04 04	5 Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kajian hasil penelitian dan pengembangan bidang kerjasama yang dihasilkan	1 Dokumen	362.000.000	8	4.435.000.000	6	2.335.000.000	6	2.585.000.000	6	2.265.000.000	29	12.402.800.000	Balittbang
		Jumlah kajian hasil penelitian dan pengembangan bidang IPTER dan Inovasi yang dihasilkan	2 Dokumen		6	6	6	6	6	6	6	6	27		Balittbang
04 05	URUSAN PENUNJANG														
04 05	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase keterlaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi	100%	337.615.503	100%	316.842.000	100%	341.834.100	160%	373.555.760	100%	406.188.352	100%	1.798.005.715	BPPD
04 05	2 Program Peningkatan Sama dan Pratama Aparatur	Persentase jumlah dan persentase aparaturnya yang memadai	100%	335.934.500	100%	356.487.000	100%	321.007.000	100%	346.434.000	100%	289.656.200	100%	1.603.943.700	BPPD
04 05	3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai aturan	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	BPPD
04 05	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akurat/bertepatan waktu	100%	103.900.000	100%	78.900.000	100%	78.900.000	100%	78.900.000	100%	103.900.000	100%	444.500.000	BPPD
04 05	5 Penelitian, Pelembagaan dan Penguatan Rencana	Persentase jumlah ASN/stayaker yang memiliki kemampuan pengembangan rencana	85%	644.620.700	100%	788.140.400	100%	726.652.100	100%	907.663.800	100%	823.675.500	100%	3.890.260.500	BPPD
04 05	6 Keselamatan	Persentase desa/pekerja yang terakreditasi bencana dan memiliki rencana dan penanggulangan bencana	70%	493.211.100	65%	780.171.200	70%	617.131.300	75%	651.051.400	80%	891.051.500	80%	3.832.656.600	BPPD

KODE	Bidang Urusan Penerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan						Kondisi Kinerja yang akhir periode RPMD		Kemungkinan Daerah Penanggung Jawab						
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022					
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp	TARGET	Rp		
05 01 6	Program kemitraan penguatbantuan wawasan kebangsaan	Pertentase perubahan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Baru	13,27%	770.410.500	900.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000	100,00%	1.110.000.000	100,00%	3.900.410.500	Kabupaten
05 01 7	Program pendidikan politik masyarakat	Pertentase partisipasi pemilih dalam pemilu	74,40%	539.000.000	590.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	100,00%	325.000.000	100,00%	2.454.093.000	Kabupaten	
05 02	UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD																	
05 02 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertentase pelayanan adanya proses perkantoran tepat waktu	100%	8.895.049.000	8.268.289.000	8.734.300.000	8.734.300.000	8.734.300.000	8.734.300.000	8.734.300.000	8.734.300.000	8.734.300.000	100%	8.734.300.000	100%	44.624.065.000	SEKRETARIAT DPRD	
05 02 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	4.253.127.000	2.685.017.800	3.142.360.000	3.142.360.000	3.142.360.000	3.142.360.000	3.142.360.000	3.142.360.000	3.142.360.000	100%	3.142.360.000	100%	16.865.469.700	SEKRETARIAT DPRD	
05 02 3	Program Peningkatan Unggah Aparatur	Pertentase Aparatur yang Berprestasi Peringkatnya sesuai dengan standar	100%	410.750.000	825.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	100%	520.000.000	100%	2.950.750.000	SEKRETARIAT DPRD	
05 02 4	Program Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Pertentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan standar	75%	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
05 02 5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD	Pertentase Dokumen Perencanaan dan Kegiatan yang dibuat dan tepat waktu	100%	123.100.000	110.425.000	117.530.000	117.530.000	117.530.000	117.530.000	117.530.000	117.530.000	117.530.000	100%	117.530.000	100%	657.213.000	SEKRETARIAT DPRD	
05 02 6	Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pertentase rapat yang diseenggarakan dengan baik	100%	15.642.110.000	13.192.783.500	14.105.500.000	14.105.500.000	14.105.500.000	14.105.500.000	14.105.500.000	14.105.500.000	14.105.500.000	100%	14.105.500.000	100%	71.992.052.500	SEKRETARIAT DPRD	
05 02 7	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pertentase efisiensi pelayanan publik dijalan daerah Pertentase pembinaan masyarakat berbagai Kategori DPRD	100%	514.352.000	497.500.000	540.250.000	540.250.000	540.250.000	540.250.000	540.250.000	540.250.000	540.250.000	100%	540.250.000	100%	2.801.479.500	SEKRETARIAT DPRD	
05 02	UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD																	
05 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	9.877.746.000	10.708.248.400	11.223.343.500	11.223.343.500	11.223.343.500	11.223.343.500	11.223.343.500	11.223.343.500	11.223.343.500	100%	11.223.343.500	100%	56.060.874.393	Sekretariat Daerah	

KODE	Bidang Urusan, Perencanaan dan Program, Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode SPKID	Peringkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target
05 03 11	Program Pengembangan Sistem Manajemen Prasarana	Pembinaan Peningkatan Sistem Manajemen Perencanaan di Kabupaten Lampung Barat	100%	40%	11.257.000	40%	12.382.700	60%	13.624.970	80%	14.983.067	100%	16.481.374	100%	48.275.111	Sekretariat Daerah
05 03 12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembinaan dan Peningkatan Aparatur di Kabupaten Lampung Barat	100%	40%	1.192.937.600	40%	1.625.618.660	60%	1.415.424.180	80%	1.794.768.222	100%	1.639.730.284	100%	7.650.879.252	Sekretariat Daerah
05 03 13	Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	415.765.000	40%	483.241.500	60%	531.626.650	80%	549.508.213	100%	569.458.037	100%	2.565.644.403	Sekretariat Daerah
05 03 14	Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako	Peningkatan Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako di Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	1.930.361.000	40%	1.066.986.300	60%	1.176.697.000	80%	1.236.733.000	100%	142.404.000	100%	2.477.301.300	Sekretariat Daerah
05 03 15	Program Pengkajian Investasi dan Potensi Daerah	Pengkajian Investasi dan Potensi Daerah Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	1.630.000.000	40%	1.791.600.000	60%	1.969.167.000	80%	1.236.733.000	100%	2.382.497.000	100%	9.091.393.000	Sekretariat Daerah
05 03 16	Program Penyempurnaan dan Pemetaan Kelangkaan	Pengukuran dan Pemetaan Kelangkaan dan Pemetaan Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	230.000.000	40%	230.000.000	60%	230.000.000	80%	230.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	Sekretariat Daerah
05 03 17	Program Peningkatan Potensi Ekonomi	Peningkatan Potensi Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	67.630.000	40%	74.393.000	60%	81.834.300	80%	90.016.000	100%	93.016.000	100%	432.889.300	Sekretariat Daerah
05 03 18	Program Peningkatan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Jasa Masyarakat	Peningkatan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Jasa Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat	100%	20%	361.275.000	40%	373.825.000	60%	388.615.000	80%	463.825.000	100%	416.825.000	100%	1.946.575.000	Sekretariat Daerah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Fungsionalisasi Perangkat Daerah		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				%		%		%		%		%				%	
05 03 19	Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah/Instansi Pemerintah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah di Kabupaten/Lampung Barat	100%	20%	250.139.000	40%	480.000.000	50%	521.000.000	80%	564.100.000	100%	605.510.000	100%	2.434.749.000	Sekretariat Daerah	
05 03 20	Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah/Instansi Pemerintah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah di Kabupaten/Lampung Barat	100%	20%	617.661.500	40%	719.814.000	60%	534.636.390	80%	583.645.021	100%	794.344.524	100%	3.447.022.935	Sekretariat Daerah	
05 03 21	Program Peningkatan Kesetiajawanan Sosial	Persentase Peningkatan Kesetiajawanan Sosial di Kabupaten/Lampung Barat	0%	20%	157.784.200	40%	176.430.000	60%	194.071.000	80%	210.863.010	100%	231.949.319	100%	971.099.820	Sekretariat Daerah	
05 03 22	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase Peningkatan Wilayah Perbatasan Kabupaten/Lampung Barat	100%	20%	508.238.000	40%	460.061.800	50%	506.067.980	80%	556.674.778	100%	612.242.256	100%	2.703.384.814	Sekretariat Daerah	
05 04	UNSIK PENDUKUNG																
05 04 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tepat Waktu	100%	100%	564.092.000	100%	600.811.000	100%	560.516.000	100%	716.446.300	100%	798.498.500	100%	3.350.075.500	Inspektoral	
05 04 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	55%	65%	714.010.000	70%	761.656.000	75%	845.835.000	80%	884.650.000	85%	928.802.500	85%	4.134.947.500	Inspektoral	
05 04 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Pencatatan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	106.729.000	100%	89.800.000	100%	98.688.000	100%	108.210.000	100%	119.655.000	100%	523.574.000	Inspektoral	
05 04 4	Penyediaan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Belanjaan Kabupaten/KDH	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	0%	65%	2.409.044.250	70%	2.672.644.000	75%	2.777.139.800	80%	2.960.614.000	85%	3.151.728.000	85%	14.037.466.050	Inspektoral	
05 04 5	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase AP/PT yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan	85%	81%	372.761.800	83%	339.655.000	100%	454.856.000	100%	500.146.000	100%	550.372.000	100%	2.218.184.800	Inspektoral	

KODE	Bidang/Unit Pemerintahan dan Program/Unit Pengembangan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMD	Peningkat Daerah Pengembang Jawab				
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
05 04	6	Penataan dan Pengembangan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	214.406.500	205.505.000	226.055.000	248.659.000	274.523.000	1.168.150.500	Inspektoral					
05 05	1	INSUR PENSIUNGAN KECAMATAN	100%	422.260.000	485.714.000	558.571.100	642.856.765	748.710.280	2.847.712.145	Kecamatan Sumber Jaya					
05 05	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50%	179.920.000	206.908.000	237.944.200	273.635.830	314.681.205	1.213.081.210	Kecamatan Sumber Jaya					
05 05	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50%	4.000.000	4.600.000	5.250.000	6.083.586	6.956.025	28.963.535	Kecamatan Sumber Jaya					
05 05	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100%	86800.000	99.820.000	114.793.600	132.011.950	151.813.743	585.286.693	Kecamatan Sumber Jaya					
05 05	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	420.246.200	483.398.130	555.907.850	639.294.027	735.188.131	2.834.134.337	Kecamatan Way Tening					
05 05	6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50%	153.090.000	176.042.000	202.448.300	232.815.545	267.737.877	1.031.133.722	Kecamatan Way Tening					
05 05	7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50%	6.000.000	6.900.000	7.935.000	9.125.250	10.494.039	40.454.288	Kecamatan Way Tening					
05 05	8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	100%	86.390.000	99.820.000	114.793.600	132.011.950	151.813.743	585.286.693	Kecamatan Way Tening					
05 05	9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	422.676.000	485.077.400	558.999.010	642.837.362	739.262.966	2.849.842.737	Kecamatan Sekeloa					

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
05 05 10	Program Peningkatan dan Pemasaran Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai yang memadai	50%	153.200.500	70%	176.160.650	80%	202.067.794	90%	232.958.363	100%	267.948.807	100%	3.032.936.853	Kecamatan Sekeloa			
05 05 11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan dengan formal sesuai dengan aturan	50%	4.000.000	60%	4.600.000	65%	5.390.000	70%	6.083.300	75%	6.946.025	75%	76.964.525	Kecamatan Sekeloa			
05 05 12	Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	86.800.000	100%	99.870.000	100%	114.793.000	100%	132.011.956	100%	1.148.13.743	100%	585.236.693	Kecamatan Sekeloa			
05 05 13	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang memadai	100%	197.695.000	100%	227.350.400	100%	261.452.950	100%	300.676.906	100%	345.771.540	100%	1.332.941.804	Kecamatan Belitau			
05 05 14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	174.230.000	70%	200.364.500	80%	230.419.175	90%	264.982.051	100%	304.739.359	100%	3.176.725.085	Kecamatan Belitau			
05 05 15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan formal sesuai dengan aturan	50%	9.000.000	60%	10.350.000	65%	11.902.500	70%	13.687.875	75%	15.741.856	75%	50.681.431	Kecamatan Belitau			
05 05 16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	86.800.000	100%	99.870.000	100%	114.793.000	100%	132.011.956	100%	151.813.743	100%	585.236.693	Kecamatan Belitau			
05 05 17	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang memadai	100%	198.259.000	100%	227.997.850	100%	262.197.528	100%	301.627.137	100%	346.756.230	100%	1.336.737.764	Kecamatan Batu Brak			
05 05 18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	173.350.000	70%	199.352.500	80%	229.255.375	90%	263.643.681	100%	302.190.233	100%	1.168.791.790	Kecamatan Batu Brak			
05 05 19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan formal sesuai dengan aturan	50%	5.000.000	60%	5.750.000	65%	6.612.500	70%	7.604.375	75%	8.745.031	75%	33.711.906	Kecamatan Batu Brak			
05 05 20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	68.000.000	100%	101.200.000	100%	116.860.000	100%	132.037.000	100%	153.912.550	100%	593.324.550	Kecamatan Batu Brak			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Keuangan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Peningkatan Kinerja				
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
03 05 21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	626.578.000	100%	720.565.390	100%	828.050.199	100%	932.947.728	100%	1.095.889.888	100%	4.234.631.884	Kecamatan Baik
03 05 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	186.268.000	70%	193.499.000	80%	222.521.830	90%	235.902.428	100%	294.287.792	100%	1.134.473.069	Kecamatan Baik
03 05 23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	50%	5.000.000	60%	5.750.000	65%	6.614.500	70%	7.604.375	75%	8.745.031	75%	33.711.506	Kecamatan Baik
03 05 24	Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	86.800.000	100%	99.876.000	100%	114.793.000	100%	132.011.950	100%	151.813.743	100%	585.238.693	Kecamatan Baik
03 05 25	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	213.653.000	100%	245.939.800	100%	282.819.270	100%	325.242.161	100%	374.028.485	100%	1.441.671.715	Kecamatan Baik
03 05 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	132.340.000	70%	175.191.000	80%	201.465.650	90%	231.690.048	100%	266.443.632	100%	1.027.134.360	Kecamatan Baik
03 05 27	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	50%	4.000.000	60%	4.600.000	65%	5.291.000	70%	6.083.500	75%	6.996.025	75%	26.965.625	Kecamatan Baik
03 05 28	Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100%	87.400.000	100%	100.510.000	100%	115.866.500	100%	132.924.475	100%	152.863.146	100%	589.284.121	Kecamatan Baik
03 05 29	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	217.726.000	100%	256.384.300	100%	287.942.635	100%	331.134.830	100%	380.804.135	100%	1.467.991.700	Kecamatan Baik
03 05 30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	194.931.000	70%	224.171.500	80%	257.797.570	90%	296.467.206	100%	346.937.266	100%	1.314.305.862	Kecamatan Baik
03 05 31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	50%	4.000.000	60%	4.600.000	65%	5.291.000	70%	6.083.500	75%	6.996.025	75%	26.965.625	Kecamatan Baik

KODE	Ruang Lingkup dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal SPMO (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Peringkat Daerah Perangkoang Jember				
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
05 05 32	Program Peningkatan Pemeliharaan Sistem dan Keunggulan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang ditandatangani tepat waktu	100%	96.800.000	100%	99.820.000	100%	114.792.000	100%	132.011.950	100%	151.813.743	100%	585.238.693	Kecamatan Suoh
05 05 33	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	200.976.000	100%	231.122.400	100%	265.791.760	100%	305.659.374	100%	351.508.280	100%	1.355.056.814	Kecamatan Gedung Surtan
05 05 34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	138.320.000	70%	159.066.000	80%	182.228.200	90%	210.367.430	100%	241.922.415	100%	432.406.175	Kecamatan Gedung Surtan
05 05 35	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan acuan	50%	6.000.000	60%	6.900.000	65%	7.935.000	70%	9.125.250	75%	11.494.638	75%	46.454.288	Kecamatan Gedung Surtan
05 05 36	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang ditandatangani tepat waktu	100%	86.800.000	100%	98.820.000	100%	114.792.000	100%	132.011.950	100%	151.813.743	100%	585.238.693	Kecamatan Gedung Surtan
05 05 37	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	196.484.800	100%	225.956.600	100%	259.856.000	100%	298.827.804	100%	343.651.744	100%	1.324.776.638	Kecamatan Kebun Tebu
05 05 38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	132.912.000	70%	152.848.800	80%	175.776.120	90%	202.142.536	100%	232.463.919	100%	896.143.377	Kecamatan Kebun Tebu
05 05 39	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan acuan	50%	5.000.000	60%	5.750.000	65%	6.612.500	70%	7.604.375	75%	8.745.031	75%	33.711.906	Kecamatan Kebun Tebu
05 05 40	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang ditandatangani tepat waktu	100%	86.800.000	100%	99.820.000	100%	114.792.000	100%	132.011.950	100%	151.813.743	100%	585.238.693	Kecamatan Kebun Tebu
05 05 41	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	193.782.800	100%	222.856.270	100%	256.287.811	100%	294.730.062	100%	338.939.571	100%	1.306.804.714	Kecamatan Air Hitam
05 05 42	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	132.912.000	70%	152.848.800	80%	175.776.120	90%	202.142.536	100%	232.463.919	100%	896.143.377	Kecamatan Air Hitam

KODE	Bidang Urusan Pemertanian dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode (MD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
05 05 43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan format dengan arahan	50%	55%	4.000.000	60%	4.000.000	65%	5.299.000	70%	6.083.500	75%	6.996.075	75%	26.966.535	Kecamatan Alf Ritau
05 05 44	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	86.800.000	100%	99.840.000	100%	114.793.000	100%	132.011.950	100%	151.813.743	100%	585.236.693	Kecamatan Alf Ritau
05 05 45	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	100%	194.030.800	100%	223.134.500	100%	256.684.675	100%	295.095.376	100%	339.350.683	100%	1.208.224.234	Kecamatan Pagar Dewa
05 05 46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	60%	132.912.000	70%	152.846.800	80%	175.776.120	90%	202.142.538	100%	232.463.919	100%	896.143.377	Kecamatan Pagar Dewa
05 05 47	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan arahan	50%	55%	4.000.000	60%	4.660.000	65%	5.280.000	70%	6.083.500	75%	6.996.075	75%	26.966.535	Kecamatan Pagar Dewa
05 05 48	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	86.800.000	100%	99.840.000	100%	114.793.000	100%	132.011.950	100%	151.813.743	100%	585.236.693	Kecamatan Pagar Dewa
05 05 49	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	100%	192.790.800	100%	222.859.420	100%	256.288.333	100%	294.731.583	100%	338.941.320	100%	1.206.611.456	Kecamatan Batu Keruh
05 05 50	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	60%	132.912.000	70%	152.846.800	80%	175.776.120	90%	202.142.538	100%	232.463.919	100%	896.143.377	Kecamatan Batu Keruh
05 05 51	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan arahan	50%	55%	5.000.000	60%	5.750.000	65%	6.612.500	70%	7.604.375	75%	8.745.031	75%	33.711.906	Kecamatan Batu Keruh
05 05 52	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	86.800.000	100%	99.840.000	100%	114.793.000	100%	132.011.950	100%	151.813.743	100%	585.236.693	Kecamatan Batu Keruh
05 05 53	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	100%	194.021.000	100%	223.124.150	100%	256.592.773	100%	295.081.668	100%	339.343.942	100%	1.206.163.553	Kecamatan Jambak Sumbang

KODE	Bidang Urusan Penerimaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kendali Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Pencapaian Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
05 05 54	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	132.912.000	70%	152.848.000	90%	175.776.120	202142.538	100%	232.463.919	100%	26.966.525	896.143.377	Kecamatan Lambok Seminting			
05 05 55	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan formal sesuai dengan standar	50%	4.000.000	60%	4.600.000	65%	5.290.000	6.083.500	75%	6.996.025	75%	26.966.525	Kecamatan Lambok Seminting				
05 05 56	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akurat, tepat waktu	100%	86.800.000	100%	99.828.000	100%	114.763.000	132.013.450	100%	151.813.743	100%	585.238.693	Kecamatan Lambok Seminting				
05 05 57	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	193.793.100	100%	222.862.065	100%	256.291.370	294.735.081	100%	336.945.343	100%	1.301.626.964	Kecamatan Baidar Negeri Sioh				
05 05 58	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	50%	132.912.000	70%	152.848.000	80%	175.776.120	202.147.538	90%	232.463.919	100%	26.966.525	Kecamatan Baidar Negeri Sioh				
05 05 59	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan formal sesuai dengan standar	50%	4.000.000	60%	4.600.000	65%	5.290.000	6.083.500	70%	6.996.025	75%	26.966.525	Kecamatan Baidar Negeri Sioh				
05 05 60	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akurat, tepat waktu	100%	86.800.000	100%	99.828.000	100%	114.763.000	132.011.950	100%	151.813.743	100%	585.238.693	Kecamatan Baidar Negeri Sioh				
TOTAL				1.400.841.829.762		842.351.866.708	925.831.722.196	1.013.588.353.055	1.154.792.807.627	5.337.408.099.350								



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maksudnya adalah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Hasil penetapan indikator kinerja pemerintah dituangkan dalam Tabel 8.1.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Lampung Barat

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			Kondisi Awal	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)	72,22%	75,22%	78,22%	81,22%	84,22%	87,22%
2	meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (Persen)	30,88%	32,35%	33,32%	35,29%	36,76%	38,24%
		Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet (Persen)	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%
3	tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase desa yang dilistri (Persen)	32,35%	36,03%	39,71%	43,38%	47,06%	50,74%
4	meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	42,00%	45,00%	49,00%	53,00%	56,00%	60,00%
		Persentase Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	1,05%	15,20%	35,03%	36,66%	47,40%	58,19%
5	meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	90,91%	92,30%	93,27%	94,25%	95,22%	96,20%
6	meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,46	60,95	61,28	62,98	63,57	64,12
7	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase Pemantauan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase tesa tanggapan bencana (Persen)	1,47%	4,11%	8,82%	13,23%	17,64%	22,05%
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	respon time tanggap bencana (Jam)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam
		Usia harapan hidup (tahun)	66,94	66,94	67,24	67,54	67,84	68,14



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Tahun			
			2018	2019	2020	2021	2022	
9	meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	angka kematian ibu (Per 10.000 Kelahiran Hidup)	149	139	130	121	110	
		angka kematian bayi (Per 1000 KH)	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	
		Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Partisipasi Kasir						
		- SD (Persen)	111,84	111,87	111,89	111,91	111,93	
		- SMP (Persen)	99,93	99,93	99,73	99,93	99,95	
		Angka Partisipasi Murni (APIM)						
		- SMP (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		- SMP (Persen)	91,82	91,87	91,89	91,94	91,89	
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,28	7,35	7,37	7,42	7,44	
10	Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah (Fahun)	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35	
		Angka melanjutkan sekolah (Persen)	90,35	90,60	90,75	90,83	90,85	
		Milai rata Ujian Nasional (UN) (Rata-rata)	209,96	210,01	210,11	210,21	210,31	
		- SMP (Poin)	235,81	236,01	236,11	236,21	236,31	
		persentase pengunjung yang mengikuti kegiatan (persentase)	1,74%	2,24%	2,49%	2,74%	2,99%	
		pendapatan perkapita (Rupiah *)	19.080.000	22.931.750	25.140.078	27.561.067	30.215.198	
		persentase Cabang Dinas (Persen)	50%	60%	65%	70%	75%	
		Jumlah Pemuda yang beprestasi (Orang)	20	30	35	40	45	
		11	meningkatkan pendapatan masyarakat					
12	meningkatkan prestasi olahraga							
13	meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan							



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal				Target Tahun		
			2018	2019	2020	2021	2022		
14	Meningkatkan pertumbuhan penduduk	Jumlah pertumbuhan penduduk (Persen) *)	1,16	1,14	1,12	1,07	1,00		
		Angka Kelahiran Total (TFR) (Persen)	2,51%	2,44%	2,38%	2,27%	2,26%		
15	Meningkatnya kuantitas pertanian	Skor pada pangan harapan (Poin)	88,4	89,1	90	91,1	92,4		
16	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Juta Rupiah) *)	2.985.690	3.197.847	3.410.004	3.622.160	3.834.317		
17	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian (Juta Rupiah) *)	137.058	150.202	164.606	180.382	197.881		
18	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Sektor Pariwisata	Rata rata lama tinggal (Hari)	1	2	2	2,5	3		
19	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri dan perdagangan	Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri dan perdagangan (Juta Rupiah) *)	16.449 245.242	17.114 250.171	17.456 252.673	17.806 255.200	18.161 257.752		
20	Meningkatnya nilai investasi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan (Juta Rupiah) *)	643.154	656.081	662.642	689.269	675.961		
21	Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Nilai Investasi (Rupiah) Jumlah koperasi yang Sehat (Unit)	3.167.204.246 0	3.491.842.681 6	3.666.434.815 9	3.949.756.556 12	4.042.244.384 15		



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal					Target Tahun
			2018	2019	2020	2021	2022	
22	meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen) Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	-13,65%	4,00%	6,00%	8,00%	10,00%	
23	meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	B	B	BB	BB	BB	
24	meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
25	meningkatkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) (Predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
26	menurunnya desa tertinggal	Persentase desa tertinggal (Persen)	29,00%	19,84%	0,00%	0,00%	0,00%	
27	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang terhib	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Persentase kasus Keterliban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
28	menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani (Persen)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal				Target Tahun		
			2018	2019	2020	2021	2022		
29	meningkatkan kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender (Poin)	91,54	91,64	91,70	91,74	91,80		
		Indeks perbandingan gender (Poin)	50,2	51,2	52,2	53,2	54,2		
30	menurunkan kemiskinan dan ketimpangan daerah	Angka Kemiskinan (Persen)	14,00%	13,75%	13,00%	12,50%	12,00%		
31	Menurunnya pengangguran	Indeks guy (Poin)	0,36	0,32	0,3	0,28	0,26		
		tingkat pengangguran terbuka (Persen)	0,98%	0,85%	0,80%	0,75%	0,71%		

Keterangan *) adalah data tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	
		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2017				
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1.1	Angka Kemiskinan (Persen)	14,32%	13,75%	13,00%	12,50%	12,00%
1.2	Indeks gini (Poin)	0,36	0,32	0,3	0,28	0,28
1.3	pendapatan perkapita (Rupiah) *)	19.080.000	22.931.750	25.140.078	27.561.067	30.215.198
Kesejahteraan Masyarakat						
1	Pendidikan					
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- SD (Persen)	111,83	111,87	111,89	111,91	111,93
	- SMP (Persen)	99,31	99,53	99,73	99,93	99,95
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- SD (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- SMP (Persen)	91,80	91,87	91,89	91,94	91,99
2	Kesehatan					
2.1	Usia harapan hidup (Tahun)	66,64	67,24	67,54	67,84	68,14



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2018	2019	2020	2021		2022
2.2	angka kematian ibu (Per 10.000 Kelahiran Hidup)	105/100000 kelahiran hidup	149	139	130	121	110	110
2.3	angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	1,6/1000 KH	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,9
3	Seni Budaya dan Olahraga							
3.1	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi (Persen)	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,75
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,28	7,30	7,35	7,37	7,42	7,44	7,44
1.2	Angka harapan lama sekolah (Tahun)	12,17	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35	12,35
1.3	Angka melanjutkan sekolah (Persen)	90,10	90,35	90,60	90,75	90,83	90,85	90,85
1.4	Nilai rata Ujian Nasional (UN)							
	- SD (Poin)	208,91	209,96	210,01	210,11	210,21	210,31	210,31
	- SMP (Poin)	235,81	235,91	236,01	236,11	236,21	236,31	236,31
2	Kesehatan							
2.1	Persentase kasus gizi buruk yang ditinggalkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)	55,50%	82,00%	68,00%	74,00%	80,00%
3.2	Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen)	72,22%	78,22%	81,22%	84,22%	87,22%
3.3	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	42,00%	49,00%	53,00%	56,00%	60,00%
3.4	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	9,06%	25,93%	36,66%	47,40%	58,13%
4.2	Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	90,91%	93,27%	94,25%	95,22%	96,20%
5	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat					
5.1	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	
5.2	Persentase kasus Keterlambatan, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Tidak Terkait Pelayanan Dasar tenaga kerja;						
1.1	tingkat pengangguran terbuka (Persen)	0,96%	0,90%	0,80%	0,75%	0,71%	0,71%
2	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;						
2.1	Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Indeks pembangunan gender (Poin)	91,54	91,60	91,70	91,74	91,80	91,80
2.3	Indeks pemberdayaan gender (Poin)	49,16	50,2	52,2	53,2	54,2	54,2
3	pangan;						
3.1	Skor pola pangan harapan (Poin)	67,5	88,4	90	91,1	92,4	92,4
4	lingkungan hidup;						
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,16	60,35	62,98	63,57	64,12	64,12



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2018	2019	2020	2021		2022
5	pemberdayaan masyarakat dan Desa:							
5.1	Persentase desa terlayak (Persen)	28,00%	9,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	pengendalian penduduk dan keuarga berencana:							
6.1	laju pertumbuhan penduduk (Persen) *	1.17	1.14	1.12	1.02	0.96	0.96	0.96
6.2	Angka Kelahiran Total (TFR) (Persen)	2.55%	2.44%	2.38%	2.27%	2.26%	2.26%	2.26%
7	perhubungan:							
7.1	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (Persen)	30,88%	33,82%	35,29%	36,76%	38,24%	38,24%	38,24%
8	komunikasi dan Informatika:							
8.1	Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan internet (Persen)	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%
9	Koperasi, usaha kecil, dan menengah:							
9.1	Jumlah koperasi yang Sehat (Unit)	0	6	9	12	15	15	15
9.2	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	-13,65%	4,00%	6,00%	6,00%	10,00%	10,00%	30,00%



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2018	2019	2020	2021		2022
10	penanaman modal;							
10.1	Nilai investasi (Rupiah)	3.167.204.246	3.325.564.458	3.491.842.661	3.666.434.815	3.849.756.556	4.042.244.384	18.375.942.894
11	kepemudaan dan olah raga;							
11.1	Jumlah Pemuda yang beprestasi (Orang)	20	25	30	35	40	45	175
13	perpustakaan							
13.1	Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	1,74%	1,99%	2,24%	2,49%	2,74%	2,99%	2,99%
1	Peleyanan Urusan Pilihan							
1.1	Kelautan Perikanan							
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan (Juta Rupiah) *)	125.064	137.058	150.202	164.606	180.392	197.691	197.691
2	Parwisata							
2.1	Rata-rata lama tinggal (Hari)	1	1,5	2	2	2,5	3	3
2.2	Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	16.449	16.778	17.114	17.456	17.805	18.161	87.313



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

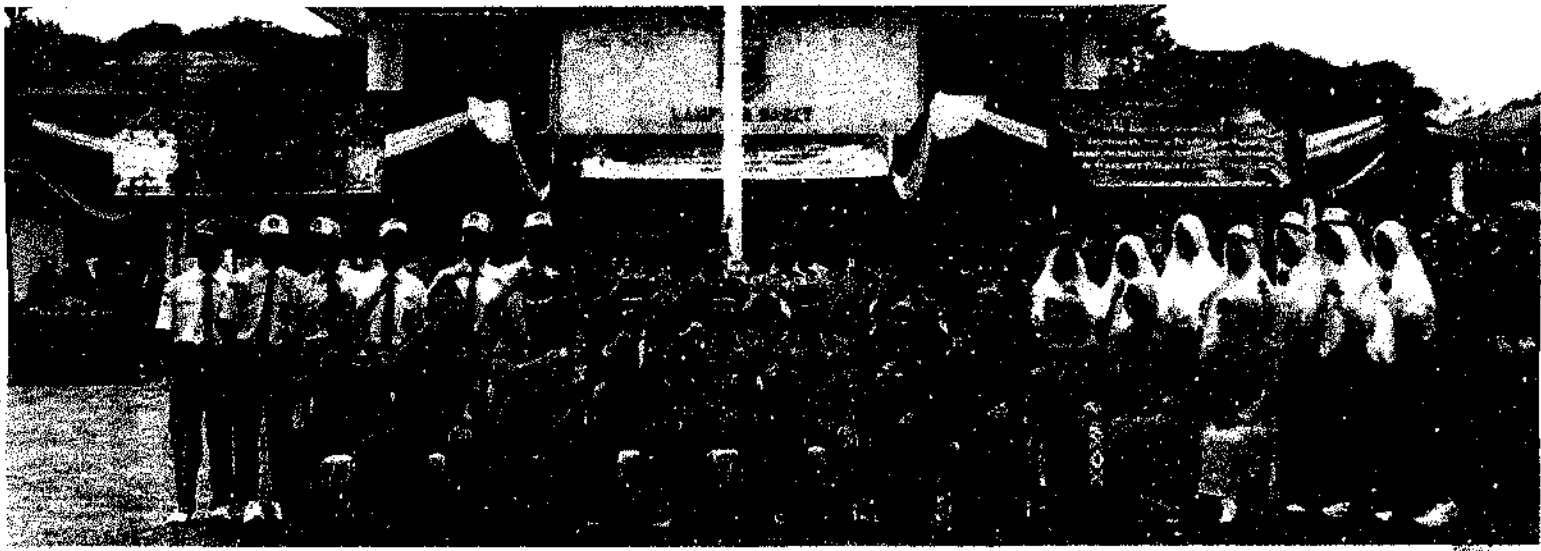
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	
3	Pertanian					
3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Juta Rupiah *)	2.767.567	3.197.847	3.410.004	3.622.160	3.834.317
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1	Persentase desa yang diadiri listrik (Persen)	82,35%	89,71%	93,38%	97,06%	100,00%
5	Perdagangan					
5.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan (Juta Rupiah) *)	643.154	656.081	662.642	689.269	675.961
6	Industri					
6.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri (Juta Rupiah) *)	245.242	250.171	252.673	255.200	257.752
7	Pelayanan Unsur Pendukung					
7.1	Persentase desa tangguh bencana (Persen)	1,47%	8,82%	13,23%	17,64%	22%
7.2	responstime tanggap bencana (Jam)	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	-	C	C	C	C	C
1.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	B	B	BB	BB	BB	BB
1.3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)	-	C	C	C	C	C
1.5	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Keterangan *) adalah data tahun 2016



BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati, disusun selain dengan pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders yaitu melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan politis, yaitu

proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada INOVASI pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang HEBAT dan SEJAHTERA.

